KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DJPb
Indonesian Treasury

InTress

Kajian Fiskal Regional

Provinsi Kepulauan Riau

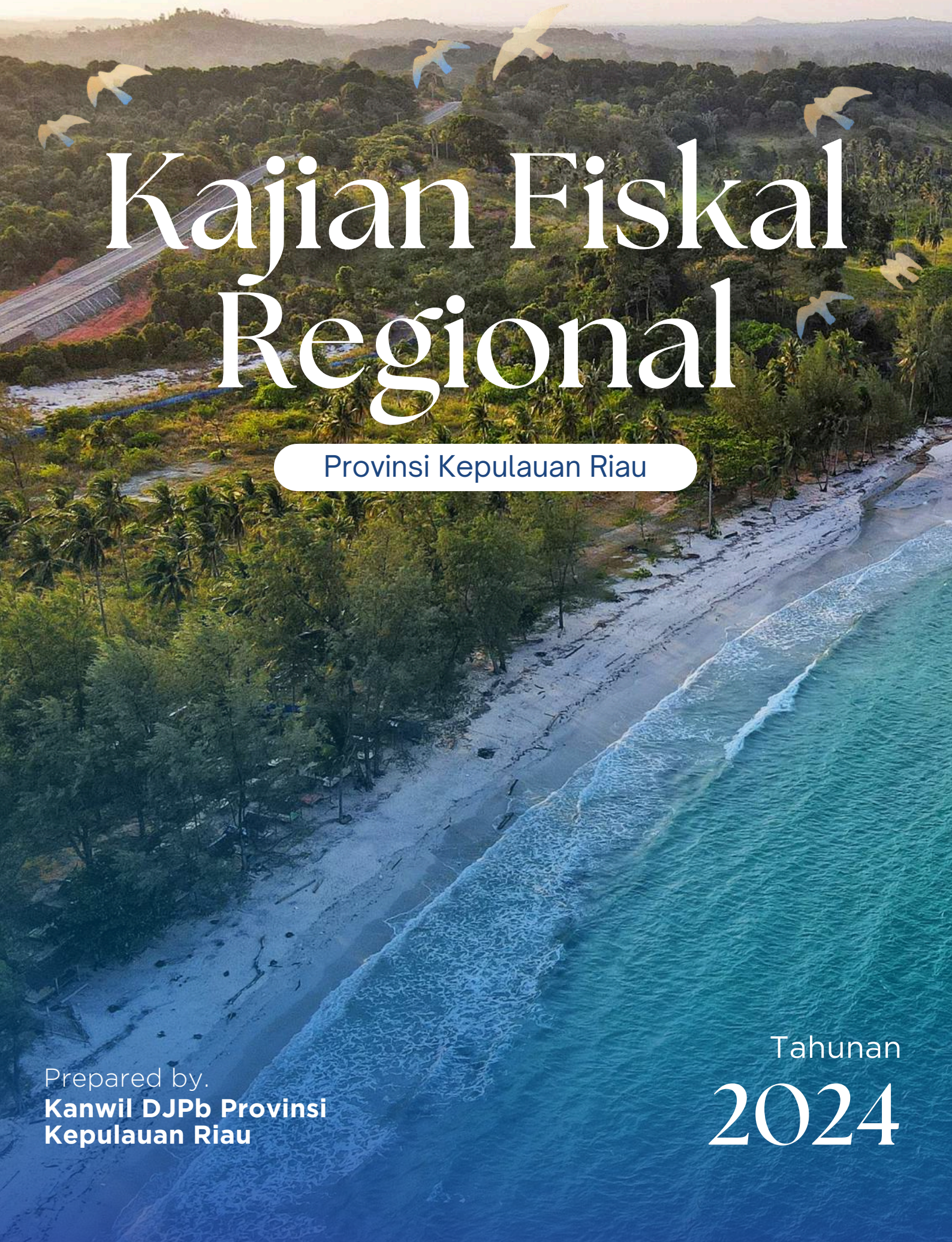

Tahunan

2024

Prepared by.
Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau

Provinsi Kepulauan Riau

Kajian Fiskal Regional

Tahunan 2024

Foreword

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum warohmatullohi wabarokatuh,
Para pembaca dan stakeholders
yang kami hormati,

Segenap puji dan syukur kami panjatkan kepada Alloh Subhanahu Wata'ala, yang atas izin dan karunia-Nya sehingga Kajian Fiskal Regional (KFR) Tahunan 2024 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

KFR sebagai salah satu output *Regional Chief Economist* disusun untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*) eksternal maupun internal yang menyajikan potret perkembangan perekonomian daerah, kondisi fiskal pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pengembangan ekonomi daerah, serta rekomendasi yang dapat memberikan nilai tambah bagi para perumus kebijakan serta seluruh stakeholders lainnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Penyusunan KFR dilakukan melalui sinergi antar *stakeholders* yang bersama-sama berkontribusi dalam mengoptimalkan kualitas perekonomian di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). KFR Tahunan 2024 mencakup informasi Perkembangan Perekonomian Regional, Kinerja Fiskal Regional (APBN, APBD dan Konsolidasian), serta analisis tematik atas "Reviu atas Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Nasional di Daerah".

Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyusunan KFR ini, terutama kepada Gubernur Provinsi Kepri, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepri, BPS Provinsi Kepri, Kanwil DJP Kepri, Kanwil DJBC Khusus Kepri, KPU BC Batam, KPKNL Batam, Dr. Myrna Sofia selaku *Local Expert* dan akademisi dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, dan seluruh jajaran pemerintah daerah lingkup Provinsi Kepri.

Kami berharap, sinergi yang telah terbangun dengan baik ini dapat semakin kita tingkatkan. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan KFR ini masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan saran dan masukan yang konstruktif untuk peningkatan kualitas kajian kedepannya.

Besar harapan kami bahwa KFR yang disusun ini dapat memberikan manfaat untuk kemajuan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Provinsi Kepri pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.

Budiman

Tanjungpinang, Februari 2025

Budiman
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kepri

Drafting Teams

Tim Penyusun

Penanggung Jawab

Budiman
(Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau)

Ketua Tim

Anisah Alfada
(Kepala Bidang PPA II)

Tim Penulis

Muhadi
(Kepala Seksi PPA II B)

Budi Indrawan
(Kepala Seksi PPA II C)

Lorensia Kristina Br. S.
(Pelaksana Seksi PPA II A)

Erika Krissanta
(Pelaksana Seksi PPA II B)

Muhammad Rizki Firdaus
(Pelaksana Seksi PPA II C)

Design & Layout

Erika Krissanta
(Source: Canva)

Stakeholders Terkait

- *Local Expert* Mitra Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau
- Pemerintah Daerah Lingkup Provinsi Kepulauan Riau
- Kemenkeu Satu Regional Kepulauan Riau (Kanwil DJP, Kanwil DJBC, KPU BC, PSO BC, Kanwil DJKN)
- Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau
- Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kepulauan Riau
- Badan Pusat Statistik Provinsi/Kabupaten/Kota lingkup Kepri
- Akademisi (UMRAH dan UIB)
- Satuan Kerja dan BLU Wilayah Provinsi Kepri
- Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepri
- BPKP Perwakilan Kepri
- KPPN Batam dan KPPN Tanjungpinang

Kajian Fiskal Regional Tahunan 2024 Provinsi Kepulauan Riau

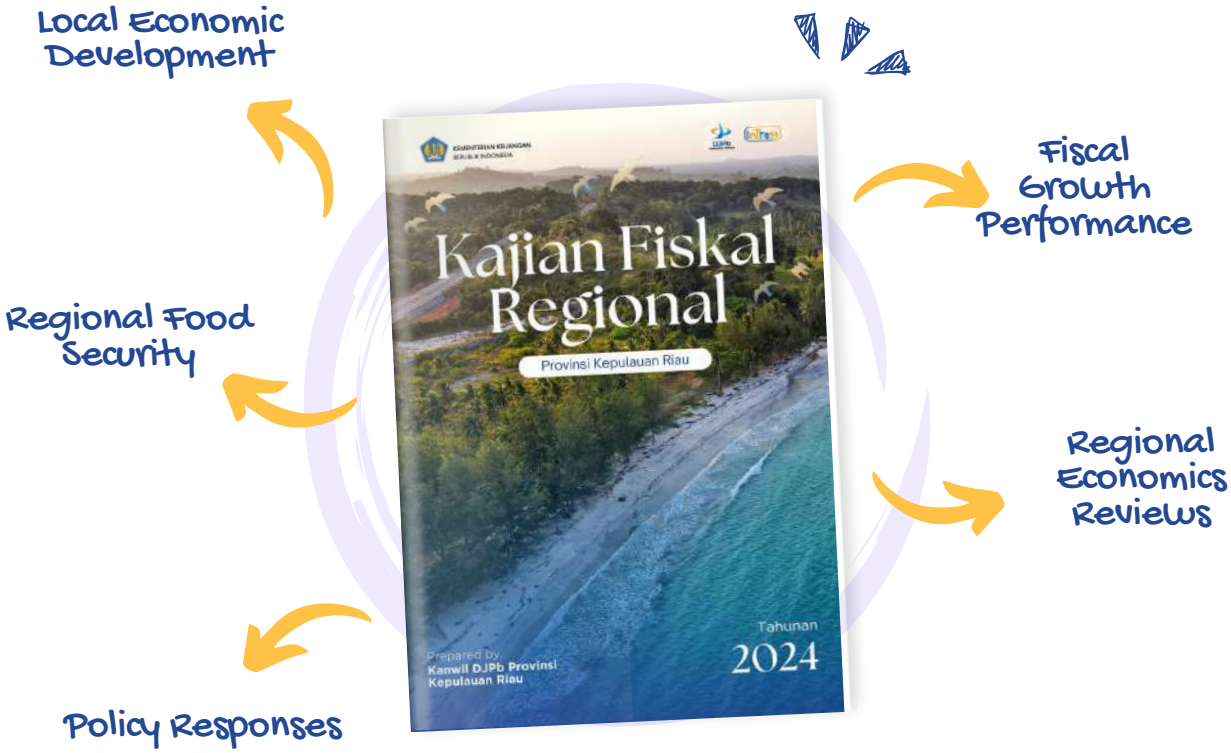

Salam hangat untuk Tuan dan Puan...
Jom kite baca KFR Tahunan Provinsi Kepri..

Korespondensi

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau
Jalan Sultan Muhammad Syah Dompak, Kota Tanjungpinang, Prov. Kep. Riau, 29124.
e-mail: djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/kepri/

Kanwil DJPb Kepulauan Riau @djpbkepri @djpbkepri

Table of Contents

Daftar Isi

i Kata Pengantar
ii Tim Penyusun
iv Daftar Isi
vi Daftar Tabel
vii Daftar Grafik dan Gambar
x Daftar Istilah
xvi Ringkasan Eksekutif
xx Dashboard

Bab I 01

Sasaran Pembangunan dan Tantangan Daerah

2 Pendahuluan
2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah
4 Keselarasan RPJMN dengan RPJMD
6 Capaian atas Keselarasan RPJMN dengan RPJMD
8 Tantangan Sasaran Pembangunan

Bab II 15

Analisis Ekonomi Regional

Analisis Indikator Makro Ekonomi 16
Analisis Indikator Kesejahteraan 20
Reviu Capaian Kinerja Makro Kesra Regional 30

Bab III 34

Analisis Fiskal Regional

35 Pelaksanaan APBN Tingkat Provinsi
58 Pelaksanaan APBD Tingkat Provinsi (Konsolidasi Pemda)
71 Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian

Table of Contents

Daftar Isi

Bab IV 74

Pengembangan Ekonomi Daerah: Harmonisasi Belanja K/L dan DAK Fisik di Tingkat Wilayah

Pendahuluan **75**
Gambaran Umum Harmonisasi Belanja K/L dan DAK Fisik di Tingkat Wilayah **75**

Bab V 86

Analisis Tematik: Reviu atas Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Nasional di Daerah

87 Pendahuluan
87 Analisis Tematik

Bab VI 106

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan **107**
Rekomendasi **113**

Daftar Pustaka

List of Special Box

Daftar Special Box

1. Menjelajahi Kekayaan Laut Natuna: Potensi Perikanan Tangkap yang Melimpah Ruah
2. Analisis Efektivitas Kinerja Penyaluran KUR di Kepri terkait Dominasi Penyaluran KUR Skema Kecil Menggunakan Metode *The Phoenix Analysis*
3. Perbedaan Definisi, Pilar dan Posisi Ketahanan Pangan dari *Food and Agriculture Organization* (FAO) dan Badan Pangan Nasional (BPN)
4. *Benchmarking Singapore Strategy in Ensuring and Securing Food Supply*
5. Menghitung Dampak Ekonomi Kebijakan Makan Bergizi Gratis dan Kesiapan Ketahanan Pangan Indonesia (Analisis Input-Output)

List of Table

Daftar Tabel

Tabel 1.1 - Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kepulauan Riau 3
Tabel 1.2 - Sasaran Indikator Kinerja Pembangunan Jangka Menengah Kepri Tahun 2021-2026 3
Tabel 1.3 - Perbandingan Target Indikator Kinerja Pembangunan pada Tahun 2024 antara RKP dan RKPD Kepulauan Riau 4
Tabel 1.4 – Matriks Capaian Keselarasan RPJMN dengan RPJMD Kepri Tahun 2024 6
Tabel 2.1 – Rincian Andil Infasi Bulan Desember 2024 per Komoditas (%yoy) 21
Tabel 2.2 – Hasil Reviu Efektivitas Kebijakan Makro Ekonomi dan Kesejahteraan 31
Tabel 3.1– Pagu dan Realisasi I-Account APBN di Kepri, 2022 s.d. 2024 (Dalam Miliar Rupiah) 35
Tabel 3.2 – Pagu dan Realisasi Penerimaan Perpajakan di Kepri, 2022 s.d. 2024 (dalam Miliar Rupiah) 37
Tabel 3.3 – Perkembangan Perpajakan di Kepri, 2022-2024 (dalam Miliar Rupiah) 37
Tabel 3.4 – Realisasi Perpajakan per Sektor Dominan di Kepri, 2023-2024 (dalam Miliar Rupiah) 38
Tabel 3.5 – Perkembangan Bea dan Cukai di Kepri, 2022-2024 (dalam Miliar Rupiah) 39
Tabel 3.6 – Perkembangan PNBP di Kepri, 2022-2024 (dalam Miliar Rupiah) 40
Tabel 3.7 – Perbandingan Proporsi Pagu dan Realisasi Belanja Seluruh 40 K/L dan 15 K/L Terbesar, 2022 s.d. 2024 (dalam Miliar Rupiah) 42
Tabel 3.8 - Realisasi Belanja Lima Belas K/L Pagu Terbesar, 2022 s.d. 2024 (dalam Miliar Rupiah) 42
Tabel 3.9 - Realisasi Belanja Menurut Fungsi, 2022 s.d. 2024 (Dalam Miliar Rupiah) 43
Tabel 3.10 – Perkembangan Pagu dan Realisasi Belanja TKD di Kepri, 2022 s.d. 2024 (Dalam Miliar Rupiah) 44
Tabel 3.11 – Perkembangan Pagu dan Realisasi DBH di Kepri, 2024 (dalam Miliar Rupiah) 46
Tabel 3.12 – Pagu dan Realisasi Dana Desa Pemda Lingkup Kepri, 2024 (dalam Miliar Rupiah) 49
Tabel 3.13-Rincian Nama Satker Berpotensi Menjadi BLU lingkup Kepri 55
Tabel 3.14 – Perkembangan I-Account APBD di Kepri, 2022 s.d. 2024 (Dalam Miliar Rupiah) 58
Tabel 3.15 – Klaster Kondisi Kemandirian Fiskal 61
Tabel 3.16 – Profil Keuangan dan Layanan BLUD Rumah Sakit di Prov. Kepri 2022-Sems I 2024 68
Tabel 3.17 – Profil Keuangan dan Layanan BLUD di Prov. Kepri Tahun 2023 68
Tabel 3.18 – Perkembangan Realisasi Konsolidsi, 2022 s.d. 2024 (Dalam Miliar Rupiah) 71
Tabel 3.19 – Rasio Belanja Konsolidasi per Kapita, 2022 s.d. 2024 72
Tabel 4.1 – Pagu dan Realisasi Belanja K/L (RO Harmonis) dan TKD Dak Fisik Tahun 2024 (dalam Rp) 76
Tabel 4.2 – Pagu K/L yang Mendukung DAK Fisik RO Harmonis (dalam Rp) 77
Tabel 4.3 – Pagu dan Realisasi Belanja K/L per Subbidang RO Harmonis Tahun 2024 (dalam Miliar Rupiah) 77
Tabel 4.4 – Pagu dan Realisasi Belanja K/L per Subbidang RO Harmonis Tahun 2024 (dalam Miliar Rupiah) 78
Tabel 5.1 - Ketahanan Pangan Makanan Pokok Beras Kepri 2024 (ton) 90
Tabel 5.2 – Tabel Kebijakan Ketahanan Pangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Provinsi Kepri 102

List of Graph

Daftar Grafik

Grafik 2.1 – Perkembangan Pertumbuhan Perekonomian Kepri Tahun 2020 – Q4 2024 (% yoy) 16
Grafik 2.2 – Grafik Perkembangan Pertumbuhan Perekonomian Kepri Tahun 2019 – Q4 2024 (%qtq) 16
Grafik 2.3 – Grafik Perkembangan Pertumbuhan Perekonomian Kepri Tahun 2019 - 2024 (%ctc) 16
Grafik 2.4 – Pertumbuhan Ekonomi Regional Sumatera Triwulan IV 2024 (%ctc) 16
Grafik 2.5 – Perkembangan Nominal PDRB ADHK dan PDRB ADHB Kepri Tahun 2019-Q4 2024 (dalam Miliar Rupiah) 17
Grafik 2.5 – Share PDRB Berdasarkan Pengeluaran Triwulan IV 2024 (%yoy) 17
Grafik 2.8 – Perkembangan Inflasi Kepri Tahun 2022-2024 (%mtm) 21
Grafik 2.9 – Inflasi pada Provinsi di Regional Sumatera per Desember 2024 (%ytd) 21
Grafik 2.10 - Perkembangan IPM Kepri, Nasional, dan Target Tahun 2020-2024 23
Grafik 2.11 - Perkembangan IPM Provinsi Kepri, Nasional, dan Regional Sumatera Tahun 2020-2024 23
Grafik 2.12 – Nilai IPM Kabupaten/Kota di Kepri per Kategori IPM Tahun 2020 – 2024 23
Grafik 2.13 – Nilai Indikator Indeks Pembangunan Manusia di Kepri Tahun 2020-2024 24
Grafik 2.14 – Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kepri Tahun 2019-2024 (ribu jiwa) 25
Grafik 2.15 – Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Perkotaan dan Pedesaan Kepri Tahun 2020-2024 26
Grafik 2.16 – Perkembangan Indeks P1 dan P2 Kepri Tahun 2020-2024 (persen) 26
Grafik 2.17 – Perbandingan Tingkat Kemiskinan di Regional Sumatera Tahun 2020-2024 (persen) 26
Grafik 2.18 – Rasio Gini di Kepri Tahun 2020-2024 27
Grafik 2.19 – Ketimpangan di Regional Sumatera per September 2024 (persen) 27
Grafik 2.20 – Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kepri per Tahun 2020-2024 28
Grafik 2.21 – Angka TPT Per Provinsi di Regional Sumatera bulan Agustus 2024 (persen) 28
Grafik 2.22 – Porsi Penyerapan Tenaga Kerja per Lapangan Usaha di Kepri Tahun 2023-2024 (persen) 29
Grafik 2.23 – Perkembangan NTP di Kepri Tahun 2022 - 2024 29
Grafik 2.24 – Perkembangan NTN di Kepri Tahun 2022 - 2024 30
Grafik 3.1 - Perkembangan Realisasi Pendapatan Negara, 2022 s.d. 2024 (dalam Miliar Rupiah) 36
Grafik 3.2 - Porsi Realisasi Pendapatan Negara, 2024 (Persen) 36
Grafik 3.3 – Perkembangan Target dan Realisasi Penerimaan Perpajakan di Kepri 2022-2024 (Dalam Miliar Rupiah) 37
Grafik 3.4 - Kontribusi Realisasi Komponen Penerimaan Perpajakan, 2024 (Persen) 37
Grafik 3.5 – Perkembangan Target dan Realisasi PNBP di Kepri, 2022-2024 (dalam Miliar Rupiah) 40
Grafik 3.6 - Kontribusi Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2024 (Persen) 40
Grafik 3.7 – Pagu dan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat, 2022 s.d. 2024 (dalam Miliar Rupiah) 41
Grafik 3.8 – Kontribusi Belanja Pemerintah Pusat, 2024 (Persen) 41
Grafik 3.9 – Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat, 2022 s.d. 2024 41
Grafik 3.10 – Proporsi Realisasi Dana Transfer Umum, 2024 (Persen) 44
Grafik 3.11 – Pagu dan Realisasi Dana Alokasi Umum, 2022 s.d. 2024 (dalam Miliar Rupiah) 44
Grafik 3.12 – Pagu dan Realisasi Dana Alokasi Umum per Pemda, 2024 (dalam Miliar Rupiah) 45
Grafik 3.13 – Pagu dan Realisasi Dana Bagi Hasil, 2022 s.d. 2024 45
Grafik 3.14 – Proporsi Realisasi Dana Transfer Khusus, 2024 46
Grafik 3.15 – Perkembangan Pagu dan Realisasi DAK Fisik, 2022 s.d. 2024 (Dalam Miliar Rupiah) 46
Grafik 3.16 – Perkembangan Pagu dan Realisasi DAK Fisik di Kepri, 2024 (Dalam Miliar Rupiah) 47
Grafik 3.17 – Perkembangan Pagu dan Realisasi DAK Non Fisik, 2022 s.d. 2024 (Dalam Miliar Rupiah) 47

List of Graph

Daftar Grafik

Grafik 3.18 – Perkembangan Pagu dan Realisasi DAK Non Fisik di Kepri, 2024 (Dalam Miliar Rupiah) 48
Grafik 3.19 – Perkembangan Pagu dan Realisasi Dana Insentif Fiskal, 2022 s.d. 2024 (Dalam Miliar Rupiah) 48
Grafik 3.20 – Perkembangan Pagu dan Realisasi DAK Non Fisik di Kepri, 2024 (Dalam Miliar Rupiah) 48
Grafik 3.21 – Perkembangan Pagu dan Realisasi Dana Desa, 2022 s.d. 2024 (Dalam Miliar Rupiah) 49
Grafik 3.22 – Perkembangan Pagu dan Realisasi Defisit APBN, 2022 s.d. 2024 (Dalam Miliar Rupiah) 50
Grafik 3.23 – Jumlah Debitur dan Nominal Penyaluran KUR di Kepri, 2022 – 2024 55
Grafik 3.24 – Jumlah Debitur dan Nominal Penyaluran UMi di Kepri, 2022 – 2024 57
Grafik 3.25 - Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah, 2022 s.d. 2024 (Dalam Miliar Rupiah) 59
Grafik 3.26 – Pagu dan Realisasi PAD, 2022 s.d. 2024 (Dalam Miliar Rupiah) 59
Grafik 3.27 – Rasio PAD terhadap PDRB, 2022 s.d. 2024 60
Grafik 3.28 – Kontribusi Komponen PAD, 2024 (persen) 60
Grafik 3.29 – Jumlah PAD dan Pendapatan Daerah Pemda Lingkup Kepri, 2024 61
Grafik 3.30 – Indeks Kemandirian Fiskal I, 2022 s.d. 2024 61
Grafik 3.31 – Jumlah PAD+DBH dan Pendapatan Daerah Pemda Lingkup Kepri, 2024 (dalam Miliar Rupiah) 62
Grafik 3.32 – Indeks Kemandirian Fiskal II, 2022 s.d. 2024 62
Grafik 3.33 – Target dan Realisasi Pendapatan Transfer, 2022 s.d. 2024 (Dalam Miliar Rupiah) 63
Grafik 3.34 – Target dan LLPDyS, 2022 s.d. 2024 (Dalam Miliar Rupiah) 63
Grafik 3.36 – Pagu dan Realisasi Belanja Operasi, 2022 s.d. 2024 (Dalam Miliar Rupiah) 64
Grafik 3.35 – Pagu dan Realisasi Belanja Daerah, 2022 s.d. 2024 (Dalam Miliar Rupiah) 64
Grafik 3.37 – Pagu dan Realisasi Belanja Modal, 2022 s.d. 2024 (Dalam Miliar Rupiah) 64
Grafik 3.38 – Pagu dan Realisasi Belanja Tak Terduga, 2022 s.d. 2024 (Dalam Miliar Rupiah) 65
Grafik 3.39 – Target dan Realisasi Belanja Transfer, 2022 s.d. 2024 (Dalam Miliar Rupiah) 65
Grafik 3.40 – Realisasi Belanja Menurut Fungsi, 2022 s.d 2024 (Dalam Miliar Rupiah) 66
Grafik 3.41 – Target dan Realisasi Surplus/Defisit APBD 2022 s.d. 2024 (Dalam Miliar Rupiah) 66
Grafik 3.42 – Target dan Pembiayaan Daerah 2022 s.d. 2024 (Dalam Miliar Rupiah) 67
Grafik 3.43 –Realisasi Pendapatan Konsolidasian, 2022 s.d. 2024 (Dalam Miliar Rupiah) 71
Grafik 3.44 –Realisasi Belanja Konsolidasian, 2022 s.d. 2024 (Dalam Miliar Rupiah) 72
Grafik 3.45 –Realisasi Defisit Konsolidasian, 2022 s.d. 2024 (Dalam Miliar Rupiah) 73
Grafik 3.46 –Realisasi Pembiayaan Konsolidasian, 2022 s.d. 2024 (Dalam Miliar Rupiah) 73
Grafik 4.1 - Kendala dan Tantangan Keseluruhan Bidang 81
Grafik 4. 2 - Kendala dan Tantangan – Eksekusi Kegiatan per Jenis Kendala 81
Grafik 4. 3 - Kendala dan Tantangan – Eksekusi Kegiatan per Bidang 81
Grafik 5.1 - Produksi Padi di Provinsi Kepri (Ton) Tahun 2018-2023 87
Grafik 5.2 - Produksi Beras di Provinsi Kepri (Ton) 88
Grafik 5.3 - Tingkat Produktivitas Lahan (ton/ha) 88
Grafik 5.4 - Konsumsi Bahan Pangan Perkapita/Bulan (ton) 88
Grafik 5.5 - Konsumsi dan Produksi Beras Tahunan (ton) 88
Grafik 5.6 - IKP Provinsi Kepri 89
Grafik 5.7 - IKP Kabupaten/Kota Lingkup Kepri 89
Grafik 5.8 - IKP Berdasarkan Pilar Ketahanan Pangan 89
Grafik 5.9 - Garis Kemiskinan (Rp) dan Jumlah Pendudukan Miskin (Ribu Jiwa) 89

List of Graph

Daftar Grafik

Grafik 5.10 - PoU Provinsi Kepri 2018-2023 (persen) 90
Grafik 5.11 - PoU Kab/Kota 2018-2023 90
Grafik 5.12 - Stock Pangan Beras Kepri 2024 (Ton) 91
Grafik 5.13 - Belanja Badan Pangan Nasional (dalam Miliar Rupiah) 91
Grafik 5.14 - Belanja Kementerian Pertanian (dalam Miliar Rupiah) 92
Grafik 5.15 - Belanja Badan Pusat Statistik 92
Grafik 5.16 - Belanja Kementerian PUPR (dalam Miliar Rupiah) 92
Grafik 5.17 – Alokasi Belanja DKP2KH Kepri (DK/TP) (dalam Miliar Rupiah) 92
Grafik 5.18 - DAK Fisik Tematik Penguatan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perinakan dan Hewani) (dalam Miliar Rupiah) 93
Grafik 5.19 - Alokasi Belanja DAK Fisik Kelautan dan Perikanan (dalam Miliar Rupiah) 93
Grafik 5.20 - DAK Fisik Pertanian Tematik Penguatan Sentra Produksi Pangan (Paertanian, Perinakan dan Hewani) (dalam Miliar Rupiah) 93
Grafik 5.21 - Dak Non Fisik Ketahanan Pangan dan Pertanian (dalam Miliar Rupiah) 93
Grafik 5.22 - Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat (dalam Miliar Rupiah) 94
Grafik 5.23 - Program Penanganan Kerawanan Pangan Masyarakat (dalam Miliar Rupiah) 94
Grafik 5.24 - Program Pengawasan Keamanan Pangan (dalam Miliar Rupiah) 94
Grafik 5. 25 - Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi (dalam Miliar Rupiah) 94
Grafik 5.26 - PSN -Sistem Penyediaan Air Minum (dalam Miliar Rupiah) (SPAM) 95
Grafik 5.27 – Grafik Pagu dan Realisasi Belanja Proyek Strategis Nasional Irigasi (dalam Miliar Rupiah) 95
Grafik 5.28 - PSN - Proyek Strategis Nasional Waduk/Bendungan (dalam Miliar Rupiah) 95
Grafik 5. 29 - Perikanan Tangkap Laut (ton) 96
Grafik 5. 30 - Produksi Ternak (ton) 96
Grafik 5. 31- Produksi Ternak Unggas (ton) 96
Grafik 5. 32 - Jalan - Tematik Penguatan Transportasi Kawasan Sentra Produksi Pangan (dalam Miliar Rupiah) 97
Grafik 5. 33 - Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi (dalam Miliar Rupiah) 97
Grafik 5.34 - Kelautan dan Perikanan - Tematik Pembangunan Kawasan Pelabuhan (dalam Miliar Rupiah) 97
Grafik 5.35 - Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat (dalam Juta Rupiah) 98
Grafik 5.36 - Perkembangan Produksi Jagung dan Kedelai (ton) 98
Grafik 5.37 - Perkembangan Perikanan Budidaya (ton) 98
Grafik 5.38 - Belanja Ketahanan Pangan (APBN) (dalam Miliar Rupiah) 99
Grafik 5.39 - Produksi Tanaman Sayuran - 1 (ton) 100
Grafik 5.40 - Produksi Tanaman Sayuran - 2 (ton) 100

Daftar Gambar

Gambar 1.1 - Mapping Keselarasan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Provinsi Kepri 4
Gambar 5.1 - Hasil Analisis Regresi Data Panel Eviews 102

Abbreviations

Daftar Istilah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran daerah selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember). APBD, perubahan APBD (APBD-P), dan pertanggungjawaban APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember). APBN, perubahan APBN (APBN-P), dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang.

Badan Layanan Umum (BLU) instansi di lingkungan Pemerintah Pusat yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas. BLU memiliki fleksibilitas pengelolaan keuangan berupa keleluasaan untuk menggunakan langsung pendapatannya (tanpa harus menyetor ke Rekening Kas Umum Negara/RKUN) dan menetapkan praktek-praktek bisnis yang sehat dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. (Contoh: BLU Perguruan Tinggi Negeri, BLU Rumah Sakit Pemerintah, dan BLUD Pengelola Dana Bergulir).

Bea Masuk (BM)/Impor Duty adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang yang memasuki daerah pabean. Pengenaan bea masuk biasanya memiliki tujuan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah, memberikan proteksi terhadap produksi local, dan/atau untuk menghukum negara tertentu dengan mengenakan tarif yang sangat tinggi untuk negara tersebut.

Bea Keluar (BK)/Export Duty adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang yang keluar dari daerah pabean. Saat ini, pengenaan bea keluar sudah jarang diterapkan karena tidak sejalan dengan kebijakan berorientasi ekspor yang membutuhkan harga kompetitif di pasar internasional.

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu, yaitu: konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan (Contoh: minuman beralkohol dan tembakau).

Cumulative to Cumulative (ctc) adalah metode perbandingan dua peristiwa yang diukur dengan basis kumulatif waktu. (Contoh: penerimaan pemerintah pada Triwulan I s.d Triwulan IV 2022 dibandingkan dengan penerimaan pemerintah pada Triwulan I s.d Triwulan IV 2021)

Dana Abadi Daerah adalah dana yang bersumber dari APBD yang bersifat abadi dan dana hasil pengelolaannya dapat digunakan untuk Belanja Daerah dengan tidak mengurangi dana pokok

Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) dana pada ABPN yang dialokasikan untuk ditransfer kepada pemerintah daerah dengan penggunaan yang sudah ditentukan sebelumnya dan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan pembangunan fisik. (Contoh penggunaan: gedung sekolah, infrastruktur irigasi, energy skala kecil, prasarana pemerintah daerah, infrastruktur jalan, transportasi perdesaan sarpras pasar, dan lain sebagainya).

Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik) dana pada ABPN yang dialokasikan untuk ditransfer kepada pemerintah daerah dengan penggunaan yang sudah ditentukan sebelumnya dan tujuan untuk membantu

Abbreviations

Daftar Istilah

mendanai kegiatan non fisik. (Contoh penggunaan: bantuan operasional sekolah (BOS), tunjangan profesi guru PNSD, bantuan operasional kesehatan, dan lain sebagainya).

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana transfer yang dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom (Provinsi/Kabupaten/Kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN, dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD. Tujuan DAU adalah sebagai pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil terdiri dari DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam (SDA).

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaran pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. kenario awal Dana Desa ini diberikan dengan mengganti program pemerintah yang dulunya disebut PNPM,

Dana Insentif Daerah (DID) adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas pencapaian kinerja tertentu

Defisit/Surplus Anggaran adalah kebijakan atau realisasi pengeluaran dan penerimaan negara. Pengeluaran lebih besar dari penerimaan disebut sebagai defisit anggaran, sedangkan pengeluaran lebih kecil dari penerimaan disebut sebagai surplus anggaran.

Free Trade Zone **(FTZ)/Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Kawasan Bebas)** merupakan kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean, sehingga bebas dari pengenaan Bea Masuk, PPN, PPnBM, dan Cukai.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (HPKD) merupakan pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD, BUMN, Perusahaan Swasta atau kelompok usaha masyarakat.

High Base-effect adalah kecenderungan pertumbuhan dari nilai yang kondisi awalnya tinggi.

Indeks Pembangunan Manusia/Human Development Index (IPM/HDI) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yakni umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak.

Industri Kecil adalah industri yang memiliki karyawan maksimal 19 orang, memiliki nilai investasi kurang dari 1 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Industri Menengah adalah industri yang memiliki karyawan maksimal 19 orang dan nilai investasi minimal 1 miliar rupiah atau memiliki karyawan minimal 20 orang dan nilai investasi maksimal 15 miliar rupiah.

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus- menerus (continue) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang.

Abbreviations

Daftar Istilah

Inflasi Tahun Kalender adalah perubahan kenaikan tingkat harga secara umum dari barang/jasa, atau merosotnya daya beli atau nilai riil uang selama satu tahun kalender (dari bulan Januari tahun ini sampai dengan bulan ini tahun ini). Ini dihitung dari persentase perubahan IHK bulan ini tahun ini terhadap IHK bulan Desember tahun lalu.

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)/Special Economic Zone (SEZ) adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Nega Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu..

Ketimpangan Fiskal Vertikal adalah perbedaan kapasitas/potensi fiskal dan kebutuhan fiskal antara pemerintah pusat dengan tingkat pemerintahan yang lebih rendah.

Ketimpangan Fiskal Horizontal adalah perbedaan kapasitas/potensi fiskal dan kebutuhan fiskal antara daerah satu dengan daerah lainnya.

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (LLPAD) merupakan pos penganggaran penerimaan asli daerah yang tidak termasuk ke dalam pajak daerah, retribusi daerah, dan HPKD. LLPAD meliputi jasa giro, bunga, tuntutan ganti rugi, denda pajak, denda retribusi, pendapatan BLUD, dan lain sebagainya.

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah (LLPD) merupakan pos penerimaan Pemda untuk menampung penerimaan selain PAD dan Dana Perimbangan. Pos LLPD meliputi hibah, dana darurat, DBH dari provinsi, bantuan keuangan, dan lain sebagainya.

Month to Month (mtm) adalah metode perbandingan dua peristiwa yang diukur dengan basis bulanan. (Contoh: penerimaan pemerintah pada bulan September 2022 dibandingkan dengan penerimaan pemerintah pada bulan Agustus 2022.

Obligasi Daerah adalah surat berharga berupa pengakuan utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)/Property Tax adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya.

Pajak Daerah/Local Tax adalah pajak yang kewenangan pemungutannya berada di tangan Pemerintah Daerah. Pajak daerah meliputi pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir dan sebagainya.

Pajak Penghasilan (PPh)/Income Tax adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya.

Pajak Perdagangan Internasional (PPI) adalah semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan bea keluar.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)/Value Added Tax (VAT)/Goods and Services Tax (GST) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan.

Abbreviations

Daftar Istilah

Pembiayaan Utang Daerah adalah setiap penerimaan Daerah yang harus dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan kelompok pendapatan pemerintah daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan LLPAD.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Menurut UU no. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.

Pengeluaran Konsumsi - Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) merupakan nilai output non-pasar yang dihasilkan oleh LNPRT.

Pengeluaran Konsumsi – Rumah Tangga (PK-RT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi.

Pinjaman Daerah adalah pembiayaan utang daerah yang diikat dalam suatu perjanjian pinjaman dan bukan dalam bentuk surat berharga, yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah nilai tambah dari semua barang dan jasa (output) yang diproduksi oleh suatu negara pada periode waktu tertentu.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai tambah dari semua barang dan jasa (output) yang diproduksi oleh suatu wilayah (Provinsi/Kabupaten/Kota) pada periode waktu tertentu

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) adalah PDRB yang menghitung nilai barang dan jasanya berdasarkan harga berlaku.

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) adalah PDRB yang menghitung nilai barang dan jasanya dengan menggunakan harga tahun tertentu sebagai dasar perhitungannya. Dengan kata lain, PDRB ADHK murni menghitung nilai tambah output tanpa memperhitungkan kenaikan/penurunan harga.

Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (PDRB/Kapita) merupakan nilai PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun yang sama. PDRB/Kapita digunakan sebagai indikator standar hidup penduduk suatu wilayah.

***Quarter to Quarter* (qtq)** mengacu pada perubahan atau pertumbuhan antara satu kuartal dengan kuartal sebelumnya. Contohnya adalah pada saat melihat pertumbuhan PDRB dari Triwulan II ke Triwulan III.

Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Retribusi daerah meliputi retribusi izin mendirikan bangunan (IMB), retribusi parkir, retribusi pelayanan pasar, retribusi terminal dan sebagainya.

Satuan Kerja (Satker) adalah Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program. Dalam konteks akuntansi, kata Satker ini bisa dipersamakan dengan entitas.

Scatterplot adalah diagram matematika yang menggunakan koordinat Cartesian untuk menampilkan nilai dari dua variabel yang khas dalam satu kumpulan data.

Abbreviations

Daftar Istilah

Sinergi Pendanaan adalah sinergi sumber-sumber pendanaan dari APBD dan selain APBD dalam rangka pelaksanaan program prioritas nasional dan/atau daerah.

Sisa Lebih/Kurang Perhitungan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Selisih positif (sisa lebih) dapat digunakan untuk membiayai defisit anggaran di tahun anggaran berikutnya.

Skala Ekonomi/*Economy of Scale* merupakan fenomena turunnya biaya produksi per unit dari suatu perusahaan yang terjadi bersamaan dengan meningkatnya jumlah produksi (output). Dalam konteks industrialisasi, skala ekonomi menciptakan efisiensi bagi suatu unit produksi sampai dengan titik tertentu.

Sukuk Daerah adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan aset Sukuk Daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

Tax Ratio adalah rasio yang membandingkan antara realisasi pajak dengan PDB/PDRB pada periode yang sama. Rasio tersebut menjadi indikator keberhasilan penggalian potensi pajak.

Tingkat Kemiskinan/Persentase Penduduk Miskin/Head Count Index (HCI-Po) adalah persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK).

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. TPAK dihitung dengan cara membagi jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk berusia 15 tahun keatas. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini baik dalam satuan unit (orang) maupun persen berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. TPT dihitung dengan cara membagi jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja.

Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) adalah ukuran yang digunakan untuk menunjukkan seberapa banyak peluang pekerjaan yang tersedia dalam suatu wilayah atau industri pada suatu waktu tertentu.

Tugas Pembantuan (TP) adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Untuk pelaksanaanya, diberikan dana tugas pembantuan dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran.

Vokasional dalam konteks pendidikan/pelatihan merupakan pendidikan/pelatihan yang lebih terfokus pada sisi keahlian atau kemahiran praktis dalam berkerja dibandingkan sisi akademik. Di era cepatnya perubahan teknologi seperti saat ini, kebutuhan akan keahlian seorang pekerja seringkali berubah-ubah sehingga permintaan akan pendidikan/pelatihan vokasional terus meningkat.

Volatilitas/Volatility dalam konteks ekonomi merupakan kecenderungan suatu variabel untuk berubah-ubah. Semakin tinggi volatilitas, semakin sering suatu variabel berubah- ubah.

Abbreviations

Daftar Istilah

***Year on Year* (*yoy*)** adalah metode perbandingan dua peristiwa yang diukur dengan basis tahunan. (Contoh: penerimaan pemerintah pada triwulan III 2022 dibandingkan dengan penerimaan pemerintah pada triwulan III 2021).

Executive Summary

Ringkasan Eksekutif

Sasaran Pembangunan dan Tantangan Daerah

Sasaran Pembangunan di Kepri berfokus pada pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Melalui RPJMD Kepri tahun 2021-2026, Provinsi Kepri memiliki sasaran spesifik berupa Optimalisasi Potensi Kemaritiman, Keunggulan Wilayah dan Keberlanjutan Lingkungan; Percepatan Pemulihan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi; Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kuat, dan Antisipatif; Penguatan Jaringan Pengamanan Sosial; Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berkarakter; Pembinaan Keagamaan, Pelestarian Budaya, dan Harmoni Masyarakat; serta Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengintegrasian antar Pulau.

Dalam memcapai sasaran pembangunan, terdapat beberapa tantangan. Kepri menghadapi berbagai tantangan dalam pembangunan yang mencakup aspek ekonomi, **sosial**, geopolitik, dan status sebagai Free Trade Zone (FTZ). Dari sisi ekonomi, Kepri kesulitan mengelola sumber daya alam, terbatasnya infrastruktur, serta ketidakmerataan investasi yang terfokus di Batam. Tantangan sosial terlihat dari ketimpangan demografis, akses pendidikan dan kesehatan yang rendah di wilayah terpencil, serta tingginya ketimpangan sosial. Secara geopolitik, konflik di wilayah Natuna menghambat pemanfaatan sumber daya bawah laut. Status FTZ Kepri menghadapi hambatan birokrasi dan resistensi masyarakat, mengurangi daya tarik investor dibandingkan dengan Singapura.

Analisis Ekonomi Regional

Kinerja ekonomi Kepulauan Riau secara kumulatif (*ctc*) tumbuh positif dan menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi ke-3 di regional Sumatera. Indikator kesejahteraan rata-rata mengalami peningkatan dengan rincian sebagai berikut.

Pada triwulan IV 2024, pertumbuhan ekonomi Kepri tercatat tumbuh 5,14 persen (*yoy*). Pertumbuhan ekonomi tersebut mencerminkan kestabilan perekonomian di Kepri yang tetap menunjukkan kinerja positif. Angka pertumbuhan ekonomi tersebut menjadikan Kepri dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi ke-3 di regional Sumatera (*ctc*), Pertumbuhan ekonomi ini dorong oleh fenomena meningkatnya jummlah kunjungan wisman dan wisnus yang meningkatkan permintaan barang dan jasa dan mendukung produktivitas ekonomi Kepri.

Berdasarkan Pengeluaran, akselerasi pertumbuhan ekonomi di Kepri **didominasi oleh komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)** atau Investasi dengan share sebesar 44,42 persen. **Dari sisi Lapangan Usaha,** struktur PDRB Kepri masih didominasi sektor **industri pengolahan** dengan kontribusi terhadap PDRB sebesar 41,07 persen.

Tekanan inflasi Kepri pada akhir tahun 2024 mencapai **2,09 persen (*yoy*), angka inflasi Kepri lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi Nasional** 1,57 (*yoy*), namun tetap stabil dan masih dalam rentang Target Inflasi Provinsi Kepri Tahun 2024 sebesar 3±1 (*yoy*). Hal ini dipengaruhi oleh ketidakstabilan iklim di daerah produsen beras yang menyebabkan gagal

panen, sedangkan Provinsi Kepri masih mengimpor beras dari daerah produsen beras dalam negeri (pulau jawa) dan luar negeri (Thailand).

IPM Kepri tahun 2024, yang dihitung dengan metode perhitungan baru sebesar 79,89, tumbuh sebesar 0,81 persen (*yoy*). Capaian tersebut merupakan prestasi bagi Kepri yang berhasil menjadi provinsi dan menjadi IPM tertinggi pada Regional Sumatera selama enam tahun berturut-turut.

Tingkat kemiskinan Kepri pada September 2024 tercatat 124,96 ribu jiwa atau 4,78 persen dari total penduduk Kepri. Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya di bulan Maret 2024, tingkat kemiskinan Kepri turun sebanyak ±13,3 ribu jiwa (*yoy*). Sementara itu **Gini Ratio** Kepri**,** per September 2024 tercatat sebesar 0,357 atau naik 0,008 persen poiny jika dibandingkan dengan periode Maret 2024. Aangka tersebut masih dibawah angka Rasio Gini Nasional yang berada di angka 0,381. Pertumbuhan ekonomi yang terus melaju nyatanya tidak serta merta mengurangi ketimpangan sosial, hal ini menunjukkan bahwa kemanfaatan dari pertumbuhan ekonomi di Kepri tidak dirasakan secara merata.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kepri bulan Agustus 2024 tercatat 6,39 persen. Angka TPT tersebut turun sebesar 0,41 persen poin (*yoy*). Kepri berada pada peringkat pertama tertinggi di Regional Sumatera dan tertinggi ke-tiga tertinggi Nasional. Di sisi lain, persentase penurunan TPT Kepri juga menjadi yang terbesar di Sumatera. Penurunan TPT tersebut menjadi sinyal positif bahwa masyarakat di Kepri telah memiliki akses dan kesempatan yang lebih baik terhadap lapangan pekerjaan dan kesempatan untuk berkontribusi dalam perekonomian.

NTP Kepri pada bulan Desember 2024 sebesar 104,63 dan menunjukkan pertumbuhan negatif sebesar 0,50 persen (*yoy*). Angka NTP Kepri masih berada di bawah angka NTP Nasional (120,30). Hal tersebut disebabkan oleh kondisi geografis Kepri yang masih belum optimal dijadikan sebagai lahan pertanian.

NTN Kepri pada Desember 2024 sebesar 104,84, lebih tinggi dibandidngkan dengan NTN nasional dengan angka 102,27. Namun demikian, capaian NTN tersebut masih berada di bawah sasaran NTN Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kepri tahun 2024 ditargetkan sebesar 116. Hal tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan belum optimalnya produksi para nelayan Kepri yang masih tradisional dan kurangnya akses terhadap metode teknologi perikanan modern.

Analisis Fiskal Regional

Pelaksanaan APBN Kepri Tunjukan Kinerja Positif. Pertumbuhan tersebut didorong oleh *extra effort* yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam menggali potensi pendapatan dan mengoptimalkan belanja APBN di Kepri.

Target Pendapatan APBN 2024 sebesar 155,62 miliar yang seluruhnya merupakan Penerimaan Dalam Negeri, terdiri dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp12.488,53 miliar dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp2.707,09 miliar. Hingga akhir tahun 2024, realisasi Penerimaan Perpajakan mencapai Rp10.582,10 miliar (85,01 persen dari Target) yang didorong oleh PPh Non Migas (88,72 persen). Realisasi Pendapatan PNBP sebesar Rp3.189,56 miliar (117,82 persen dari Target) dan tumbuh signifikan sebesar 29,81 persen (*yoy*) didominasi dari PNBP BLU BP Batam

Alokasi Belanja APBN 2024 sebesar Rp18.682,57 miliar, terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) Rp10.501,28 miliar, dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp8.181,29 miliar. Sampai dengan 31 Desember 2024, realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp9.130,36 miliar (86,95 persen dari Pagu) dan tumbuh sebesar 4,63 persen (yoy). Persentase realisasi Belanja Pemerintah Pusat tahun 2024 merupakan yang terendah dalam tiga tahun terakhir. Realisasi Belanja TKD sebesar

Rp8.036,53 miliar (98,23 persen dari Pagu) dan mengalami perlambatan pertumbuhan sebesar minus 12,65 persen (*yoy*).

Pelaksanaan APBD di Kepri terus menggali potensi pendapatan daerah. Realisasi Pendapatan Daerah di akhir tahun 2024 mencapai Rp13.068,19 miliar (89,98 persen dari Target) yang tumbuh 0,59 persen (*yoy*). Pendapatan daerah didominasi Pendapatan Transfer Rp8.290,90 miliar atau 63,44 persen dari total pendapatan daerah.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kepri sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp4.753,80 miliar (98,82 persen dari Target) yang tumbuh 8,96 persen (*yoy*). Pertumbuhan PAD didongkrak oleh keberhasilan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan Pajak Daerah yang tumbuh 7,91 persen (*yoy*) dan Retribusi Daerah yang tumbuh 193,30 persen, *yoy*) sehingga mendorong PAD tumbuh positif

Rasio PAD terhadap PDRB tahun 2024 sebesar 2,50 persen dan merupakan angka tertinggi pada tiga tahun terakhir. **IKF I menunjukan hanya Kota Batam dan Kabupaten Karimun yang masuk ke klaster Menuju Mandiri, sedangkan IKF II menunjukkan hampir seluruh kabupaten/kota sudah masuk ke klaster Menuju Kemandirian** kecuali Kabupaten Lingga

Realisasi Belanja Daerah pada akhir tahun 2024 telah terealisasikan sebesar Rp13.454,68 miliar (88,33 persen dari Pagu) yang tumbuh 1,60 persen (yoy), didorong oleh Belanja Operasi dan Belanja Transfer, meski Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga mengalami kontraksi.

Konsolidasian pelaksanaan anggaran pusat dan daerah lingkup Kepri menunjukkan bahwa jumlah Pendapatan Konsolidasi sampai dengan 31 Desember 2024 tercapai sebesar Rp19.149,68 miliar dan tumbuh 13,66 persen (*yoy*), jumlah Belanja Konsolidasi sebesar Rp23.297,09 miliar dan tumbuh 3,13 persen (*yoy*), sehingga terjadi Defisit sebesar Rp4.147,42 miliar.

Pengembangan Ekonomi Daerah: Harmonisasi Belanja K/L dan DAK Fisik di Tingkat Wilayah

Harmonisasi belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik di Kepri tahun 2024 menunjukkan realisasi anggaran yang efektif, terutama di bidang jalan, pendidikan, air minum, kesehatan, dan sanitasi.

Meski demikian, tantangan pelaksanaan kegiatan masih menjadi kendala signifikan, terutama terkait dengan kesiapan dokumen teknis dan keterlambatan dalam penyaluran DAK Fisik di beberapa wilayah, seperti Kab. Natuna dan Kota Batam, akibat masalah administrasi, lahan, dan regulasi yang lambat.

Upaya sinkronisasi terus dilakukan untuk memastikan efisiensi pembangunan, termasuk di bidang pendidikan melalui kebijakan merdeka belajar dan peningkatan akses air bersih. Pemerintah pusat dan daerah bekerja sama melalui forum Musrenbangnas dan penyusunan RKPD guna memastikan proyek strategis di Kepri berjalan optimal meski menghadapi berbagai hambatan teknis.

Analisis Tematik: Reviu atas Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Nasional di Daerah

Provinsi Kepri menghadapi tantangan besar dalam pengembangan ekonomi daerah karena keterbatasan lahan pertanian, dengan hanya 2% daratan dan 98% lautan.

Produksi padi terus menurun dari 1.097 ton pada 2018 menjadi 423,11 ton pada 2023, sementara konsumsi beras meningkat menjadi 138.800 ton/tahun pada 2023. **Dengan produksi beras lokal yang tidak mencapai 1% dari total**

kebutuhan, Kepri sangat bergantung pada impor beras untuk memenuhi konsumsi pangan, sementara stok beras saat ini hanya cukup untuk 147 hari tanpa impor tambahan.

Meski demikian, program ketahanan pangan di Kepri menunjukkan perkembangan positif, terutama pada sektor perikanan tangkap, peternakan, dan diversifikasi pangan lokal. Hasil tangkapan laut, produksi ternak, dan unggas meningkat sejak 2022-2024, memperkuat ketersediaan pangan lokal. Pemerintah juga mendorong konsumsi pangan berbasis produk lokal seperti jagung, kedelai, dan ikan untuk menciptakan ketahanan pangan yang lebih berkelanjutan di tengah tantangan ekonomi dan perubahan iklim.

Analisis kuantitatif menunjukkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik berperan signifikan dalam meningkatkan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) di Kepri, dengan kontribusi positif terhadap pembangunan infrastruktur pertanian serta program penyuluhan dan pengembangan pangan lokal. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi dana yang tepat dan program ketahanan pangan yang terpadu dapat membantu Kepri mengatasi ketergantungan impor dan memperkuat ketahanan pangan di wilayahnya.

Rekomendasi Kebijakan pada KFR Tahunan 2024 Provinsi Kepri

Rekomedasi pada KFR Tahunan 2024 Provinsi Kepri berfokus pada proses pembangunan perekonomian Kepri yang selaras dengan pembangunan nasional melalui perbaikan kinerja fiskal pada pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Berdasarkan analisis makro ekonomi, analisis kinerja APBN dan APBD, pengembangan daerah dengan harmonisasi belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta analisis tematik mengenai Reviu atas Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Nasional di Daerah, Kanwil DJPb Prov. Kepri memberikan beberapa rekomendasi kepada berbagai *stakeholders*.

Rekomendasi disampaikan kepada Pemerintah Daerah lingkup Kepri, Pemerintah Pusat, dan Kanwil DJPb Prov. Kepri sendiri selaku perwakilan Kementerian Keuangan di Provinsi Kepri. Penyampaian rekomendasi difokuskan pada aspek: Perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan pendapatan dan belanja negara.

Melalui koordinasi yang lebih intensif antar instansi terkait, peningkatan akurasi data, serta pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan anggaran, diharapkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara dapat tercapai. Selain itu, langkah-langkah perbaikan dalam pelaksanaan fiskal juga perlu terus diupayakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Provinsi Kepri.

Dashboard
Perkembangan Ekonomi Regional

PERTUMBUHAN EKONOMI - Q4 2024

Pertumbuhan Ekonomi

5,14% yoy

6,94% qtq | 5,02% ctc

1 %qtq in Sumatera

3 %ctc in Sumatera

Distribusi PDRB di Regional Sumatera

7,42%

Nominal PDRB

Atas Dasar Harga Berlaku

Rp93.446,15 M

Atas Dasar Harga Konstan

Rp55.394,49 M

Share PDRB

Share by Production (%yoy)

Indsutri Pengolahan

41,07%

Konstruksi

20,82%

Pertambangan dan Penggalian

9,87%

Share by Expenditure (%yoy)

PMTB

44,42%

PK-RT

40,23%

Net Ekspor

7,06%

INFLASI, NTP & NTN - Desember 2024

Tingkat Inflasi

2,09% yoy | **0,69% mtm** | **2,09% ytd**

Inflasi di 2 Kota dan 1 Kabupaten di Kepri

Kab. Karimun 1,57% (yoy)

Kota Batam 2,24% (yoy)

Kota Tanjungpinang 1,53% (yoy)

Kontributor Inflasi

Perhiasan Emas 0,40%

Tarif Listrik 0,26

Tarif Parkir 0,18%

Tren Inflasi di Kepri (%mtm)

Nilai Tukar Petani

104,63

↑ 0,88% (mtm)

↑ 0,34% (yoy)

Nilai Tukar Nelayan

104,84

↓ 0,28% (mtm)

↑ 1,07% (yoy)

INDIKATOR KESEJAHTERAAN

Aug 2024

Tingkat Pengangguran Terbuka

6,39 %

3 in Indonesia

Sep 2024

Tingkat Ketimpangan (Gini Ratio)

0,357

Tingkat Kemiskinan

124,96 Ribu Jiwa Sep 2024

4,78%

↓ 0,59 poin persen

Mar 2024 - Sep 2024

Pedesaan: 8,55%

26,03 Ribu Jiwa

Perkotaan: 4,36%

102,23 Ribu Jiwa

Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2024

79,89

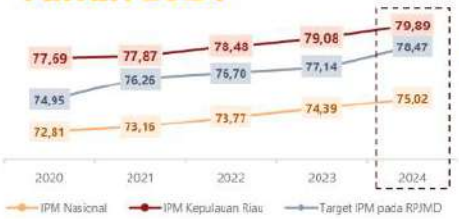

yoy ↑ 0,81%

3 in Indonesia

Dashboard
Kinerja Fiskal Regional

PAGU DAN REALISASI APBN S.D. 31 DESEMBER 2024

Realisasi Pendapatan

yoy 12,08%

90,87% Target Rp15.155,62 M

Realisasi: Rp13.771,66 Miliar

Growth YOY ▲ 7,65%

Penerimaan Perpajakan

Rp10.582,10 M

Pajak Dalam Negeri

Pajak Internasional

Growth YOY ▲ 29,81%

Penerimaan PNBP

Rp3.189,56 M

Pendapatan BLU

PNBP Lainnya

#Optimalisasi Pendapatan Negara

Realisasi Belanja

yoy -4,24%

91,89% Pagu Rp18.682,57 M

Realisasi: Rp17.166,89 Miliar

Growth YOY ▲ 4,63%

Belanja Pemerintah Pusat

Rp9.130,36 M

Belanja Pegawai

Belanja Bansos

Belanja Barang

Belanja Lainnya

Belanja Modal

Growth YOY ▼ -12,65%

Transfer Ke Daerah

Rp8.036,53 M

Dana Transfer Umum

Dana Insentif Fiskal

Dana Transfer Khusus

Dana Desa

#Efektivitas Belanja Negara

PAGU DAN REALISASI APBD S.D. 31 DESEMBER 2024

Realisasi Pendapatan

yoy -0,59%

89,98% Target Rp14.524,05 M

Realisasi: Rp13.068,19 Miliar

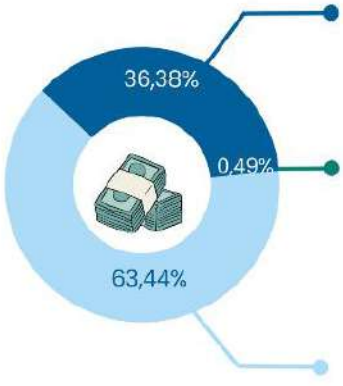

Growth YOY ▲ 8,96%

Penerimaan Asli Daerah

Rp4.753,80 M

Growth YOY ▼ -24,18%

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Rp23,49 M

Growth YOY ▼ -5,27%

Pendapatan Transfer

Rp8.290,90 M

#Optimalisasi APBD Kepulauan Riau

Realisasi Belanja

yoy 1,60%

88,33% Pagu Rp15.232,97 M

Realisasi: Rp13.454,68 Miliar

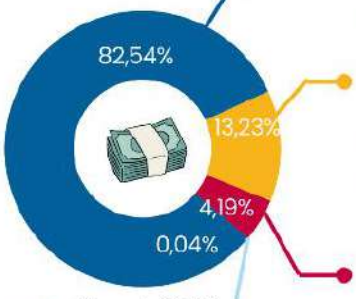

Growth YOY ▲ 5,75%

Belanja Operasi

Rp11.105,75 M

Growth YOY ▼ -17,98%

Belanja Modal

Rp1.780,12 M

Growth YOY ▲ 0,36%

Belanja Transfer

Rp563,66 M

Growth YOY ▼ -44,37%

Belanja Tidak Terduga

Rp5,16 M

Dashboard
Pengembangan Ekonomi Regional

PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH: HARMONISASI APBN DAN APBD

Kolaborasi antara Ditjen Anggaran (DJA), Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Ditjen Perbendaharaan (DJPb) sangat penting untuk **memastikan harmonisasi Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah terjaga dengan baik**

Alokasi Belanja K/L yang Mendukung DAK Fisik di Kepri (RO Harmonis)

- Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Kementerian Kesehatan
- Kementerian Pertanian

Kendala dan Tantangan Pelaksanaan Harmonisasi Belanja KL pada 6 Bidang

- Kesiapan pedoman umum, juknis, dan dokumen pelaksanaan lain.
- Permasalahan kawasan kegaitan yang tidak mendapatkan izin penggunaan lahan.
- Sulitnya menemukan vendor yang dapat menyediakan mesin dan peralatan pengolahan sagu di Lingga.
- Belum keluarnya juknis dari Kemenkes terkait spesifikasi alat kesehatan.
- Terdapat rencana kegiatan yang understimated akibat terlambat merevisi kontrak.
- Kurangnya SDM dalam memproses dokumen.
- Cuaca ekstrim dan kendala geografis yang menghambat proyek
- Reshuffle petugas pemda dan gangguan aplikasi.

Upaya Sinkronisasi di Daerah oleh Satker dan Pemda

Air Minum

Meningkatkan dialog satker pusat dalam Musrenbang Dareah

Jalan

Membagi lokasi dan fokus pembangunan antara KL dan Pemda

Kesehatan dan KB

Membagi fokus peningkatan layanan dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan. antara KL dan Pemda

Pendidikan

Meningkatkan dialog serta pendampingan dari BPMP Kepri. Dinas Pendidikan Kepri mengajukan usulan dan pelaksanaan DAK Fisik.

Pertanian

Membagi fokus pelaksanaan kegiatan dalam meningkatkan kapasitas pertanian di wilayah Kepri.

Sanitasi

meningkatkan kerja sama dan koordinasi dalam pembinaan dan pengawasan sanitasi.

ANALISIS TEMATIK:
REVIU ATAS IMPLEMENTASI KETAHANAN PANGAN DI KEPRI

Introduction

1. **Provinsi Kepri menghadapi tantangan besar dalam memenuhi ketahanan pangan daerah** karena keterbatasan lahan pertanian, dengan hanya 2% daratan dan 98% lautan.

2. **Produksi padi di Provinsi Kepri mengalami tren penurunan setiap tahunnya,** mulai dari tahun 2018 dengan produksi sebesar 1.097 ton, menjadi 423,11 ton pada tahun 2023. Kondisi dipengaruhi oleh minimnya minat SDM usia produktif untuk menjadi petani dan semakin menyempitnya lahan pertanian akibat pembangunan daerah industri dan lahan yang dikerjasamakan kepada pihak ketiga

Perkembangan Kondisi Ketahanan Pangan di Kepri

Kondisi IKP di Provinsi Kepri

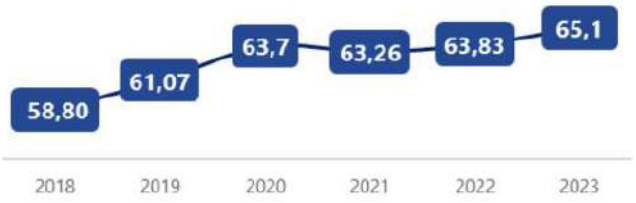

IKP Provinsi Kepri terus mengalami peningkatan, dengan pucak tertinggi pada tahun 2023 sebesar 65,10 yang berada pada urutan ke 30 nasional

Kondisi IKP di Kab/Kota Kepri

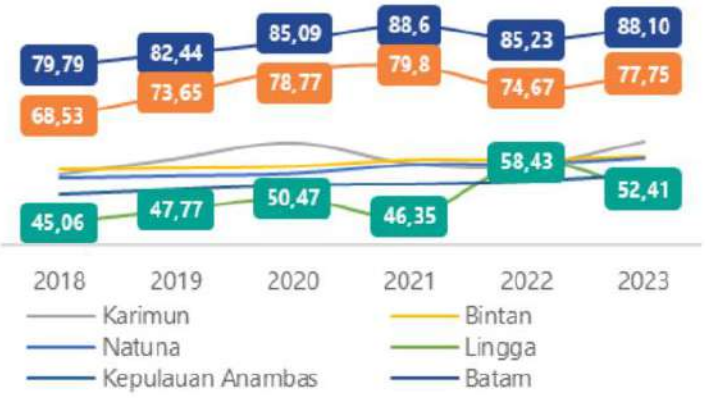

Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan

- Pemerintah turut mendorong konsumsi pangan berbasis produk lokal yang lebih beragam, seperti jagung, kedelai dan ikan, untuk menciptakan ketahanan pangan yang lebih tahan terhadap guncangan ekonomi dan perubahan iklim.
- Program ketahanan pangan di Kepri berjalan *on the track* ditunjukkan dengan hasil perikanan tangkap laut, produksi ternak, dan produksi ternak unggas yang meningkat sejak tahun 2022 s.d. 2024.
- Program peningkatan perikanan tangkap dan pengembangan peternakan sapi, kambing, domba dan ayam serta pengolahan hasil perikanan membantu menciptakan stok pangan yang lebih berkelanjutan dan dapat dijangkau oleh masyarakat setempat.

Bab I

SASARAN PEMBANGUNAN DAN TANTANGAN DAERAH

"Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya" menjadi sasaran pembangunan Kepri di tahun 2021-2026.

Nelayan di Perairan Batam,
Kota Batam

Regional Development Goals and Challenges

- Pendahuluan
- Tujuan dan Sasaran Pembangunan

1.1 Pendahuluan

Setiap daerah memiliki sebuah cita-cita pembangunan yang ingin dicapai sesuai dengan karakteristik wilayahnya. Sesuai dengan Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, Pemerintah Daerah menyinergikan kebijakan pembangunan dan kebijakan fiskal Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEMPPKF), arahan Presiden, dan peraturan perundang-undangan.

Sebagai provinsi kepulauan terbesar di Indonesia, Provinsi Kepulauan Riau (selanjutnya disebut Kepri) dihadapkan pada tantangan geografis yang memerlukan pendekatan khusus dalam mengakselerasi pembangunan di wilayahnya. Dalam konteks ini, desentralisasi fiskal menjadi krusial sebagai alat bagi pemerintah untuk memastikan bahwa distribusi anggaran yang efektif dan memadai mampu mengembangkan perekonomian dan kesejahteraan suatu daerah, termasuk di Kepri.

Implementasi desentralisasi fiskal akan menghasilkan kebijakan fiskal dan ekonomi dalam mencapai sasaran strategis daerah yang diharapkan mampu meningkatkan kondisi perekonomian dan kesejahteraan daerahnya. Untuk mendukung tujuan tersebut, perumusan sasaran pembangunan daerah harus diharmonisasikan dengan sasaran pembangunan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Pemerintah daerah, melalui Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menetapkan sasaran pembangunan sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan selama lima tahunan mendatang, dan secara tahunan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Derah (RKPD). Dengan demikian, intervensi kebijakan fiskal melalui program prioritas dapat secara langsung menjawab tantangan daerah yang dihadapi. Dalam rangka merumuskan sasaran pembangunan daerah yang efektif dan efisien, pemerintah daerah perlu memetakan tantangan-tantangan yang dihadapi baik dari sisi ekonomi, sosial-kependudukan dan geografis wilayah.

1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Dalam RPJMD Pemerintah Provinsi Kepri Tahun 2021-2026, Kepri mengusung visi "**Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya**". Visi ini menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai Kepri (*desired future*) selama lima tahun mendatang.

Dalam rangka mendukung visi tersebut, Kepri menetapkan 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah 2021-2026, yaitu:

a. **Percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis maritim**, berwawasan lingkungan dan keunggulan wilayah untuk peningkatan kemakmuran masyarakat.
b. **Melaksanakan tata kelola pemerintah yang bersih**, terbuka, dan berorientasi pelayanan.
c. **Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas**, sehat, dan berdaya saing dengan berbasis iman dan taqwa
d. **Mengembangkan dan melestarikan budaya** melayu dan nasional dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.
e. **Mempercepat konektivitas antar pulau** dan pembangunan infrastruktur kawasan

Sebagai langkah dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, Pemerintah Kepri berorientasi pada tujuh tujuan dan sasaran pembangunan Tahun 2021-2026 yang dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1 - Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kepulauan Riau

No.	Tujuan	Sasaran
1.	Optimalisasi Potensi Kemaritiman, Keunggulan Wilayah, dan Keberlanjutan Lingkungan	1. Optimalisasi Sektor Perikanan; 2. Peningkatan Sektor Pariwisata; 3. Penurunan Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup; dan 4. Optimalisasi Pemanfaatan Hutan Lestari.
2.	Percepatan Pemulihan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	1. Peningkatan PDRB pada Sektor Konstruksi, Industri Pengolahan, dan Sektor Perdagangan; 2. Peningkatan PAD; dan 3. Peningkatan Pemanfaatan Sektor Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, dan Perkebunan).
3.	Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kuat, dan Antisipatif	1. Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Teknologi Informasi yang Terbuka dan Terintegrasi; 2. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan; 3. Manajemen ASN yang Profesional; 4. Pemerintahan Provinsi Kepri yang Tanggap, Tangkas, dan Tangguh dalam Menghadapi Bencana; dan 5. Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
4.	Penguatan Jaringan Pengamanan Sosial	1. Menurunkan Angka Kemiskinan; dan 2. Masyarakat Desa yang Tangguh dan Partisipatif
5.	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berkarakter	1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat; 2. Meningkatnya Mutu dan Akses Layanan Pendidikan; 3. Meningkatnya Kualitas hidup Perempuan dan Anak; dan 4. Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Pemuda.
6.	Pembinaan Keagamaan, Pelestarian Budaya, dan Harmoni Masyarakat	1. Peningkatan Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu; dan 2. Harmonisasi antar Umat Beragama
7.	Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengintegrasian antar Pulau	1. Percepatan Pembangunan Infrastruktur dasar, 2. dan Pembangunan antar Pulau dan Pesisir.

Sumber: RPJMD Provinsi Kepri Tahun 2021-2026

Untuk mengukur kinerja pencapaian pembangunan Kepri secara kuantitatif, pemerintah daerah menetapkan sasaran indikator makroekonomi dan indikator kesejahteraan sebagaimana terlihat pada tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2 - Sasaran Indikator Kinerja Pembangunan Jangka Menengah Kepri Tahun 2021-2025

No.	Sasaran Makro Kesra	Tahun ke-1 (2021)	Tahun ke-2 (2022)	Tahun ke-3 (2023)	Tahun ke-4 (2024)	Tahun ke-5 (2025)
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	1,5 - 3,5	4,8 - 5,6	4,9 - 5,8	5,0 - 5,9	5,1 - 6,1
2.	Inflasi (%)	3,09 ±1	3,14 ±1	3,13 ±1	3,03 ±1	2,94 ± 1
3.	IPM (indeks)	76,26	76,7	77,14	77,58	78,03
4.	Kemiskinan (%)	6,07	6,01	5,74	5,69	5,63
5.	Pengangguran (%)	10,22	10,1	9,5	8,70	8,10
6.	Rasio Gini (indeks)	0,336	0,332	0,329	0,325	0,321
7.	NTP (indeks)	99,84	99,88	99,91	99,95	99,98
8.	NTN (indeks)	110,57	115	115,5	116	116,1

Sumber: RPJMD Provinsi Kepri Tahun 2021-2026 (diolah)

Selanjutnya, berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah, hal-hal tersebut dijabarkan ke dalam program dan kegiatan tahunan daerah melalui RKPD.

Mengusung tema "Pemulihan Ekonomi dengan Penguatan Jaring Pengaman Sosial melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Menjunjung Nilai-Nilai Budaya Melayu

dan Nasional", RKPD menetapkan indikator kinerja pembangunan Kepri tahun 2023 sebagaimana dapat dilihat pada tabel 1.3.

Tabel 1.3 - Perbandingan Target Indikator Kinerja Pembangunan pada Tahun 2024 antara RKP dan RKPD Kepulauan Riau

No.	Sasaran Makro Kesra	RKP 2024	RKPD 2024
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3 - 5,7	5,0 - 5,9
2.	Inflasi (%)	1,5 - 3,5	3,03 ± 1
3.	IPM (indeks)	73,99 - 74,02	77,58
4.	Kemiskinan (%)	6,5 - 7,5	5,69
5.	Pengangguran (%)	5,0 - 5,7	8,70
6.	Rasio Gini (indeks)	0,374 - 0,377	0,325
7.	NTP (indeks)	105 - 108	99,95
8.	NTN (indeks)	107 - 110	116

Sumber: RKP Tahun 2024 dan RKPD Provinsi Kepri Tahun 2024 (diolah)

1.3 Keselarasan RPJMN dengan RPJMD

Pembangunan daerah harus mendukung dan sejalan dengan pencapaian sasaran pembangunan nasional. Oleh karena itu, penyusunan RPJMD perlu diselaraskan dengan RPJMN. Misi, tujuan, serta sasaran yang disusun oleh pemerintah daerah melalui dokumen RPJMD harus mengacu pada misi, tujuan, dan sasaran nasional yang tercantum dalam RPJMN untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Keselarasan antara misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah dan nasional ditunjukkan lebih lanjut pada gambar 1.1 berikut.

Gambar 1.1 - *Mapping* Keselarasan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Provinsi Kepri

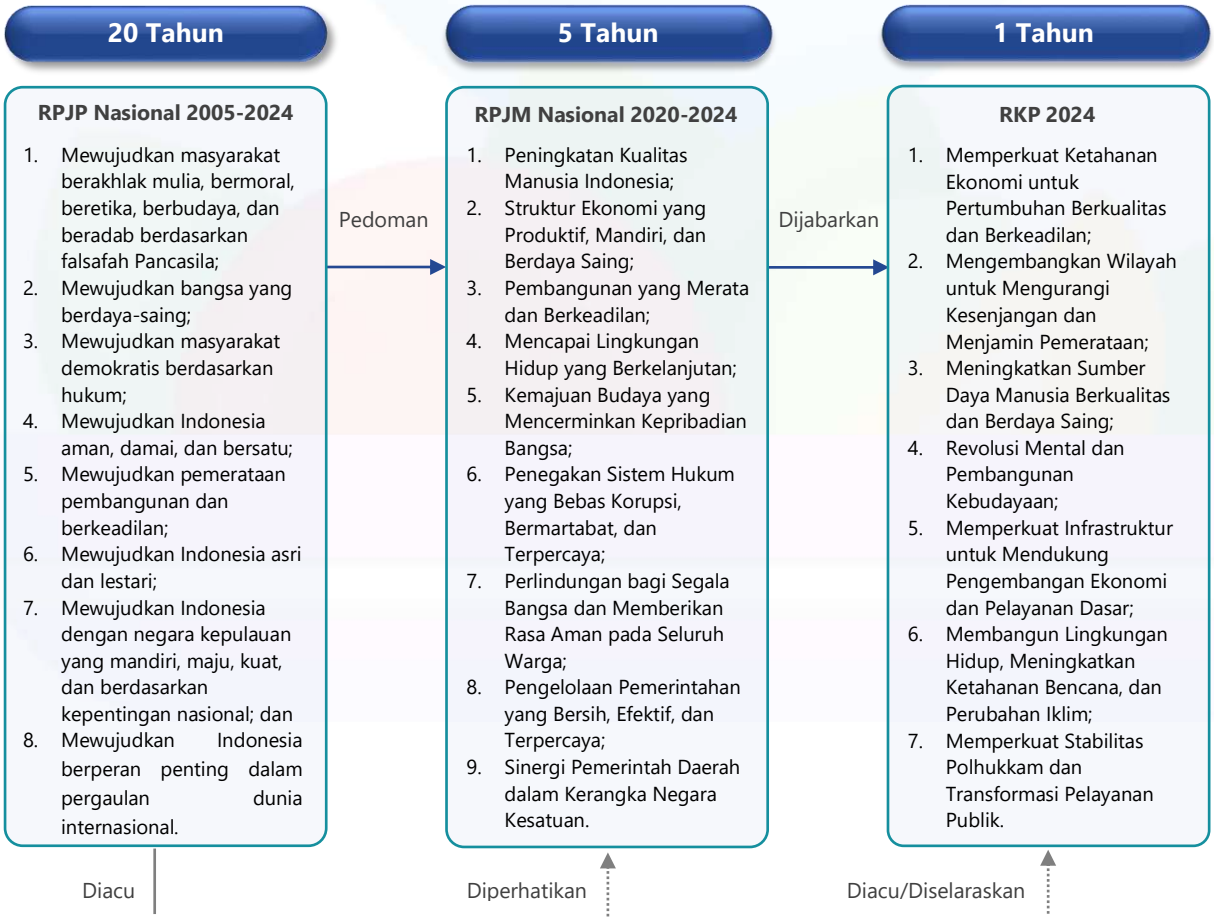

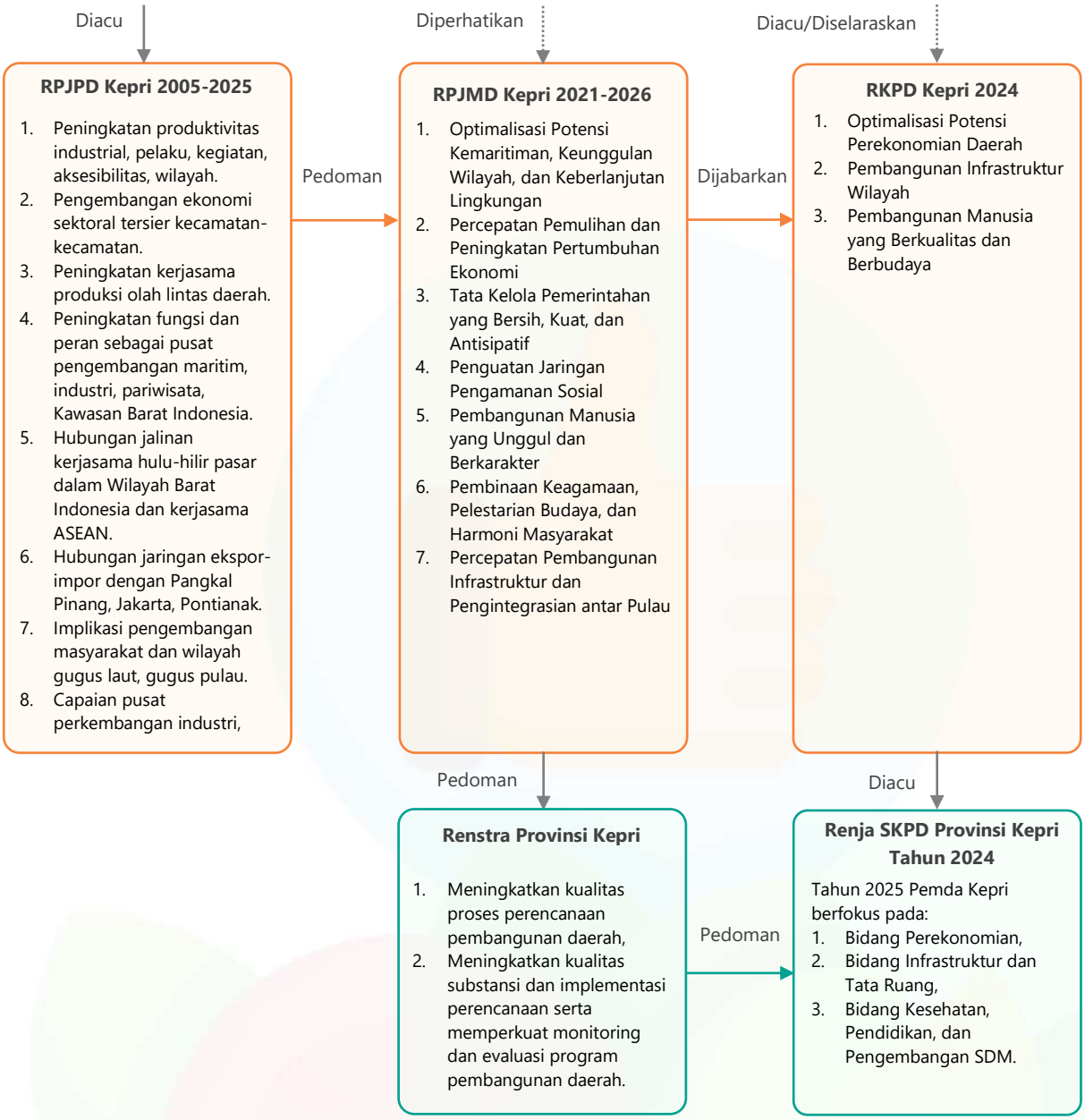

Sumber: Bappenas dan Bappeda Provinsi Kepri, 2024

Arah kebijakan/tema pembangunan RPJMN di tahun 2024 adalah "**Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Kualitas Hidup**". Sebagai titik tolak dalam mencapai sasaran visi "Indonesia Maju" di tahun 2045, RPJMN 2020-2024 menjadi pedoman untuk memperkuat proses transformasi pembangunan Nasional.

RPJMD Kepri tahun 2021-2026 disusun melalui proses harmonisasi sehingga selaras dengan RPJMN. Dengan demikian, berdasarkan *mapping* keselarasan RPJMN dan RPJMD yang telah dilakukan, **seluruh misi dalam RPJMD telah sesuai dengan misi yang ada dalam RPJMN**. Terdapat kesamaan kata kunci dalam setiap pembahasan, yang mencerminkan adanya upaya bersama dalam berbagai bidang, seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi, kualitas sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan, pembangunan infrastruktur, pelestarian budaya, serta pembangunan berkelanjutan.

Keselarasan ini memastikan bahwa pembangunan di Kepri berjalan seiring dengan arah kebijakan pembangunan nasional, yang

akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan secara lebih efektif dan terpadu.

1.4 Capaian atas Keselarasan RPJMN dengan RPJMD

Capaian atas keselarasan RPJMD Kepri dengan RPJMN menjadi krusial untuk memastikan terintegrasinya pelaksanaan pembangunan yang hendak dicapai oleh Kepri agar sejalan dengan tujuan pembangunan nasional. Keselarasan ini menunjukkan bahwa kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Kepri telah dirumuskan dengan mempertimbangkan arah pembangunan nasional, sehingga mendukung pencapaian target-target yang ditetapkan dalam RPJMN.

Pada tahun 2024, tema pembangunan daerah Kepri tahun 2024 adalah "Peningkatan Investasi dan Daya Saing Daerah untuk Kemakmuran Rakyat Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Menjunjung Nilai-Nilai Budaya Melayu dan Nasional."

Melalui sinergi ini, Kepri diharapkan dapat mencapai hasil yang optimal dalam pembangunan ekonomi, infrastruktur, sumber daya manusia, serta tata kelola pemerintahan yang baik, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ringkasan mengenai capaian atas target indikator kinerja sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD pada wilayah masing-masing yang selaras dengan RPJMN tahun 2020-2024 dapat terlihat pada tabel berikut

Tabel 1.4 – Matriks Capaian Keselarasan RPJMN dengan RPJMD Kepri Tahun 2024

No.	RPJMN (2020-2024)	RPJMD Kepri (2021-2026)	Indikator Kinerja Sasaran (RPJMD)	Keterangan Keselarasan Capaian RPJMD dengan RPJMN
1	Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia	Optimalisasi Potensi Kemaritiman, Keunggulan Wilayah, dan Keberlanjutan Lingkungan	Peningkatan IPM, Akses terhadap pendidikan di daerah pesisir	• Keselarasan pada peningkatan kualitas SDM di Kepri dengan fokus pada wilayah pesisir dan maritim. • Ditandai dengan terus meningkatnya IPM Kepri 2024 sebagai IPM tertinggi di Sumatera dan No. 3 Nasional yang mencapai 79,89 (melebihi target RPJMD). • Angka Rata Rata Lama Sekolah (RLS) di Kepri sebesar 10,50 yang sebelumnya 10,41 di tahun 2023.
2	Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing	Percepatan Pemulihan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi daerah di sektor kelautan dan perikanan	• Selaras dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui sektor maritim. • Ditandai dengan pertumbuhan ekonomi Kepri yang pada tahun 2024 tumbuh 5,02 persen (*ctc*) (memenuhi target RPJMD), khususnya di sektor perikanan yang tumbuh 18,83 persen (*qtq*) di triwulan IV 2024. • Tingkat Inflasi Kepri juga terjaga di angka 2,09 (*ytd*) di tahun 2024 (memenuhi target RPJMD). • Selanjutnya, pemerintah Kepri juga terus menggalakkan peran UMKM di sektor

No.	RPJMN (2020-2024)	RPJMD Kepri (2021-2026)	Indikator Kinerja Sasaran (RPJMD)	Keterangan Keselarasan Capaian RPJMD dengan RPJMN
				perikanan melalui dukungan pemberian permodalan dengan bunga 0%.
3	Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan	Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kuat, dan Antisipatif	Penurunan ketimpangan di daerah pesisir, peningkatan efektivitas tata kelola pemerintahan	• Keselarasan pada aspek tata kelola pemerintahan yang inklusif dan berkeadilan terus ditingkatkan di Kepri. • Salah satunya ditandai dengan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Kepri yang terus tumbuh dan di tahun 2023 mencapai 77,66 (kondisi sedang). • Untuk Tingkat Ketimpangan atau Rasio Gini Provinsi Kepri tahun 2024 masih berada di angka 0,357 (belum mencapai target RPJMD Kepri di angka 0,352).
4	Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Penguatan Jaringan Pengamanan Sosial	Peningkatan jaringan pengamanan sosial terutama di wilayah rentan	• Selaras dalam pembangunan berkelanjutan yang memprioritaskan penguatan sosial. • Salah satunya ditandai dengan peningkatan akses masyarakat rentan terhadap bantuan sosial, layanan kesehatan, pendidikan, serta program pengentasan kemiskinan.
5	Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berkarakter	Penguatan identitas budaya lokal Melayu	• Keselarasan pada pembangunan manusia yang mengedepankan budaya lokal. • Salah satunya ditandai dengan diselenggarakannya festival budaya. internasional di pulau Anambas dan Natuna. • Pemerintah Kepri juga terus melestarikan situs bersejarah sebagai daya tarik wisata.
6	Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya	Pembinaan Keagamaan, Pelestarian Budaya, dan Harmoni Masyarakat	Peningkatan transparansi pemerintahan daerah, penguatan harmoni sosial	• Keselarasan dalam penegakan hukum yang mendorong harmonisasi sosial dan budaya • Pemerintah Kepri juga terus meningkatkan layanan pemerintah melalui penerapan *good governance* di berbagai bidang. • Juga terdapat *platform e-government* seperti Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan website resmi pemda yang memuat informasi anggaran, perizinan, laporan keuangan, dan pengadaan barang/jasa secara *real-time*, yang dapat diakses oleh publik.
7	Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga	Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengintegrasian antar Pulau	Pembangunan infrastruktur antar pulau, jaringan transportasi diperluas	• Selaras dengan percepatan pembangunan infrastruktur yang meningkatkan konektivitas antar wilayah • Hal ini ditandai antara lain dengan bertambahnya jumlah infrastruktur konektivitas di Kepri seperti pelabuhan, bandara, dan jembatan. • Angka kemiskinan di Kepri juga terus mengalami penurunan, dan di Tahun 2024

No.	RPJMN (2020-2024)	RPJMD Kepri (2021-2026)	Indikator Kinerja Sasaran (RPJMD)	Keterangan Keselarasan Capaian RPJMD dengan RPJMN
				berhasil mencapai angka 4,78 persen (memenuhi target).
8	Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya	(Berkaitan dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kuat, dan Antisipatif - RPJMD No. 3)	Tata kelola pemerintahan di Kepri menjadi lebih efisien dan transparan	• Keselarasan pada aspek tata kelola pemerintahan yang inklusif dan berkeadilan terus ditingkatkan di Kepri. • Salah satunya ditandai dengan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Kepri yang terus tumbuh dan di tahun 2023 mencapai 77,66 (Kondisi Sedang). • Untuk Tingkat Ketimpangan atau Rasio Gini Provinsi Kepri tahun 2024 masih berada di angka 0,357 (belum mencapai target RPJMD Kepri di angka 0,352).
9	Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan	(Terkait dengan Infrastruktur dan Pengintegrasian antar Pulau - RPJMD No. 7)	Sinergi pembangunan antar daerah, Peningkatan kerjasama regional	• Selaras dengan percepatan pembangunan infrastruktur yang meningkatkan konektivitas antar wilayah • Hal ini ditandai antara lain dengan bertambahnya jumlah infrastruktur konektivitas di Kepri seperti pelabuhan, bandara, dan jembatan. • Angka kemiskinan di Kepri juga terus mengalami penurunan, dan di Tahun 2024 berhasil mencapai angka 4,78 persen (memenuhi target).

Sumber: RKP Tahun 2024, RKPD Provinsi Kepri Tahun 2024, BPS Provinsi Kepri 2025

Capaian sasaran strategis Kepri di tahun 2024 dapat dilihat secara rinci pada bab II KFR Tahunan 2024.

1.5 Tantangan Sasaran Pembangunan

Kondisi geografis Kepri dengan banyaknya pulau-pulau kecil yang dipisahkan oleh lautan, jarak yang jauh dari pusat kota dan pemerintahannya terkadang di-*cap* sebagai daerah pinggiran (Narotama, 2022). Hal tersebut menyebabkan Provinsi Kepri perlu memiliki pengelolaan otonomi daerah khusus kepulauan agar mampu mengembangkan wilayahnya secara inklusif.

Dalam RKPD Kepri tahun 2024, Kepri menitikberatkan beberapa isu strategis dalam pembangunan daerahnya, yaitu:

1. Potensi Maritim yang belum optimal dikembangkan;
2. Tata Kelola Pemerintahan yang Belum Optimal;
3. Kualitas Sumber Daya Manusia yang Belum Optimal;
4. Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem;
5. Disparitas antar wilayah yang Masih Terjadi;
6. Infrastruktur Wilayah yang Belum Merata; dan
7. Budaya Melayu dan Nasional yang belum berkembang.

Melalui isu strategis yang ada, pemerintah provinsi Kepri, secara teknokrat, menyepakati prioritas pembangunan daerah tahun 2024 yang berfokus dalam:

1. Mengoptimalisasi potensi perekonomian daerah
2. Membangun infrastruktur wilayah; dan

3. Membangun manusia yang berkualitas dan berbudaya

Dengan demikian, di sepanjang dekade terakhir pemerintah daerah bersama dengan pemerintah pusat telah mengedepankan pembangunan yang berfokus pada pengoptimalisasian potensi perekonomian daerah, pembangunan infrastruktur wilayah, serta peningkatan kualitas dan budaya SDM. Hal tersebut ditandai dengan akselerasi pada indikator ekonomi dan kondisi sosial-kesejahteraan masyarakat Kepri yang kian membaik. Namun demikian, perkembangan tersebut nyatanya belum dirasakan oleh seluruh masyarakat Kepri secara merata. Hal ini mengindikasikan bahwa Kepri dihadapkan pada kendala dan tantangan ekonomi yang harus ditangani secara komprehensif dan inklusif.

Pada tahun 2024, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh Kepri dalam mencapai pembangunan yang berkualitas. Tantangan-tantangan tersebut antara lain:

1.5.1 Tantangan Ekonomi Daerah

Kepri menjadi salah satu wilayah representasi utama dari identitas Indonesia sebagai negara maritim. Memiliki letak geografis strategis di rute perdagangan dunia yang melintasi Selat Malaka, Laut Natuna di Utara, Selat Karimata, serta berbatasan langsung dengan Singapura, Malaysia, Vietnam dan Kamboja, menjadikan Kepri sebagai gerbang penting bagi aktivitas perdagangan internasional.

Keunggulan geografis ini tidak hanya memperkuat peran Kepri dalam ekonomi nasional, tetapi juga menjadikannya pusat interaksi global di sektor maritim, energi, dan logistik. Selain itu, kekayaan alam yang melimpah, terutama dalam bentuk minyak, gas, dan hasil laut, semakin memperkuat daya saing ekonomi Kepri, sekaligus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarpulau di wilayah tersebut.

1. Tantangan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Penurunan jumlah produksi perikanan budidaya di Kepri menjadi tantangan dalam sektor sumber daya alam. Provinsi yang kaya akan hasil laut ini menghadapi kendala dalam menjaga dan meningkatkan produksi perikanan, yang kemungkinan disebabkan oleh perubahan lingkungan, teknologi budidaya yang kurang berkembang, atau tantangan lainnya.

Penyediaan sarana dan prasarana untuk penangkapan dan budidaya hasil laut juga masih kurang memadai, menunjukkan bahwa sektor perikanan belum didukung sepenuhnya dengan fasilitas yang dibutuhkan untuk meningkatkan produksi.

2. Tantangan Pengelolaan Iklim Investasi yang Kondusif

Tantangan utama dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif adalah ketidakmerataan penyebaran investasi, di mana sebagian besar investasi masih terpusat di Kota Batam. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam pemerataan investasi di wilayah lain di Kepulauan Riau.

Salah satu aspek yang sangat penting dalam upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif di suatu wilayah adalah peran pemerintah daerah dalam menggali potensi daerah dan melakukan riset mendalam melalui analisis *cost-benefit* yang dapat ditawarkan kepada para investor. Hal tersebut nyatanya masih sulit dilakukan oleh pemda di kabupaten terluar Kepri, seperti Kab. Lingga, Kab. Natuna, dan Kab. Kepulauan Anambas.

Tantangan ini diperburuk oleh keterbatasan SDM, terbatasnya akses terhadap pendidikan dan pelatihan yang berkualitas, kurangnya infrastruktur pendukung, serta minimnya sumber daya finansial yang diperlukan untuk pengembangan riset dan promosi investasi yang efektif. Akibatnya, potensi daerah yang seharusnya dapat dikembangkan menjadi

daya tarik bagi investor belum dapat dimanfaatkan secara maksimal.

3. Tantangan Permodalan dan Infrastruktur Ekonomi

Kuantitas dan kualitas infrastruktur di Kepri masih belum memadai. Infrastruktur ekonomi, seperti jaringan transportasi, pelabuhan, serta fasilitas logistik, memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, baik dalam skala lokal maupun global. Konektivitas antar kabupaten dan kota yang terpisah oleh lautan masih memerlukan perbaikan, terutama di pulau-pulau terluar Kepri.

Tantangan infrastruktur konektivitas seperti terbatasnya bandara, pelabuhan yang memadai, sedikitnya keberangkatan kapal penumpang/kargo, fasilitas kesehatan dan jaringan internet berkecepatan tinggi di Kab. Natuna, Kab. Kepulauan Anambas, dan Kab. Lingga menjadi kendala besar yang menghambat pergerakan ekonomi di wilayah tersebut. Khususnya, hal tersebut menghambat integrasi ekonomi dan sosial, sehingga potensi perdagangan, investasi, dan pembangunan di area perbatasan belum dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Peningkatan infrastruktur ekonomi di daerah perbatasan akan membantu untuk memperkuat daya saing wilayah ini, membuka peluang investasi, dan memperlancar arus barang serta jasa, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi Kepri secara menyeluruh.

4. Tantangan Ketenagakerjaan

Dalam hal ketenagakerjaan, penduduk usia kerja di Kepri per Agustus 2024 mencapai 1.620,20 ribu orang atau meningkat 27,74 ribu orang dibandingkan dengan Agustus 2023. Peningkatan ini bisa memberikan potensi besar untuk produktivitas, namun juga menjadi tantangan besar jika tidak diiringi dengan peningkatan kesempatan kerja yang memadai.

Tantangan ini menggambarkan tekanan terhadap pasar tenaga kerja yang belum mampu menyerap peningkatan jumlah angkatan kerja, serta perlunya pelatihan dan peningkatan keterampilan bagi penduduk usia kerja agar sesuai dengan kebutuhan industri.

1.5.2 Tantangan Sosial Kependudukan

Dalam satu dekade terakhir, pembangunan manusia di Provinsi Kepri terus mengalami kemajuan. IPM Kepulauan Riau meningkat dari 73,35 pada tahun 2014 menjadi 78,89 pada tahun 2024. Dalam rentang periode tersebut, status IPM Kepulauan Riau selalu berada dalam kategori "tinggi" dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,70 persen per tahun.

Meskipun demikian, disparitas antara kabupaten/kota di Kepri masih cukup besar. Kabupaten Lingga tetap berada di posisi terendah dengan IPM sebesar 66,57, sementara Kota Batam tetap menempati peringkat tertinggi dengan IPM sebesar 81,67. Hal ini menjadikan Kota Batam sebagai satu-satunya kabupaten/kota di Kepri yang memiliki status pembangunan manusia "sangat tinggi" (IPM ≥ 80). Dalam konteks ini, pembangunan di Kepri masih belum optimal dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di Kepri secara merata.

1. Tantangan Demografis

Sampai dengan tahun 2024, penyebaran jumlah penduduk di Provinsi Kepri tidak merata. Dengan konsentrasi penduduk Kepri sejumlah 2.183,30 ribu jiwa, lebih dari 58,48 persen penduduknya berada di Kota Batam dengan jumlah 1.276,90 ribu jiwa. sedangkan Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki jumlah penduduk terendah sebesar 49,7 ribu jiwa atau 2,27 persen dari total penduduk di Kepri. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan demografis yang dapat memengaruhi pembangunan ekonomi dan sosial di wilayah terpencil.

Pertambahan jumlah penduduk di kota Batam disebabkan oleh migrasi penduduk dari

provinsi lain di regional Sumatera dan regional Jawa yang tertarik dengan peluang kerja serta perkembangan karir di kota Batam, sebagai salah satu kota dengan UMR tertinggi di Kepri.

Di sisi lain, daerah-daerah dengan jumlah penduduk rendah, seperti Kepulauan Anambas akan terus mengalami keterbatasan akses terhadap fasilitas dasar dan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pemerataan pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan di seluruh wilayah Provinsi Kepri, tidak hanya di pusat-pusat ekonomi utama seperti Batam.

2. Ketimpangan Pembangunan Manusia

Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan ketimpangan antar wilayah, di mana pada tahun 2024 Kota Batam memiliki nilai tertinggi (83,32) sedangkan Kabupaten Lingga memiliki nilai terendah (73,05) Ketimpangan ini menandakan adanya disparitas dalam pembangunan manusia antara daerah perkotaan dan pedesaan.

Tantangan yang muncul dari ketimpangan struktur dan jumlah penduduk ini meliputi akses yang tidak merata terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi. Kota Batam, sebagai pusat industri dan ekonomi, memiliki fasilitas dan infrastruktur yang jauh lebih baik dibandingkan dengan wilayah seperti Kabupaten Lingga yang lebih banyak bergantung pada sektor primer.

3. Tantangan Budaya Masyarakat

Kepri menghadapi tantangan dalam meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengadopsi budaya global yang positif dan produktif. Di sisi lain, masih ada kebutuhan untuk memperkuat kesadaran masyarakat akan pentingnya kearifan lokal sebagai landasan dalam pembangunan daerah, serta mendorong diplomasi budaya antar suku dan antar negara.

4. Pembangunan Pendidikan

Pendidikan di Kepri masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa wilayah terpencil sulit mengakses layanan pendidikan formal dan nonformal karena kondisi geografis dan keterbatasan infrastruktur. Selain itu, angka partisipasi masyarakat untuk pendidikan menengah belum optimal, dengan Angka Partisipasi Murni (APM) sebesar 77,2% dan angka putus sekolah sebesar 0,4%. Tantangan lainnya termasuk kesenjangan dalam akses pendidikan berkualitas antara wilayah perkotaan dan terpencil.

5. Pembangunan Kesehatan

Pelayanan kesehatan di suatu daerah menjadi sangat krusial dalam memastikan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Kepri dengan banyaknya pulau-pulau yang kecil menyebabkan kurang optimalnya layanan kesehatan yang memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi. Selain itu, keberadaan layanan kesehatan yang baik juga mendukung peningkatan IPM di wilayah tersebut.

Kepri masih menghadapi Angka Kematian Ibu (AKI) yang tinggi (98 per 100.000 kelahiran hidup, naik dari sebelumnya 83 di tahun 2022), serta angka kematian bayi (AKB) Kepri di tahun 2021 sebesar 15 per 1.000 kelahiran. Kekurangan gizi pada anak balita juga menjadi masalah yang signifikan. Tantangan kesehatan ini diperburuk oleh rendahnya kesadaran masyarakat akan kesehatan ibu hamil dan balita, serta sulitnya mengakses pelayanan kesehatan yang memadai di wilayah terpencil.

6. Tantangan Ketimpangan Sosial

Masalah sosial, seperti kemiskinan, masih menjadi tantangan di Kepri. Meskipun ada program bantuan untuk keluarga miskin, seperti Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan bantuan lainnya, namun tingkat keberhasilan program ini tidak konsisten. Pada tahun 2024, pemerintah melalui

APBN telah memberikan bantuan sosial berupa Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kepri kepada 1.224 orang dengan jumlah realisasi Rp7.694,55 miliar yang disalurkan melalui Kementerian Agama (OM-SPAN, 2024).

Bantuan tersebut ternyata masih kurang memberikan dampak yang optimal bagi ketimpangan di Kepri. Hal tersebut terlihat dari angka rasio Gini di Kepri sebesar 0,357 yang masih belum mencapai target RKPD Kepri tahun 2024.

1.5.3 Tantangan *Geopolitical Conflict* di Wilayah Maritim

Kabupaten Natuna merupakan salah satu wilayah di Kepri dengan potensi SDA minyak dan gas alam tersembunyi bawah lautnya. Lokasi geografis yang dilindungi *Exclusive Economic Zone* (EEZ) tidak mampu menjaga Natuna dari eksploitasi "*beggar thy neighbour*" negara Asia Timur seperti Cina, Jepang, Korea Selatan dan Taiwan baik dari aspek ikan dan biota laut maupun migasnya.

Teori "*A deadly triangle*" terjadi di Natuna, tingginya pengeluaran keamanan untuk menjaga kedaulatan wilayah Indonesia, melimpahnya sumber daya alam yang tidak bisa dimaksimalkan karena semakin panasnya tensi perebutan EEZ dengan negara tetangga menjadikan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kab. Natuna tidak mampu berkembang (*economic growth trap)*. Usaha pemda dan pemerintah pusat tidak cukup untuk mengeluarkan Natuna dari *low-income trap*.

Sebagai respon dari keterbatasan tersebut, markas gugus tempur laut, Kantor PSO Ditjen Bea Cukai ditempatkan untuk pengamanan wilayah kelautan Natuna. Dari sisi politik, Indonesia menyepakati dengan negara ASEAN *code of conduct* terkait Laut Cina Selatan dan UNCLOS 1982 dengan negara lain.

Dalam aspek perekonomian, Teori "*A Deadly Triangle*" antara 3 faktor yaitu pertahanan, energi dan pertumbuhan ekonomi menjadi topik kajian ini. Cina yang mengalami penurunan stok energi minyak dan gas alam akibat eksploitasi suplai industri secara masif menghasilkan pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia, untuk itu Cina meningkatkan tensi eksploitasi ke negara tetangga. Mekanisme *"beggar thy neighbour"* pun terjadi.

Berdasarkan hal-hal diatas, dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Perbatasan Natuna – Indonesia dengan negara-negara lain ternyata mengakibatkan tingginya pengeluaran keamanan untuk menjaga yurisdiksi dan kedaulatan wilayah Indonesia.
2. Kemampuan perikanan nelayan Natuna tidak mampu berkembang seiring dengan konflik di daerah tengah laut dengan kehadiran kapal perikanan asing menggunakan teknologi *Distant Water Fishing Nations* (DWFN) negara Cina, Jepang, Korea Selatan dan Taiwan yang mengeksploitasi bahkan sampai melanggar komitmen perbatasan antar negara.
3. Pengeluaran untuk keamanan dan pertahanan menjadi tinggi seiring dengan tensi geopolitik dari negara tetangga yang semakin meruncing. Hal ini menggerus pendapatan Natuna baik dari PAD maupun TKD
4. Pertumbuhan ekonomi Natuna tidak semakin membaik karena adanya *trade off* antara keberkahan sumber daya alam yang melimpah namun dikuasai negara lain dan tidak dapat dimaksimalkan oleh Natuna, pengeluaran keamanan dan pertahanan yang tinggi dan kesejahteraan masyarakat yang tidak semakin membaik.

1.5.4 Tantangan sebagai Daerah Berstatus *Free Trade Zone* (FTZ)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2000 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) adalah area dalam wilayah Indonesia yang terpisah dari kawasan pabean, sehingga terbebas dari Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Cukai.

1. Kelebihan Kawasan FTZ

Pemberlakuan Kawasan Perdagangan Bebas FTZ di Kota Batam, Kabupaten Bintan, Tanjungpinang dan Kabupaten Karimun (BBK) akan membawa dampak positif bagi para investor. Dalam skema FTZ di Batam, investor dan pelaku usaha dapat menikmati berbagai keuntungan, seperti pembebasan bea ekspor dan impor, pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif khusus bagi pelaku usaha dan investor yang beroperasi di kawasan FTZ, sehingga semakin menarik bagi aktivitas investasi di wilayah tersebut.

Berdasarkan berbagai referensi, terdapat **beberapa karakteristik FTZ** sebagai daerah penyedia nilai tambah sebagai berikut:

1. Insentif bisnis dalam bentuk insentif fiskal, keuangan dan infrastruktur yang diatas rata-rata dibandingkan daerah lainnya;
2. Regulasi bisnis yang lebih fleksibel. Di sini, prosedur kepabeanan yang minimum dan sistem perizinan satu atap (ijin dan aplikasi) menjadi syarat perlu. Ketentuan terkait tenaga kerja juga hendaknya lebih fleksibel;
3. Area produksi dengan basis biaya produksi rendah yang dapat menjadi salah satu keuntungan komparatif bisnis;
4. Produksi berorientasi ekspor;
5. Paket insentif yang menarik dalam bentuk: pembebasan Bea Masuk terhadap pemasukan barang impor dan pembebasan pajak penjualan atau PPN terhadap perolehan barang yang dijual di dalam FTZ untuk keperluan produksi;
6. Pembebasan atau potongan pajak (*tax holiday or tax rebates*) terhadap industri berdasarkan penilaian tertentu dari kinerja ekspor mereka.

2. Kendala Implementasi FTZ di Kepri

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat beberapa kendala administratif yang dihadapi oleh investor dalam Implementasi FTZ di Kepri. Agus Syarif Hidayat dan Darwin Syamsulbahri dalam tulisan "Implementasi FTZ di Kepulauan Riau: Tinjauan Aspek Infrastruktur dan Investasi" (Diterbitkan BPMPD Kepri, 2010) menuliskan beberapa **kendala administratif dan kendala sosial dalam implementasi fungsi FTZ** yang dihadapi oleh investor, yaitu:

1. Proses perizinan impor dan *master list* yang rumit dan memakan waktu lama;
2. Ketidakpastian akan pengenaan pajak berganda bagi investor;
3. Disinsentif fiskal berupa perbedaan tarif pajak (*corporate income tax*) antara Indonesia dan Singapura, di mana tarif pajak Singapura lebih rendah sehingga membuat para investor cenderung memilih Singapura sebagai opsi untuk berinvestasi;
4. Proses pengurusan hak atas penggunaan lahan yang sering terhambat oleh birokrasi yang lambat atau kurang transparan;
5. Adanya resistensi dari masyarakat lokal terhadap proyek investasi yang dianggap merugikan lingkungan dan perekonomian masyarakat kecil, sehingga menimbulkan isu sosial yang memperlambat proses pembangunan dan operasional di wilayah FTZ (isu pulau Rempang-Batam, 2023-sekarang).

3. Langkah Optimalisasi FTZ

Pemberlakukan Kawasan BBK sebagai zona ekonomi khusus berupa *Free Trade Zone* dan *export processing zones* merupakan adaptasi dari negara-negara lain. Kawasan BBK merupakan salah satu area di Indonesia yang ditetapkan sebagai FTZ dan dinilai paling berkontribusi bagi Indonesia. Letak geografis

yang dekat dengan Singapura dan Malaysia menjadi tempat yang menarik bagi investor.

Konsep FTZ dengan keunggulannya sejatinya akan memberikan manfaat yang besar bagi Kepri. Namun demikian, implementasi FTZ di Kepri belum berjalan optimal karena masih terdapat beberapa keterbatasan di dalamnya. Beberapa langkah dapat diterapkan dalam mengoptimalisasikan FTZ adalah:

1. Pemerintah daerah dan badan pengelola kawasan (BP) agar meningkatkan aksesibilitas melalui penambahan infrastruktur konektivitas yang menghubungkan wilayah FTZ dengan daerah luar.
2. BP BBK, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), pemda setempat, dan Ditjen Bea Cukai dapat memaksimalkan kemudahan/insentif menarik bagi para investor, contohnya dengan mempersingkat waktu pengurusan izin investasi.
3. Dinas Ketenagakerjaan pada pemda setempat agar memberikan pelatihan kepada tenaga kerja di Batam untuk menyediakan tenaga kerja yang terampil dengan jumlah yang mencukupi.

Special Box 1

Menjelajahi Kekayaan Laut Natuna: Potensi Perikanan Tangkap yang Melimpah Ruah

Kabupaten Natuna, sebuah gugusan pulau di gerbang utara Indonesia yang menyimpan kekayaan laut yang luar biasa. Dengan luas wilayah mencapai 224.684,59 km^2, **Natuna didominasi oleh lautan seluas 222.683,29 km^2**, **menjadikannya salah satu daerah maritim terpenting di Indonesia**. Dikelilingi perairan strategis seperti Laut China Selatan serta berbatasan dengan Malaysia, Natuna memiliki posisi geopolitik yang krusial sekaligus kaya akan sumber daya perikanan.

Sebagai wilayah kepulauan dengan 154 pulau dan hanya 27 pulau yang berpenghuni, Natuna menyimpan potensi besar yang belum sepenuhnya tergarap. Karakteristik topografinya yang berbukit serta dikelilingi **hamparan laut luas menjadikannya surga bagi berbagai jenis ikan yang bernilai ekonomi tinggi**. Tidak mengherankan jika sektor perikanan menjadi sektor ekonomi unggulan di Kabupaten Natuna yang menawarkan peluang besar bagi pengembangan industri kelautan.

Potensi Perikanan Tangkap di Kabupaten Natuna Natuna

Tabel 7. Potensi dan Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan (JTB) Perikanan Tangkap di Kab. Natuna

Kelompok SDI	Potensi (ton/th)	JTB (ton/th)	Tingkat Pemanfaatan
Pelagis Kecil	536.917	375.842	0,9
Pelagis Besar	163.744	114.621	0,7
Ikan Demersal	289.300	202.510	0,8
Ikan Karang	197.580	138.306	0,5
Udang Penaeid	71.810	50.267	0,6
Lobster	1.467	734	1,1
Kepiting	3.388	1.694	1,9
Rajungan	9.804	4.902	1,2
Cumi-Cumi	32.369	22.658	0,5
Total	**1.306.379**	**911.534**	**0,70**

Sumber: Buku Saku Profil Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2024, 2025 (diolah).

Perairan Natuna didominasi oleh ikan pelagis kecil, seperti ikan kembung dan ikan selar dengan potensi mencapai 536,92 ribu ton/tahun, menjadikannya sumber daya laut terbesar di Natuna. Selain itu, ikan demersal seperti kakap dan kerapu juga memiliki potensi melimpah yang mencapai 289,30 ribu ton/tahun, merupakan jenis ikan banyak ditemukan di sekitar dasar laut berbatu dan terumbu karang. Ikan karang sendiri memiliki potensi yang tidak kalah melimpah yang mencapai 197,58 ribu ton/tahun, menegaskan kekayaan ekosistem bawah laut Natuna.

Di luar kelompok ikan, Natuna juga kaya akan udang penaeid dengan potensi mencapai 71,81 ribu ton/tahun, cumi-cumi 32,37 ribu ton/tahun, serta lobster dan kepiting yang bernilai tinggi. Dengan keberagaman biota lautnya, Natuna berpotensi menjadi pusat perikanan nasional dengan pengelolaan yang tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem.

Special Box 1

Menjelajahi Kekayaan Laut Natuna: Potensi Perikanan Tangkap yang Melimpah Ruah

Produksi Perikanan Tangkap di Kabupaten Natuna Natuna

Tabel 8. Produksi Perikanan Tangkap Kab. Natuna 2018 - 2023

Tahun	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)
2018	87.248,26
2019	104.879,81
2020	120.583,25
2021	132.632,62
2022	134.874,55
2023	135.171,42

Sumber: Buku Saku Profil Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2024, 2025 (diolah).

Perairan Natuna memiliki potensi perikanan tangkap yang sangat besar, dengan total sumber daya ikan mencapai 1,3 juta ton/tahun dengan Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan (JTB) mencapai 911,53 ribu ton/tahun. Namun demikian produksi perikanan tangkap Natuna baru mencapai 135,17 ribu ton pada tahun 2023 atau hanya 10,35% dari potensinya. Kondisi Ini menunjukkan masih terdapat ruang yang cukup besar untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya perikanan di Natuna secara optimal.

Angka produksi perikanan tangkap di Natuna menunjukan tren yang meningkat setiap tahunnya. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah turut memegang peranan penting dalam upaya peningkatan pemanfaatan potensi perikanan di Kabupaten Natun, melalui berbagai program belanja pemerintah seperti DAK Fisik.

"Success is not final, failure is not fatal: It is the courage to continue that counts."

Winston Churchill

Bab II

ANALISIS EKONOMI REGIONAL

Kinerja ekonomi di Provinsi Kepri menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. Iklim investasi yang aktif serta kegiatan di sektor industri turut dukung pertumbuhan ekonomi di Kepri.

Bawah Reserve, Kabupaten Anambas

Regional Economic Review

- Pertumbuhan Ekonomi
- Produk Domestik Regional Bruto
- Tingkat Inflasi
- Indeks Pembangunan Manusia
- Tingkat Kemiskinan
- Rasio Gini
- Tingkat Pengangguran
- Nilai Tukar Petani
- Nilai Tukar Nelayan

2.1 Analisis Perkembangan Indikator Makro Ekonomi

2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Berdasarkan Pengeluaran dan Sektor/Lapangan Usaha

A. Pertumbuhan Ekonomi (*Economic Growth*)

Gejolak dan ketidakpastian ekonomi global di sepanjang tahun 2024 membawa risiko pelemahan ekonomi di berbagai belahan dunia. Dinamika ekonomi global seperti eskalasi tensi perang dagang US dan China, perang tarif impor dari kebijakan presiden US, perang Rusia dan Ukraina yang masih berlangsung, volatilitas nilai tukar dan suku bunga *The Fed* yang masih bertahan di level yang tinggi di kisaran 4,5%-4,75% dengan tujuan untuk untuk menekan inflasi di US, serta melemahnya prospek pertumbuhan ekonomi global turut memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian domestik.

Meskipun dihadapkan dengan ketidakpastian global dan *outlook* pertumbuhan ekonomi yang relatif *stagnan*, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri mampu melanjutkan tren pertumbuhan yang positif.

Grafik 2.1 – Perkembangan Pertumbuhan Perekonomian Kepri Tahun 2020 – Q4 2024 (% *yoy*)

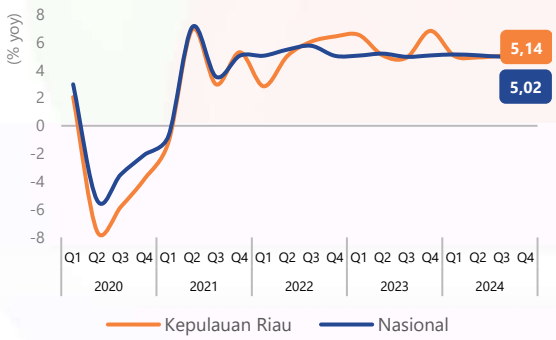

Sumber: BPS Kepri, 2025 (diolah)

Pada triwulan IV 2024, pertumbuhan ekonomi Kepri tercatat tumbuh positif sebesar 5,14 persen (*yoy*). Angka pertumbuhan positif tersebut mencerminkan kestabilan perekonomian di Kepri yang tetap menunjukkan kinerja positif. Di sisi lain, bila dibandingkan antara angka pertumbuhan ekonomi Nasional dan Kepri masing-masing sebesar 5,02 persen (*yoy*) dan 5,14 persen (*yoy*), pertumbuhan ekonomi Kepri tumbuh lebih tinggi dibandingkan Nasional.

Grafik 2.2 – Grafik Perkembangan Pertumbuhan Perekonomian Kepri Tahun 2019 – Q4 2024 (%qtq)

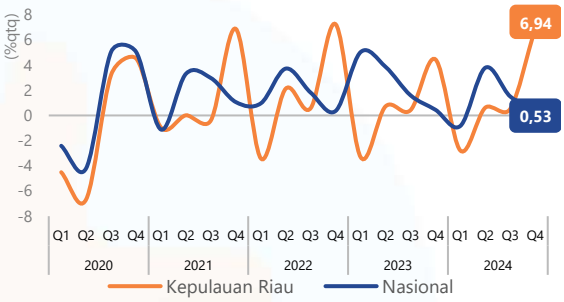

Sumber: BPS Kepri, 2025 (diolah)

Jika melihat perkembangan pertumbuhan ekonomi Kepri secara triwulanan, pertumbuhan ekonomi Kepri menunjukkan tren yang fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, **perekonomian Kepri tumbuh menjadi yang tertinggi di Sumatera yaitu sebesar 6,94 persen (*qtq*).**

Grafik 2.3 – Grafik Perkembangan Pertumbuhan Perekonomian Kepri Tahun 2019 - 2024 (*%ctc)*

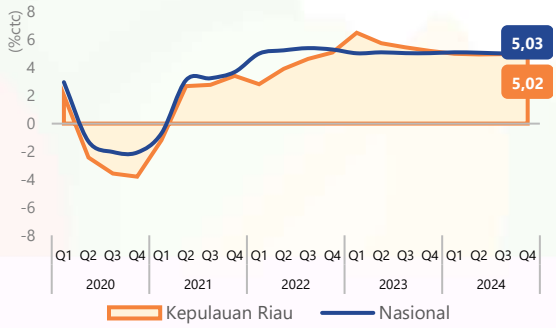

Grafik 2.4 – Pertumbuhan Ekonomi Regional Sumatera Triwulan IV 2024 (*%ctc)*

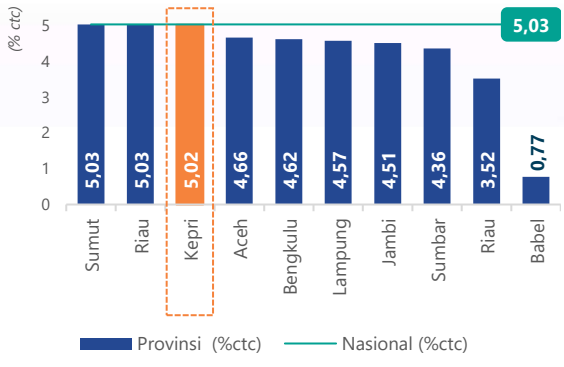

Sumber: BPS Kepri, 2025 (diolah)

Dengan capaian **pertumbuhan ekonomi kumulatif di tahun 2024 sebesar 5,02 persen (*ctc*), provinsi Kepri menempati peringkat ke-tiga sebagai provinsi dengan angka pertumbuhan tertinggi di regional Sumatera**. Perekonomian tersebut memberikan kontribusi sebesar 7,42 persen dari total pertumbuhan ekonomi di Regional Sumatera, tumbuh 0,42 persen poin dibandingkan dengan triwulan IV 2024.

Capaian kinerja ekonomi tersebut sekaligus menjadikan Kepri sebagai Provinsi dengan pertumbuhan ekonomi yang tertinggi ke-3 di Sumatera dengan angka pertumbuhan sebesar 5,02 persen (*ctc*) setelah Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Sumatera Utara dengan pertumbuhan yang sama sebesar 5,03 persen (*ctc*).

B. Nominal dan Pertumbuhan PDRB Berdasarkan Pengeluaran dan Lapangan Usaha

Grafik 2.5 – Perkembangan Nominal PDRB ADHK dan PDRB ADHB Kepri Tahun 2019-Q4 2024 (dalam Miliar Rupiah)

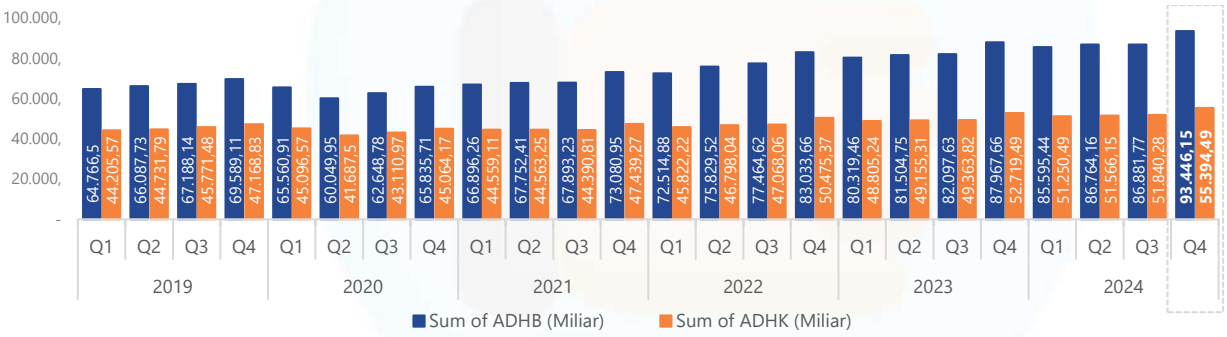

Sumber: BPS Kepri, 2025 (diolah)

Pertumbuhan ekonomi regional dinilai dengan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu periode. Secara nominal, PDRB terbagi atas dua kategori, yaitu PDRB Angka Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK).

Pada triwulan IV 2024, perekonomian Kepri tumbuh 5,14 persen (*yoy*) dengan nominal **PDRB ADHK sebesar Rp55.394,49 miliar dan PDRB ADHB sebesar Rp93.446,15 miliar.**

1) PDRB berdasarkan Pengeluaran

PDRB berdasarkan Pengeluaran diukur dari penjumlahan nilai barang dan jasa yang dikonsumsi oleh pengguna akhir. Pada triwulan IV 2024, PDRB Kepri dari sisi Pengeluaran secara signifikan didominasi oleh **Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau Investasi dengan *share* 44,42** persen dari total PDRB yang tumbuh 5,41 persen (*qtq*) dan 5,63 persen *(yoy)*.

Grafik 2.5 – *Share* PDRB Berdasarkan Pengeluaran Triwulan IV 2024 (%*yoy*)

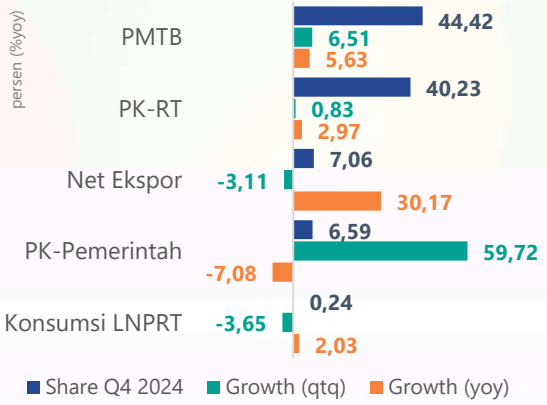

Sumber: BPS Kepri, 2024 (diolah)

a) Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

PMTB dengan *share* kontribusi 44,42 persen (*yoy*) mendominasi komponen PDRB Kepri di triwulan IV 2024. Berbeda dengan profil PDRB pada provinsi lain maupun nasional yang

didominasi pengeluaran rumah tangga, hal ini menunjukkan kinerja positif investasi di Kepri yang terus tumbuh, baik dari sisi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA).

PMTB menjadi pengungkit perekonomian Kepri yang cukup rawan terimbas oleh negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Vietnam. PMTB tumbuh positif pada kelompok barang modal bangunan & konstruksi, mesin dan perlengkapan, serta alat transportasi. Pertumbuhan komponen PMTB juga tergambar dari realisasi Belanja Modal APBN yang sampai dengan 31 Desember 2024 mengalami pertumbuhan positif sebesar 34,07 persen (*yoy*).

b) Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT)

PK-RT pada triwulan IV 2024 berkontribusi 40,23 persen dari PDRB Kepri dan tumbuh 2,97 persen (*yoy*). Pertumbuhan ekonomi pada komponen PK-RT sejalan dengan meningkatnya mobilitas aktivitas ekonomi masyarakat yang dipengaruhi oleh menggeliatnya jumlah kunjungan wisman dan wisnus di Kepri sebanyak 3.491.947 perjalanan atau tumbuh 52,12 persen (*yoy*).

Hal tersebut turut mendorong peningkatan meningkatkan permintaan di berbagai sektor usaha karena tingginya mobilitas masyarakat sehingga menjadi stimulus aktivitas ekonomi, khususnya pada kelompok transportasi, komunikasi, serta hotel dan restoran. Pergerakan ekonomi pada PK-RT juga ditandai dengan meningkatnya daya beli masyarakat dengan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) di bulan Desember 2024 yang terjaga pada angka 127,72.

c) Net Ekspor

Komponen net ekspor pada triwulan IV 2024 berkontribusi 7,06 persen *(yoy)* dari total PDRB Kepri. Bila dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya, komponen net ekspor menjadi komponen dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dengan *growth* sebesar 30,17 persen *(qtq)*. Pertumbuhan tersebut turut didorong oleh kembali bangkitnya kegiatan proyek migas (*on stream*) seperti hasil minyak dan minyak mentah di Kabupaten Natuna.

Secara kumulatif di tahun 2024, nilai ekspor Kepri tercatat sebesar US$19.559,72 juta, dengan aktivitas yang didominasi oleh kelompok industri, berkontribusi sebesar 80,50 persen dari total nilai ekspor tahun 2024. Dominasi kelompok industri ini menunjukkan bahwa sektor manufaktur memainkan peran utama dalam pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

Selanjutnya, di sisi impor, nilai impor pada tahun 2024 tercatat sebesar US$17.059,71 juta. Capaian tersebut juga didominasi oleh kelompok industri dengan kontribusi sebesar 84,19 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan bahan baku dan barang modal sebagai penunjang sektor industri, mendukung peningkatan produksi serta ekspor sangat besar.

d) Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P)

Pada periode triwulan IV 2024, komponen **PK-P mencatat kontribusi yang signifikan sebesar 6,59 persen (*yoy*)** terhadap total PDRB Kepri. Lebih terlihat menonjol dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, PK-P berhasil melonjak tajam dengan pertumbuhan sebesar 59,72 persen (*qtq*) dan hal ini didorong oleh akselerasi belanja pemerintah yang dominan dibayarkan di akhir tahun anggaran.

Walaupun realisasi Belanja Negara di triwulan IV mengalami peningkatan dibandingkan triwulan III 2024, realisasi Belanja Negara di tahun 2024 mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2023. Dengan total realisasi sebesar Rp17.166,89 miliar, Belanja Negara justru turun 4,24 persen (*yoy*) dimana sebagian besar disebabkan oleh

kebijakan efisiensi belanja pemerintah yang mulai diterapkan pada triwulan IV 2024.

Sementara itu, dari sisi APBD, realisasi Belanja Daerah hingga 31 Desember 2024 mencapai Rp13.454,68 miliar dan menunjukkan pertumbuhan moderat sebesar 1,60 persen (*yoy*).

2) PDRB berdasarkan Lapangan Usaha

PDRB menurut Lapangan Usaha (LU) dihitung dengan menjumlahkan nilai tambah dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh LU-LU yang mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Pada triwulan IV 2024, secara umum lapangan usaha di Kepri tumbuh positif (*yoy*).

Grafik 2.6 – *Share* PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha Triwulan IV 2024 (%*yoy*)

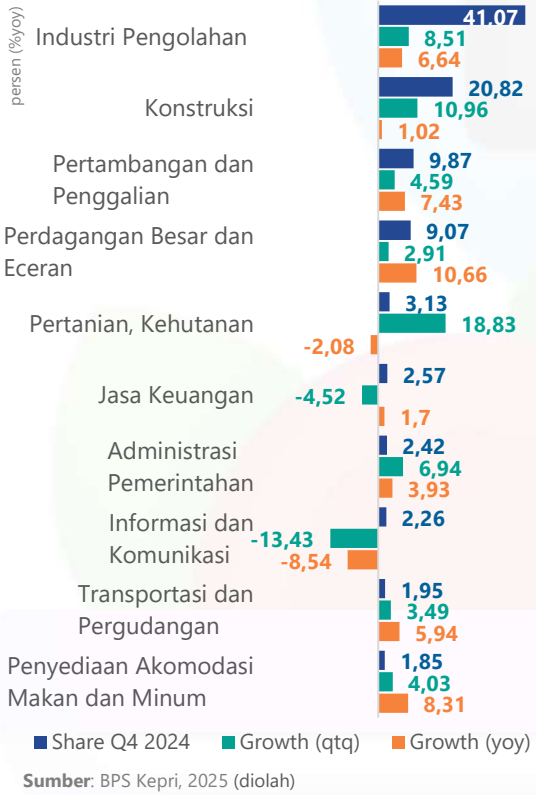

Sumber: BPS Kepri, 2025 (diolah)

Sebagai *leading sectors* perekonomian Kepri, industri pengolahan konsisten menjadi LU dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kepri sebesar 41,07 persen (*yoy*) pada triwulan IV 2024. Komponen LU lain dengan distribusi terbesar terhadap PDRB disusul oleh LU konstruksi dan pertambangan dan penggalian yang masing-masing berkontribusi sebesar 20,82 persen (*yoy*) dan 9,87 persen *(yoy)*.

a) Industri Pengolahan

Pada triwulan IV 2024, industri pengolahan berkontribusi sebesar 41,07 persen (*yoy*) terhadap nilai PDRB di Kepri. Pertumbuhan ekonomi pada sektor industri pengolahan ditopang dari konsistensi permintaan barang tingkat domestik dan mancanegara. Hal tersebut kemudian meningkatkan aktivitas ekonomi di Kepri.

Perkembangan LU industri pengolahan juga ditunjukkan dengan tumbuhnya penjualan listrik untuk konsumsi listrik segmen industri yang tumbuh 19,50 persen (*yoy*) di Triwulan IV 2024 (PLN Batam, 2025). Investasi pada industri pengolahan di Kepri turut didorong oleh peran penting Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam memberikan insentif fiskal, terutama di **Zona Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)** serta perkembangan infrastruktur di Kepri. Hadirnya *Foreign Direct Investment* (FDI) dari negara tetangga, khususnya Singapura, Tiongkok, dan Jepang yang turut memperkuat momentum perkembangan LU industri pengolahan di Kepri.

b) Konstruksi

LU konstruksi pada triwulan IV yang tumbuh 1,02 persen (*yoy*) berhasil memberikan kontribusi sebesar 20,82 persen (*yoy*) terhadap PDRB Kepri. Perkembangan LU konstruksi di Kepri sejalan beberapa output strategis APBN di Kepri, seperti dilaksanakannya Pembangunan *Rempang Eco City* di Kota Batam, Pembangunan Jembatan Trans pada 18 pulau di Kabupaten Natuna, Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya di Kota Tanjungpinang, Pembangunan Bandar Udara Letung di Kabupaten Anambas yang telah memasuki tahap II serta proyek pembangunan strategis Kepri lain yang sedang dibangun.

Selanjutnya, di Kepri juga terdapat **mega proyek Jembatan Batam-Bintan** yang telah memasuki tahap pengeboran laut. Jembatan ini merupakan proyek besar yang berfungsi sebagai jalur transportasi dan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi antara Batam dan Bintan.

c) Pertambangan dan Penggalian

LU pertambangan dan penggalian menjadi LU dengan kontribusi terbesar ketiga terhadap PDRB Kepri di triwulan IV 2024 dengan *share* sebesar 9,87 persen (*yoy*). Kinerja perekonomian pada pertambangan dan penggalian menjadi LU dengan pertumbuhan tercepat pada triwulan IV 2024 yang tumbuh 7,43 persen (*qtq*). Hal tersebut didorong oleh perusahaan migas yang kembali beroperasi di Perairan Kepri. Pertumbuhan PDRB dari LU pertambangan dan penggalian akhir periode 2024 didrongkak oleh proyek tambang OPL Belida yang *onstream* di akhir Oktober 2024 dan proyek tambang Forel yang *onstream* di Desember 2024.

d) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor

Kinerja LU perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor berkontribusi 9,07 persen (*yoy*) terhadap PDRB Kepri pada triwulan IV 2024 dan tumbuh 10,66 persen (*yoy*). LU perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor menjadi salah satu LU yang perlu diwaspadai akibat adanya penurunan *demand* dari negara mitra dagang utama seperti China dan Singapura. Pelemahan ekonomi global memberikan berdampak signifikan terhadap penurunan volume perdagangan dan konsumsi barang di Kepri.

2.1.2 Tingkat Inflasi

1) Pergerakan Inflasi di Kepri

Pergerakan inflasi (*yoy*) sepanjang tahun 2024 menunjukkan tren penurunan dalam tiga tahun terakhir. Tren inflasi menunjukkan terjadinya peningkatan di sisi permintaan (*demand side*) pada bulan-bulan yang bertepatan dengan perayaan hari besar keagamaan, seperti Bulan Puasa, Idul Fitri, Natal, Tahun Baru, serta masa liburan sekolah. Selain itu, faktor penawaran (*supply side*) seperti tingginya curah hujan dan berakhirnya masa panen juga berkontribusi terhadap inflasi, terutama akibat **terbatasnya pasokan bahan makanan di Kepri yang secara geografis terdiri dari ribuan pulau-pulau.**

Pergerakan inflasi di sepanjang tahun 2024 menunjukkan tren yang menurun. Inflasi menjadi alat untuk memahami stabilitas ekonomi di suatu wilayah, khususnya dalam melihat potensi dan kemampuan daya beli masyarakat. Pada tahun 2024, tekanan inflasi di Kepri dihitung dari 2 kota dan 1 kabupaten (Kota Batam, Kota Tanjungpinang, dan Kabupaten Karimun).

Grafik 2.7 – Perkembangan Inflasi Kepri Tahun 2022-2024 (% *yoy*)

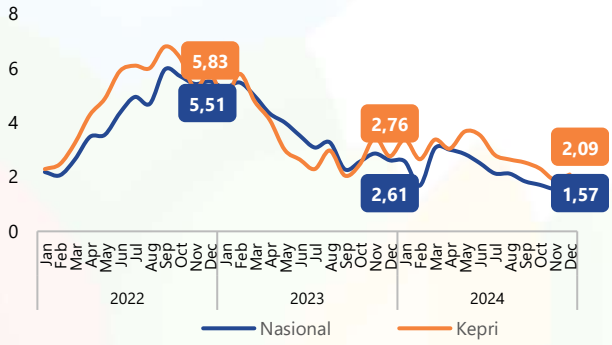

Sumber: BPS Kepri, 2025, (diolah)

Pada bulan Desember 2024, Kepri mengalami inflasi sebesar 2,09 persen (*yoy*) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 107,35. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Batam sebesar 2,24 persen dengan IHK sebesar 107,71 dan terendah terjadi di Kota Tanjungpinang sebesar 1,53 persen dengan IHK sebesar 105,73. Sementara untuk Kabupaten Karimun, inflasi tercatat sebesar 1,57 persen dengan IHK sebesar 106,42. **Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi terbesar bulan Desember 2024 (*yoy*) adalah emas perhiasan**

(0,40 persen), tarif listrik (0,26 persen), tarif parkir (0,18 persen), beras (0,15 persen), dan sigaret kretek mesin (0,10 persen).

Jika dilihat secara lebih rinci, **inflasi yang terjadi di Kepri disebabkan oleh adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya harga 8 (delapan) indeks kelompok pengeluaran**. Tiga kelompok terbesar yang dominan menyumbang angka inflasi terbesar Kepri di bulan Desember 2024 adalah kelompok makanan, minuman dan tembakau dengan andil inflasi 0,72 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,46 persen; serta kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,42 persen.

Tabel 2.1 – Rincian Andil Infasi Bulan Desember 2024 per Komoditas (*%yoy*)

No.	Rincian	Inflasi Desember 2024 (*%yoy*)	Andil Inflasi Desember 2024 (*%yoy*)
Inflasi Umum		**2,09**	**2,09**
1	Makanan, Minuman, dan Tembakau	2,46	0,72
2	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	7,53	0,46
3	Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	2,65	0,42
4	Transportasi	2,13	0,3
5	Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	1,42	0,13
6	Pakaian dan Alas Kaki	2,11	0,1
7	Kesehatan	4,24	0,1
8	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	0,38	0,01
9	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	-0,22	-0,01
10	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-0,1	-0,01
11	Pendidikan	-1,84	-0,13

Sumber: BPS Kepri, 2025 (diolah)

Sementara itu, terdapat kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan IHK yaitu: kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga turun sebesar 0,22 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan turun sebesar 0,10 persen; serta kelompok pendidikan turun sebesar 1,84 persen.

Grafik 2.8 – Perkembangan Inflasi Kepri Tahun 2022-2024 (*%mtm*)

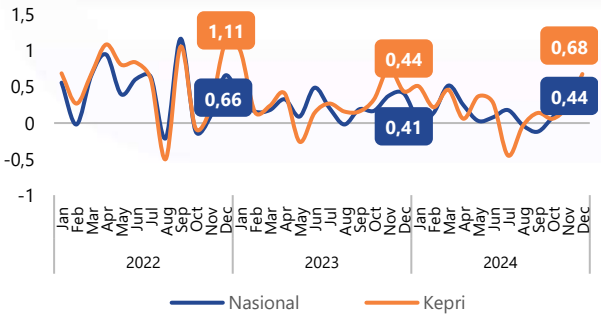

Sumber: BPS Kepri, 2025 (diolah)

Dibandingkan dengan bulan November 2024, inflasi di Kepri pada bulan Desember 2024 tercatat sebesar 0,68 persen (*mtm*). Inflasi ini terjadi karena adanya peningkatan IHK dari 106,63 pada November 2024 menjadi 107,35 pada Desember 2024.

Grafik 2.9 – Inflasi pada Provinsi di Regional Sumatera per Desember 2024 (*%ytd*)

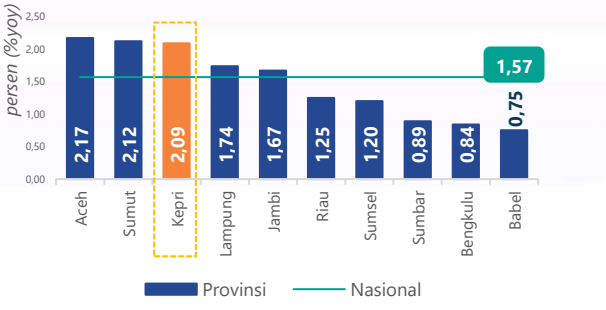

Sumber: BPS Kepri, 2025 (diolah)

Secara kumulatif (*ctc*), inflasi Kepri pada tahun 2024 berada pada peringkat ketiga di regional Sumatera dengan tingkat inflasi sebesar 2,09 persen (*ctc*). Pencapaian ini terutama disebabkan oleh tantangan logistik dan distribusi yang dihadapi wilayah kepulauan, yang kerap menyebabkan kenaikan harga barang, terutama bahan makanan dan kebutuhan pokok. **Keterbatasan pasokan karena faktor geografis dan cuaca yang ekstrem**, seperti tingginya curah hujan, turut berkontribusi terhadap tekanan harga di pasar lokal.

Selain itu, **kenaikan harga bahan bakar dan biaya transportasi juga memengaruhi inflasi di Kepri.** Sebagai wilayah yang mengandalkan distribusi barang dari luar, setiap peningkatan pada sektor transportasi berdampak langsung pada harga barang dan jasa. Faktor eksternal, seperti fluktuasi harga komoditas internasional, serta kebijakan pemerintah yang memengaruhi harga energi, turut memperburuk kondisi inflasi di tahun 2024.

Pengendalian inflasi di Provinsi Kepri di sepanjang tahun 2024 Kepri menunjukkan sinergi yang optimal. Sinergi antar instansi dan lembaga dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus ditingkatkan dan diperkuat sebagai upaya pengendalian inflasi di tengah peningkatan tekanan inflasi global dan dinamika pasokan domestik menjelang libur Natal dan Tahun Baru yang rentan akan gangguan logistic akibat cuaca ekstrim.

Berbagai upaya dilakukan dalam kerangka 4K yaitu, memastikan Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Upaya pengendalian yang telah dilakukan antara lain:

A. Keterjangkauan Harga

1. Mengoptimalkan Gerai Pangan dan Koperasi mitra TPID untuk penjualan hasil panen petani seperti cabai merah dan sayuran, serta hasil ikan.
2. Melaksanakan pasar murah dan Gerakan Pangan Murah di berbagai titik di seluruh Kab/Kota di wilayah Kepri, penyelenggaraan Operasi Pasar Murah dan Gerakan Pangan Murah menjelang HBKN sebanyak 25 kali menjelang HBKN Idulfitri di berbagai Kab/Kota di Kepri.

B. Ketersediaan pasokan

1. Melakukan pemantauan intensif untuk memastikan ketersediaan stok bahan pangan pada Bulog, distributor, serta di pasar termasuk mengantisipasi pengoplosan daging sapi segar dengan daging beku baru.
2. Melaksanakan sekolah lapang pertanian cabai yang bekerja sama dengan Korem 033 Wira Pratama Kepri kepada 63 petani disertai pemberian bantuan teknis di lahan seluas 2 Ha.
3. Penanaman Serentak Gerakan Sekolah Menanam (GSM) Cabai di 100 SMA/SMK se-Kepri sebanyak 25.000 bibit.
4. Monitoring budidaya cabai merah di Koperasi Plasma Agri Kundur Kab. Karimun dan menyerahkan bantuan bibit cabai kepada PKK di Kota Batam dan Tanjungpinang masing-masing sebanyak 5.000 bibit yang mendukung pertanian rumah tangga.

C. Kelancaran Distribusi

1. Mengoptimalkan KAD antara lain melalui penguatan peran BUMD dalam pengendalian inflasi dengan mendatangkan cabai dari Sulawesi Utara.
2. Pengawasan dan pemantauan *Domestic Market Obligation* (DMO) minyak goreng di tingkat provinsi maupun kabupaten/ kota serta pengawasan terhadap jalur distribusi.
3. Memastikan kelancaran transportasi laut dan melakukan pemantauan agar tidak terjadi spekulasi harga angkutan laut
4. Dukungan prioritas bongkar muat kapal angkutan bahan pokok dan penjaminan sertifikasi komoditas pangan yang masuk ke wilayah Kepri dan melaksanakan *business matching* antara distributor di Kepri dengan produsen di daerah lain

D. Komunikasi efektif

1. Melaksanakan koordinasi dan sinergi melalui kegiatan data *High Level Meeting* (HLM) TPID Provinsi/Kota/Kab dan melakukan pengendalian ekspektasi masyarakat dengan mendiseminasikan kecukupan pasokan, kewajaran harga serta mengampanyekan Himbauan Belanja Bijak melalui TV, radio, media sosial, dan *flyer* selama periode Ramadan dan HBKN Idulfitri

2. Melaksanakan Koordinasi dan Sinergi Program antara lain melalui kegiatan Musrenbang, Bimbingan Teknis (Bimtek) Kerangka Ekonomi Makro Daerah oleh Bappeda Provinsi Kepri, Rapat Koordinasi, talkshow di media cetak, online serta televisi untuk menjaga ekspektasi masyarakat.

2.2 Analisis Perkembangan Indikator Kesejahteraan/Pembangunan

2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas pembangunan manusia dalam suatu wilayah atau negara. **IPM Kepri pada tahun 2024 sebesar 79,89 atau tumbuh sebesar 0,81 persen point (*yoy*).**

Grafik 2.10 - Perkembangan IPM Kepri, Nasional, dan Target Tahun 2020-2024

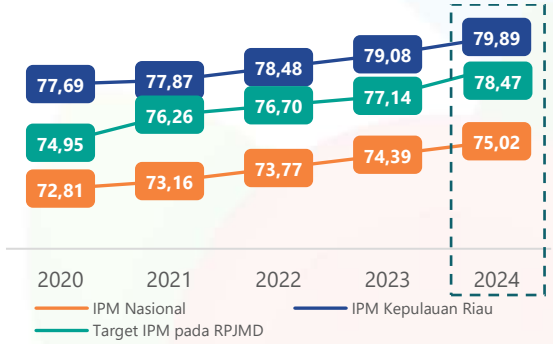

Sumber Data: BPS, 2024 (diolah)

Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan IPM Nasional dengan capaian indeks 75,02 tahun 2024. Kemudian, IPM Kepri di tahun 2023 juga telah melampaui angka IPM yang ditargetkan dalam RPJMD Kepri 2021-2026 yaitu 78,47. Bahkan sejak tahun 2010, status pembangunan manusia di Kepri sudah berada di level "tinggi".

IPM dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, IPM < 60 (rendah), 60 ≤ IPM < 70 (sedang), 70 ≤ IPM < 80 (tinggi), IPM ≥ 80 (sangat tinggi).

Grafik 2.11 - Perkembangan IPM Provinsi Kepri, Nasional, dan Regional Sumatera Tahun 2020-2024

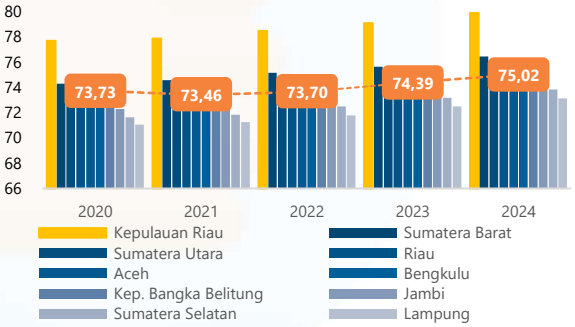

Sumber Data: BPS, 2024 (diolah)

Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Regional Sumatera, **IPM Kepri berada pada peringkat tertinggi selama enam tahun** berturut-turut. Selanjutnya disusul oleh Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau, Aceh, Bengkulu, Kep. Bangka Belitung, Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung secara berturut-turut. Capaian tersebut merupakan prestasi bagi **Kepri yang berhasil menjadi provinsi dengan IPM tertinggi pada Regional Sumatera selama lima tahun berturut-turut.**

Grafik 2.12 – Nilai IPM Kabupaten/Kota di Kepri per Kategori IPM Tahun 2020 – 2024

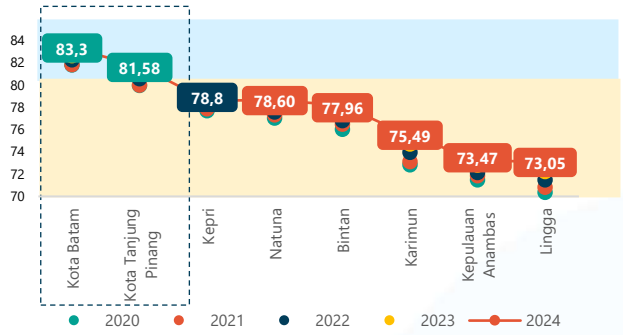

Sumber Data: BPS, 2024 (diolah)

Grafik 2.13 – Nilai Indikator Indeks Pembangunan Manusia di Kepri Tahun 2020-2024

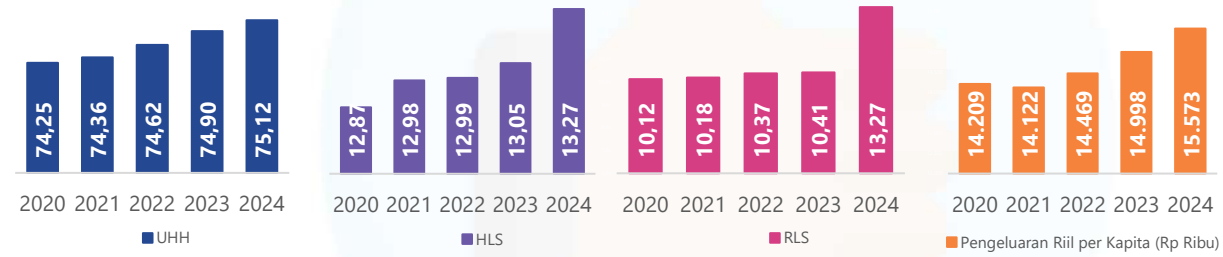

Sumber Data: BPS, 2024 (diolah)

Selanjutnya, berdasarkan kategori IPM yang terdapat pada Grafik 2.28, dapat dilihat bahwa profil IPM di sepanjang tahun 2020-2024 pada seluruh kab/kota di Provinsi Kepri terbagi atas kategori Tinggi dan Sangat Tinggi. Kota Batam dan Kota Tanjungpinang menjadi Kota dengan kategori IPM "Sangat Tinggi" ≥ 80 dengan IPM di tahun 2023 masing-masing sebesar 83,32 dan 81,58. Keberlanjutan peningkatan IPM Kepri menunjukkan adanya perbaikan kesejahteraan masyarakat Kepri.

Unsur IPM terbentuk dari tiga dimensi utama, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pendidikan (*knowledge*), serta standar hidup layak (*decent standard of living*).

Ketiga dimensi ini diukur menggunakan beberapa indikator: umur panjang dan hidup sehat diukur dengan Umur Harapan Hidup (UHH), dimensi pendidikan diukur dengan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), sementara standar hidup layak diukur dari pendapatan per kapita riil yang telah disesuaikan dengan daya beli (*Purchasing Power Parity*/PPP) di wilayah yang bersangkutan, atau melalui pengeluaran per kapita.

UHH penduduk Kepri pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,29 persen (*yoy*), menjadi 75,12 dari sebelumnya 74,90. Peningkatan UHH ini menunjukkan bahwa bayi yang baru lahir memiliki harapan hidup hingga usia 75,12 tahun.

HLS di Kepri pada tahun 2024 tumbuh 1,69 persen menjadi 13,27 tahun dari yang sebelumnya 13,05 tahun. Peningkatan HLS ini menunjukkan bahwa anak-anak usia 7 tahun ke atas memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,27 tahun.

Lebih lanjut, **RLS di Kepri tahun 2024 juga mengalami peningkatan yang telah mencapai 10,50 persen**, tumbuh 0,86 persen (*yoy*). Hal mengartikan bahwa terdapat perubahan sosial budaya dan ekonomi yang turut mendukung masyarakat untuk dapat memiliki akses ke pendidikan lebih lama, baik pada pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Hal ini mengartikan bahwa terdapat perubahan sosial budaya dan ekonomi yang turut mendukung masyarakat untuk dapat memiliki akses ke pendidikan lebih lama.

Peningkatan juga terjadi pada **pengeluaran per kapita** yang tumbuh sebesar 3,83 persen di tahun 2024 (*yoy*) yang menandakan adanya peningkatan pengeluaran masyarakat Kepri, baik dari sisi konsumsi maupun sisi investasi. Kondisi masyarakat Kepri yang membaik tergambar

melalui keempat indikator pembentuk IPM yang terus meningkat sejak tahun 2020 hingga 2024.

Pemerintah melalui APBN telah mengalokasikan sumber daya yang signifikan untuk meningkatkan IPM di Kepri khususnya untuk mendukung Bidang Kesehatan dan Bidang Pendidikan.

Sampai dengan 31 Desember 2024, **Belanja Fungsi Kesehatan** telah direalisasikan sebesar Rp209,71 miliar atau tercapai 97,71 persen dari Pagu tahun 2024. Belanja tersebut difokuskan pada Program Kesehatan Masyarakat, Pelayanan Kesehatan dan JKN, Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

Pada tahun 2024, **Belanja Fungsi Pendidikan** di Kepri difokuskan untuk kegiatan Peningkatan Kualitas Dan Kapasitas Perguruan Tinggi Vokasi. Sampai dengan akhir tahun 2024, Belanja Fungsi Pendidikan telah direalisasikan sebesar Rp952,12 miliar atau mencapai 99,40 persen dari Pagu tahun 2024. Belanja tersebut difokuskan pada peningkatan Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran, Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan, Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, Pendidikan Tinggi, serta Program Perpustakaan dan Literasi.

Selain itu, melalui **Belanja Transfer ke Daerah** (TKD) tahun 2024, pemerintah telah mengalokasikan DAK Non Fisik untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS), BOP PAUD dan BOP Kesetaraan dengan Pagu masing-masing sebesar Rp594,55 miliar, Rp24,74 miliar, dan 12,24 miliar.

Sampai dengan 31 Desember 2024, **penyaluran Dana BOS** di Kepri telah mencapai Rp584,61 miliar atau 98,33 persen dari Pagu. Selanjutnya realisasi Dana BOP PAUD telah terealisasi sebesar Rp23,66 miliar atau 95,63 persen dari Pagu dan realisasi Dana BOP Kesetaraan sebesar Rp11,88 miliar atau 97,06 persen dari Pagu tahun 2024.

Pemda lingkup Kepri juga telah melakukan beberapa upaya dalam meningkatkan kualitas Pendidikan di Provinsi Kepri. Pada tahun 2024, **Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Kepri fokus pada tiga program prioritas** yaitu pengangkatan guru penggerak menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah, percepatan pembentukan satgas dan tim pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan, dan optimalisasi *chromebook* dan akun *belajar.id*.

2.2.2 Tingkat Kemiskinan

Penurunan tingkat kemiskinan di suatu wilayah menjadi ukuran keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kepri**. Tingkat Kemiskinan di suatu daerah diukur** dari persentase jumlah penduduk miskin yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan sendiri merupakan ambang minimum pengeluaran untuk kebutuhan makanan dan non makanan agar tidak dikategorikan miskin. Pada tahun 2024, garis kemiskinan di Kepri sebesar Rp807.602 per kapita/per bulan. Garis tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp65.076 atau 8,76 persen (*yoy*).

Pada bulan September 2024, **tingkat kemiskinan Kepri** tercatat sebesar 124,96 ribu jiwa atau 4,78 persen dari total penduduk Kepri. Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya di bulan Maret 2024, tingkat kemiskinan Kepri telah menurun ±13,3 ribu jiwa (*yoy*).

Grafik 2.14 – Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kepri Tahun 2019-2024 (ribu jiwa)

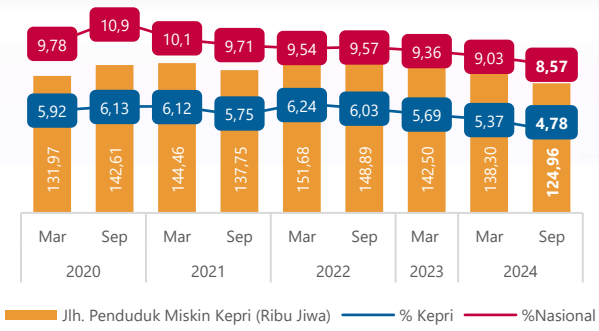

Sumber: BPS Kepri, 2025 (diolah)

Angka ini berada di bawah **angka kemiskinan Nasional** sebesar 8,57 persen. Jika dibandingkan dengan target RPJMD Kepri yang menargetkan persentase penduduk miskin di Tahun 2024 sebesar 5,69 persen, persentase penduduk miskin di Kepri (4,78 persen) telah mencapai target yang diharapkan dan bahkan lebih baik dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

Hingga bulan September 2024, **penduduk miskin yang tinggal di wilayah perkotaan** sejumlah 102,23 ribu atau 4,36 persen dari total penduduk di perkotaan, turun 0,51 persen poin dibandingkan dengan Maret 2024.

Grafik 2.15 – Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Perkotaan dan Pedesaan Kepri Tahun 2020-2024

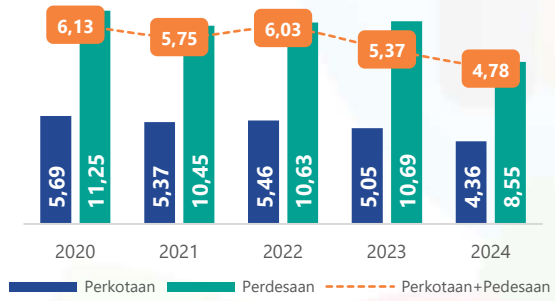

Sumber: BPS Kepri, 2025 (diolah)

Kemudian, **jumlah penduduk miskin di Kepri yang tinggal di wilayah Pedesaan** sebanyak 22,72 ribu orang atau 8,55 persen dari total penduduk di Pedesaan, turun 41 persen poin dibandingkan dengan Maret 2024.

Selain persentase penduduk miskin, **indikator kemiskinan makro juga dapat dilihat dari Tingkat Kedalaman Kemiskinan/*Poverty Gap Index* (P1) dan Tingkat Keparahan Kemiskinan/*Poverty Severity Index* (P2)**. P1 menjelaskan tentang ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan, P2 memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

Grafik 2.16 – Perkembangan Indeks P1 dan P2 Kepri Tahun 2020-2024 (persen)

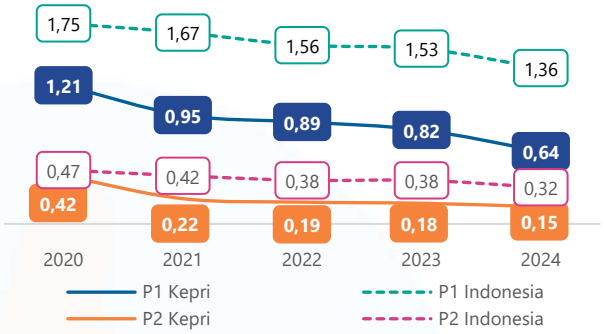

Sumber: BPS Kepri, 2025 (diolah)

Semakin tinggi nilai indeks P1 dan P2, maka semakin tinggi pula ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Pada bulan September 2024, **Indeks Kedalam Kemiskinan (P1) di Kepri** sebesar 0,635, turun 0,063 poin dibandingkan dengan periode Maret 2024. Kemudian, **Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kepri** periode September 2024 sebesar 0,143 juga turun 0,003 poin dibandingkan dengan periode Maret 2024.

Penurunan pada P1 menggambarkan semakin dekatnya jarak antara rata-rata pengeluaran dengan garis kemiskinan. Kemudian, penurunan pada P2 menunjukkan semakin dekatnya nilai ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di Kepri.

Grafik 2.17 – Perbandingan Tingkat Kemiskinan di Regional Sumatera Tahun 2020-2024 (persen)

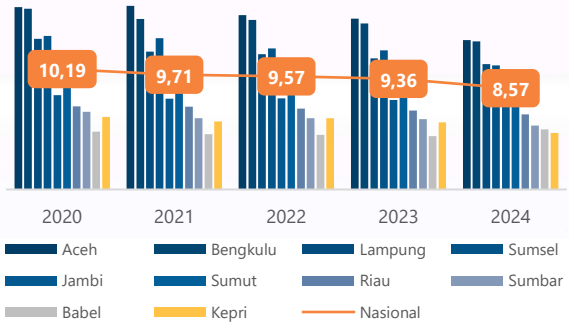

Sumber: BPS Kepri, 2025 (diolah)

Tingkat kemiskinan Kepri pada bulan September 2024 berhasil mencapai kinerja

sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah di regional Sumatera. Selanjutnya, provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah disusul oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (5,08 persen) dan Sumatera Barat (5,42 persen).

Tidak hanya di lingkup Regional Sumatera, tingkat kemiskinan Kepri per September 2024 juga menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah ke-empat nasional dari 38 provinsi di Indonesia. Posisi tiga terendah diisi oleh Provinsi Bali, Kalimantan Selatan, dan DKI Jakarta dengan tingkat kemiskinan 3,80 persen, 4,02 persen, dan 4,14 persen secara berurutan.

Hingga periode akhir tahun 2024, Pemerintah Pusat melalui APBN yang berperan sebagai stabilisasi perekonomian telah menjalan **beberapa program yang dapat mengurangi kemiskinan**, antara lain melalui realisasi Belanja Bantuan Sosial yang mencapai Rp7,67 miliar atau 98,08 persen dari Pagu 2024 kepada penerima PIP dan KIP; pemberian program subsidi dengan UMKM, serta percepatan Belanja Pemerintah Pusat dalam membangun fasilitas umum yang memberikan *multiplier effects* bagi masyarakat.

Pemerintah Pusat juga turut mendorong daya beli masyarakat, khususnya pada pengembangan ekonomi masyarakat pedesaan melalui Dana Desa. Pada tahun 2024, **Dana Desa di Kepri** dialokasikan sebesar Rp218,84 miliar yang diberikan kepada kepada 275 desa di 5 Kabupaten di Kepri (Bintan, Karimun, Natuna, Lingga, dan Anambas).

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, APBN telah memprioritaskan Dana Desa *Earmark* berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp34,61 miliar (30,67 persen dari Pagu Dana Desa); (2) *Earmark* Ketahanan Pangan Rp47,45 miliar (42,06 persen dari Pagu Dana Desa); dan (3) *Earmark Stunting* Rp30,76 miliar (27,27) persen dari Pagu Dana Desa).

Sampai dengan akhir tahun 2024, penyerapan BLT Desa telah terealisasikan sebesar Rp33,07 miliar kepada 110.249 KPM. BLT Desa tersebut disalurkan kepada masyarakat desa di kabupaten Bintan, Karimun, Natuna, Lingga dan Kepulauan Anambas. Selain itu, Pemda Kepri juga menyiapkan **4 (empat) upaya pengentasan kemiskinan** antara lain:

1. Penanganan Infrastruktur Dasar (Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni, Sanitasi, Air Bersih, dan Listrik);
2. Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial (JKN, Pemberian Beras Bersubsidi, dan Program Keluarga Harapan (PKH);
3. Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (Posyandu, RT/RW, BUMdes, UMKM, Perikanan, Pertanian dan Ketahanan Pangan.
4. Program Pemberian Beasiswa bagi Mahasiswa Kurang Mampu.

2.2.3 Ketimpangan Pendapatan (Rasio Gini)

Grafik 2.18 – Rasio Gini di Kepri Tahun 2020-2024

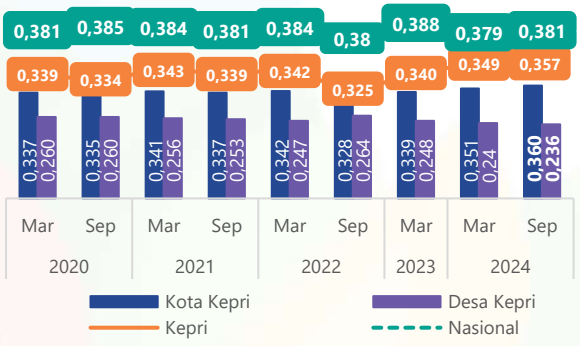

Sumber Data: BPS, 2025 (diolah)

Pada periode September 2024, **Gini Ratio Kepri sebesar 0,357,** naik 0,008 poin dibandingkan dengan Maret 2025. Angka gini rasio tersebut masih berada di bawah capaian rasio gini Nasional yang pada September 2024 berada di angka 0,381.

Grafik 2.19 – Ketimpangan di Regional Sumatera per September 2024 (persen)

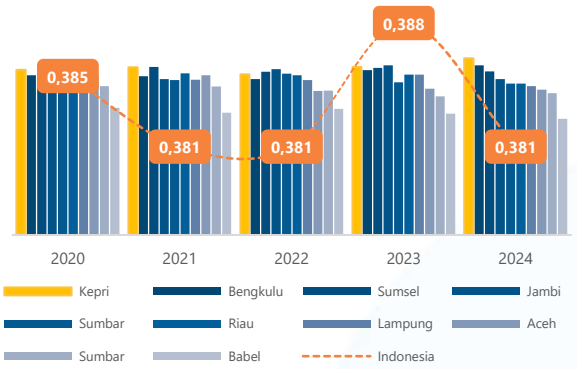

Sumber Data: BPS, 2024 (diolah)

Gini Rasio Kepri per September 2024 menjadi yang tertinggi di Regional Sumatera. **Pertumbuhan ekonomi yang terus melaju nyatanya tidak serta merta mengurangi ketimpangan sosial,** hal ini menunjukkan bahwa kemanfaatan dari pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, khususnya di Kepri yang pada periode September 2024 tidak dirasakan secara merata. Artinya, golongan masyarakat berpendapatan rendah dalam suatu daerah mempunyai kesempatan akses yang lebih rendah dalam menikmati "kue" suksesnya pertumbuhan ekonomi.

Dalam memberikan peran hadirnya Pemerintah bagi masyarakat dalam mengurangi tingkat pendapatan masyarakat, terdapat beberapa hal yang telah dilaksanakan oleh Pemda maupun Pempus dalam menurunkan gini ratio yang ada di Provinsi Kepri.

Pemerintah melakukan beberapa **upaya dalam mengurangi ketimpangan di daerah**, di antaranya dengan tetap menyalurkan bantuan sosial, menciptakan lapangan kerja melalui akselerasi pembangunan, serta perbaikan standar pengupahan yang dibutuhkan untuk memperkuat daya beli masyarakat dalam menyambut ketidakpastian ekonomi di masa mendatang.

Pemerintah juga hadir dengan memberikan **program pemberdayaan masyarakat melalui Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)** yang diberikan pada Usaha Mikro, Kecil Menengah, dan Koperasi, yang pada periode Januari-Desember 2024 telah direalisasikan sebesar Rp1.686,59 miliar.

Program tersebut meliputi **program pemberdayaan UMKM** juga diberikan dalam pemberian subsidi pembiayaan usaha UMKM baik melalui KUR/UMi/dan Program Pembiayaan Bunga nol persen dari Pemprov Kepri. Kemudian, sebagai bantalan sosial, APBN juga telah memberikan BLT kepada para KPM baik melalui TKD ataupun belanja K/L. Selain itu, program pendidikan dan pelatihan juga terus diberikan baik oleh Pempus maupun Pemda, salah satunya adalah melalui Balai Latihan kerja dalam rangka meningkatkan keterampilan dan kualifikasi tenaga kerja lokal.

2.2.4 Kondisi Ketenagakerjaan dan Tingkat Pengangguran

Penurunan tingkat pengangguran menjadi salah indikator dari perkembangan ekonomi di suatu regional. Pada bulan Agustus 2024, Kepri mencatat **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)** sebesar 6,39 persen atau turun 0,41 persen point (*yoy*) dibandingkan dengan Agustus 2023. Angka tersebut juga lebih tinggi apabila dibandingkan dengan TPT Nasional sebesar 4,91 persen dan bahkan berada pada posisi tertinggi ke-tiga Nasional, selain empat provinsi baru, setelah Provinsi Jawa Barat (6,75 persen) dan Provinsi Banten (6,68 persen).

Grafik 2.20 – Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kepri per Tahun 2020-2024

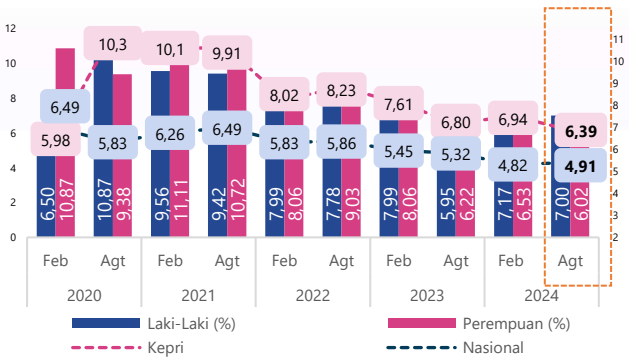

Sumber Data: BPS, 2024 (diolah)

Sampai dengan periode Agustus 2024, **jumlah angkatan kerja di Kepri tercatat mencapai 1.120,66 ribu orang atau 93,06 persen** dari total penduduk usia kerja di Kepri. Dari jumlah angkatan kerja di Kepri, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kepri bulan Agustus mencapai 69,17 persen dari total penduduk Kepri. Angka TPT tersebut tumbuh 0,49 persen poin dibanding dengan Agustus 2023 (*yoy*), hal tersebut mencerminkan adanya pemulihan yang berkelanjutan dalam sektor ketenagakerjaan di Kepri.

Grafik 2.21 – Angka TPT Per Provinsi di Regional Sumatera bulan Agustus 2024 (persen)

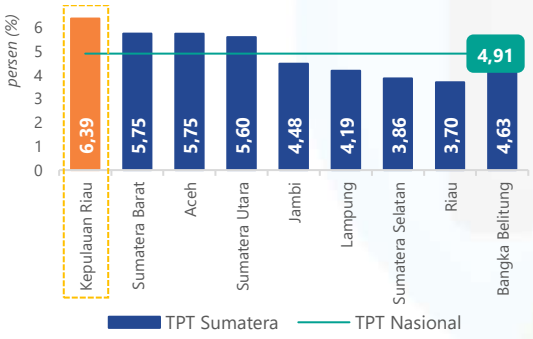

Sumber Data: BPS, 2024 (diolah)

Pada bulan Agustus 2024, TPT menjadi angka TPT tertinggi **di Regional Sumatera**. Namun demikian, persentase perubahan penurunan TPT Kepri juga menjadi yang tertinggi ke-dua di Regional Sumatera dengan penurunan angka pengangguran 0,41 persen poin (*yoy*), setelah Provinsi Riau yang berhasil menurunkan angka TPT 0,53 persen poin (*yoy*).

Penurunan TPT tersebut juga menjadi sinyal positif bahwa masyarakat di Kepri telah memiliki akses dan kesempatan yang lebih baik terhadap lapangan pekerjaan dan kesempatan untuk berkontribusi dalam perekonomian.

Grafik 2.22 – Porsi Penyerapan Tenaga Kerja per Lapangan Usaha di Kepri Tahun 2023-2024 (persen)

Sumber Data: BPS, 2024 (diolah)

Selama periode satu tahun terakhir (Agustus 2023 - Agustus 2024), **komposisi tenaga kerja yang ada di Kepri didominasi oleh 3 (tiga) sektor lapangan usaha** yaitu sektor Industri Pengolahan (23,65 persen),

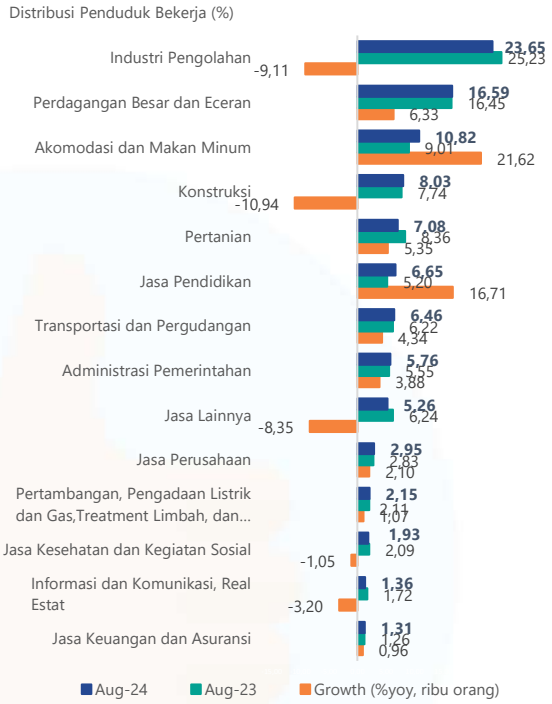

Perdagangan (16,59 persen) dan Akomodasi dan Makanan Minuman (10,82 persen).

Sektor akomodasi dan makanan minuman turut menjadi sektor dengan penyerapan tenaga kerja terbesar selama periode Agustus 2023-Agustus 2024 dengan pertumbuhan 21,62 persen (*yoy*). Selanjutnya, sektor yang mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja terbesar di Kepri ada pada sektor konstruksi dengan pertumbuhan negatif 10,94 persen (*yoy*).

2.2.5 Nilai Tukar Petani (NTP)

Grafik 2.23 – Perkembangan NTP di Kepri Tahun 2022 - 2024

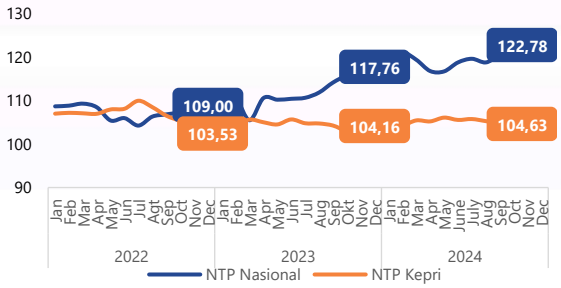

Sumber Data: BPS, 2025 (diolah)

NTP Kepri pada bulan Desember 2024 sebesar 104,63 menunjukkan pertumbuhan

positif 0,88 persen (*mtm*) dan 0,45 persen (*yoy*). NTP tersebut telah mencapai target NTP dalam RPJMD Kepri yang ditargetkan mencapai 99,95 persen di tahun 2024. Namun NTP Kepri masih berada di bawah angka NTP Nasional (122,78).

Kurang optimalnya kegiatan pertanian di Kepri disebabkan oleh kondisi geografis Kepri yang tidak optimal memungkinkan untuk dijadikan sebagai lahan pertanian. Namun secara bulanan, **Indeks Harga yang Diterima Petani (It)** di Kepri bulan Desember 2024 mengalami pertumbuhan 1,47 persen dibandingkan dengan November 2024.

Pada bulan Desember 2024 empat dari lima subsektor mengalami peningkatan Indeks Harga yang Diterima Petani (It). **Subsektor yang mengalami peningkatan NTP di Kepri** secara berturut-turut adalah subsektor tanaman perkebunan rakyat sebesar 3,02 persen (*yoy*) dan hortikultura 2,39 persen (*yoy*), subsektor perikanan naik 0,22 persen (*yoy*) dan subsektor peternakan tumbuh 0,02 persen (*yoy*).

Sebagai provinsi Kepulauan, Provinsi Kepri dihadapkan pada tantangan pengembangan sektor pertanian, yaitu: (1) terbatasnya dukungan infrastruktur untuk kegiatan pertanian, seperti irigasi, jalan usaha tani, dan fasilitas pengolahan hasil pertanian; (2) belum optimalnya kemampuan petani dan pelaku usaha perkebunan karena kondisi geografis Kepri yang didominasi oleh lahan bakau dan tanah bauksit, sehingga membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dalam mengelola pertanian; (3) serta perlunya peningkatan penggunaan teknologi pertanian, baik dalam proses pengolahan maupun untuk keberlanjutan pemasaran. Selain itu, keterbatasan luas lahan pertanian juga menjadi salah satu tantangan dalam pengembangan sektor ini di Kepri.

Pada tahun 2024 **Pemerintah Pusat melalui APBN telah mengalokasikan Pagu Belanja pada Kementerian Pertanian** sebesar Rp8,43 miliar yang hingga bulan Desember 2024 telah terealisasikan sebesar Rp6,78 miliar atau 80,74 persen dari Pagu 2024. Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk melaksanakan kegiatan: (1) penguatan pembenihan tanaman perkebunan; (2) pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura; (3) penguatan perbenihan tanaman perkebunan; (4) pengelolaan sistem perbenihan tanaman pangan, dan beberapa kegiatan di bidang pertanian lainnya.

2.2.6 Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Provinsi Kepri merupakan provinsi maritim dengan 98 persen wilayahnya merupakan lautan dan hanya 2 persen adalah daratan. Dengan kondisi geografis tersebut, tentunya Kepri menyimpan potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar serta sektor lain yang berkaitan dengan ekonomi maritime dan pesisir.

Grafik 2.24 – Perkembangan NTN di Kepri Tahun 2022 - 2024

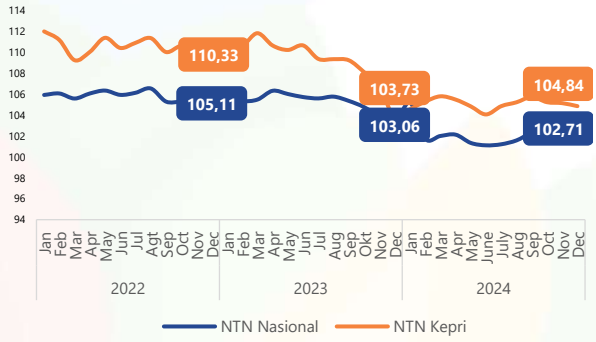

Sumber Data: BPS, 2025 (diolah)

NTN Kepri di bulan Desember 2024 yang tergambar pada Grafik 2.24 sebesar 104,84. Angka NTN tersebut mengalami penurunan sebesar 0,28 persen (*mtm*) dan namun jika dibandingkan tahun 2023, NTN Kepri 1,07 persen (*yoy*). NTN Kepri di bulan Desember 2024 berada di atas angka NTN Nasional (102,71).

Meskipun lebih tinggi dibandingkan dengan capaian NTN Nasional, NTP Kepri masih belum mencapai **sasaran NTN yang ditetapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kepri yang**

pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 116. Maka dari itu pemerintah akan terus meningkatkan produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap serta meningkatkan kapasitas nelayan terkait teknologi kelautan perikanan.

Meskipun merupakan wilayah Kepulauan, **capaian NTN di Kepri masih belum optimal. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor,** diantaranya adalah persaingan di pasar ekspor yang berdampak pada berkurangnya daya saing harga produk hasil perikanan. Selain penurunan harga jual, kenaikan biaya operasional terutama terkait dengan biaya bahan bakar, alat tangkap dan kebutuhan pokok lainnya juga menjadi faktor yang menyebabkan penurunan margin keuntungan nelayan tangkap.

Pertumbuhan NTN Kepri di bulan Desember 2024 (*yoy*) dipengaruhi oleh kenaikan indeks harga yang diterima nelayan tangkap sebesar 0,58 persen disebabkan antara lain oleh kenaikan harga 5 komoditi ikan laut pada sub sektor perikanan tangkap, yaitu cakalang 10,23 persen, kuwe sebesar 8,12 persen, selar sebesar 3,11 persen, ekor kuning sebesar 1,82 persen dan belanak sebesar 1,06 persen.

Tantangan pengembangan sektor perikanan di Kepri meliputi: (1) *IUU Fishing* di pulau terluar seperti Natuna, yang mengurangi hasil laut bagi nelayan lokal; (2) pencemaran laut oleh limbah kapal internasional di Selat Malaka; (3) terbatasnya teknologi pengolahan perikanan yang belum berstandar ekspor; (4) cuaca buruk dan tantangan ekosistem perairan yang menurunkan volume tangkapan serta pendapatan nelayan. Maka dari itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan turut mengupayakan perkembangan sektor perikanan di Kepri yang dilaksanakan melalui beberapa program.

Pada tahun 2024, **Pagu Belanja pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Kepri** adalah sebesar Rp104,52 miliar. Sampai dengan akhir Desember 2024, Belanja tersebut telah direalisasikan sebesar Rp100,39 miliar atau 95,77 persen dari pagu TA 2024.

Beberapa **kegiatan mendorong pengembangan sektor perikanan melalui beberapa kegiatan,** antara lain: (1) fasilitasi dan pembinaan masyarakat/kelompok masyarakat; (2) operasi pengawasan sumber daya alam; (3) dukungan pembinaan UMKM; (4) fasilitasi dan pembinaan industri; (5) serta beberapa kegiatan lainnya yang membantu para nelayan untuk meningkatkan kualitas produksinya.

2.3 Reviu Capaian Kinerja Makro Kesra Regional

Evaluasi capaian Kinerja Makro dan Kesra (Kesejahteraan Rakyat) sangat diperlukan karena kepentingannya dalam mengawasi dan menilai seberapa efektif kebijakan atau program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan serta mutu kehidupan masyarakat. Dengan menghubungkan target dengan pencapaian indikator makro kesra, kita dapat menarik kesimpulan apakah kebijakan yang mendasari penetapan target telah dijalankan dengan benar, atau apakah target tersebut hanyalah angka yang ditetapkan tanpa melalui prosedur yang tepat, atau bahkan apakah penetapan target tersebut didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Tabel 2.2 – Hasil Reviu Efektivitas Kebijakan Makro Ekonomi dan Kesejahteraan Provinsi Kepri Tahun 2024

No.	Sasaran Makro Kesra	Target RKPD Kepri TA 2024	Realisasi 2024	Hasil Reviu
1	Pertumbuhan Ekonomi (%*yoy*)	5,0 - 5,9	5,14	• **Capaian pertumbuhan ekonomi Kepri tahun 2024 sebesar 5,14 persen (*yoy*) telah mencapai target RPJMD Kepri** dalam rentang sasaran 5,0 – 5,9 untuk tahun 2024. • **Pertumbuhan Ekonomi Kepri tahun 2024 menunjukkan kinerja yang baik** dan berada di rentang target RPJMD yang ditetapkan. Hal tersebut didukung dengan meningkatkan investasi dan pembangunan infrastruktur yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Kepri di tahun 2024.
2	Inflasi (%)	3,03 ± 1	2,09	• **Capaian inflasi Kepri tahun 2024 sebesar 2,09 telah mencapai target RPJMD Kepri** dalam rentang 3,03 ± 1 untuk tahun 2024. • **Inflasi di Kepri di sepanjang tahun 2024 memberikan kinerja yang stabil**. Hal tersebut didorong oleh program TPID dan bantuan pempus dan pemda dalam mengoperasikan stok kebutuhan di Kepri.
3	IPM (indeks)	77,58	79,89	• **Capaian IPM Kepri Tahun 2024 sebesar 79,89 telah melebihi target RPJMD Kepri** yang ditargetkan 77,58 untuk tahun 2024. • **IPM Kepri masuk dalam kategori IPM "sangat tinggi".** Hal ini menggambarkan kondisi kesehatan, pendidikan, dan perekonomian yang baik di tahun 2024 sebagai **IPM tertinggi di Sumatera.**
4	Kemiskinan (%)	5,69	4,78	• **Tingkat kemiskinan Kepri menunjukkan prestasi dengan tren yang terus menurun**, terutama di tahun 2024 sebesar 4,78 persen. Persentase tersebut telah memenuhi dan bahkan melampaui target dalam RPJMD Kepri dengan target 5,69 persen untuk tahun 2024. • **Provinsi Kepri juga menjadi provinsi dengan angka kemiskinan terendah nomor 4 (empat) di Indonesia.** Capaian tersebut tidak lepas dari peran pemerintah pusat dan pemda lingkup Kepri yang berlari untuk menurunkan persentase penduduk miskin di Kepri dengan berbagai program bantuan pemerintah dan pemberdayaan SDM.
5	Pengangguran (%)	8,7	6,39	• **Capaian TPT Kepri sebesar 6,39 persen per Agustus 2024 telah melebihi target RPJMD yang ditetapkan** sebesar 8,7 persen untuk tahun 2024. • **Namun demikian, kebutuhan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan ketersediaan SDM lokal masih sangat dibutuhkan.** Sehingga, pemerintah perlu terus mendukung peningkatan kualitas SDM lokal dan membangun kerja sama dengan pengelola usaha industri untuk mengurangi *mismatch* tenaga kerja di Kepri.
6	Rasio Gini (indeks)	0,325	0,357	• **Rasio Gini di Kepri pada periode September 2024 masih menunjukkan capaian yang kurang optimal.** Dengan angka *Gini Ratio* sebesar 0,357, Gini Rasio

				Kepri belum mencapai target RPJMD Kepri yang ditargetkan 0,325 untuk tahun 2024. • **Ketimpangan atau ketidakmerataan ekonomi yang masih tinggi di Kepri** disebabkan oleh belum meratanya pembangunan antar kab/kota di Provinsi Kepri, khususnya di daerah terluar Kepri yang masih sulit dalam mengakses infrastruktur dan pelayanan umum.
7	NTP (indeks)	99,95	104,63	• **NTP di Provinsi Kepri per Desember 2024 telah melebihi target yang ditetapkan RPJMD** Kepri sebesar 99,95 untuk tahun 2024. Hal tersebut didukung oleh program pemerintah pusat dan daerah serta GNPIP yang mendukung para petani melalui program peningkatan produktivitas petani. • **Sektor pertanian di Kepri masih dihadapkan pada keterbatasan geografis** yang menyebabkan terbatasnya lahan pertanian produktif. Akses terhadap infrastruktur pertanian yang masih konvensional juga masih menjadi penghambat potensi pertumbuhan yang optimal di sektor ini.
8	NTN (indeks)	116	104,84	• **NTN di Provinsi Kepri per Desember 2024 masih belum mencapai target RPJMD Kepri** yang ditargetkan sebesar 116 untuk tahun 2024. Hal tersebut dipengaruhi oleh cuaca ekstrim, lemahnya permodalan di sektor perikanan, dan sistem pengolahan perikanan di Kepri yang masih terbatas. • **Terdapat isu dalam proses perhitungan NTN di Kepri.** Secara riil, banyak nelayan budidaya di Kepri yang juga menjadi nelayan tangkap di musim tertentu, namun output dari nelayan-nelayan tersebut tidak tercatat seutuhnya oleh BPS. • **Sebagai daerah kepulauan dengan kekuatan maritim yang besar,** provinsi Kepri agar mampu mengakselerasi sektor perikanan sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Kepri memiliki peluang besar untuk mengembangkan industri perikanannya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal serta memperkuat posisi Kepri sebagai pusat ekonomi maritim nasional.

Sumber: RPJMD dan BPS Provinsi Kepri, 2021-2026 (data diolah)

Special Box 2

Analisis Efektivitas Kinerja Penyaluran KUR di Kepri terkait Dominasi Penyaluran KUR Skema Kecil Menggunakan Metode *The Phoenix Analysis*

Bagan The Phoenix Analysis

A. 1. Explore the Problem

Identifiy Impact

Sesuai dengan data yang telah disampaikan pada BAB III laporan ini, **kinerja penyaluran KUR mengalami kontraksi sebesar 3,46 persen (*yoy*) dan jumlah debitur penerima manfaat KUR juga mengalami kontraksi sebesar 16,28 persen *(yoy)***. Pada tahun 2024, KUR tersalur sebesar Rp1.686,59 miliar kepada 22.324 debitur sedangkan pada tahun 2023 terjadi penyaluran KUR sebesar Rp1.747,51 miliar kepada 26.674 debitur. **Selain itu, jika melihat tren penyaluran KUR per skema dalam lima tahun terakhir maka diketahui penyaluran KUR terdapat dominasi oleh skema kecil**. Secara rinci penyaluran KUR per skema tersaji dalam Tabel 5.1 berikut.

Penyaluran KUR per Skema di Kepri, 2020 s.d. 2024 (Rp M)

Skema		Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Kecil		580,92	880,09	1.134,25	845,61	788,01
Mikro		569,36	743,81	1.136,41	841,32	887,82
Supermi		30,43	46,17	51,73	60,58	10,75
Total		**1.180,71**	**1.670,07**	**2.322,39**	**1.747,51**	**1.686,59**

Sumber: SIKP, 2024 (diolah)

Special Box 2

Analisis Efektivitas Kinerja Penyaluran KUR di Kepri terkait Dominasi Penyaluran KUR Skema Kecil Menggunakan Metode *The Phoenix Analysis*

Adapun jumlah debitur penerima KUR per skema secara rinci tersaji dalam Tabel 5.2 berikut.

Debitur KUR per Skema di Kepri, 2020 s.d. 2024 (orang)

Skema	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kecil	2.570	3.930	4.193	3.195	2.911
Mikro	18.056	22.794	25.473	16.890	18.229
Supermi	3.243	4.990	5.710	6.589	1.184
Total	**23.869**	**31.714**	**35.376**	**26.674**	**22.324**

Sumber: SIKP, 2024 (diolah)

Check Information

Secara persentase proporsi penyaluran KUR per skema di Kepri tersaji dalam Grafik 5.1 sedangkan persentase proporsi debitur KUR per skema di Kepri tersaji dalam Grafik 5.2 berikut.

Berdasarkan Grafik 5.1 terlihat bahwa pada tahun 2020, 2021, dan 2023 KUR didominasi oleh skema Kecil sedangkan pada tahun 2022 dan 2024 KUR didominasi oleh skema Mikro. Secara keseluruhan, **porsi penyaluran KUR skema Kecil di Kepri sangat besar (lebih dari 45 persen) namun jika dibandingkan dengan jumlah debitur penerima KUR, maka jumlahnya sangat kecil (kurang dari 15 persen)**.

Proporsi Penyaluran KUR per Skema di Kepri, 2020 s.d. 2024 *(persen)*

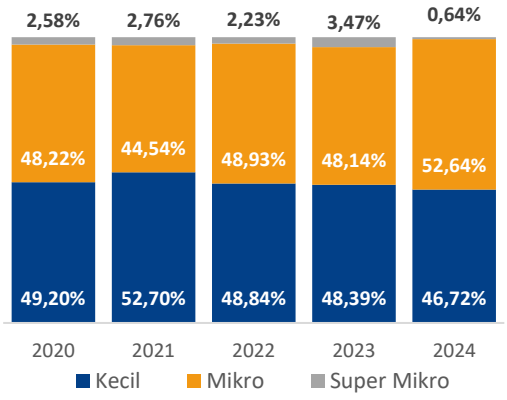

Proporsi Debitur KUR per Skema di Kepri, 2020 s.d. 2024 *(persen)*

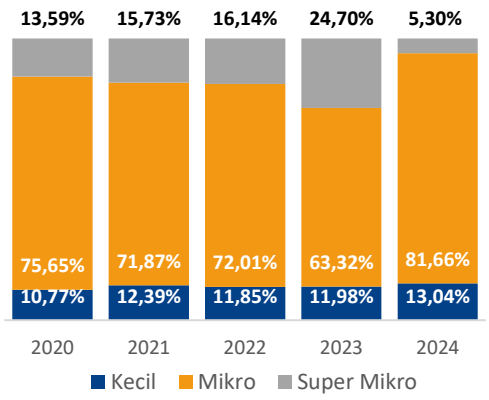

Define Problem

Pada tahun 2024, KUR tersalur sebesar Rp1.686,59 miliar kepada 22.324 debitur sedangkan pada tahun 2023 terjadi penyaluran KUR sebesar Rp1.747,51 miliar kepada 26.674 debitur. **Hal ini menunjukan penurunan jumlah debitur dari tahun sebelumnya.** Berdasarkan hasil desk review tersebut diidentifikasi symptom yang muncul yaitu **dominansi penyaluran KUR skema Kecil dengan penerima manfaat yang sangat sedikit dalam lima tahun terakhir**.

Special Box 2

Analisis Efektivitas Kinerja Penyaluran KUR di Kepri terkait Dominasi Penyaluran KUR Skema Kecil Menggunakan Metode *The Phoenix Analysis*

Tingkat keberhasilan pelaksanaan KUR dinilai dari beberapa indikator meliputi jumlah plafon KUR yang disalurkan, tingkat kredit/pembiayaan bermasalah (non-performing loan atau non-performing financing), jumlah debitur yang menerima KUR, dan jumlah debitur yang berhasil mengalami graduasi.

Break it Down

Jumlah debitur penerima manfaat KUR skema Kecil sangat sedikit, namun total nilai penyaluran KUR yang digelontorkan relatif besar. Sebagai contoh pada tahun 2024, berdasarkan Grafik 5.1 dan Grafik 5.2 terlihat bahwa dominasi penyaluran KUR skema kecil mencapai 46,72 persen dari total penyaluran, namun hanya dapat dirasakan oleh 13,04 persen debitur KUR. Tentu saja hal ini dikarenakan KUR skema Kecil merupakan pinjaman KUR dengan nominal lebih dari Rp100 juta sehingga **penyaluran yang besar hanya dirasakan oleh sebagian kecil debitur**.

Recognise and Reframe

Dari sisi kapasitas pelaku UMKM selaku debitur KUR, dapat dikatakan bahwa **debitur KUR Kecil** dengan plafon pinjaman di atas Rp100 juta **tentu lebih mampu dan mapan dibandingkan dengan debitur KUR Mikro** yang meminjam dengan plafon Rp10 juta sampai dengan Rp100 juta maupun debitur KUR Super Mikro yang meminjam dengan plafon di bawah Rp10 juta. Penyaluran KUR pada skema Kecil yang cukup dominan menunjukkan indikasi bahwa **penyaluran KUR tidak tepat sasaran**. Dampak dari penyaluran KUR tidak tepat sasaran dijabarkan sebagai berikut.

a. Tidak Terjadi Perluasan Akses KUR

Salah satu sasaran program KUR adalah untuk mendorong perluasan akses pembiayaan dengan indikator peningkatan jumlah debitur yang menerima KUR. Dengan **fenomena yang ditunjukkan oleh data pada lima tahun terakhir didapati bahwa penyaluran KUR didominasi oleh KUR Kecil, maka terjadi penurunan jumlah debitur yang mendapatkan fasilitas KUR**. Pada KUR Kecil karena penyaluran lebih dari Rp100 juta kepada satu debitur, maka dengan jumlah penyaluran yang sama, jumlah debitur yang mendapatkan fasilitas KUR lebih sedikit.

Selain itu, **sasaran KUR terkait jumlah debitur yang menerima KUR adalah meningkatnya jumlah debitur baru (pelaku UMKM baru)**. Dengan fenomena dominansi KUR Kecil, maka sasaran untuk meningkatkan jumlah debitur baru akan terhambat dan tidak optimal. Fenomena tersebut didukung oleh terbitnya kebijakan pembatasan frekuensi hingga dua kali menerima fasilitas KUR untuk sektor non-4P dan larangan untuk mensyaratkan agunan tambahan bagi skema Mikro dan Super Mikro yang meningkatkan risiko NPL sehingga menyulitkan penyalur untuk mendapatkan debitur baru.

b. Terhambatnya UMKM naik kelas

Tujuan utama pemerintah memberikan bantuan permodalan melalui KUR adalah agar pelaku UMKM dapat mengembangkan usahanya. Melalui bantuan permodalan pelaku UMKM dapat menggunakan sebagai tambahan modal kerja ataupun pembelian aset investasi untuk mendukung pengembangan usaha. Bantuan permodalan dengan bunga rendah seperti KUR

Special Box 2

Analisis Efektivitas Kinerja Penyaluran KUR di Kepri terkait Dominasi Penyaluran KUR Skema Kecil Menggunakan Metode *The Phoenix Analysis*

sangat membantu pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha atau naik kelas. Dengan bantuan permodalan regular dari perbankan atau penyedia permodalan lainnya yang memberikan bunga tinggi dan persyaratan yang rumit dapat menghambat UMKM untuk naik kelas.

Ketika penyaluran KUR berfokus pada skema Kecil maka akan semakin sedikit debitur KUR yang merasakan manfaat dari KUR. Akses permodalan merupakan salah satu faktor penting dalam pengembangan usaha UMKM. Ketika pelaku UMKM tidak dapat mengakses permodalan sesuai dengan yang dibutuhkan maka akan terjadi stagnansi usaha dan terhambatnya UMKM naik kelas.

c. Penurunan Indeks Inklusi Keuangan

Indeks Inklusi Keuangan (IIK) mengukur ketersediaan akses produk/layanan jasa keuangan di lembaga formal yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan. **Hasil dari SNLIK Tahun 2024 didapati bahwa IIK sebesar 75,02 persen dan mengalami penurunan dibandingkan dengan hasil SNLIK periode sebelumnya**. Nilai IIK yang menurun menandakan terjadinya penurunan ketersediaan akses layanan keuangan formal yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, salah satunya akses permodalan bagi UMKM.

A. 2. Solve, Plan, and Act

Build on Knowledge

Penyebab Penyaluran KUR Tidak Tepat Sasaran disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu sebagai berikut.

a. Tata Kelola

1. **Monev ke penyalur KUR tidak berjalan efektif**. Pada level daerah, instansi pemerintah yang melakukan monev ke penyalur KUR hanya Kanwil DJPb sementara kewenangan KUR sendiri lebih besar ada di Kemenko Perekonomian. Hal ini membuat Kanwil DJPb pun tidak cukup kuat untuk memberikan arahan kepada perbankan khususnya terkait kuota penyaluran KUR per skema. Di sisi lain, pada level pusat juga tidak ada pengaturan khusus terkait pembagian kuota KUR per skema membuat penyalur KUR dapat secara bebas menyalurkan KUR ke debitur yang paling menguntungkan, dalam hal ini yaitu UMKM berskala besar dan minim resiko melalui KUR skema Kecil.
2. **Kurangnya sosialisasi terkait tujuan yang ingin dicapai pemerintah** melalui KUR kepada penyalur KUR di daerah membuat penyalur KUR tidak memiliki *sense of belonging* dalam program KUR. Penyalur KUR di daerah merasa KUR sama saja dengan kredit produktif lainnya yang disalurkan kepada pelaku UMKM. Oleh karena itu, penyalur KUR di daerah tidak merasa harus menjangkau sebanyak mungkin debitur, namun cukup menghabiskan kuota nominal penyaluran KUR yang telah dibagi dari pusat.
3. **Belum taatnya seluruh pemda dalam melakukan input data calon debitur potensial ke aplikasi SIKP**. Hal ini disebabkan beberapa faktor, seperti belum dianggap hal yang penting dan prioritas, tidak terdapat sanksi, dan pemda tidak mempunyai data pelaku UMKM di

Special Box 2

Analisis Efektivitas Kinerja Penyaluran KUR di Kepri terkait Dominasi Penyaluran KUR Skema Kecil Menggunakan Metode *The Phoenix Analysis*

wilayahnya.

b. Kebijakan

1. **Kontraksi penyaluran KUR disebabkan oleh ketentuan penyaluran KUR yang baru terbit pada akhir Februari**, sehingga periode penyaluran KUR hanya efektif sepuluh bulan yaitu dari Maret hingga Desember. Dalam waktu sepuluh bulan ini, para penyalur harus menyalurkan KUR semaksimal mungkin dengan target adalah menghabiskan kuota nominal KUR, bukan target jumlah penerima/debitur. Sehingga solusinya adalah menyalurkan KUR skema Kecil yang nominalnya di atas Rp100 juta sehingga hanya perlu menjangkau sedikit debitur saja.
2. **Penyalur KUR lebih selektif dan berhati-hati untuk menyalurkan kredit skema Mikro dan Supermikro**. Hal ini disebabkan karena terdapat ketentuan baru bahwa penyalur tidak diperkenankan meminta agunan tambahan, selain agunan pokok yang berupa usaha pelaku UMKM untuk skema penyaluran KUR Mikro dan Supermikro. Penyalur KUR dikenakan sanksi berupa tidak dibayarkan subsidi bunga/subsidi marjin KUR atas penerima KUR yang bersangkutan. Pada skema Kecil, penyalur KUR dapat meminta agunan tambahan berupa sertifikat tanah, sertifikat rumah, maupun BPKB kendaraan sehingga kredit lebih pasti dilunasi dan kemungkinan debitur melarikan diri/mangkir sangat kecil.
3. **Penyalur KUR juga diwajibkan untuk menjada *Net Performing Loan (NPL)*.** Meskipun KUR dijamin dan memiliki asuransi yaitu Askrindo dan Jamkrindo, namun penyalur KUR juga dituntut untuk tidak menyalurkan KUR secara sembarangan sehingga NPL tetap terjaga. Oleh karena itu, penyalur KUR cenderung mencari pelaku UMKM yang sudah stabil dan dapat menyediakan agunan tambahan sehingga akan diarahkan untuk meminjam KUR skema Kecil.

c. Teknologi Informasi

1. **Penyalur KUR di daerah tidak dapat mengakses langsung SIKP yang dikembangkan oleh DJPb sehingga tidak dapat mengakses data debitur potensial yang diinput oleh pemda**. Hal ini mengakibatkan penyalur KUR tidak mendapatkan data yang lengkap terkait pelaku UMKM yang telah dikumpulkan oleh pemda. Justru, penyalur KUR mendapatkan data debitur dengan mendatangi secara langsung ke pasar, pertokoan, tempat usaha pelaku UMKM. Hal ini membuat proses pencarian debitur KUR lebih sulit bagi penyalur KUR.

d. SDM

1. **Terdapat pergantian SDM sebagai operator pada pemda**. Operator baru belum mempunyai keahlian terkait penggunaan aplikasi SIKP sehingga tidak dapat melakukan input data pelaku UMKM potensial pada aplikasi SIKP.
2. **Tidak terdapat petugas pencari data UMKM untuk diinput ke aplikasi SIKP**. Petugas pendamping UMKM dibentuk dengan SK Gubernur. Belum terdapat SK Gubernur terbaru terkait petugas pendamping UMKM yang diterbitkan pada tahun 2019. Oleh karena itu, tidak terdapat petugas pendamping UMKM.

The only thing standing between you and outrageous success is continuous progress

Dan Waldschmidt

Bab III
ANALISIS FISKAL REGIONAL

Kinerja APBN dan APBD berfokus pada pemerataan pembangunan dan penguatan ekonomi yang inklusif.

Treasure Bay, Kabupaten Bintan

Regional Fiscal Review

- Pelaksanaan APBN Tingkat Provinsi
- Pelaksanaan APBD Tingkat Provinsi (Konsolidasi Pemda)
- Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian

3.1 Pelaksanaan APBN Tingkat Provinsi

Sebagai instrumen kebijakan fiskal dalam mencapai tujuan bernegara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjalankan tiga fungsi yaitu stabilisasi, alokasi, dan distribusi. Fungsi stabilisasi dijalankan melalui peran **APBN sebagai *shock absorber*** untuk menstabilkan harga. Pada fungsi alokasi, APBN berperan untuk membuat ekonomi semakin efisien dan tidak distortif. Pada fungsi distribusi, APBN berperan sebagai alat pemerataan keadilan. Ketiga fungsi tersebut tak hanya dijalankan dalam skala nasional, tetapi juga pada tingkat regional. APBN dianggarkan dan direalisasikan untuk mencapai tujuan masyarakat Kepri yang sejahtera melalui peningkatan indikator perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Adapun perkembangan APBN di Kepri tergambar pada Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1– Pagu dan Realisasi I-Account APBN di Kepri, 2022 s.d. 2024 (Dalam Miliar Rupiah)

I-Account (Miliar Rupiah)	TA 2022			TA 2023			TA 2024			*Growth* (2023 s.d. 2024)
	Pagu	Real	% Real	Pagu	Real	% Real	Pagu	Real	% Real	
PENDAPATAN DAN HIBAH	**11.818,86**	**12.814,00**	**108,42%**	**11.519,71**	**12.287,00**	**106,66%**	**15.155,62**	**13.771,66**	**90,87%**	**12,08%**
Penerimaan Dalam Negeri	**11.818,86**	**12.814,00**	**108,42%**	**11.519,71**	**12.287,00**	**106,66%**	**15.155,62**	**13.771,66**	**90,87%**	**12,08%**
Penerimaan Perpajakan	9.653,86	10.128,77	104,92%	9.209,34	9.829,88	106,74%	12.448,53	10.582,10	85,01%	7,65%
Penerimaan Negara Bukan Pajak	2.165,00	2.685,23	124,03%	2.310,37	2.457,12	106,35%	2.707,09	3.189,56	117,82%	29,81%
Hibah	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
BELANJA NEGARA	**14.793,91**	**15.317,78**	**103,54%**	**19.198,56**	**17.926,49**	**93,37%**	**18.682,57**	**17.166,89**	**91,89%**	**-4,24%**
Belanja Pemerintah Pusat	**7.245,92**	**6.642,32**	**91,67%**	**9.898,10**	**8.726,49**	**88,16%**	**10.501,28**	**9.130,36**	**86,95%**	**4,63%**
Belanja Pegawai	1.878,10	1.850,54	98,53%	2.072,02	2.010,67	97,04%	2.264,29	2.239,50	98,90%	11,38%
Belanja Barang	3.353,35	3.190,82	95,15%	4.944,82	4.401,58	89,01%	4.824,65	4.103,79	85,06%	-6,77%
Belanja Modal	1.763,28	1.357,66	77,00%	2.630,22	2.073,11	78,82%	3.149,61	2.779,38	88,25%	34,07%
Bantuan Sosial	2,55	2,55	100,00%	4,59	4,54	98,71%	7,82	7,70	98,43%	69,69%
Belanja Lainnya	248,64	240,75	96,83%	246,44	236,60	96,01%	254,91	0,00	0,00%	-100,00%
Transfer Ke Daerah dan Dana Desa	**7.547,99**	**8.675,46**	**114,94%**	**9.300,45**	**9.200,00**	**98,92%**	**8.181,29**	**8.036,53**	**98,23%**	**-12,65%**
Dana Transfer Umum	**5.466,81**	**6.710,36**	**122,75%**	**6.922,17**	**6.911,72**	**99,85%**	**5.966,57**	**5.897,15**	**98,84%**	**-14,68%**
Dana Bagi Hasil	1.186,17	2.429,72	204,84%	2.447,33	2.446,94	99,98%	1.149,18	1.149,09	99,99%	-53,04%
Dana Alokasi Umum	4.280,64	4.280,64	100,00%	4.474,84	4.464,78	99,78%	4.817,40	4.748,06	98,56%	6,34%
Dana Transfer Khusus	**1.714,68**	**1.599,66**	**93,29%**	**1.979,78**	**1.895,73**	**95,75%**	**1.893,68**	**1.821,93**	**96,21%**	**-3,89%**
Dana Alokasi Khusus Fisik	592,32	553,57	93,46%	805,94	755,76	93,77%	648,36	602,83	92,98%	-20,23%
Dana Alokasi Khusus NonFisik	1.122,36	1.046,09	93,20%	1.173,84	1.139,97	97,11%	1.245,31	1.219,10	97,89%	6,94%
Dana Otsus, DIY, DID	**157,36**	**157,36**	**100,00%**	**166,77**	**166,77**	**100,00%**	**93,99**	**90,98**	**96,80%**	**-45,44%**
Dana Insentif Fiskal	157,36	157,36	100,00%	166,77	166,77	100,00%	93,99	90,98	96,80%	-45,44%
Dana Desa	**209,14**	**208,08**	**99,49%**	**225,94**	**225,78**	**99,93%**	**227,05**	**226,46**	**99,74%**	**0,30%**
Dana Desa	209,14	208,08	99,49%	225,94	225,78	99,93%	227,05	226,46	99,74%	0,30%
Transfer Hibah	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**5,80**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
KESEIMBANGAN PRIMER	**-2.975,05**	**-2.503,78**	**84,16%**	**-7.678,85**	**-5.639,49**	**73,44%**	**3.526,94**	**-3.395,23**	**-96,27%**	**39,80%**
SURPLUS/DEFISIT ANGGARAN	**-2.975,05**	**-2.503,78**	**84,16%**	**-7.678,85**	**-5.639,49**	**73,44%**	**3.526,94**	**-3.395,23**	**-96,27%**	**39,80%**

Sumber: ALCo Kanwil DJPb Kepri dan GFS Kanwil DJPb Kepri, 2025 (diolah)

Pada tahun 2024, Pendapatan dan Hibah ditargetkan sebesar Rp15.155,62 miliar dengan Pagu Belanja sebesar Rp18.682,57 miliar. Tingginya Belanja dibandingkan Pendapatan mengakibatkan **APBN lingkup Kepri mengalami Defisit sebesar Rp3.526,94 miliar**. Kebijakan defisit anggaran diambil pemerintah agar perekonomian tetap tumbuh dengan baik. Pemerintah mempertahankan nominal Belanja Negara yang diharapkan akan memberikan dampak stimulus bagi perekonomian Kepri di berbagai sektor.

Target Pendapatan dan Hibah lebih tinggi sebesar Rp3.635,91 miliar dibandingkan target tahun sebelumnya sebesar Rp11.519,71 miliar. Peningkatan Target Pendapatan berbanding terbalik dengan penurunan Pagu Belanja Negara sebesar Rp515,99 miliar dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp19.198,56 miliar. Secara spesifik, penurunan terjadi di Pagu Transfer ke Daerah (TKD) sedangkan Pagu Belanja Pemerintah Pusat justru meningkat. Fenomena ini lebih lanjut berdampak pada **penurunan Defisit Rp4.151,90 miliar dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp7.678,85 miliar**.

3.1.1 Pendapatan Negara

Grafik 3.1 - Perkembangan Realisasi Pendapatan Negara, 2022 s.d. 2024 (dalam Miliar Rupiah)

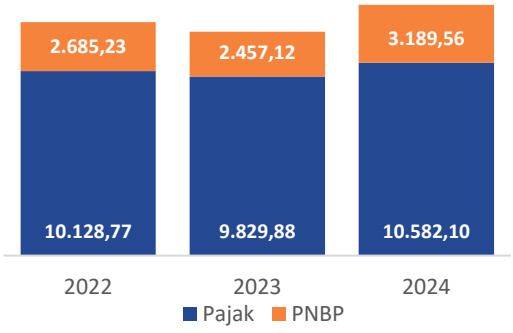

Sumber: ALCo Kanwil DJPb Kepri dan GFS Kanwil DJPb Kepri, 2025 (diolah)

Pendapatan Negara dan Hibah telah terealisasi sebesar Rp13.771,66 miliar (90,87 persen dari Target) meningkat 12,08 persen (*yoy*) dan menunjukan kinerja yang positif sepanjang 2024 sebagaimana tergambar pada Grafik 3.1 di atas.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah terdiri atas **Penerimaan Perpajakan yang memberikan kontribusi dominan yaitu 76,84 persen (Rp10.582,10 miliar)** terhadap total pendapatan APBN regional dan PNBP yang memberikan kontribusi sebesar 23,16 persen (Rp3.189,56 miliar). Rincian perbandingan sebagaimana tersaji dalam pada Grafik 3.2 berikut

Grafik 3.2 - Porsi Realisasi Pendapatan Negara, 2024 (Persen)

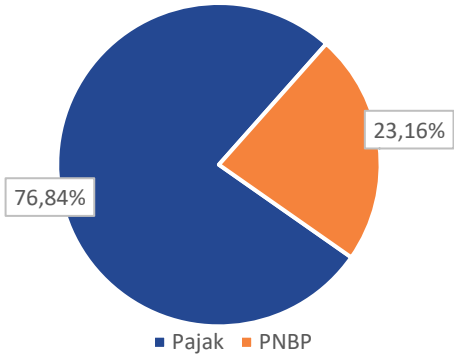

Sumber: ALCo Kanwil DJPb Kepri dan GFS Kanwil DJPb Kepri, 2025 (diolah)

3.1.1.1 Pendapatan Perpajakan

Penerimaan Perpajakan direalisasikan sebesar Rp10.582,10 miliar (85,01 persen dari Target) dan tumbuh 7,65 persen (*yoy*). **Realisasi tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 (Rp9.829,88 miliar) dan tahun 2022 (Rp10.128,77 miliar)** yang sejalan dengan peningkatan Target sebagaimana Grafik 3.3 berikut.

Grafik 3.3 – Perkembangan Target dan Realisasi Penerimaan Perpajakan di Kepri 2022-2024 (Dalam Miliar Rupiah)

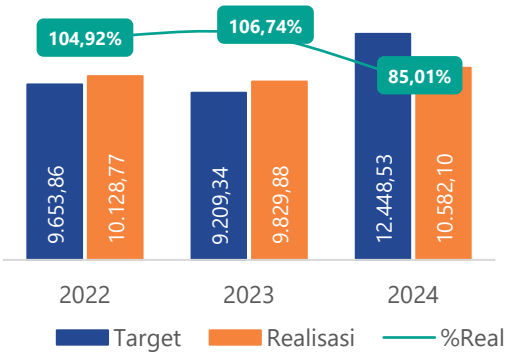

Sumber: ALCo Kanwil DJPb Kepri dan GFS Kanwil DJPb Kepri, 2025 (diolah)

Penerimaan Perpajakan terdiri dari Pajak Dalam Negeri dan Pajak Perdagangan Internasional. **Pajak Dalam Negeri memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan perpajakan** yaitu 94,25 persen (Rp9.973,91 miliar), sedangkan Pajak Perdagangan Internasional memberikan kontribusi sebesar 5,75 persen (Rp608,19 miliar) seperti yang terlihat pada Grafik 3.4 berikut.

Grafik 3.4 - Kontribusi Realisasi Komponen Penerimaan Perpajakan, 2024 (Persen)

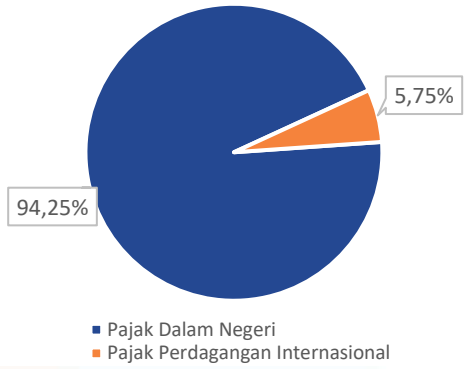

Sumber: ALCo Kanwil DJPb Kepri dan GFS Kanwil DJPb Kepri, 2025 (diolah)

Pada tahun 2024, Penerimaan Perpajakan tumbuh 7,65 persen disumbang oleh pertumbuhan Pajak Dalam Negeri sebesar 10,82 persen, meskipun menghadapi penurunan Pajak Perdagangan Internasional sebesar minus 26,83 persen dengan rincian sebagaimana Tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2 – Pagu dan Realisasi Penerimaan Perpajakan di Kepri, 2022 s.d. 2024 (dalam Miliar Rupiah)

Uraian	TA 2022			TA 2023			TA 2024			Growth (2023-2024)
	Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%	
Penerimaan Perpajakan	**9.653,86**	**10.128,77**	**104,92%**	**9.209,34**	**9.829,88**	**106,74%**	**12.448,53**	**10.582,10**	**85,01%**	**7,65%**
Pajak Dalam Negeri	8.264,81	8.540,02	103,33%	8.528,78	8.999,93	105,52%	11.797,69	9.973,91	84,54%	10,82%
Pajak Perdagangan Internasional	1.389,05	1.588,75	114,38%	680,56	829,95	122,13%	650,85	608,19	93,45%	-26,83%

Sumber: ALCo Kanwil DJPb Kepri dan GFS Kanwil DJPb Kepri, 2025 (diolah)

3.1.1.1.1 Analisis Kinerja Perpajakan

Analisis kinerja perpajakan terbagi menjadi analisis kinerja perpajakan menurut jenisnya dan analisis kinerja perpajakan sektoral menurut lapangan usaha. Kedua jenis analisis ini dijabarkan sebagai berikut.

Perpajakan Menurut Jenisnya

Tabel 3.3 berikut menyajikan perkembangan penerimaan perpajakan menurut jenisnya dalam tiga tahun terakhir.

Tabel 3.3 – Perkembangan Perpajakan di Kepri, 2022-2024 (dalam Miliar Rupiah)

Uraian	TA 2022			TA 2023			TA 2024			Growth (2023-2024)
	Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%	
PPh Non Migas	7.815,94	8.567,03	109,61%	8.350,89	8.554,33	102,44%	10.301,22	10.342,70	100,40%	20,91%
PPN	532,00	666,80	125,34%	1.067,44	1.183,10	110,84%	1.205,29	1.191,02	98,82%	0,67%
PPNBM	2,03	1,85	91,39%	2,01	0,04	2,13%	0,26	0,22	84,62%	413,34%
PBB dan BPHTB	24,59	29,46	119,80%	28,84	29,56	102,50%	29,39	35,47	120,69%	19,99%

PPh Migas	0,00	-0,04	N/A	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,02	1,00%	333,49%
Pajak Lainnya*	80,65	36,93	45,79%	91,47	83,49	91,28%	83,39	88,13	105,68%	5,55%
Total	**8.455,21**	**9.302,04**	**110,02%**	**9.540,66**	**9.850,54**	**103,25%**	**11.619,55**	**11.657,56**	**100,33%**	**18,34%**

Sumber: Kanwil DJP Kepri, 2025 (diolah)

Berdasarkan jenisnya, kinerja perpajakan didominasi oleh PPh Non-Migas sebesar Rp10.342,70 miliar. Jumlah ini mendominasi sekitar 88,72 persen dari total Penerimaan Perpajakan di Kepri. Sumbangan terkecil diberikan oleh PPh Migas sebesar Rp0,02 miliar. Penerimaan dari PPh Non-Migas mengalami peningkatan 20,91 persen (*yoy*) meskipun demikian pertumbuhan tertinggi terjadi pada jenis pajak PPNBM sebesar 413,34 persen (*yoy*) dan pertumbuhan terkecil terjadi pada PPN sebesar 0,67 persen (*yoy*).

Perpajakan Sektoral Menurut Lapangan Usaha

Secara kumulatif pada tahun 2024, **Industri Pengolahan menjadi sektor penyumbang penerimaan Perpajakan terbesar yaitu Rp5.319,63 miliar dengan kontribusi sebesar 45,63 persen**, kemudian berturut-turut oleh Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor yaitu Rp1.281,65 miliar (10,99 persen), Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar Rp1.003,95 miliar (8,61 persen), Konstruksi sebesar Rp915,55 miliar (7,85 persen), serta Pengangkutan dan Pergudangan Rp762,47 miliar (6,54 persen). Sedangkan sisanya Rp2.374,28 miliar (20,37 persen) merupakan gabungan dari Penerimaan Perpajakan di luar sektor dominan dengan rincian sebagaimana Tabel 3.4 berikut.

Tabel 3.4 – Realisasi Perpajakan per Sektor Dominan di Kepri, 2023-2024 (dalam Miliar Rupiah)

Nama Sektor	Realisasi		Growth (*yoy*)	Kontribusi
	2023	2024		
Industri Pengolahan	3.855,15	5.319,63	37,99%	45,63%
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	1.272,71	1.281,65	0,70%	10,99%
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	12,30	1.003,95	8060,57%	8,61%
Konstruksi	471,51	915,55	94,17%	7,85%
Pengangkutan dan Pergudangan	570,10	762,47	33,74%	6,54%
Aktivitas Keuangan dan Asuransi	312,72	436,80	39,68%	3,75%
Pertambangan dan Penggalian	0,00	282,73	-	2,43%
Pejabat Negara, Karyawan, Pensiunan, Tidak/Belum Bekerja	0,00	267,79	-	2,30%
Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	3,74	264,61	6983,60%	2,27%
Real Estate	41,46	260,65	528,73%	2,24%
Aktivitas Penyewaan Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	128,82	189,06	46,76%	1,62%
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	45,59	166,80	265,85%	1,43%
Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	24,88	156,39	528,55%	1,34%
Informasi dan Komunikasi	44,14	129,67	193,80%	1,11%
Aktivitas Jasa Lainnya	12,48	81,81	555,61%	0,70%
Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	54,21	50,54	-6,78%	0,43%
Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment dan Pemulihan Material Sampah, dan Aktivitas Remediasi	25,70	32,88	27,95%	0,28%
Pendidikan	19,18	29,49	53,77%	0,25%
Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	13,92	24,16	73,53%	0,21%
Jasa Perorangan uang Melayani Rumah Tangga	0,68	0,76	12,45%	0,01%
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	23,19	0,12	-99,47%	0,00%
KLU Tidak Diketahui	2.918,06	0,00	-100,00%	0,00%
Total	**9.850,54**	**11.657,52**	**18,34%**	**100,00%**

Sumber: Kanwil DJP Kepri, 2025 (diolah)

Kanwil DJP Kepri melakukan beberapa *extra efforts* selama triwulan III 2024, antara lain berupa: (i) melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara DJP - Polda - Dispenda berupa Pengawasan PPNDN kendaraan bermotor pada FTZ Batam, yang dilaksanakan di unit SAMSAT Polda KEPRI dibawah Regident Direktorat Lalu Lintas; dan (ii) mengadakan edukasi tentang sistem perpajakan terbaru, *Coretax*, bagi wajib pajak dari 19 Agustus s.d. 5 September 2024 di Batam.

3.1.1.1.2 Analisis Kinerja Bea dan Cukai

Pada tahun 2024, berdasarkan data Kanwil BC Khusus Kepri dan KPU BC Batam diketahui bahwa total **realisasi Bea dan Cukai di Kepri sebesar Rp659,77 miliar**. Realisasi ini terdiri atas Bea Masuk Rp430,87 miliar (108.49 persen terhadap Target), Bea Keluar Rp188,27 miliar (116,21 persen terhadap Target), Cukai 39,54 miliar (105,75 persen terhadap Target), dan Penerimaan Bea dan Cukai Lainnya Rp1,09 milliar. Adapun rincian penerimaan Bea dan Cukai mulai dari tahun 2022 sampai dengan 2024 sebagaimana tersaji pada Tabel 3.5 berikut.

Tabel 3.5 – Perkembangan Bea dan Cukai di Kepri, 2022-2024 (dalam Miliar Rupiah)

URAIAN	TA 2022			TA 2023			TA 2024			Growth (2023-2024)
	Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%	
Bea Masuk	680,01	890,39	130,94%	618,08	678,51	109,78%	397,17	430,87	108,49%	-36,50%
Bea Keluar	732,16	787,59	107,57%	168,23	150,83	89,66%	162,01	188,27	116,21%	24,82%
Cukai	10,75	16,39	152,48%	22,59	27,29	120,83%	37,39	39,54	105,75%	44,88%
Penerimaan BC lainnya*	0,00	0,38	100%	0,00	1,79	100%	0,00	1,09	100%	-39,23%
Total	**1.422,92**	**1.694,75**	**119,10%**	**808,90**	**858,43**	**106,12%**	**596,57**	**659,77**	**110,59%**	**-23,14%**

Sumber: Kanwil DJPBC Kepri dan KPUBC Batam, 2025 (diolah)

Jumlah penerimaan Bea dan Cukai cenderung menurun dari tahun 2022 sampai dengan 2024. Pada tahun 2022, Penerimaan Bea dan Cukai sebesar Rp1.694,75 miliar kemudian pada tahun 2023 sebesar Rp858,43 miliar dan pada tahun 2024 sebesar Rp659,77 miliar sehingga terjadi kontraksi sebesar 23,14 persen.

Kontraksi pada Bea Masuk disebabkan beberapa hal, yaitu: (i) penurunan aktivitas importasi kebutuhan pembangunan KEK dikarenakan pembangunan KEK sudah hampir selesai sehingga berdampak pada menurunnya frekuensi dan volume impor; dan (ii) adanya pengembalian bea masuk kepada beberapa perusahaan.

Persentase realisasi tertinggi terdapat pada Bea Keluar sebesar 116,21 persen. Capaian Bea Keluar ini seluruhnya terjadi di wilayah kerja KPU BC Batam. Adapun penyumbang terbesar Bea Keluar yaitu aktivitas ekspor yang didominasi oleh: RBD Palm Olein, RBD Palm Kernel Oil, RBD Palm Olein, Palm Kernel Fatty Acid Distillate, dan RBD Palm Oil.

Realisasi Cukai mengalami pertumbuhan tertinggi pada tahun 2024 sebesar 44,88 persen (yoy). Komponen penyumbang Cukai terbesar yaitu Minuman Mengandung Ethyl Alkohol (MMEA), serta Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang didorong oleh peningkatan permintaan pita cukai (CK-1) dari beberapa perusahaan rokok/tembakau yang mengalihkan penjualan dari penjualan luar negeri ke penjualan di daerah lokal.

3.1.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Target PNBP lingkup Kepri cenderung meningkat dari tahun 2022 sebesar Rp2.165,00 miliar, lalu pada tahun 2023 sebesar Rp2.300,79 miliar, hingga tahun 2024 menjadi 2.707,09 miliar. Kenaikan target ini diikuti dengan peningkatan realisasi PNBP lingkup Kepri.

Grafik 3.5 – Perkembangan Target dan Realisasi PNBP di Kepri, 2022-2024 (dalam Miliar Rupiah)

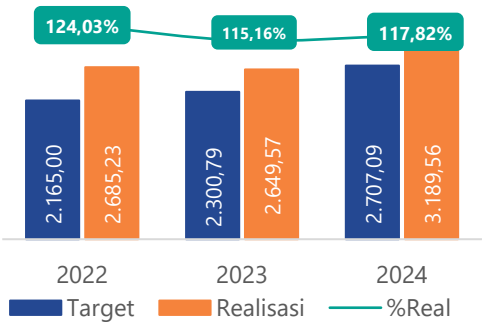

Sumber: ALCo Kanwil DJPb Kepri dan GFS Kanwil DJPb Kepri, 2025 (diolah)

Realisasi PNBP pada tahun 2024 sebesar Rp3.189,56 miliar (117,82 persen dari Target). Kinerja realisasi Penerimaan PNBP cukup optimal dengan pertumbuhan sebesar 20,38 persen (*yoy*).

Pada Grafik 3.6 terlihat bahwa realisasi PNBP didominasi sebesar 74,68 persen oleh PNBP Pendapatan BLU Rp2.382,05 miliar, sedangkan sisanya disumbang oleh PNBP lainnya (Rp807,51 miliar). **Pendapatan BLU selain ditopang oleh BP Batam juga ditopang oleh tiga BLU muda (kurang lebih berumur 1-2 tahun) di Kepri,** yaitu Poltek Negeri Batam, BLU RS Bhayangkara Batam dan BLU RSAL dr. Midiyato Tanjungpinang. Dari sisi PNBP lainnya, tingginya lalu lintas keluar masuk Indonesia oleh wisatawan asing maupun

Grafik 3.6 - Kontribusi Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2024 (Persen)

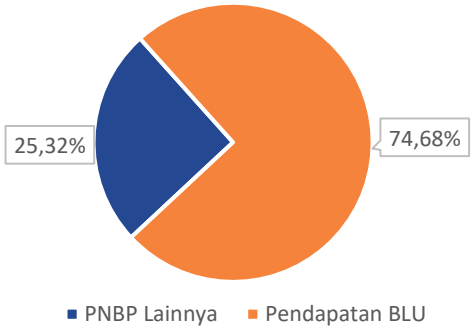

Sumber: OM-SPAN, 2025 (diolah)

wisatawan lokal berdampak pada pertumbuhan realisasi akun PNBP Lainnya.

Data dari KPKNL Batam merincikan PNBP lingkup Kepri di luar Pendapatan BLU menjadi **PNBP Aset, PNBP Piutang Negara, dan PNBP Lelang** dengan rincian target dan realisasi sebagaimana dirinci pada Tabel 3.6 berikut.

Tabel 3.6 – Perkembangan PNBP di Kepri, 2022-2024 (dalam Miliar Rupiah)

Uraian	TA 2022			TA 2023			TA 2024			Growth (2023-2024)
	Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%	
PNBP Aset	140,00	298,76	213,40%	174,31	300,19	172,22%	259,14	562,93	217,23%	87,52%
PNBP Piutang Negara	0,02	0,29	1450,00%	0,06	0,12	200,00%	0,09	0,06	66,67%	-50,00%
PNBP Lelang	10,15	12,48	122,96%	25,17	17,02	67,62%	23,74	23,86	100,51%	40,19%
Total	**150,17**	**311,53**	**207,45%**	**199,54**	**317,33**	**159,03%**	**282,97**	**586,85**	**207,39%**	**84,93%**

Sumber: KPKNL Batam, 2025 (diolah)

Target PNBP cenderung meningkat mulai dari tahun 2022 (Rp150,17 miliar), tahun 2023 (Rp199,54 miliar), dan tahun 2024 (Rp282,97 miliar). Sejalan dengan peningkatan target PNBP, **realisasi PNBP juga turut meningkat** sebesar Rp311,53 miliar (2022), Rp317,33 miliar (2023) dan Rp586,85 miliar (2024). Pada tahun 2024 terjadi realisasi PNBP

sebesar 207,37 persen dari Target dengan pertumbuhan realisasi PNBP sebesar 84,93 persen (*yoy*).

3.1.1.3 Penerimaan Hibah

Pada tahun 2022 sampai dengan 2024 tidak terdapat penerimaan Hibah pada lingkup provinsi Kepri.

3.1.2 Belanja Negara

Belanja Negara dalam hal ini merupakan realisasi Belanja Pemerintah Pusat lingkup provinsi Kepri.

3.1.2.1 Belanja Pemerintah Pusat (BPP)

Persentase Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) pada tahun 2024 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dan menjadi realisasi dengan persentase terendah dalam tiga tahun terakhir. Realisasi BPP pada tahun 2024 sebesar Rp9.130,36 miliar atau 86,95 persen terhadap Pagu. Realisasi ini mengalami pertumbuhan 4,63 persen (*yoy*). Rincian Pagu dan realisasi BPP tergambar dalam Grafik 3.7 berikut.

Grafik 3.7 – Pagu dan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat, 2022 s.d. 2024 (dalam Miliar

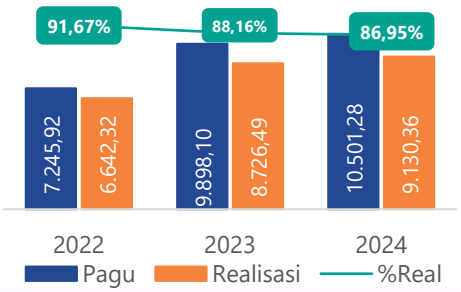

Sumber: OM-SPAN, 2025 (data diolah)

3.1.2.2 Berdasarkan Jenis Belanja

Berdasarkan jenis Belanja, sebagaimana tergambar pada Grafik 3.8 bahwa **BPP secara berturut-turut didominasi oleh: Belanja Barang Rp4.103,79 miliar (44,95 persen);** Belanja Modal Rp2.779,38 miliar (30,44 persen); Belanja Pegawai Rp2.239,50 miliar (24,53 persen); Bantuan Sosial Rp7,70 miliar (0,08 persen); dan Belanja Lainnya Rp0,00 miliar (0,00 persen).

Dari Grafik 3.9 terlihat bahwa ada **tiga jenis BPP yang mengalami kenaikan realisasi**

Grafik 3.8 – Kontribusi Belanja Pemerintah Pusat, 2024 (Persen)

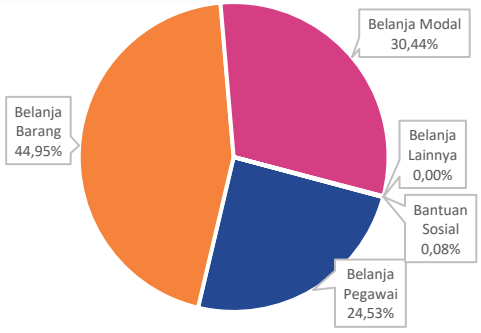

Sumber: OM-SPAN, 2025 (diolah)

bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu Belanja Pegawai, Belanja Modal, dan Bantuan Sosial, sedangkan Belanja Barang dan Belanja Subsidi mengalami penurunan realisasi dibandingkan tahun sebelumnya.

Grafik 3.9 – Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat, 2022 s.d. 2024

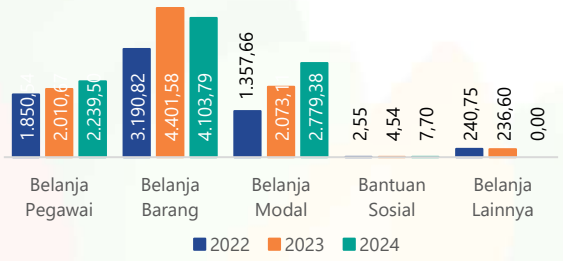

Sumber: OM-SPAN, 2025 (data diolah)

3.1.2.3 Berdasarkan Kementerian Negara/Lembaga (K/L)

Terdapat 15 (lima belas) K/L dengan Pagu Belanja terbesar dengan total Pagu Rp9.686,07 miliar atau 95,13 persen dari total Pagu seluruh satuan kerja lingkup Kepri. Pada tahun 2024, realisasi lima belas K/L tersebut mencapai Rp9.150,64 miliar atau sebesar 95,05 persen dari total realisasi Belanja seluruh K/L lingkup Kepri yang secara rinci tersaji dalam Tabel 3.7 berikut.

Tabel 3.7 – Perbandingan Proporsi Pagu dan Realisasi Belanja Seluruh 40 K/L dan 15 K/L Terbesar, 2022 s.d. 2024 (dalam Miliar Rupiah)

Uraian	TA 2022			TA 2023			TA 2024			Growth (2023-2024)
	Pagu	Real	%	Pagu	Real	%	Pagu	Real	%	
15 K/L Pagu Terbesar	6.475,18	5.895,11	91,04%	9.153,13	8.457,74	92,40%	9.686,07	9.150,64	94,47%	8,19%
Seluruh 40 K/L	7.245,92	6.642,32	91,67%	9.898,59	9.184,64	92,79%	10.181,79	9.626,91	94,55%	4,82%
Proporsi 15 K/L terhadap 40 K/L	**89,36%**	**88,75%**		**92,47%**	**92,09%**		**95,13%**	**95,05%**		

Sumber: Sintesa, 2025 (diolah)

Meskipun mengalami peningkatan pagu, data pada Tabel 3.7 dapat dilihat bahwa selama tiga tahun persentase realisasi Belanja lima belas K/L pagu terbesar selalu lebih rendah dibandingkan dengan persentase Belanja seluruh K/L lingkup Kepri. Hal ini perlu perhatian khusus untuk mengetahui penyebab rendahnya persentase realisasi tersebut. Adapun rincian Belanja lima belas K/L Pagu terbesar tersaji pada Tabel 3.8 berikut.

Tabel 3.8 - Realisasi Belanja Lima Belas K/L Pagu Terbesar, 2022 s.d. 2024 (dalam Miliar Rupiah)

K/L	TA 2022		TA 2023		TA 2024		*Growth (2023-2024)*
	Pagu	Real.	Pagu	Real.	Pagu	Real.	
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (BPKPB Batam)	2.066,22	1.630,82	2.637,64	2.145,28	2.972,68	2.599,74	21,18%
Kementerian Pertahanan	808,42	799,41	1.431,89	1.419,08	1.226,84	1.222,24	-13,87%
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	912,16	842,00	1.651,44	1.579,49	1.104,21	1.095,05	-30,67%
Kepolisian Negara Republik Indonesia	763,24	761,50	830,35	828,25	885,57	876,06	5,77%
Kementerian Perhubungan	296,11	290,57	521,92	477,02	745,49	693,40	45,36%
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi	248,01	238,58	413,93	399,76	657,89	633,92	58,58%
Komisi Pemilihan Umum	50,37	46,58	160,32	155,04	388,95	374,47	141,53%
Kementerian Agama	280,84	278,50	342,45	338,84	347,66	372,29	9,87%
Kementerian Keuangan	299,67	287,98	299,02	285,20	340,24	332,02	16,42%
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Ri	250,22	246,05	246,58	242,80	320,02	315,07	29,77%
Badan Pengawas Pemilihan Umum	38,97	36,46	116,49	96,21	217,36	170,51	77,22%
Kementerian Kesehatan	207,86	188,97	186,30	181,31	153,76	149,09	-17,77%
Mahkamah Agung	84,65	81,05	130,35	128,50	117,21	115,72	-9,94%
Kementerian Kelautan Dan Perikanan	91,27	90,64	98,23	97,34	104,83	100,39	3,13%
Kejaksaan Republik Indonesia	77,18	76,00	86,23	83,62	103,37	100,67	20,38%
Total	**6.475,18**	**5.895,11**	**9.153,13**	**8.457,74**	**9.686,07**	**9.150,64**	**8,19%**

Sumber: Sintesa, 2025 (diolah)

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (BPKPB Batam) merupakan satuan kerja (satker) BLU dengan Pagu Belanja terbesar yaitu Rp2.972,68 miliar (29,19 persen dari Pagu) dan menjadi satker dengan realisasi terbesar yaitu Rp2.599,74 miliar.

Satker dengan *growth* realisasi Belanja terbesar (*yoy*) yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar 141,53 persen dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) sebesar 77,22 persen. Peningkatan realisasi belanja yang signifikan pada kedua satker ini dalam rangka belanja pemilihan umum di bulan Februari 2024.

3.1.2.4 Berdasarkan Fungsi

Ditinjau dari fungsi pemerintahan, tiga fungsi dengan pagu Belanja tertinggi terdapat pada fungsi Ekonomi (Rp4.844,85 miliar), Ketertiban dan Keamanan (Rp1.449,77 miliar), dan Pertahanan (Rp1.226,84 miliar). Adapun urutan realisasi Belanja terbesar sejalan dengan Pagu yaitu fungsi Ekonomi (Rp4.403,12 miliar), Ketertiban dan Keamanan (Rp1.430,28 miliar), dan Pertahanan (Rp1.222,24 miliar).

Jika ditinjau dari **persentase realisasi terhadap Pagu, maka fungsi Agama menjadi peringkat persentase realisasi terbesar (105,12 persen),** disusul oleh Pariwisata dan Budaya (99,95 persen), dan Pertahanan (99,62 persen). Belanja fungsi Agama yang melebihi Pagu terjadi di K/L Kementerian Agama dan memerlukan analisis lebih lanjut. Adapun rincian Pagu dan realisasi masing-masing fungsi dapat dilihat pada Tabel 3.9 berikut.

Tabel 3.9 - Realisasi Belanja Menurut Fungsi, 2022 s.d. 2024 (Dalam Miliar Rupiah)

Fungsi	TA 2022			TA 2023			TA 2024			*Growth* (2023-2024)
	Pagu	Real	%	Pagu	Real	%	Pagu	Real	%	
Agama	88,52	87,48	98,82%	96,20	93,41	97,10%	102,48	107,73	105,12%	15,33%
Ekonomi	3.295,10	2.777,42	84,29%	4.737,12	4.122,09	87,02%	4.844,85	4.403,12	90,88%	6,82%
Kesehatan	238,59	220,43	92,39%	226,37	221,60	97,89%	214,63	209,71	97,71%	-5,36%
Ketertiban Dan Keamanan	1.200,58	1.189,70	99,09%	1.319,98	1.309,53	99,21%	1.449,77	1.430,28	98,66%	9,22%
Lingkungan Hidup	110,83	107,06	96,60%	98,76	98,17	99,40%	110,12	107,96	98,04%	9,97%
Pariwisata Dan Budaya	1,53	1,52	99,66%	1,09	1,08	99,84%	1,54	1,53	99,95%	41,63%
Pelayanan Umum	538,87	516,25	95,80%	708,60	667,77	94,24%	1.071,83	995,92	92,92%	49,14%
Pendidikan	523,68	511,04	97,59%	693,28	677,79	97,77%	957,89	952,12	99,40%	40,47%
Pertahanan	808,42	799,41	98,89%	1.431,89	1.419,08	99,11%	1.226,84	1.222,24	99,62%	-13,87%
Perumahan Dan Fasilitas Umum	176,35	176,05	99,83%	323,21	322,21	99,69%	201,84	196,30	97,25%	-39,08%
Total	**6.982,46**	**6.386,36**	**91,46%**	**9.636,49**	**8.932,72**	**92,70%**	**10.181,8**	**9.626,91**	**94,55%**	**7,77%**

Sumber: Sintesa, 2025 (diolah)

Dari sepuluh fungsi yang ada, tujuh fungsi mengalami pertumbuhan realisasi yang positif, sedangkan tiga fungsi mengalami pertumbuhan realisasi yang minus. **Pertumbuhan realisasi tertinggi ada pada fungsi Pelayanan Umum (49,14 persen)** kemudian berturut-turut yaitu: Pariwisata dan Budaya (41,63 persen), Pendidikan (40,47 persen), Agama (15,33 persen), Lingkungan Hidup (9,97 persen), Ketertiban dan Keamanan (9,22 persen), dan Ekonomi (6,82 persen).

Sedangkan **pertumbuhan negatif atau perlambatan pertumbuhan Belanja terjadi pada fungsi** Kesehatan (-5,36 persen), Pertahanan (-13,87 persen), dan Perumahan dan Fasilitas Umum (-39,08 persen).

3.1.3 Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKD)

Transfer ke Daerah (TKD) merupakan wujud dari peran APBN dalam menghadirkan pemerataan bagi seluruh masyarakat Indonesia sehingga tidak terjadi kesenjangan kemampuan fiskal yang jauh (*Fiscal Capacity Gap*) antar daerah baik kabupaten/kota maupun provinsi.

TKD terbagi menjadi Dana Transfer Umum (DTU), Dana Tranfer Khusus (DTK), Dana Insentif Fiskal, dan Dana Desa. DTU terbagi atas Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Sedangkan DTK terbagi atas Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan DAK Non-Fisik.

Total realisasi TKD pada tahun 2024 sebesar Rp8.036,53 miliar atau 98,23 persen dari Pagu. Realisasi ini mengalami perlambatan pertumbuhan sebesar minus 12,65 persen *(yoy)* sejalan dengan penurunan Pagu TKD dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Rincian Pagu dan realisasi Belanja TKD dijabarkan sebagaimana Tabel 3.10 berikut.

Tabel 3.10 – Perkembangan Pagu dan Realisasi Belanja TKD di Kepri, 2022 s.d. 2024 (Dalam Miliar Rupiah)

I-Account (Miliar Rupiah)	TA 2022			TA 2023			TA 2024			Growth (2023-2024)
	Pagu	Real	% Real	Pagu	Real	% Real	Pagu	Real	% Real	
Dana Transfer Umum	5.466,81	6.710,36	122,75%	6.922,17	6.911,72	99,85%	5.966,57	5.897,15	98,84%	-14,68%
Dana Transfer Khusus	1.714,68	1.599,66	93,29%	1.979,78	1.895,73	95,75%	1.893,68	1.821,93	96,21%	-3,89%
Dana Insentif Fiskal	157,36	157,36	100,00%	166,77	166,77	100,00%	93,99	90,98	96,80%	-45,44%
Dana Desa	209,14	208,08	99,49%	225,94	225,78	99,93%	227,05	226,46	99,74%	0,30%
Total TKD	**7.547,99**	**8.675,46**	**114,94%**	**9.300,45**	**9.200,00**	**98,92%**	**8.181,29**	**8.036,53**	**98,23%**	**-12,65%**

Sumber: OM-SPAN, 2025 (diolah)

Dari keempat jenis TKD, **pertumbuhan realisasi hanya ada pada oleh Dana Desa** (0,30 persen) sementara komponen TKD lainnya mengalami pertumbuhan realisasi yang kontraktif yaitu DTK (minus 3,89 persen), DTU (minus 14,68 persen), dan DID (minus 45,44 persen).

3.1.3.1 Dana Transfer Umum (DTU)

Grafik 3.10 – Proporsi Realisasi Dana Transfer Umum, 2024 (Persen)

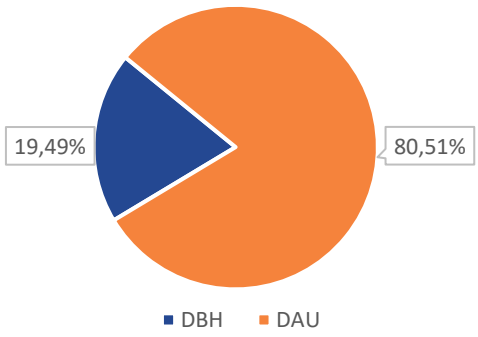

Sumber: OM-SPAN, 2025 (diolah)

Realisasi DTU sebesar Rp5.897,15 miliar atau 98,84 persen dari Pagu. **Realisasi ini didominasi oleh DAU sebesar Rp4.748,06** miliar (80,51 persen) dibandingkan dengan DBH sebesar Rp1.149,09 (19,49 persen). Proporsi realisasi DTU sebagaimana Grafik 3.10 di atas.

Persentase DAU yang lebih besar menggambarkan fokus pemerintah dalam hal memperkecil ketimpangan fiskal antar daerah dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Seperti yang tersaji pada Grafik 3.11, **realisasi DAU pada tahun 2024 sebesar Rp4.748,06 miliar (98,56 persen dari Pagu**) dengan pertumbuhan 6,34 persen (*yoy*). Pagu DAU terus mengalami peningkatan dari tahun

Grafik 3.11 – Pagu dan Realisasi Dana Alokasi Umum, 2022 s.d. 2024 (dalam Miliar Rupiah)

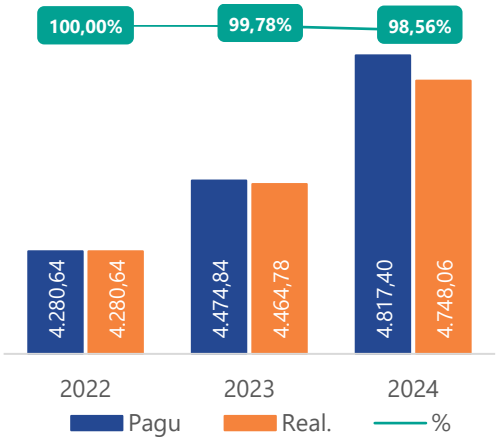

Sumber: OM-SPAN, 2025 (diolah)

2022 sampai dengan 2024 diikuti dengan peningkatan realisasi DAU pada tahun 2022 sampai dengan 2024. Meski demikian, terjadi

penurunan persentase realisasi DAU terus menerus dari tahun 2022 sampai dengan 2024.

Realisasi DAU di lingkup Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 telah tersalurkan secara optimal atau lebih dari 90,00 persen dengan rincian sesuai Grafik 3.12. **Penyaluran tertinggi pada Pemprov Kepri** sebesar Rp1.177,92 miliar atau 100,00 persen dari Pagu, sedangkan pemda dengan **persentase realisasi DAU terendah pada Kabupaten Karimun** sebesar 95,76 persen dari Pagu atau Rp445,68 miliar. Rendahnya realisasi tersebut dipengaruhi oleh penyaluran DAU Penggajian Formasi PPPK yang tidak optimal sebesar 27,91 persen dari Pagu, akibat perubahan mekanisme penyaluran yang menggunakan laporan rencana atau realisasi pembayaran. **Tidak terpenuhinya formasi PPPK pada Kabupaten Karimun mengakibatkan rendahnya realisasi pembayaran pada tahun 2024**.

Grafik 3.12 – Pagu dan Realisasi Dana Alokasi Umum per Pemda, 2024 (dalam Miliar Rupiah)

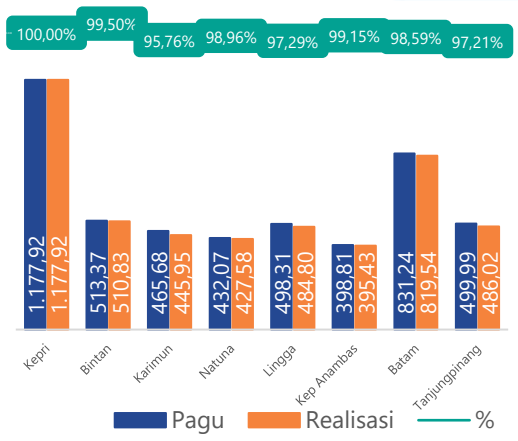

Sumber: OM-SPAN TKD, 2025 (diolah)

Dana Bagi Hasil (DBH)

Realisasi DBH pada tahun 2024 sebesar Rp1.149,09 miliar (99,99 persen dari Pagu). Pagu DBH tahun 2024 (Rp1.149,18 miliar) mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan Pagu tahun 2023 (Rp2.447,33 miliar). Penurunan Pagu diikuti dengan penurunan realisasi DBH sehingga menyebabkan **DBH tumbuh kontraktif sebesar minus 53,04 persen (*yoy*)**. Pagu dan realisasi DBH sebagaimana Grafik 3.13 berikut.

Sesuai dengan Tabel 3.11 di bawah ini, penyaluran DBH Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2024 telah terealisasikan secara optimal

Grafik 3.13 – Pagu dan Realisasi Dana Bagi Hasil, 2022 s.d. 2024

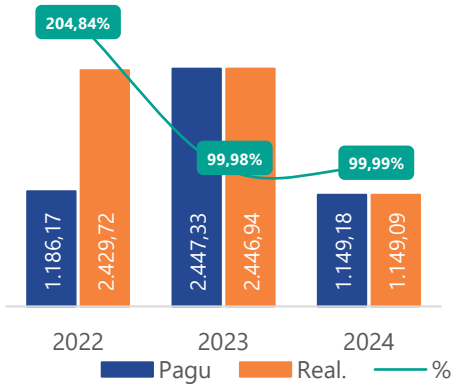

Sumber: OM-SPAN TKD, 2025 (diolah)

sebesar Rp1.149,09 miliar atau 99,99 persen dari total Pagu 2024 yaitu Rp1.149,18 miliar. Terdapat 6 pemerintah daerah dengan realisasi yang mencapai 100,00 persen. Sedangkan 2 pemerintah daerah, yaitu Kabupaten Bintan dan Karimun masing-masing mencapai 99,99 persen dan 99,91 persen. Rendahnya realisasi pada Kabupaten Karimun dipengaruhi oleh **tidak tersalurnya DBH SDA Kehutanan – PSDH dengan Pagu 66,72 juta**. Pada Kabupaten Bintan DBH SDA Kehutanan – PSDH juga **tidak dapat tersalur optimal atau 74,55 persen** dari Pagu.

Tabel 3.11 – Perkembangan Pagu dan Realisasi DBH di Kepri, 2024 (dalam Miliar Rupiah)

Pemda (1)	Pagu (2)	Rekomendasi (Bruto) (3)	Potongan (4)	Penundaan (5)	Realisasi (Neto) (6)	% Salur (2/3)
1. Prov Kepri	302,51	302,51	12,28	0	290,23	100,00%
2. Bintan	71,01	71,00	3,76	0	67,24	99,99%
3. Karimun	82,36	82,29	2,66	0	79,62	99,91%
4. Natuna	221,36	221,36	18,28	0	203,08	100,00%
5. Lingga	66,20	66,20	3,99	0	62,21	100,00%
6. Kep Anambas	153,83	153,82	11,75	0	142,07	100,00%
7. Batam	190,51	190,51	7,43	0	183,08	100,00%
8. Tanjungpinang	61,41	61,41	2,11	0	59,29	100,00%
Total	**1.149,18**	**1.149,09**	**62,27**	**-**	**1.086,82**	**99,99%**

Sumber: Laporan TKD Semester II 2024 Kanwil DJPb Kepri, 2025

3.1.3.2 Dana Transfer Khusus (DTK)

Realisasi DTK sebesar Rp1.821,93 miliar atau 96,21 persen dari Pagu. **Realisasi ini didominasi oleh DAK Non-Fisik sebesar Rp1.219,10 miliar (66,91 persen dari Pagu)** dibandingkan dengan DAK Fisik sebesar Rp602,83 miliar (33,09 persen dari Pagu). Proporsi realisasi DTK sebagaimana Grafik 3.14 berikut.

Grafik 3.14 – Proporsi Realisasi Dana Transfer Khusus, 2024

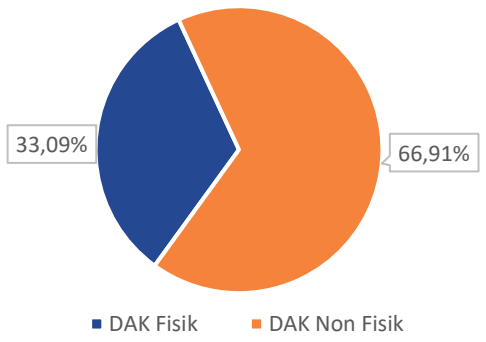

Sumber: OM-SPAN, 2025 (diolah)

DAK Fisik

Realisasi DAK Fisik pada tahun 2024 sebesar Rp602,83 miliar atau 92,98 persen dari Pagu. **Realisasi DAK Fisik tumbuh sebesar minus 20,23 persen (*yoy*)**. Realisasi DAK Fisik dari tahun 2022 sampai dengan 2024 menunjukkan angka yang fluktuatif sejalan dengan Pagu yang juga tumbuh fluktuatif. Dari tahun 2022 sampai dengan 2024, persentase realisasi mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Pagu dan realisasi DAK Fisik tersaji dalam Grafik 3.15 berikut.

Grafik 3.15 – Perkembangan Pagu dan Realisasi DAK Fisik, 2022 s.d. 2024 (Dalam Miliar Rupiah)

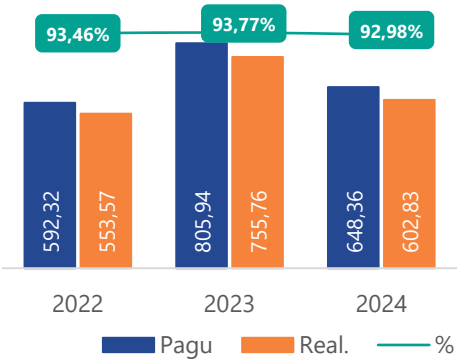

Sumber: OM-SPAN, 2025 (diolah)

Jika dilihat data pada Grafik 3.16 di bawah**, Pemerintah Daerah dengan persentase penyaluran DAK Fisik tertinggi tahun 2024 terdapat pada Kota Tanjungpinang** dengan penyaluran sebesar **Rp29,42 miliar** atau **98,56 persen** dari Pagu, diikuti oleh Kabupaten Bintan dengan total penyaluran 52,18 miliar atau 97,96% dari Pagu.

Grafik 3.16 – Perkembangan Pagu dan Realisasi DAK Fisik di Kepri, 2024 (Dalam Miliar Rupiah)

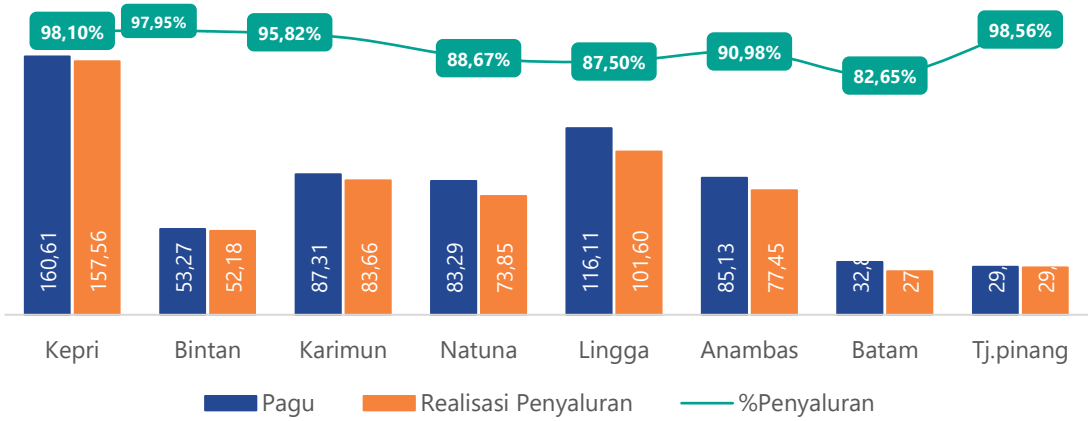

Sumber: Laporan TKD Semester II 2024 Kanwil DJPb Kepri, 2025 (diolah)

Selanjutnya, Pemerintah Daerah dengan **persentase penyaluran DAK Fisik paling kecil terdapat pada Kota Batam 82,65 persen yang disebabkan terdapat 1 kegiatan yang tidak tersalurkan pada DAK Fisik tahap 3 yaitu pada bidang pendidikan subbidang SD di Kota Batam** dengan nilai penyaluran Rp533,44 Juta, karena Pemerintah Kota Batam terlambat menyampaikan syarat salur. Diikuti oleh Pemerintah Kabupaten Lingga dengan persentase 87,50 persen yang disebabkan terjadinya **wanprestasi dari pihak ketiga yang tidak mampu memenuhi kontrak penyediaan alat mesin sentra IKM pertanian sagu senilai 12,30 miliar** sampai batas akhir penyaluran DAK Fisik pada tanggal 16 Desember 2024.

DAK Non – Fisik

Realisasi DAK Non Fisik tahun 2024 sebesar Rp1.219,10 miliar atau 97,89 persen dari Pagu. Realisasi ini tumbuh sebesar 6,94 persen (*yoy*). Realisasi DAK Non Fisik dari tahun 2022 sampai dengan 2024 menunjukkan angka yang terus meningkat sejalan dengan Pagu yang juga meningkat dari tahun ke tahun. Selain itu, peningkatan juga terjadi pada persentase realisasi dan menunjukkan kinerja belanja DAK Non-Fisik khususnya di daerah yang semakin membaik. Pagu dan realisasi DAK Non Fisik tergambar pada Grafik 3.17 berikut.

Grafik 3.17 – Perkembangan Pagu dan Realisasi DAK Non Fisik, 2022 s.d. 2024 (Dalam Miliar Rupiah)

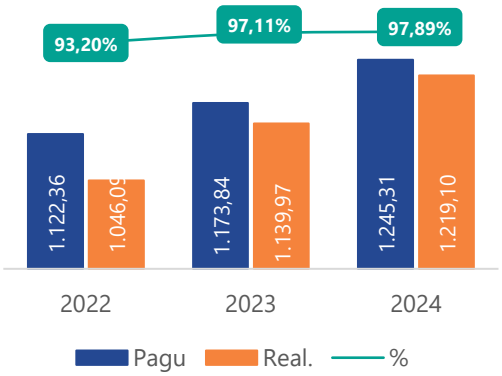

Sumber: OM-SPAN, 2025 (diolah)

Realisasi DAK Non Fisik per pemerintah daerah tahun 2024 telah tersalurkan secara optimal lebih dari 95,00 persen. Pemerintah daerah dengan persentase realisasi tertinggi pada Pemprov Kepri yang mencapai 99,44 persen dari Pagu dan secara nominal Rp312,08 miliar. Sedangkan pemerintah daerah dengan persentase realisasi terendah, yaitu pada Kabupaten Bintan yang mencapai 96,99 persen dari Pagu atau secara nominal sebesar Rp100,79 miliar. Rincian Pagu dan realisasi DAK Non Fisik pemda lingkup Kepri tersaji pada Grafik 3.18 berikut.

Grafik 3.18 – Perkembangan Pagu dan Realisasi DAK Non Fisik di Kepri, 2024 (Dalam Miliar Rupiah)

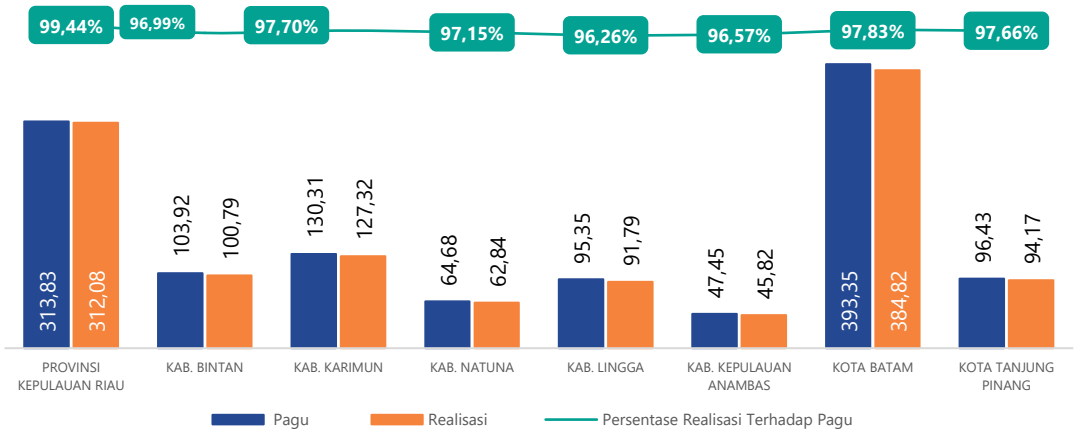

Sumber: Laporan TKD Semester II 2024 Kanwil DJPb Kepri, 2025 (diolah)

3.1.3.3 Dana Insentif Fiskal

Grafik 3.19 – Perkembangan Pagu dan Realisasi Dana Insentif Fiskal, 2022 s.d. 2024 (Dalam Miliar Rupiah)

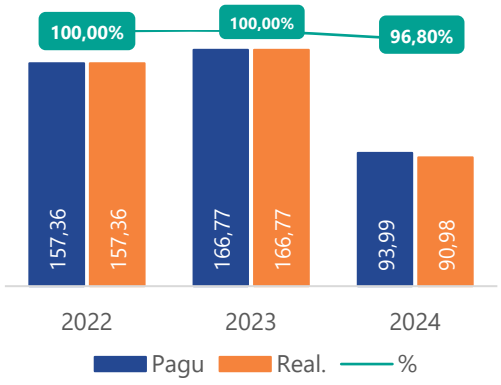

Sumber: OM-SPAN, 2025 (diolah)

Sebagaimana Grafik 3.19 di atas, **realisasi Dana Insentif Fiskal pada tahun 2024 sebesar Rp90,98 miliar atau 96,80 persen** dari Pagu. Persentase ini mengalami penurunan sebesar 45,44 persen (*yoy*) dan jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun 2022 ketika DID terserap maksimal 100 persen.

Realisasi Dana Insentif Fiskal tahun 2024 di Provinsi Kepri optimal 100,00 persen pada Pemerintah Daerah Bintan, Karimun, Natuna, Anambas, Batam, dan Tanjungpinang. Selanjutnya, **penyaluran Dana Insentif Fiskal pada Pemprov Kepri tidak tersalurkan optimal** atau hanya mencapai 79,02 persen dari Pagu, karena **tidak terdapat penyaluran dana kinerja kesejahteraan masyarakat tahap II akibat dari tidak menyampaikan syarat penyalurannya**. Adapun pagu dan realisasi DAK Non Fisik pemda lingkup Kepri secara rinci tergambar pada Grafik 3.20 berikut.

Grafik 3.20 – Perkembangan Pagu dan Realisasi DAK Non Fisik di Kepri, 2024 (Dalam Miliar Rupiah)

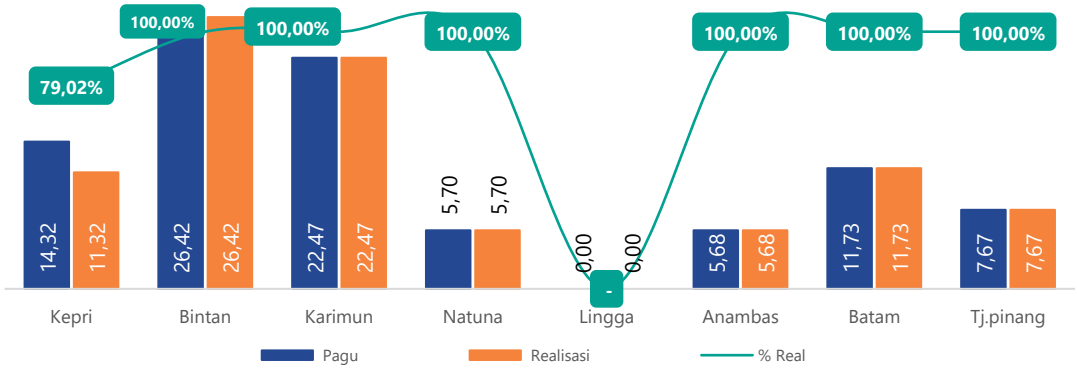

Sumber: Laporan TKD Semester II 2024 Kanwil DJPb Kepri, 2025 (diolah)

3.1.3.4 Dana Desa

Dana Desa pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp226,46 miliar, tumbuh 0,30 persen (*yoy*). Persentase realisasi Dana Desa pada tahun 2024 (99,74 persen dari Pagu) mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 (99,93 persen dari Pagu) maupun tahun 2022 (99,49 persen dari Pagu). Pagu dan realisasi Dana Desa tersaji sebagaimana Grafik 3.21 berikut.

Grafik 3.21 – Perkembangan Pagu dan Realisasi Dana Desa, 2022 s.d. 2024 (Dalam Miliar Rupiah)

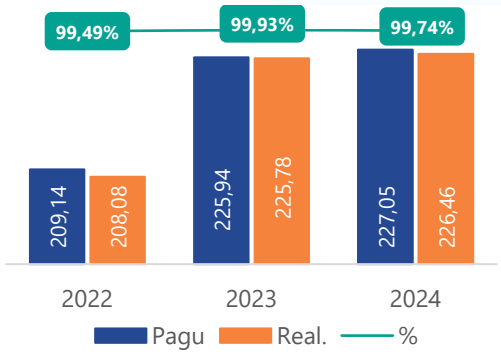

Sumber: OM-SPAN, 2025 (diolah)

Penurunan persentase realisasi Dana Desa disebabkan oleh beberapa desa yang tidak menerima penyaluran dikarenakan alasan administratif terkait kelengkapan dan penyampaian dokumen syarat salur.

Berdasarkan hasil monitoring aplikasi OMSPAN pada tahun 2024**, total realisasi penyaluran Dana Desa Pemda lingkup Provinsi Kepulauan Riau pada 5 (lima) kabupaten sebesar Rp226,46 miliar atau mencapai 99,74 persen dari Pagu**. Adapun realisasi penyaluran Dana Desa Non-BLT Desa sebesar Rp192,43 miliar dan penyaluran BLT Desa sebesar Rp34,61 miliar. **Hingga semester II 2024, terdapat tambahan dana desa sebesar 8,21 miliar yang dapat direalisasikan sebesar 100 persen**. Adapun realisasi Dana Desa per pemda dan per tahap sebagaimana tersaji pada Tabel 3.12 berikut:

Tabel 3.12 – Pagu dan Realisasi Dana Desa Pemda Lingkup Kepri, 2024 (dalam Miliar Rupiah)

Pemda	Desa	Pagu	*Non-Earmark*				*Earmark*				Real Tambahan	Total	%
			Thp 1	Thp 2	Blm 1	Blm 2	Thp 1	Thp 2	Blm 1	Blm 2			
Bintan	36	32,04	5,67	7,72	-	-	10,37	6,92	-	1	1,16	31,84	99,39
Karimun	42	37,75	6,95	8,54	-	-	12,57	8,38	-	-	1,30	37,75	100,00
Natuna	70	54,37	11,42	16,35	-	-	14,76	9,84	-	-	1,99	54,37	100,00
Lingga	75	63,53	12,51	18,33	-	-	18,10	11,89	-	1	2,31	63,14	99,38
Anambas	52	39,37	7,81	10,27	-	-	11,90	7,93	-	-	1,46	39,37	100,00
TOTAL	**275**	**227,05**	**44,36**	**61,22**	**-**	**-**	**67,70**	**44,96**	**-**	**2**	**8,21**	**226,46**	**99,39**

Sumber: Laporan TKD Semester II 2024 Kanwil DJPb Kepri, 2025 (diolah)

Penyaluran Dana Desa pada tahun 2024, terdapat capaian pada **Desa Ekang Anculai Kabupaten Bintan yang mampu meraih penghargaan sebagai salah satu dari 25 Desa Cantik Nasional**. Selanjutnya, Pemerintah **Kabupaten Karimun mendapatkan penghargaan Peringkat II Nasional** pada tahun 2024 dari Kementerian Koordinator Kemenko) Bidang Perekonomian dalam bidang percepatan dan perluasan digitalisasi daerah (P2DD) terkait inovasi digital yang telah dilakukan.

Dalam penyaluran Dana Desa tahun 2024 terdapat beberapa isu strategis di kabupaten/kota dan provinsi meliputi:

1. **Penyaluran Dana Desa tahap dua pada Desa Lancang Kuning**, Kab Bintan tidak tersalurkan karena Kepala Desa Lancang Kuning terkena kasus korupsi sehingga DPMD dan BPKAD tidak mengalokasikan sisa dana tahun sebelumnya di RKD.
2. **Terhambatnya penyaluran Dana Desa tahap I di Kabupaten Lingga pada Desa Resang** yang disebabkan sebagian alokasi

Dana Desa tahap I digunakan oleh Kepala Desa untuk keperluan pribadi, sehingga penyerapan dana tidak mencapai 60% dan capaian output kegiatan tidak mencapai 40 persen.

3. **Sulitnya transportasi disebabkan oleh kondisi geografis** berbentuk kepulauan yang didominasi lautan dan terdiri dari ribuan pulau kecil. Kondisi Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas yang berada pada wilayah terluar Indonesia mengakibatkan desa mengalami kesulitan transportasi, baik maupun mobilitas aparat desa maupun barang. Moda transportasi yang terbatas dan pengaruh cuaca menyebabkan terbatasnya transportasi untuk akses ke desa.
4. **Terbatasnya infrastruktur dasar** pada pulau-pulau diluar pulau Batam dan Bintan meliputi listrik, air dan bbm serta sinyal internet yang tidak stabil dan belum menjangkau seluruh desa menyebabkan perangkat desa sulit untuk mengakses aplikasi sehubungan dengan penyaluran Dana Desa. Sehingga untuk mengakses Siskeudes online harus mencari tempat yang sinyal internetnya stabil.

3.1.4 Surplus/Defisit APBN

Grafik 3.22 – Perkembangan Pagu dan Realisasi Defisit APBN, 2022 s.d. 2024 (Dalam Miliar Rupiah)

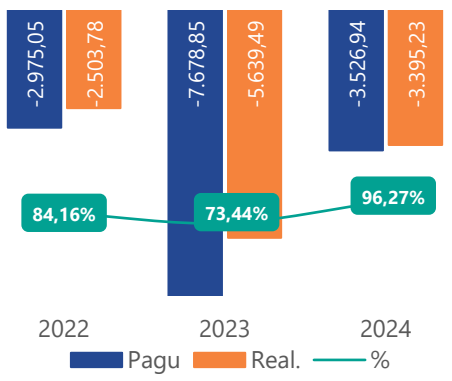

Sumber: OM-SPAN, 2025 (data diolah)

Pada APBN regional Kepri tahun 2024, kebijakan defisit anggaran tetap dilaksanakan dengan besaran **Defisit anggaran sebesar Rp3.526,94 miliar**. Selama tahun 2024, realisasi anggaran mencatat Defisit sebanyak minus Rp3.395,23 miliar. Defisit tersebut sebesar 96,27 persen dari anggaran Defisit yang ditetapkan. Realisasi Defisit yang besar disumbang oleh besarnya realisasi Belanja Negara.

Potensi risiko fiskal dapat memengaruhi stabilitas keuangan daerah seperti, Defisit Anggaran daerah terjadi ketika pendapatan yang diterima daerah tidak mencukupi untuk membiayai Belanja Daerah. **Analisis Risiko Fiskal** pelaksanaan APBN sebagai berikut:

1) Keterlambatan penyerapan anggaran daerah akibat proses administrasi yang panjang, keterbatasan SDM, atau prosedur pengadaan barang dan jasa yang lamban akan mengakibatkan **risiko pada tertundanya pencapaian target pembangunan.**

2) **Keterlambatan penyerapan anggaran berpotensi risiko pada pemborosan anggaran** karena membayar biaya tambahan akibat keterlambatan. Misalnya: biaya inflasi yang meningkat atau biaya tambahan karena proses administrasi yang memakan waktu lama.

3) **Defisit anggaran mengarah pada opsi pembiayaan dengan risiko peningkatan Beban Utang**. jika hutang tidak dikelola dengan baik akan sulit dilunasi dan merusak kestabilan fiskal dalam jangka panjang.

4) **Pemotongan anggaran dalam rangka efisiensi untuk mengurangi Defisit** anggaran mengakibatkan risiko penurunan kualitas program dan proyek berjalan terhadap layanan publik.

5) **Defisit anggaran berlebih meningkatkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah daerah,** dengan anggapan pemda tidak mampu mengendalikan

belanja secara efektif dan efisien sesuai anggarannya.

6) **Risiko ekonomi makro, seperti resesi global atau krisis ekonomi nasional,** dapat memengaruhi pendapatan daerah dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Misalnya: peningkatan harga tiket pesawat/kapal yang menurunkan jumlah kunjungan ke Kepri sehingga tidak menstimulus aktivitas ekonomi daerah.

Beberapa hal perlu diantisipasi, khususnya kinerja penerimaan pada tahun 2025 agar mampu mencapai target dan mampu menopang Belanja sehingga Defisit dapat terjadi sesuai Pagu yang direncanakan.

3.1.5 Pengelolaan BLU Pusat

3.1.5.1. Profil BLU, Jenis Layanan

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam)

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam **(BP Batam), menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 tanggal 4 Februari 2011** tentang Pengelolaan Keuangan pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam serta dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012.

BP Batam sebagai pengelola kawasan bertujuan untuk mengembangkan wilayah Batam, Rempang, dan Galang untuk meningkatkan investasi di sektor industri terpadu, perdagangan, jasa, dan pariwisata. Pengembangan sektor industri diharapkan mampu menampung, mengembangkan, dan memanfaatkan sumber daya baik dari kawasan Batam maupun kawasan sekitarnya dengan mengikutsertakan peran masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan. Hal ini juga dilakukan melalui upaya pengembangan berbagai area investasi yang terkoneksi secara komprehensif dengan ketersediaan pelabuhan laut dan udara dalam rangka memanfaatkan sepenuhnya geografis Pulau Batam yang ada pada jalur perdagangan internasional. Sebagai daerah tujuan wisata bertaraf internasional, Pulau Batam menyiapkan kawasannya untuk pariwisata kapal pesiar, *Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions* (MICE), dan resor.

Jenis Layanan

Terdapat sepuluh produk dan jasa layanan yang diberikan BP Batam kepada masyarakat yang mengacu pada visi dan misi periode 2020-2024 yaitu: layanan jasa pelabuhan laut; layanan pengalokasian lahan; layanan jasa penerbangan; layanan kesehatan masyarakat; layanan rekomendasi sambungan air bersih; layanan rumah susun; asrama haji; agribisnis; dan aset lainnya; layanan data center dan training center; layanan izin penempatan reklame dan laboratorium uji tanah; layanan perizinan lalu lintas barang; serta layanan fatwa planogi.

Terdapat dua belas unit kerja pada BP Batam yaitu Badan Usaha Pelabuhan, Direktorat Pengelolaan Pertanahan, Unit Usaha Pengelola Logistik Aerocity, Badan Usaha Rumah Sakit, Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan, Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum, Biro Keuangan, Direktorat Infrastruktur Kawasan, Kantor Perwakilan BP Batam, Direktorat Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal, Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Pusat Data dan Sistem Informasi.

Isu dan Permasalahan

i. **Kinerja belanja BP Batam** masih fluktuatif. Dengan kata lain, belum menunjukkan tren peningkatan secara konsisten. BP Batam perlu menyusun kebijakan terkait percepatan realisasi

belanja, khususnya Belanja bersumber dana BLU yang seyogyanya dapat langsung digunakan untuk peningkatan kualitas layanan kepada *stakeholders*.

ii. **Rasio aspek kinerja layanan menunjukkan tren positif** yang berarti BP Batam telah mampu memberikan layanan dengan baik serta efisiensi beban operasional telah menunjukkan hasil positif.

iii. Terlalu banyak penyesuaian yang dilakukan BP Batam dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran sehingga **hasil analisis atas perbandingan RBA dan realisasi menunjukkan deviasi yang tinggi.** Hal ini menggambarkan proses perencanaan kurang mempertimbangkan berbagai potensi risiko yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan. BP Batam perlu menguatkan implementasi manajemen risiko dalam berbagai lini unit/bisnis.

iv. BP Batam mengajukan **revisi penggunaan saldo kas dengan frekuensi yang cukup tinggi,** tetapi dalam pelaksanaannya, tren realisasi belanja BP Batam tidak menunjukkan angka yang memuaskan.

v. Unit bisnis BP Batam sangat luas dan beragam. Hal ini tercermin dari struktur POK yang sangat mendetil untuk masing-masing unit bisnis.

vi. **Sistem pengelolaan keuangan yang digunakan di internal BP Batam (FBMS) yang tidak dapat disinkronisasi dengan Aplikasi SAKTI** menyebabkan operator keuangan harus melakukan dua kali perekaman untuk satu transaksi dalam rangka pertanggungjawaban belanja. Proses ini memperlambat proses pengesahan pendapatan/belanja BLU.

vii. Pada Agustus 2024, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan **verifikasi atas *Maturity Rating* pada BP Batam. Nilai tertinggi yaitu pada aspek Pelayanan** dan nilai terendah yaitu pada aspek Inovasi.

Politeknik Negeri Batam

Politeknik Negeri Batam (Polibatam) menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 517/KMK.05/2022 tanggal 29 Desember 2022. **Polibatam juga menyelenggarakan fungsi pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi, pelaksanaan penelitian,** pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, pelaksanaan pembinaan sivitas akademika, dan pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi (Tridharma Perguruan Tinggi).

Jenis Layanan

Secara umum, layanan yang diberikan Polibatam terbagi menjadi **lima pusat layanan sesuai dengan Tridharma perguruan tinggi** yaitu pusat layanan pendidikan tinggi vokasi, pusat layanan pengembangan *technopreneurship*, pusat layanan training dan kompetensi, pusat layanan assessment kompetensi, dan pusat layanan litbang terapan. Kelima pusat layanan tersebut dijabarkan menjadi delapan jenis layanan yang ditujukan kepada berbagai pasar sasaran seperti lulusan SLTA, calon pekerja, perusahaan/lembaga, serta elemen masyarakat lainnya.

Isu dan Permasalahan

i. Kinerja Belanja Polibatam telah berada pada jalur yang tepat (*on track*). Peningkatan realisasi Belanja, terutama yang bersumber dana PNBP/BLU menggambarkan komitmen manajemen untuk segera menggunakan penerimaan dari layanan untuk melaksanakan kegiatan/pengadaan barang/jasa yang bertujuan untuk peningkatkan kualitas layanan. **Peningkatan kualitas layanan akan berdampak pada peningkatan pendapatan BLU** sehingga dapat menaikkan tingkat kemandirian satker.

ii. **Rasio aspek kinerja layanan menunjukkan tren positif** yang berarti Polibatam telah mampu mengelola beban operasionalnya secara efisien serta mengoptimalkan

kegiatan operasional untuk mencapai realisasi pendapatan yang terus meningkat.

iii. Nilai Defisit terus berkurang menandakan peningkatan kualitas kinerja. Selanjutnya, kondisi **Defisit pada Polibatam mengharuskan manajemen untuk terus meningkatkan pendapatan bersamaan dengan upaya efisiensi** di berbagai lini beban operasional.

iv. **Polibatam mengalami blokir anggaran yang cukup tinggi pada tahun 2024 (Rp40,00 miliar)** dan belum ada kepastian waktu pembukaan blokir. Nilai blokir anggaran yang tinggi pada semester II mengandung risiko keterbatasan waktu realisasi dalam hal pembukaan blokir dilakukan mendekati akhir tahun anggaran.

v. Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan, Polibatam memerlukan **alat dukung pembelajaran yang kerap kali bersifat spesifik dan tidak memenuhi syarat TKDN**. Hal ini menyebabkan proses pengadaan barang/jasa menjadi lebih panjang karena melibatkan adanya izin impor dan *cleareance* IT. **Proses pengadaan barang/jasa yang panjang dapat berakibat pada menurunnya realisasi anggaran**. Polibatam dan pembina teknis K/L nya harus melakukan koordinasi intensif terkait percepatan penerbitan izin impor.

vi. Pada Agustus 2024, **Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan verifikasi atas *Maturity Rating* pada Polibatam**. Nilai tertinggi dicapai pada aspek Tata Kelola Kepemimpinan dan nilai terendah pada aspek Lingkungan.

Rumah Sakit Bhayangkara Batam

Rumah Sakit Bhayangkara Batam (RSB Batam) Penerapan pola pengelolaan keuangan BLU pada RSB Batam didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 170 Tahun 2023 tanggal 12 Mei 2023. RSB Batam merupakan rumah sakit yang dibentuk untuk memberikan layanan kesehatan tidak hanya bagi anggota Polri/PNS serta keluarganya, tetapi juga bagi masyarakat umum. **RSB Batam merupakan rumah sakit tingkat IV** dan menjadi rumah sakit rujukan dari fasilitas kesehatan BPJS Tingkat Pertama.

Jenis Layanan

RSB Batam memiliki tiga jenis pelayanan utama yaitu pelayanan instalasi rawat jalan, instalasi rawat inap, dan instalasi penunjang. Instalasi rawat jalan terdiri dari dua belas klinik pelayanan yaitu klinik penyakit dalam, klinik anak, klinik bedah umum, klinik kandungan, klinik bedah plastik, klinik jiwa, klinik saraf, klinik forensi, klinik umum, klinik mata, klinik bedah mulut, dan klinik gizi. Instalasi rawat inap terdiri dari unit gawat darurat (6 tempat tidur - TT), instalasi bedah sentral (2 kamar operasi), kamar bersalin (2 TT), instalasi rawat inap non isolasi (18 TT), instalasi rawat inap isolasi (33 TT), HCU (1 TT), Perinatologi (1 TT), dan rawat tahanan (4 TT). Instalasi penunjang terdiri dari instalasi laboratorium, instalasi farmasi, instalasi radiologi, instalasi loundry, instalasi gizi, IPAL, instalasi IPPRS, dan layanan *ambulance* 24 jam.

Isu dan Permasalahan

i. Pencatatan PNBP BLU baru dilakukan oleh RSB Batam sejak pertengahan tahun 2023. Hal ini menyebabkan perhitungan tren Belanja serta tingkat kemandirian satker untuk tahun sebelum 2023 tidak tergambar pada tabel terkait. Untuk **rasio aspek kinerja layanan, angka rasio untuk tahun 2023 menunjukkan masih tingginya Beban Operasional**

dibandingkan Pendapatan Operasional. Atas hal ini, manajemen perlu meningkatkan upaya efisiensi Beban Operasional bersamaan dengan upaya peningkatan pendapatan sehingga angka rasio aspek kinerja layanan tahun 2024 dapat menunjukkan peningkatan

ii. **Belanja Barang bersumber dana BLU pada tahun 2023 mengalami persentase realisasi terendah** dibandingkan Belanja bersumber dana RM. Atas hal ini, RSB Batam perlu melakukan langkah-langkah penguatan kompetensi SDM terkait pola pengelolaan keuangan BLU termasuk terkait pertanggungjawaban Belanja untuk mengoptimalkan realisasi Belanja Barang bersumber dana BLU.

iii. Penilaian atas tingkat maturitas pada RSB Batam akan dilakukan untuk kinerja tahun 2024 sehingga RSB Batam harus melakukan tindak lanjut atas rekomendasi yang disampaikan Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau pada kegiatan pendampingan uji coba penilaian *Maturity Rating* pada triwulan II 2024.

Rumah Sakit TNI Angkatan Laut dr. Midiyato Suratani

Rumkital dr. Midiyato berstatus sebagai Rumah Sakit Kelas B berdasarkan sertifikat izin operasional rumah sakit, serta Rumah Sakit Tingkat II di wilayah Indonesia Bagian Barat berdasarkan Peraturan Panglima TNI nomor Perpang/65/VII/2011 terkait persetujuan dan pengesahan peningkatan status dari Rumah Sakti Tingkat III menjadi Rumah Sakit Tingkat II. Selain tugas dalam memberikan pelayanan kesehatan, Rumkital dr. Midiyato sebagai fasilitas kesehatan TNI memiliki tugas yang tidak terpisahkan dalam **mendukung Operasi Militer Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP).** Bentuk dukungan yang dilakukan yaitu menyiapkan SDM kesehatan, material kesehatan dan sarana prasarana kesehatan, serta melaksanakan perawatan di wilayah operasi dan melakukan evakuasi medis melalui darat, laut, dan udara.

Jenis Layanan

Pelayanan kesehatan yang ada pada Rumkital dr. Midiyato yaitu unit gawat darurat 24 jam, unit rawat jalan (32 poliklinik), unit rawat inap (205 TT), pelayanan medik spesialistik lengkap dan 4 subspesialistik, unit trauma center/bedah, unit pelayanan *intensive care*, unit hemodialisa, unit rehabilitasi medik, unit pelayanan gigi dan mulut, unit pelayanan radiologi, unit pelayanan farmasi, unit *hyperbarik chamber*, unit *medical checkup*, unit rekam medik, unit penunjang medik, unit penunjang non medik, unit pemulasaran jenazah, unit bangdiklat, dan unit manajeman.

Isu dan Permasalahan

i. Pencatatan PNBP BLU baru dilakukan oleh Rumkital dr. Midiato sejak pertengahan tahun 2023. Hal ini menyebabkan **perhitungan tren Belanja serta tingkat kemandirian satker untuk tahun sebelum 2023** tidak dapat diaplikasikan pada pelaksanaan tahun berikutnya.

ii. **Angka rasio aspek kinerja layanan untuk tahun 2023 menunjukkan masih tingginya Beban Operasional** dibandingkan dengan Pendapatan Operasional. Atas hal ini, manajemen perlu meningkatkan upaya efisiensi Beban Operasional sehingga angka rasio aspek kinerja layanan tahun 2024 dapat menunjukkan perbaikan kualitas.

iii. Proyeksi realisasi tahun 2024-2026 memperlihatkan bahwa **realisasi Belanja RM cenderung menurun dan realisasi Belanja BLU cenderung meningkat**. Hal ini sejalan dengan upaya satker BLU untuk senantiasa berusaha meningkatkan kemandirian

terutama dalam hal membiayai kebutuhan operasional untuk memberikan layanan

iv. Penilaian atas tingkat maturitas pada Rumkital dr. Midiato akan dilakukan untuk kinerja tahun 2024 sehingga **satker harus melakukan tindak lanjut atas rekomendasi yang disampaikan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau** pada kegiatan pendampingan uji coba penilaian *Maturity Rating* pada triwulan II 2024.

3.1.5.3. Profil dan jenis layanan satker PNBP dan Potensinya menjadi BLU

Sampai dengan tahun 2024, **terdapat sembilan satker yang berpotensi menjadi satker BLU di Provinsi Kepulauan Riau.** Tiga satker pada bidang Pendidikan, 4 satker yang bergerak di bidang layanan ekonomi sub-bidang transportasi sebagai mana Tabel 3.13 berikut.

Tabel 3.13-Rincian Nama Satker Berpotensi Menjadi BLU lingkup Kepri

Nama Satker	Jenis Layanan Umum
Universitas Maritim Raja Ali Haji	Pendidikan
Politeknis Kesehatan Tanjung Pinang	Pendidikan
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau	Pendidikan
Kantor UPBU Ranai	Transportasi
Kantor UPBU Dabo	Transportasi
Kantor UPBU Raja Haji Abdullah	Transportasi
Kantor UPBU Letung	Transportasi

Sumber: Laporan BLU Kanwil DJPb Kepri, 2025

3.1.5.4 Kontribusi BLU terhadap Regional Kepri

BLU Pusat memberikan kontribusi positif bagi regional Kepri, sebagai berikut:

a. **BP Batam sebagai pengelola Kawasan Batam memiliki peran sentral dan sangat dominan dalam pembangunan di Kota Batam**. Kota Batam menjadi pusat dari Provinsi Kepri, baik ekonomi, pendidikan, industri dll. Melalui pengembangan industri pada Kawasan *Free Trade Zone* (FTZ) Kota Batam dapat menyerap tenaga kerja yang banyak.

b. **BLU menyumbang PNBP** dominan dalam PNBP lingkup Kepri.

c. **BLU Poltek Batam sebagai Lembaga Pendidikan**, mampu menciptakan output lulusan yang dapat langsung diserap oleh industri di Batam.

d. **BLU rumah sakit, baik RSAL dan RSB mampu memberikan alternatif layanan kepada masyarakat selain RSUD** di lingkup Kepri. Fasilitas dan tenaga medis yang disediakan, mampu memberikan layanan yang sangat baik bagi masyarakat.

3.1.6 Pengelolaan Manajemen Investasi Pusat

Pada tahun 2024 di Kepri terdapat dua jenis investasi pemerintah pusat yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayan Ultra Mikro (UMi).

3.1.6.1 Kredit Usaha Rakyat

Perkembangan Penyaluran KUR

Grafik 3.23 – Jumlah Debitur dan Nominal Penyaluran KUR di Kepri, 2022 – 2024

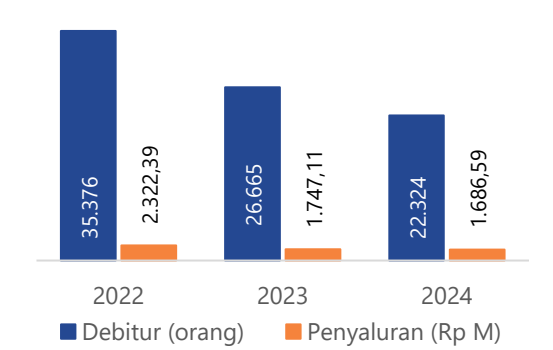

Sumber: SIKP-KUR, 2025 diolah)

Berdasarkan Aplikasi SIKP dengan penarikan data 6 Januari 2025, tercatat **penyaluran KUR sampai dengan 31**

Desember 2024 sebesar Rp1.686,59 miliar kepada 22.324 debitur. Kinerja penyaluran mengalami kontraksi sebesar 3,46 persen (*yoy*) dibandingkan dengan Desember 2023 sebesar Rp1.747,11 miliar. Penurunan juga terjadi dari sisi debitur yaitu sebesar 16,28 persen (*yoy*) dari tahun sebelumnya sebesar 26.665 debitur. Perkembangan penyaluran dan debitur KUR secara rinci tersaji dalam Grafik 3.23 di atas.

Sepanjang tahun 2024, **penyaluran KUR per skema didominasi oleh skema Mikro sebesar Rp887,82 miliar atau 52,64 persen** dari total penyaluran KUR. Dari sisi debitur, KUR juga didominasi oleh skema Mikro sebanyak 18.229 debitur (81,66 persen dari total debitur KUR). Selanjutnya, penyaluran KUR skema Kecil sebesar Rp788,01 miliar (46,72 persen dari total penyaluran KUR) kepada 2.911 debitur dan terakhir Super Mikro sebesar Rp10,75 miliar (0,64 persen dari total penyaluran KUR) kepada 1.184 debitur.

Sebagai wilayah dengan pusat perekonomian berada di sektor perdagangan dan industri, **penyaluran KUR per sektor** di Kepri juga didominasi oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar Rp843,39 miliar dengan *share* 50,01 persen. Lebih lanjut, penyaluran KUR per sektor berturut-turut, yaitu: Kemasyarakatan Sosial Budaya (Rp257,99 miliar); Akomodasi dan Makan Minum (Rp180,24 miliar); Perikanan (Rp111,19 miliar); Pertanian dan Kehutanan (Rp82,66 miliar); Real Estate dan Persewaan (Rp80,87 miliar); Industri Pengolahan (Rp78,18 miliar); Transportasi Pergudangan (Rp28,21 miliar); Jasa Pendidikan (Rp8,34 miliar); Konstruksi (Rp7,98 miliar); dan Kesehatan Sosial (Rp7,54 miliar).

Dampak KUR bagi UMKM

Kanwil DJPb Kepri melakukan survei kepada debitur KUR yang merupakan UMKM. **Dari hasil survei dilakukan analisis kuantitatif menggunakan uji *Wilcoxon Signed Rank Test*** dan dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa **dampak yang dirasakan debitur setelah memperoleh pembiayaan KUR**, yaitu:

- terjadi peningkatan rata-rata omzet responden.
- terjadi peningkatan rata-rata profit responden.
- terjadi peningkatan rata-rata pengeluaran rumah tangga responden

Namun demikian, terdapat **beberapa aspek yang tidak terdampak setelah responden memperoleh pembiayaan KUR**, sebagai berikut:

- tidak terjadi peningkatan rata-rata pengeluaran pendidikan responden.
- tidak terjadi peningkatan rata-rata pengeluaran kesehatan responden.
- tidak terjadi peningkatan rata-rata jumlah tenaga kerja responden.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa **penyaluran KUR berdampak atau telah menjadi pengungkit pada peningkatan usaha** melalui peningkatan omzet dan profit dan peningkatan kesejahteraan UMKM melalui peningkatan rata-rata pengeluaran rumah tangga. Namun demikian, dampak tersebut belum terlalu besar terhadap peningkatan usaha karena belum sampai pada tahap penambahan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan melalui peningkatan pengeluaran pendidikan dan pengeluaran kesehatan.

3.1.6.2 Kredit Ultra Mikro (UMi)

Perkembangan Penyaluran UMi

Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan pemerintah menjadi kemandirian usaha kepada usaha mikro yang berada di lapisan terbawah yang belum bisa difasilitasi perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pembiayaan UMi memberikan fasilitas permodalan yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Berdasarkan Pasal 2 PMK

No.193/PMK.05/2020, Pembiayaan UMi bertujuan untuk menyediakan fasilitas pembiayaan yang mudah dan cepat bagi usaha ultra mikro serta menambah jumlah wirausaha yang difasilitasi oleh pemerintah. Data perkembangan UMi sebagai mana tersaji dalam Grafik 3.24 berikut.

Grafik 3.24 – Jumlah Debitur dan Nominal Penyaluran UMi di Kepri, 2022 – 2024

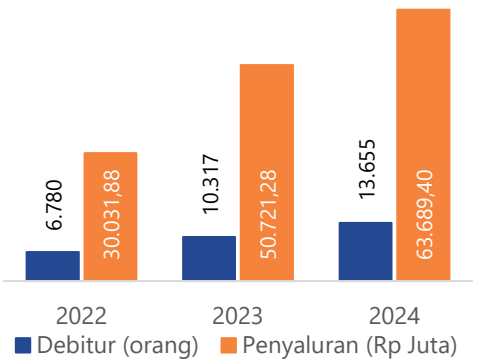

Sumber: SIKP-UMi, 2025 (diolah)

Berdasarkan data **SIKP-UMi, pada 2024, pembiayaan UMi di Prov. Kepri (Prov. Kepri) telah menjangkau 11.631 debitur** dengan total penyaluran kredit sebesar Rp63,69 miliar. Dari sisi nominal, penyaluran UMi tumbuh sebesar 25,57 persen (*yoy*) sedangkan dari sisi debitur, jumlah debitur UMi tumbuh sebesar 12,74 persen (*yoy*).

Program Pembiayaan UMi telah tersebar di seluruh Kota/Kabupaten di Kepri, namun **penyebarannya masih terpusat di Kota Batam dengan penyaluran sebesar Rp38,84 miliar atau 60,99 persen kepada 6.670 debitur**. Hal ini sejalan dengan jumlah sebaran UMKM di Kepri, yaitu 72,25 persen dari jumlah UMKM berada di kota Batam sehingga pembiayaan UMi dapat tersalurkan dengan maksimal di Kota Batam.

Dampak UMi bagi UMKM

Kanwil DJPb Kepri melakukan survei kepada debitur KUR yang merupakan UMKM. Dari **hasil survei dilakukan analisis kuantitatif menggunakan uji *Wilcoxon Signed Rank Test*** terhadap NKD *baseline* semester II 2023 dan NKD *endline* semester II 2024 atas *sample* debitur yang sama menunjukkan bahwa **pembiayaan UMi memberikan dampak signifikan bagi nilai keekonomian debitur**.

3.1.7 Isu Strategis Pelaksanaan APBN di Daerah

3.1.7.1 Evaluasi Dan Tantangan Atas Ketercapaian Output Program Strategis Pemerintah Yang Didanai oleh APBN di Daerah

1. **Alokasi anggaran daerah tidak seimbang dengan kebutuhan nyata di lapangan**. Beberapa daerah dengan tingkat pembangunan yang lebih rendah atau wilayah yang lebih terpencil sering kali tidak mendapatkan anggaran yang memadai untuk melaksanakan program-program strategis.
2. **Keterbatasan dalam sistem pengumpulan data dan monitoring** yang tidak memadai menjadi salah satu tantangan dalam menilai sejauh mana output program tercapai. Tanpa data yang akurat dan sistematis, evaluasi yang dilakukan bisa menjadi kurang objektif.
3. Di beberapa daerah, terdapat **resistensi dari masyarakat terhadap program yang diimplementasikan**, baik karena kurangnya pemahaman, ketidakpercayaan terhadap pemerintah, atau konflik kepentingan lokal sehingga mengurangi efektivitas dari program yang ada.
4. **Perlu peningkatan kapasitas SDM** untuk mengelola dan menjalankan program-program strategis, terutama yang memerlukan pengetahuan teknis tinggi. Keterbatasan dalam kapasitas manajerial dan administratif di tingkat daerah sering menghambat pelaksanaan program.
5. **Izin mengenai prasyarat penyiapan pelaksanaan proyek,** seperti perizinan pemanfaatan lahan hutan lindung/hutan mangrove, dan penyiapan kondisi pra pengadaan barang dan jasa lain yang harus disiapkan sebelum pelaksanaan kegiatan.
6. Permasalahan utama yang masih kerap ditemui yaitu **kondisi cuaca dan**

geografis Kepri yang menyulitkan mobilisasi orang dan barang terutama untuk proyek fisik yang berlokasi di pulau terluar.

3.1.7.2 Permasalahan Dan Tantangan Dalam Tata Kelola Dan Pencapaian Belanja Pemerintah Yang Berkualitas Yang Didanai APBN di Daerah

1. **Transparansi dalam pengelolaan Belanja APBN di daerah** masih menjadi isu besar. Dalam beberapa kasus, masih terdapat praktik pengelolaan yang tidak transparan sehingga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan anggaran.
2. **Blokir pagu *Automatic Adjusment* (blokir AA) masih menjadi kendala** terbesar dalam aspek penganggaran. Blokir AA dengan persentase yang besar terhadap total pagu mengharuskan satker melakukan perombakan rencana kegiatan. Perombakan tersebut menimbulkan permasalahan baru, yaitu kemunduran penandatangan kontrak, tidak terlaksananya kegiatan seusai dengan rencana awal.
3. **Proses revisi yang tumpang tindih** antara revisi terpusat/eselon I dan revisi tingkat satker.
4. **Ketersediaan pagu Belanja Pegawai** yang tidak selaras dengan jumlah pegawai
5. **Tambahan pagu** pada triwulan II
6. **Rumitnya struktur COA pada POK BLU BP Batam** yang menampung kegiatan dua puluh tiga unit kerja.
7. **Barang/jasa spesifik tidak selalu tersedia** pada e-catalog sebagaimana terbatasnya barang yang memenuhi unsur TKDN.
8. **Kebijakan internal satker**, seperti pemusatan pemilihan penyedia barang/jasa pada satker BP2JK untuk seluruh satker lingkup Kementerian PUPR
9. **Panjangnya administrasi bansos** pada satker lingkup Kementerian Agama

3.1.7.3 Permasalahan Dan Tantangan Dalam Upaya Akselerasi Belanja APBN di Daerah

1. Proses **pengadaan barang dan jasa di daerah seringkali mengalami keterlambatan** akibat kurangnya pengalaman dalam pengadaan, atau bahkan masalah politik dan hukum di tingkat daerah.
2. **Kualitas SDM satker yang kurang memahami pentingnya kontrak pra DIPA** sebagai bagian dari upaya percepatan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran. Selain itu, satker juga kurang memahami ketentuan terkait batas waktu penyelesaian tagihan.
3. **Lemahnya koordinasi internal satker** menyebabkan ketidakselarasan antara progres pekerjaan/capaian output dan rencana penarikan dana.

3.2 Pelaksanaan APBD Tingkat Provinsi (Konsolidasi Pemda)

Sampai dengan 31 Desember 2024, APBD menunjukkan terdapat SiKPA Rp436,12 miliar. Pendapatan Daerah dapat direalisasikan Rp13.068,19 miliar atau turun 0,59 persen (*yoy*). Di sisi lain, Belanja Daerah dapat direalisasikan Rp13.454,68 miliar atau meningkat 1,60 persen (*yoy*) sebagaimana tergambar pada Tabel 3.14 berikut.

Tabel 3.14 – Perkembangan I-Account APBD di Kepri, 2022 s.d. 2024 (Dalam Miliar Rupiah)

URAIAN	TA 2022			TA 2023			TA 2024			Growth (2023-2024)
	Pagu	Real.	%	Pagu	Real.	%	Pagu	Real.	%	
PENDAPATAN DAERAH	**12.906,38**	**12.318,06**	**95,44%**	**13.755,70**	**13.146,15**	**95,57%**	**14.524,05**	**13.068,19**	**89,98%**	**-0,59%**
Pendapatan Asli Daerah	3.971,51	3.853,20	97,02%	4.268,11	4.362,70	102,22%	4.810,80	4.753,80	98,82%	8,96%
Pendapatan Transfer	8.896,02	8.428,76	94,75%	9.441,48	8.752,46	92,70%	9.609,46	8.290,90	86,28%	-5,27%
Transfer Antar Daerah	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
LLPDyS	38,85	36,10	92,93%	46,12	30,99	67,19%	103,79	23,49	22,64%	-24,18%
BELANJA DAERAH	**13.949,63**	**12.395,90**	**88,86%**	**14.432,58**	**13.243,09**	**91,76%**	**15.232,97**	**13.454,68**	**88,33%**	**1,60%**
Belanja Operasi	**10.427,37**	**9.758,96**	**93,59%**	**10.698,79**	**10.501,79**	**98,16%**	**11.719,57**	**11.105,75**	**94,76%**	**5,75%**
Belanja Pegawai	4.728,81	4.506,55	95,30%	5.042,39	4.873,12	96,64%	5.623,84	5.622,99	99,98%	15,39%
Belanja Barang dan Jasa	4.908,22	4.530,07	92,30%	4.936,86	4.803,79	97,30%	5.114,09	4.620,24	90,34%	-3,82%

URAIAN	TA 2022			TA 2023			TA 2024			Growth (2023-2024)
	Pagu	Real.	%	Pagu	Real.	%	Pagu	Real.	%	
Belanja Bunga	2,50	0,66	26,56%	13,14	8,62	65,62%	4,68	3,69	78,88%	-57,18%
Belanja Subsidi	2,12	1,69	79,76%	2,45	5,31	216,72%	4,93	2,23	45,26%	-57,97%
Belanja Hibah	728,49	681,12	93,50%	690,36	783,44	113,48%	944,96	834,60	88,32%	6,53%
Belanja Bantuan Sosial	57,23	38,87	67,92%	13,58	27,50	202,46%	27,07	21,99	81,24%	-20,03%
Belanjan Modal	**2.297,38**	**2.111,66**	**91,92%**	**2.429,07**	**2.170,39**	**89,35%**	**2.116,19**	**1.780,12**	**84,12%**	**-17,98%**
Belanja Modal	2.297,38	2.111,66	91,92%	2.429,07	2.170,39	89,35%	2.116,19	1.780,12	84,12%	-17,98%
Belanja Tak Terduga	**26,17**	**5,97**	**22,81%**	**93,05**	**9,27**	**9,96%**	**85,58**	**5,16**	**6,02%**	**-44,37%**
Belanja Tak Terduga	26,17	5,97	22,81%	93,05	9,27	9,96%	85,58	5,16	6,02%	-44,37%
Belanja Transfer	**1.198,71**	**519,30**	**43,32%**	**1.211,66**	**561,65**	**46,35%**	**1.311,64**	**563,66**	**42,97%**	**0,36%**
Belanja Bagi Hasil	N/A	24,06	#VALUE!	679,43	26,93	3,96%	776,95	35,31	4,55%	31,14%
Belanja Bantuan Keuangan	N/A	495,25	#VALUE!	532,23	534,72	100,47%	534,68	528,35	98,81%	-1,19%
SURPLUS/ (DEFISIT)	**(1.043,25)**	**(77,83)**	**7,46%**	**(676,87)**	**(96,95)**	**14,32%**	**(708,93)**	**(386,49)**	**54,52%**	**298,66%**
PEMBIAYAAN	**1.043,23**	**1.024,90**	**98,24%**	**676,87**	**895,31**	**132,27%**	**708,93**	**822,61**	**116,04%**	**-8,12%**
Penerimaan Pembiayaan	1.045,23	1.025,90	98,15%	763,21	963,58	126,25%	804,48	914,56	113,68%	-5,09%
Pengeluaran Pembiayaan	2,00	1,00	50,00%	86,34	68,27	79,07%	95,55	91,95	96,22%	34,69%
SiLPA/SiKPA	**-**	**947,06**		**(0,00)**	**798,36**	**-**	**-**	**436,12**		**-45,37%**

Sumber: SIKRI dan GFS Kanwil DJPb Kepri, 2025 (diolah)

3.2.1 Pendapatan Daerah

Grafik 3.25 - Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah, 2022 s.d. 2024 (Dalam Miliar Rupiah)

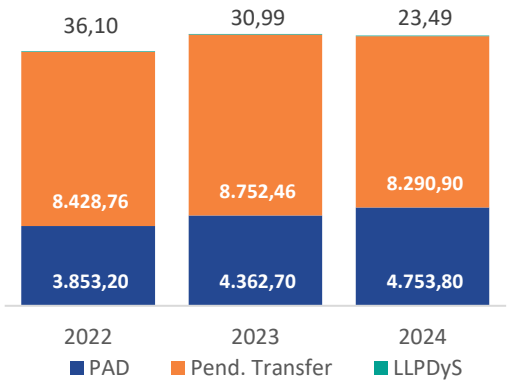

Sumber: SIKRI dan GFS Kanwil DJPb Kepri, 2025 (diolah)

Pendapatan Pemerintah Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (LLPDyS). Pendapatan Daerah dapat direalisasikan sebesar Rp13.068,19 miliar atau 89,98 persen dari Pagu dan mengalami pertumbuhan minus 0,59 persen (*yoy*).

Realisasi Pendapatan Daerah masih didominasi oleh Pendapatan Transfer, yaitu sebesar Rp8.290,90 miliar (63,44 persen dari Pendapatan Daerah) dibandingkan PAD sebesar Rp4.753,80 miliar (36,38 persen dari Pendapatan Daerah) dan LLPDyS sebesar Rp23,49 miliar (0,18 persen dari Pendapatan Daerah). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih belum dapat mengandalkan PAD sebagai penopang utama keuangan daerah dan masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

3.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD dapat direalisasikan sebesar Rp4.753,80 miliar atau 98,82 persen dari Target. Realisasi PAD tumbuh sebesar 8,96 persen. Pada 2022 realisasi PAD sebesar Rp3.853,20 miliar (97,02 persen dari Target) sedangkan tahun 2023 sebesar Rp4.362,70 miliar (102,22 persen dari Target). Target dan realisasi PAD secara rinci tersaji pada Grafik 3.26 berikut.

Grafik 3.26 – Pagu dan Realisasi PAD, 2022 s.d. 2024 (Dalam Miliar Rupiah)

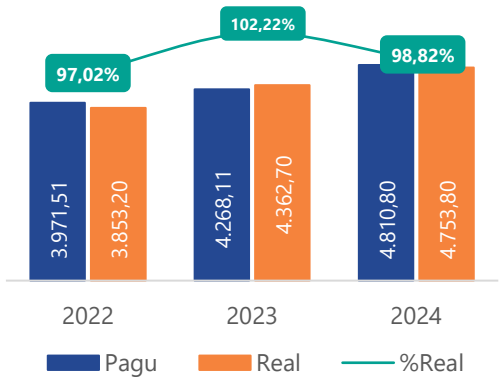

Sumber: SIKRI dan GFS Kanwil DJPb Kepri, 2025 (diolah)

Pada periode **tahun 2024, kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah sebesar 36,38 persen** sedangkan pada tahun 2023 memberikan kontribusi sebesar 33,19 persen dan pada 2022 sebesar 31,28 persen terhadap total Pendapatan Daerah. Hal ini menunjukkan

pada tahun 2024 **terdapat peningkatan persentase kontribusi PAD terhadap total Pendapatan Daerah**. Terbitnya UU HKPD memberikan dampak peningkatan PAD ini.

Pertumbuhan PAD sebesar 8,96 persen (*yoy*) didongkrak oleh keberhasilan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan Pajak Daerah (tumbuh 7,91 persen) dan Retribusi Daerah (tumbuh 193,30 persen) sehingga mendorong PAD tumbuh positif. Namun demikian, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terkontraksi minus 18,64 persen (*yoy*) dan Lain-lain PAD yang Sah juga tumbuh minus 43,75 persen (*yoy*).

Grafik 3.28 – Kontribusi Komponen PAD, 2024 (persen)

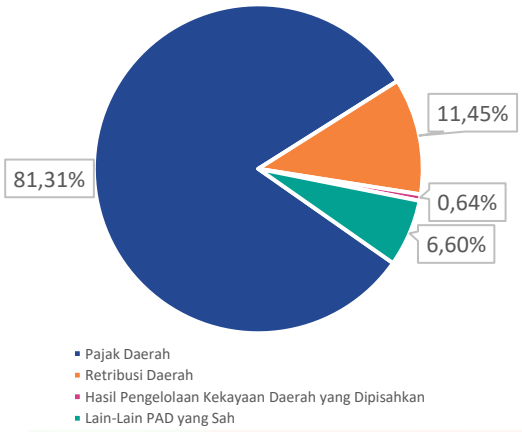

Sumber: SIKRI dan GFS Kanwil DJPb Kepri, 2025 (diolah)

Sebagaimana Grafik 3.28, **Pajak Daerah merupakan komponen terbesar penyumbang PAD yaitu Rp3.865,54 miliar atau 81,31 persen** dari total PAD. Kemudian, komponen PAD yang memberikan kontribusi terbesar kedua adalah Retribusi Daerah sebesar Rp544,31miliar (11,45 persen dari total PAD), Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp313,75 miliar (6,6 persen dari total PAD), dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp30,21 miliar (0,64 persen dari total PAD).

Analisis Rasio PAD terhadap PDRB

Rasio PAD terhadap PDRB menunjukkan angka tertinggi pada tiga tahun terakhir yaitu 2,50 persen. Rasio tersebut meningkat dikarenakan terjadi peningkatan PAD namun PDRB justru menurun sehingga terjadi kenaikan rasio PAD terhadap PDRB. Adapun rasio PAD terhadap PDRB dalam tiga tahun terakhir tersaji dalam Grafik 3.27 berikut.

Grafik 3.27 – Rasio PAD terhadap PDRB, 2022 s.d. 2024

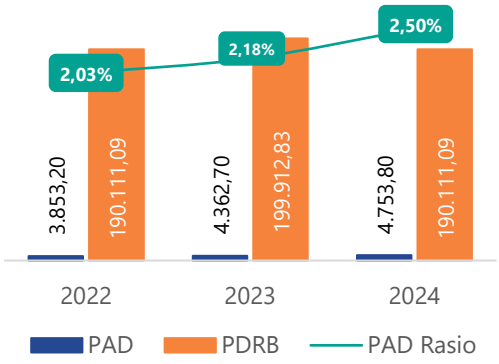

Sumber: SIKRI dan GFS Kanwil DJPb Kepri, 2025 (diolah)

Analisis Kemandirian Fiskal Daerah

Otonomi daerah adalah pemberian kemandirian kepada pemerintah daerah, berupa wewenang mengatur dan mengurus berbagai kepentingan masyarakat secara mandiri. Kebijakan ini bertujuan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat secara mandiri melalui peningkatan layanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab lebih besar dalam memberikan pelayanan dan melaksanakan pembangunan di daerahnya sebagai konsekuensi penerapan otonomi daerah.

Peningkatan kemampuan fiskal daerah menjadi syarat utama untuk mendukung otonomi tersebut. Oleh karena itu, pemda diberikan perluasan desentralisasi fiskal untuk memperkuat kewenangan daerah dalam

memungut pajak dan retribusi daerah sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Meskipun kewenangan dan perluasan desentralisasi fiskal telah diberikan kepada pemerintah daerah, **mayoritas pemerintah daerah masih memiliki ketergantungan fiskal yang tinggi pada pemerintah pusat**. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan desentralisasi fiskal dalam peningkatan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai layanan publik secara mandiri belum sepenuhnya tercapai. Tak terkecuali di Kepri, mayoritas Belanja Daerah masih dibiayai oleh Pendapatan Transfer dari pemerintah pusat.

Tingkat kemandirian keuangan daerah dapat ditunjukkan melalui Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) yang akan dibagi ke dalam beberapa kluster sebagai mana Tabel 3.15 berikut.

Tabel 3.15 – Klaster Kondisi Kemandirian Fiskal

IKF	Kondisi Kemandirian Fiskal
0,75 ≤ IKF ≤ 1,00	Sangat Mandiri
0,50 ≤ IKF < 0,75	Mandiri
0,25 ≤ IKF < 0,50	Menuju Kemandirian
0,00 ≤ IKF < 0,25	Belum Mandiri

Sumber: GFS Kanwil DJPb Kepri, 2025

IKF dihitung dengan membandingkan antara PAD dengan Pendapatan Daerah yang diperoleh dari sumber lain, seperti transfer dari pemerintah pusat dan pinjaman. Selain itu, terdapat cara lain untuk menghitung kemandirian daerah yaitu dengan memperhitungkan seluruh pendapatan yang dihasilkan dari suatu daerah, termasuk DBH. Berikut tingkat kemandirian daerah tiap Kabupaten/Kota lingkup Kepri berdasarkan kedua indeks tersebut:

Indeks Kemandirian Fiskal I

[IKF I = PAD/Total Pendapatan]

Indeks Kemandirian Fiskal I (IKF I) menghitung kemandirian dengan membandingkan PAD dengan total Pendapatan Daerah. Pada tahun 2024, posisi PAD dan Pendapatan Daerah dari pemda lingkup Kepri tergambar dalam Grafik 3.29 berikut.

Grafik 3.29 – Jumlah PAD dan Pendapatan Daerah Pemda Lingkup Kepri, 2024

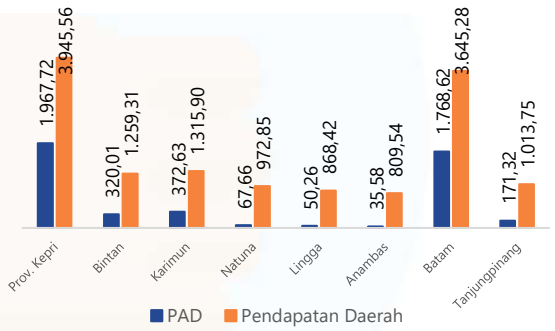

Sumber: SIKRI dan GFS Kanwil DJPb Kepri, 2025 (diolah)

Hasil perhitungan IKF I dari tahun 2022 s.d 2024 sebagaimana Grafik 3.30 menunjukkan bahwa selama tiga tahun terakhir **mayoritas kabupaten/kota di lingkup Kepri masih berada pada klaster "Belum Mandiri"**.

Grafik 3.30 – Indeks Kemandirian Fiskal I, 2022 s.d. 2024

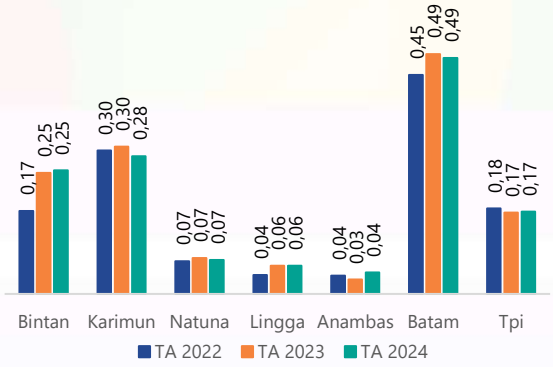

Sumber: SIKRI dan GFS Kanwil DJPb Kepri, 2025 (diolah)

Kota Batam, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Karimun berada pada klaster "Menuju Kemandirian". Kota Tanjungpinang, Kabupaten Lingga, Kabupaten Kepulauan

Anambas, dan Kabupaten Natuna masih berada pada klaster "Belum Mandiri".

Indeks Kemandirian Fiskal II

[IKF II = (PAD+DBH)/Total Pendapatan]

Indeks Kemandirian Fiskal II (IKF II) menghitung kemandirian dengan membandingkan PAD ditambah DBH dengan total Pendapatan Daerah. Pada tahun 2024, posisi PAD+DBH dan Pendapatan Daerah dari pemda lingkup Kepri tergambar dalam Grafik 3.31 berikut.

Grafik 3.31 – Jumlah PAD+DBH dan Pendapatan Daerah Pemda Lingkup Kepri, 2024 (dalam Miliar Rupiah)

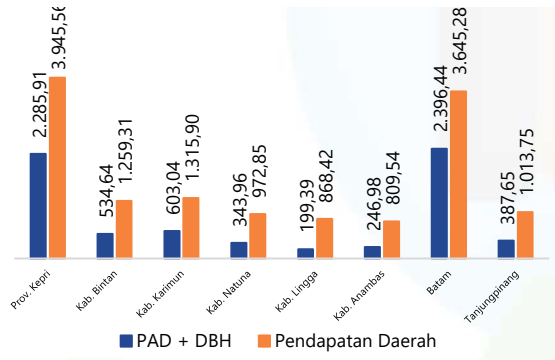

Sumber: SIKRI dan GFS Kanwil DJPb Kepri, 2025 (diolah)

Grafik 3.32 – Indeks Kemandirian Fiskal II, 2022 s.d. 2024

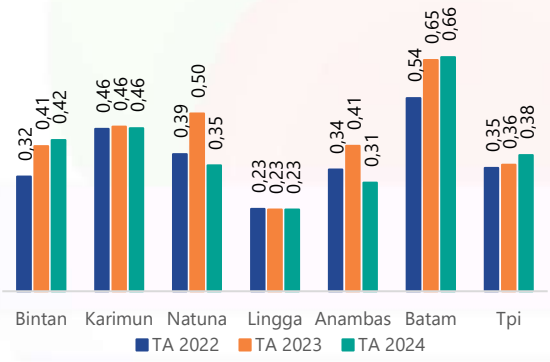

Sumber: SIKRI dan GFS Kanwil DJPb Kepri, 2025 (diolah)

Hasil perhitungan IKF II dari tahun 2022 s.d 2024 sebagai mana Grafik 3.32 menunjukkan bahwa jika memasukkan komponen DBH ke dalam perhitungan IKF akan membuat beberapa daerah yang awalnya berada pada 'Belum Mandiri' menjadi 'Menuju Kemandirian' yaitu Tanjungpinang, Natuna, dan Kepulauan Anambas. Hal ini dikarenakan besarnya potensi SDA di Natuna dan Kepulauan Anambas. Meskipun demikian, Lingga masih terjebak pada klaster 'Belum Mandiri' pada tahun 2024.

Upaya Daerah Dalam Meningkatkan PAD

Langkah yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD adalah sebagai berikut.

1. **Peningkatan Pajak Hiburan diskotek, kelab malam, bar, karaoke dan mandi uap atau SPA** menjadi minimal 40% s.d. maksimal 75% pada seluruh pemerintah daerah lingkup Kepri sehingga berpotensi meningkatkan pendapatan daerah.
2. **Penghapusan Biaya BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah** yang baru akan memiliki rumah pertama, dengan penghasilan maksimal Rp7 juta untuk individu tunggal dan Rp8 juta untuk keluarga; luas lantai maksimal 36 meter/rumah umum/susun, sementara 48 meter rumah swadaya. Hal ini berpotensi meningkatkan perdagangan bidang perumahan.
3. **Pemerintah Provinsi Kepri, mendorong kebijakan bebas visa bagi wisatawan** dari beberapa negara untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan asing, terutama dari Singapura, Malaysia, dan negara-negara lain di Asia. Namun, hal ini belum mendapat *approve* dari Kementerian Pariwisata.
4. **Pemerintah Provinsi Kepri telah melaksanakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB**) pada tahun 2024 dengan pengurangan pokok tunggakan PKB sebesar 50%, Pembebasan sanksi administrasi PKB dan pembebasan denda SWDKLLJ. Program ini berlangsung dari 5 Agustus s.d. 5

Oktober 2024, dalam rangka memperingati HUT ke-79 Kemerdekaan RI dan HUT ke-22 Provinsi Kepri.

5. **Pada Desember 2024, Pemko Tanjungpinang melaksanakan program pemutihan pajak (penghapusan denda)** terhadap seluruh jenis pajak daerah, antara lain PBB, BPHTB, PBJT atas makanan dan/atau minuman, tenaga listrik, perhotelan, parkir, kesenian dan hiburan, reklame, air tanah, MBLB, serta sarang burung walet. selanjutnya, Pemko Tanjungpinang juga memberikan diskon pokok piutang PBB hingga 70% untuk tunggakan periode 1995-2012 dan 50% periode 2013-2018.

6. **Pemko Tanjungpinang mengeluarkan kebijakan insentif pemungut retribusi** pelayanan parkir di tepi jalan umum melalui Keputusan Walikota Tanjungpinang nomor 240 tahun 2024. Hal ini diharapkan dapat mendorong peningkatan retribusi daerah.

3.2.1.2 Pendapatan Transfer

Grafik 3.33 – Target dan Realisasi Pendapatan Transfer, 2022 s.d. 2024 (Dalam Miliar Rupiah)

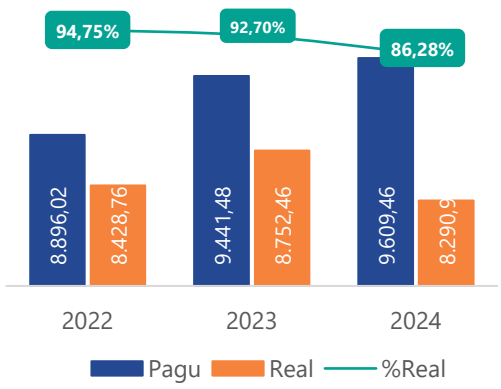

Sumber: SIKRI dan GFS Kanwil DJPb Kepri, 2025 (diolah)

Pada tahun 2024, Realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp8.290,90 miliar (86,28 persen dari Target) dan tumbuh negatif sebesar minus 5,27 persen (*yoy*). Realisasi Pendapatan Transfer terbagi menjadi dua yaitu Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp7.962,47 miliar dan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp5,96 miliar. Target dan realisasi Pendapatan Transfer dalam tiga tahun terakhir sebagaimana tersaji pada Grafik 3.33.

Pada tahun 2024, **Pendapatan Transfer secara dominan disumbang oleh Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat khususnya DAU** sebesar Rp4.724,34 miliar atau 52,27 persen dari total Pendapatan Transfer. Kontribusi berturut-turut disumbang oleh DAK (Rp1.742,21 miliar atau 19,27 persen dari total Pendapatan Transfer), DBH (Rp1.489,95 miliar atau 16,48 persen dari Pendapatan Transfer), Bagi Hasil Pajak (Rp754,25 miliar atau 8,34 persen dari Pendapatan Transfer), Dana Desa (Rp225,48 miliar atau 2,49 persen dari total Pendapatan Transfer), dan Insentif Fiskal (Rp102,95 miliar atau 1,14 persen dari total Pendapatan Transfer).

3.2.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah (LLPDyS)

Grafik 3.34 – Target dan LLPDyS, 2022 s.d. 2024 (Dalam Miliar Rupiah)

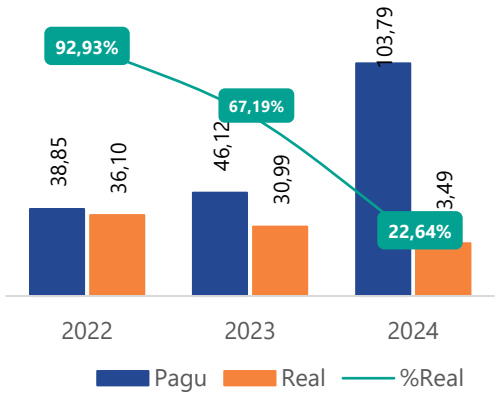

Sumber: SIKRI dan GFS Kanwil DJPb Kepri, 2025 (diolah)

Pada tahun 2024, realisasi LLPDyS sebesar Rp23,49 miliar (22,64 persen dari Target) dan mengalami pertumbuhan minus 24,18 persen (*yoy*). LLPDyS terdiri atas Pendapatan Hibah sebesar Rp3,22 miliar dan Lain-lain Pendapatan sebesar Rp20,28 miliar. Grafik 3.25 menyajikan rincian Target dan

realisasi LLPDyS mulai tahun 2022 sampai dengan 2024.

Perlu menjadi perhatian bersama bahwa **LLPDyS merupakan jenis pendapatan yang insidentil** dan sangat bergantung kepada banyak faktor eksternal, seperti para pemberi hibah sehingga memang tidak bisa dipastikan komponen LLPDyS akan selalu tumbuh positif.

3.2.2 Belanja Daerah

Belanja Daerah dapat direalisasikan sebesar Rp13.454,68 miliar atau 88,33 persen dari Pagu. Dalam tiga tahun terakhir terjadi peningkatan Pagu Belanja Daerah yang diikuti dengan peningkatan realisasi dan persentase realisasi Belanja Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pemda semakin baik dalam mengelola perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan belanja di daerah. Adapun perkembangan Pagu dan realisasi sebagaimana Grafik 3.35 berikut.

Grafik 3.35 – Pagu dan Realisasi Belanja Daerah, 2022 s.d. 2024 (Dalam Miliar Rupiah)

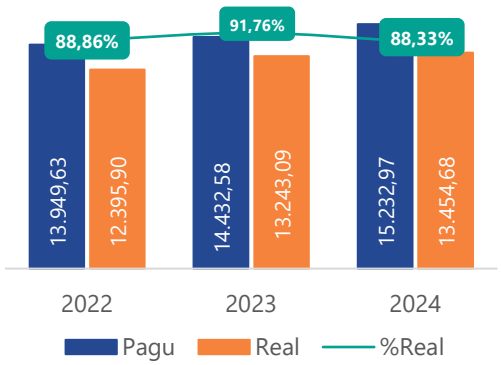

Sumber: SIKRI dan GFS Kanwil DJPb Kepri, 2025 (diolah)

Belanja Daerah tumbuh 1,60 persen (*yoy*) yang ditopang oleh tumbuhnya Belanja Operasi sebesar 5,75 persen (*yoy*) dan Belanja Transfer sebesar 0,36 persen (*yoy*) sedangkan Belanja Modal tumbuh sebesar minus 17,98 persen (*yoy*) dan Belanja Tidak Terduga sebesar minus 44,37 persen (*yoy*).

3.2.2.1 Berdasarkan Jenis Belanja

Belanja Operasi

Belanja Operasi dapat direalisasikan sebesar Rp11.105,75 miliar (94,76 persen dari Pagu) dan mengalami pertumbuhan sebesar 5,75 persen (*yoy*). Persentase realisasi maupun pertumbuhan tertinggi terjadi pada Belanja Pegawai yaitu sebesar 99,98 persen dari Pagu dan 15,39 persen (*yoy*). Pagu dan realisasi Belanja Operasi disajikan pada Grafik 3.36 berikut.

Grafik 3.36 – Pagu dan Realisasi Belanja Operasi, 2022 s.d. 2024 (Dalam Miliar Rupiah)

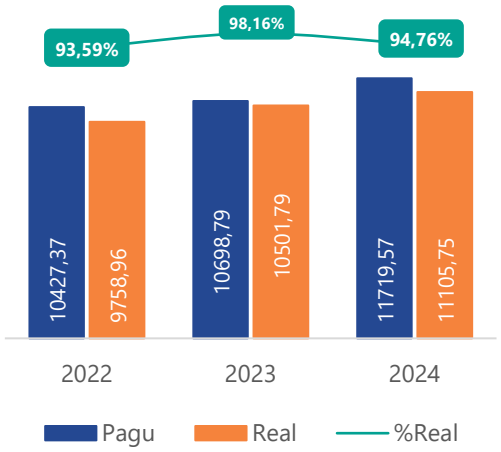

Sumber: SIKRI dan GFS Kanwil DJPb Kepri, 2025 (diolah)

Belanja Modal

Grafik 3.37 – Pagu dan Realisasi Belanja Modal, 2022 s.d. 2024 (Dalam Miliar Rupiah)

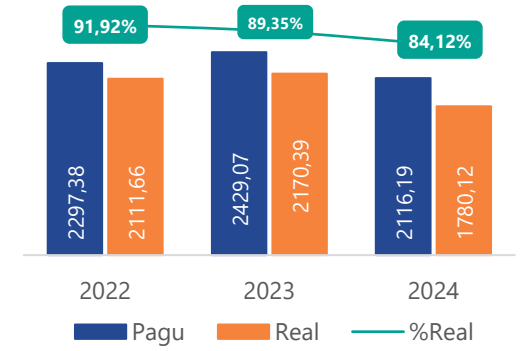

Sumber: SIKRI dan GFS Kanwil DJPb Kepri, 2025 (diolah)

Belanja Modal direalisasikan sebesar Rp1.780,12 miliar atau 84,12 persen dari Pagu dengan pertumbuhan negatif sebesar minus 17,98 persen (*yoy*). Hal ini disebabkan

oleh realisasi Belanja Modal yang lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebagai dampak penurunan Pagu. Pagu dan realisasi Belanja Modal disajikan pada Grafik 3.37 di atas.

Kontribusi terbesar Belanja Modal terdapat pada Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp783,18 miliar (44,00 persen dari realisasi) kemudian berturut-turut diikuti oleh Gedung dan Bangunan sebesar Rp586,11 miliar (32,93 persen dari total realisasi), Peralatan dan Mesin sebesar Rp359,17 miliar (20,18 persen dari total realisasi), Aset Tetap Lainnya sebesar 39,87 miliar (2,24 persen dari total realisasi), Aset Lainnya sebesar Rp6,89 miliar (0,39 persen dari total realisasi), dan yang terkecil yaitu Tanah sebesar Rp4,94 miliar (0,28 persen dari total realisasi).

Belanja Tidak Terduga

Grafik 3.38 – Pagu dan Realisasi Belanja Tak Terduga, 2022 s.d. 2024 (Dalam Miliar Rupiah)

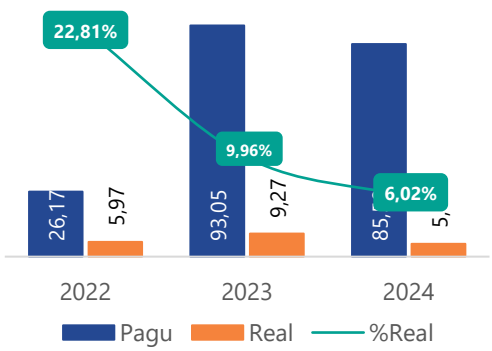

Sumber: SIKRI dan GFS Kanwil DJPb Kepri, 2025 (diolah)

Pagu dan realisasi Belanja Tak Terduga disajikan pada Grafik 3.38 di atas. **Belanja Tidak Terduga dapat direalisasikan sebesar Rp5,16 miliar** (6,02 persen dari Pagu) dan mengalami pertumbuhan negatif sebesar minus 44,37 persen (*yoy*). Realisasi tersebut sangat rendah, namun demikian, realisasi Belanja Tidak Terduga merupakan pos pengeluaran untuk kegiatan yang tidak direncanakan dan bersifat *force majure*, misalnya penanggulangan bencana alam dll. Di sisi lain, rendahnya realisasi belanja ini menunjukkan hal positif, yaitu tidak terdapat bencana atau hal-hal *force majure* lainnya.

Belanja Transfer

Belanja Transfer dapat direalisasikan sebesar Rp563,66 miliar atau 42,97 persen dari Pagu. Belanja Transfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Belanja Bagi Hasil dapat direalisasikan sebesar Rp35,31 miliar (4,55 persen dari Pagu), sedangkan Belanja Bantuan Keuangan dapat direalisasikan sebesar Rp528,35 miliar (98,81 persen dari Pagu). Pagu dan realisasi Belanja Transfer disajikan pada Grafik 3.39 berikut.

Grafik 3.39 – Target dan Realisasi Belanja Transfer, 2022 s.d. 2024 (Dalam Miliar Rupiah)

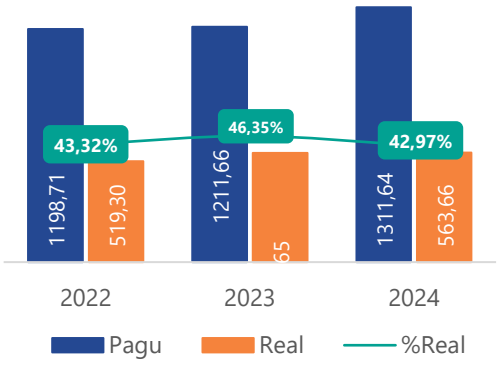

Sumber: SIKRI dan GFS Kanwil DJPb Kepri, 2025 (diolah)

3.2.2.2 Berdasarkan Fungsi

Belanja daerah menurut fungsinya terbagi menjadi sembilan jenis. Berdasarkan fungsinya, realisasi belanja tertinggi ada pada belanja fungsi Pelayanan Umum sebesar Rp4.820,90 miliar (31,41 persen dari total realisasi) kemudian dilanjut berturut-turut oleh Pendidikan sebesar Rp4.030,43 miliar (26,26 persen dari total realisasi), Kesehatan sebesar Rp2.367,91miliar (15,43 persen dari total realisasi), Perumahan dan Fasilitas Umum sebesar Rp1.583,25 miliar (10,31 persen dari total realisasi), Ekonomi sebesar Rp1.082,98 miliar (7,06 persen dari total realisasi), Ketertiban dan Keamanan sebesar Rp758,92 miliar (4,94 persen dari total realisasi),

Perlindungan Sosial sebesar Rp243,46 miliar (1,59 persen dari total realisasi), dan Pariwisata sebesar Rp159,78 miliar (1,04 persen dari total realisasi). Rincian perkembangan realisasi Belanja Daerah menurut fungsi dari tahun 2022 sampai dengan 2024 tersaji dalam Grafik 3.40 berikut.

Grafik 3.40 – Realisasi Belanja Menurut Fungsi, 2022 s.d 2024 (Dalam Miliar Rupiah)

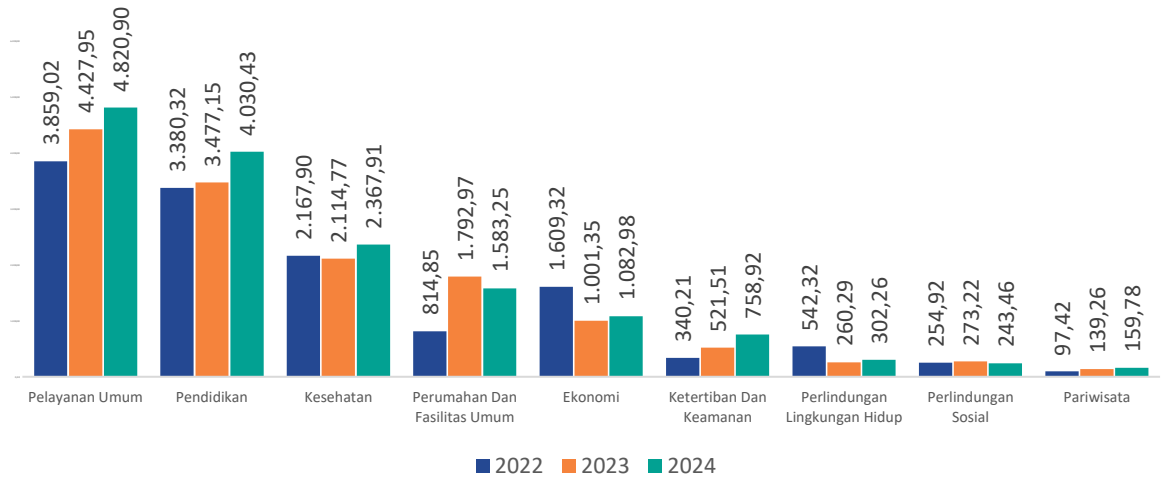

Sumber: SIKRI dan GFS Kanwil DJPb Kepri, 2025 (diolah)

Dari kesembilan fungsi yang ada, pada tahun 2024 terjadi pertumbuhan positif di hampir seluruh fungsi, kecuali dua fungsi yaitu Perumahan dan Fasilitas Umum dan Perlindungan Sosial. Peningkatan realisasi belanja cukup besar pada fungsi Pelayanan Umum dan Pendidikan. Hal ini menandakan fokus pemerintah daerah yang semakin tinggi dalam peningkatan pelayanan umum dan pendidikan di wilayah Kepri dari tahun ke tahun.

3.2.3 Surplus/Defisit APBD

APBD 2024 dianggarkan Defisit sebesar Rp708,93miliar, namun demikian pada akhir periode tahun 2024 APBD mencatatkan **Defisit anggaran sebesar Rp386,49 miliar atau 54,52 persen dari yang dianggarkan**. Defisit yang lebih rendah dari yang dianggarkan disebabkan persentase realisasi Pendapatan Daerah yang lebih tinggi dari persentase realisasi Belanja Daerah.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka pertumbuhan Defisit justru mengalami peningkatan sebesar 298,66 persen (*yoy*). Atas nilai perkembangan Defisit ini maka perlu ditentukan langkah-langkah dalam optimalisasi APBD khususnya belanja di daerah.

Grafik 3.41 – Target dan Realisasi Surplus/Defisit APBD 2022 s.d. 2024 (Dalam Miliar Rupiah)

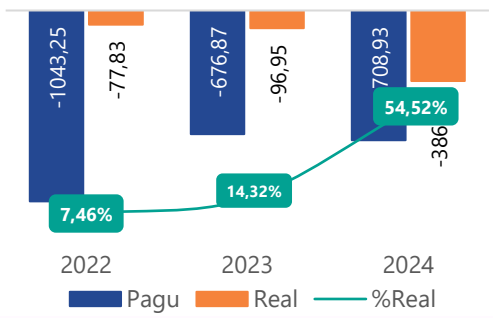

Sumber: SIKRI dan GFS Kanwil DJPb Kepri, 2025 (diolah)

Potensi risiko fiskal dapat memengaruhi stabilitas keuangan daerah seperti, Defisit anggaran daerah terjadi ketika pendapatan yang diterima daerah tidak mencukupi untuk membiayai belanja daerah. **Analisis Risiko Fiskal** pelaksanaan APBD sebagai berikut:

1) Pemerintah daerah sangat bergantung pada dana transfer pemerintah pusat

meliputi DAU, DAK, DBH. Ketergantungan ini menciptakan **risiko fiskal ketika ada perubahan kebijakan atau penurunan transfer dari pemerintah pusat**.

2) **Defisit anggaran mengarah pada opsi pembiayaan dengan risiko peningkatan beban Utang**. jika hutang tidak dikelola dengan baik akan sulit dilunasi dan merusak kestabilan fiskal dalam jangka panjang.

3) **Pemotongan anggaran dalam rangka efisiensi untuk mengurangi Defisit** anggaran mengakibatkan risiko penurunan kualitas program dan proyek berjalan terhadap layanan publik.

4) **Defisit anggaran berlebih meningkatkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah daerah,** dengan anggapan pemda tidak mampu mengendalikan belanja secara efektif dan efisien sesuai budget anggaran.

5) **Risiko ekonomi makro, seperti resesi global atau krisis ekonomi nasional,** dapat memengaruhi pendapatan daerah dari pajak dan retribusi. Misalnya: peningkatan harga tiket pesawat/kapal yang menurunkan jumlah kunjungan ke Kepri sehingga tidak menstimulus aktivitas ekonomi daerah.

3.2.4 Pembiayaan Daerah

Pada tahun 2024, Pemerintah Daerah telah menganggarkan Pembiayaan Netto sebesar Rp708,93 miliar, dengan Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp804,48 miliar dan Pengeluaran Pembiayaan Rp95,55 miliar. **Realisasi Pembiayaan pada tahun 2024 sebesar Rp822,61 miliar (116,04 persen Pagu)**, dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp914,56 miliar (113,68 persen Pagu) dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp91,95 miliar (96,22 persen Pagu).

Grafik 3.42 – Target dan Pembiayaan Daerah 2022 s.d. 2024 (Dalam Miliar Rupiah)

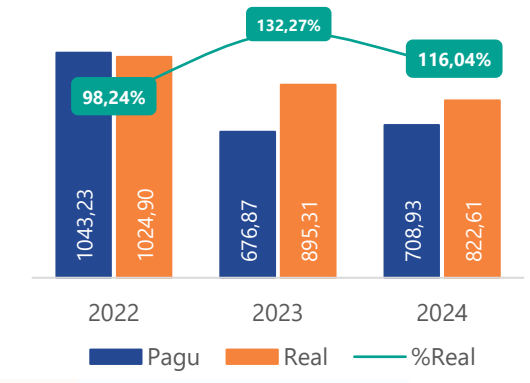

Sumber: SIKRI dan GFS Kanwil DJPb Kepri, 2025 (diolah)

Realisasi Pembiayaan yang melebihi Pagu disebabkan oleh adanya **Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) yang terealisasi Rp913,46 miliar** meskipun hanya dianggarkan sebesar Rp803,98 miliar pada Pagu. Atas Pembiayaan yang jauh di atas Defisit maka terbentuk SiLPA sebesar Rp436,12 miliar.

3.2.5 Perkembangan BLU Daerah

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (UPT) di lingkungan pemerintah daerah di Indonesia yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

BLUD merupakan bagian dari perangkat Pemerintah Daerah, dengan status hukum tidak terpisah dari Pemerintah Daerah. Berbeda dengan SKPD pada umumnya, pola pengelolaan keuangan BLUD memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, seperti pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Sampai dengan tahun 2024, tercatat Kepri memiliki 26 (dua puluh enam) entitas yang telah ditetapkan sebagai instansi yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPKBLUD). Dari 26 BLUD yang ada, terdapat 17 BLUD yang bergerak di Bidang Kesehatan, 5 BLUD di Bidang Pendidikan, 1 BLUD Bidang Pengelola Dana, dan 3 BLUD di bidang Layanan Lainnya.

Adapun dari 17 BLUD yang bergerak di bidang kesehatan, terdapat 9 BLUD yang berbentuk rumah sakit. Tabel 3.16 menyajikan profil dari 9 BLUD rumah sakit di Prov. Kepri sedangkan Tabel 3.17 menyajikan profil BLUD lainnya.

Tabel 3.16 – Profil Keuangan dan Layanan BLUD Rumah Sakit di Prov. Kepri 2022-Sems I 2024

No.	Nama BLUD RSUD	Tahun	Pendapatan	Belanja	Total Aset Lancar	Total Aset Tidak Lancar	Total Kewajiban
1	RSUD Raja Ahmad Tabib	2022	116.979.172.351	244.346.764.015	7.881.244.363	545.819.331.918	0,00
		2023	106.952.299.137	281.751.090.838	10.683.734.070	619.265.706.613	0,00
		s.d. Smt 1 2024	30.004.160.015	31.350.800.195	14.980.049.225	623.674.128.506	0,00
2	RSUD Kota Tanjungpinang	2022	70.759.464.790	81.808.521.785	35.529.536.185	63.247.317.422	912.186.513
		2023	54.332.051.933	74.059.864.234	18.571.004.706	62.595.768.077	1.245.875.434
		s.d. Smt 1 2024	30.737.750.517	23.767.434.089	25.452.192.168	56.882.223.143	3.582.915.099
3	RSJKO Engku Haji Daud	2022	29.016.395.693	25.814.341.433	8.147.709.750	60.595.786.531	2.092.255.282
		2023	20.712.595.015	22.488.820.059	5.658.881.154	94.366.457.996	6.607.701.037
		s.d. Smt 1 2024	9.780.830.222	10.925.481.071	4.402.177.096	90.081.646.854	0,00
4	RSUD Kabupaten Bintan	2022	21.639.789.617	66.242.902.441	13.137.488.182	93.224.164.432	5.263.988.485
		2023	26.376.902.044	42.078.478.868	13.295.382.301	49.878.181.179	0,00
		s.d. Smt 1 2024	9.855.146.805	14.974.832.791	9.687.994.039	51.176.798.217	0,00
5	RSUD Embung Fatimah Batam	2022	100.640.918.159	201.575.515.961	49.221.332.638	145.623.809.813	8.679.306.955
		2023	97.244.734.350	176.158.138.476	33.188.411.643	29.669.037.049	10.021.427.696
		s.d. Smt 1 2024	50.528.128.256	88.680.575.400	29.080.079.106	129.759.735.427	4.756.165.056
6	RSUD Dabo	2022	4.416.500.101	11.067.996.764	2.995.366.885	2.190.305.630	123.173.451
		2023	7.745.755.195	8.498.846.647	1.551.661.457	1.721.861.109	338.908.576
		s.d. Smt 1 2024	4.225.230.282	4.175.899.578	1.063.884.957	1.832.968.795	338.908.576
7	RSUD Encik Mariyam	2022	4.092.778.295	5.829.977.489	3.160.035.439	515.120.546	1.545.810.663
		2023	5.116.664.490	6.788.604.638	1.410.858.144	417.614.229	525.881.276
		s.d. Smt 1 2024	2.272.478.543	2.247.817.659	1.879.992.473	440.947.229	0,00
8	RSUD Muhammad Sani	2022	67.819.422.358	84.950.832.554	86.033.797.118	64.312.612.466	24.155.206.293
		2023	73.605.439.411	98.333.486.735	58.206.036.833	80.321.577.308	8.406.941.664
		s.d. Smt 1 2024	37.995.142.111	37.345.660.456	58.206.036.833	80.321.577.308	7.872.209.527
9	RSUD Natuna	2022	6.344.883.376	36.356.802.961	11.326.600.443	5.114.887.206	2.625.792.748
		2023	25.007.928.655	24.704.621.991	14.935.960.286	24.916.784.415	1.163.285.412
		s.d. Smt 1 2024	11.122.118.116	9.564.606.679	5.114.887.206	273.305.820	0,00

Sumber: Laporan BLUD Kanwil DJPB Kepri, 2025

Tabel 3.17 – Profil Keuangan dan Layanan BLUD di Prov. Kepri Tahun 2023

No.	Nama BLU	Rumpun Layanan	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)	Aset (Rp)
1	SMK Negeri 1 Kota Batam	Pendidikan	4.335.968.750	258.9451.782	68.929.200
2	SMK Negeri 1 Kota Tanjungpinang	Pendidikan	2.019.003.491	1.436.926.541	48.591.620

3	SMK Negeri 2 Kota Batam	Pendidikan	0	6.900.000	6.900.000
4	SMK Negeri 2 Kota Tanjungpinang	Pendidikan	1.240.356.280	499.718.978	103.790.100
5	SMK Negeri 6 Kota Batam	Pendidikan	2.698.069.303	2.161.077.269	150.364.000
6	UPT Pelayanan Jasa Transportasi Dinas Perhubungan Kota Batam	Barang / Jasa Lainnya	3.541.229.809	3.511.522.032	225.400.000
7	UPT Pengelolaan Air Bersih pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	Barang / Jasa Lainnya	2.569.599.889	1.881.994.126	5.534.854.413
8	UPT Pengelolaan Dana Bergulir pada BPKAD Kota Batam	Pengelolaan Dana	381.261.633	434.861.245	1.158.227.207
9	UPT Puskesmas Kundur Barat Kabupaten Karimun	Kesehatan	474.061.034	467.663.613	2.604.968.055
10	UPT Puskesmas Lubuk Baja	Kesehatan	891.169.864	441.362.556	12.374.594.555
11	UPT Puskesmas Meral Kabupaten Karimun	Kesehatan	812.244.648	796.990.842	263.287.017
12	UPT Puskesmas Sekupang Kota Batam	Kesehatan	912.573.678	512.603.974	6.339.307.173
13	UPT Puskesmas Tanjung Balai Karimun	Kesehatan	1.147.770.130	1.142.750.414	14.731.992.473
14	UPT Puskesmas Tanjung Batu Kabupaten Karimun	Kesehatan	473.054.746	533.325.312	32.504 .123.317
15	UPT Puskesmas Tanjung Berlian Kabupaten Karimun	Kesehatan	349.536.730	314.107.732	3.197.150.531
16	UPT Puskesmas Tanjung Sengkuang Kota Batam	Kesehatan	967.886.064	494.557.933	11.772.796.279
17	UPT Puskesmas Tebing Kabupaten Karimun	Kesehatan	557.124.492	528.610.236	4.808.403.332

Sumber: Laporan BLUD Kanwil DJPB Kepri, 2025

Perjalanan pengelolaaan BLUD di Provinsi Kepri sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 merupakan sebuah hal yang terus menjadi tantangan bagi para pengelola dan pembina BLUD di Kepri. **Kanwil DJPb Prov. Kepri melaksanakan tugas dalam hal asistensi kepada BLUD**. Merujuk pada hasil asistensi, secara umum, permasalahan yang dialami oleh BLUD lingkup Prov. Kepri adalah adanya **kendala pada pengelola keuangan BLUD yang belum memahami pengelolaan keuangan BLUD dan penggunaan aplikasi e-BLUD.** Selain itu, terdapat kendala terkait SDM seperti ketika terjadi pergantian pengelola keuangan tidak terjadi internalisasi sehingga pengelola keuangan yang baru perlu mempelajari dan beradaptasi terkait penganggaran dan pelaporan keuangan BLUD serta terdapat pengelola keuangan (bendahara) yang belum tersertifikasi, serta terdapat beberapa BLUD yang terkendala kekurangan SDM atau tenaga kerja. Selanjutnya **beberapa BLUD juga belum menerapkan peraturan terkait pembentukan Dewan Pengawas** karena ada syarat yang belum terpenuhi, belum melakukan pembayaran insentif berbasis kinerja, dan belum mengimplementasikan investasi jangka Panjang.

Melalui **berbagai perbaikan yang dijalankan oleh BLUD di Kepri dengan asistensi pembinaan oleh Kanwil DJPb Kepri**, maka setiap BLUD kini telah mampu untuk memetakan permasalahan yang ada dan menggali potensi melalui SDM dan sumber dana yang ada demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang terus memberikan dampak sosial dan ekonomi bagi wilayah Kepulauan Riau.

3.2.6 Isu Strategis Pelaksanaan APBD

3.2.6.1 Evaluasi Dan Tantangan Atas Ketercapaian Output Program Strategis Pemda Yang Didanai APBD

1. Terdapat **status lahan yang belum *clear*** sehingga DAK Fisik untuk bidang/subbidang Pendidikan tidak dapat terserap optimal.
2. Pergantian atau ***reshuffle* pejabat yang diiringi dengan pergantian operator** dan pelaksana kegiatan sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi terhambat.
3. Terdapat beberapa **pejabat daerah yang masuk sebagai objek pemeriksaan BPK dan Kejaksaan** sehingga menghambat proyek dan program berjalan.
4. OPD penanggungjawab kegiatan **lambat dalam menyampaikan laporan realisasi** dan mengajukan reviu kepada APIP.
5. **Kurangnya koordinasi antara OPD dengan BPKAD** dan Inspektorat Provinsi.
6. **Letak geografis Kepri yang kepulauan** dengan jarak antar pulau yang jauh dan terluar membutuhkan waktu untuk ditempuh dengan perjalanan via kapal laut, ferry, pesawat, *speed boat* sehingga menyulitkan dalam mobilisasi orang dan barang terlebih untuk proyek fisik di pulau terluar
7. **Cuaca ekstrem dan rentan bencana alam** (longsor, kebakaran, angin kencang di musim penghujan dan ombak tinggi) dapat menghambat pengerjaan proyek fisik misalnya terkait proyek fisik pembangunan jalan dan transportasi perairan. Sempat terdapat Kapal pengangkut barang tenggelam di wilayah perairan Tanjung Nyang, Kabupaten Lingga dan kapal pengangkut sembako karam di Perairan Desa Belubang, Kabupaten Lingga, Kepri tersebut diketahui mengangkut 200 ton beras.

3.2.6.2 Permasalahan Dan Tantangan Tata Kelola Dan Pencapaian Belanja Daerah Berkualitas Yang Didanai APBD

1. **Keterlambatan dalam evaluasi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)** dapat menghambat proses perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan, sehingga mengurangi efektivitas penggunaan anggaran
2. Beberapa daerah di Kepri menghadapi **masalah dalam pengelolaan pajak dan retribusi, termasuk realisasi belanja** yang tidak sesuai ketentuan dan pengelolaan aset tetap yang kurang optimal.
3. **Sistem** yang digunakan dalam proses menjalankan APBD belum sepenuhnya digital, berbeda dengan APBN.
4. Kurangnya jumlah **SDM** yang memahami tata kelola penganggaran, belanja dan pertanggungjawaban APBD

3.2.6.3 Permasalahan Dan Tantangan Dalam Upaya Akselerasi Belanja APBD

1. **Tahapan penyiapan APBD** mulai dari evaluasi oleh Kemendagri, rapat pembahasan dengan DPRD, penetapan APBD, input kepeng SIPD, pembagian DPA, penyiapan SK dan dokumen administratif, hingga realisasi APBD memakan waktu yang cukup lama hingga bulan Maret tahun anggaran tersebut, salah satunya terkendala sistem yang belum sepenuhnya digital seperti pengelolaan keuangan APBN.
2. **OPD masih lambat dalam menyampaikan dokumen realisasi**

penyerapan dana dan capaian output DAK Fisik periode sebelumnya sehingga DAK Fisik tahap selanjutnya tidak dapat segera disalurkan.

3.3 Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian

Pada tingkat wilayah, Kanwil DJPb Kepri menyusun **Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) tingkat wilayah** yang mengonsolidasikan LKPP tingkat wilayah dan LKPD konsolidasi di wilayah kerja Kanwil DJPb Kepri. Tabel 3.16 berikut menyajikan perkembangan realisasi anggaran konsolidasi mulai tahun 2022 sampai dengan 2024.

Tabel 3.18 – Perkembangan Realisasi Konsolidsi, 2022 s.d. 2024 (Dalam Miliar Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2023	% *Growth*	TA 2024	% *Growth*
Pendapatan Konsolidasi	**16.673,21**	**16.848,79**	**1,05%**	**19.149,68**	**13,66%**
Penerimaan Perpajakan	13.233,86	13.415,34	1,37%	14.488,16	8,00%
Pendapatan PNBP	3.426,13	3.428,57	0,07%	4.658,30	35,87%
Penerimaan Hibah	13,23	4,88	-63,08%	3,22	-34,12%
Belanja dan Transfer Konsolidasi	**19.245,23**	**22.589,72**	**17,38%**	**23.297,09**	**3,13%**
Belanja Pusat dan Daerah	18.509,40	21.607,45	16,74%	22.533,31	4,28%
Transfer Pusat dan Daerah	735,83	982,26	33,49%	763,78	-22,24%
Surplus/Defisit	**-2.572,02**	**-5.740,92**	**123,21%**	**-4.147,42**	**-27,76%**
Pembiayaan Netto	**1.024,90**	**895,31**	**-12,64%**	**822,61**	**-8,12%**
Penerimaan Pembiayaan	1.025,90	963,58	-6,07%	914,56	-5,09%
Pengeluaran Pembiayaan	1,00	68,27	0,00%	91,95	0,00%
SiLPA/SiKPA	**-1.547,12**	**-4.845,61**	**213,20%**	**-3.324,80**	**-31,39%**

Sumber GFS Kanwil DJPb Kepri, 2025 (diolah)

Pada tahun 2024 secara konsolidasi terdapat realisasi Pendapatan Konsolidasi sebesar Rp19.149,68 miliar dengan *growth* 13,66 persen (*yoy*). Realisasi Belanja dan Transfer Konsolidasi sebesar Rp23.297,09 miliar dengan *growth* 3,13 persen (*yoy*). Atas realisasi pendapatan dan belanja ini terdapat Defisit sebesar Rp4.147,42 miliar. Jumlah defisit ini lebih rendah dibandingkan tahun 2023 sehingga terjadi *growth* sebesar minus 27,76 persen (*yoy*).

Terdapat realisasi Pembiayaan Netto sebesar Rp822,61 miliar dengan *growth* minus 8,12 persen (*yoy*) sehingga pada akhirnya terdapat SiKPA sebesar Rp3.324,80 miliar.

Grafik 3.43 –Realisasi Pendapatan Konsolidasian, 2022 s.d. 2024 (Dalam Miliar Rupiah)

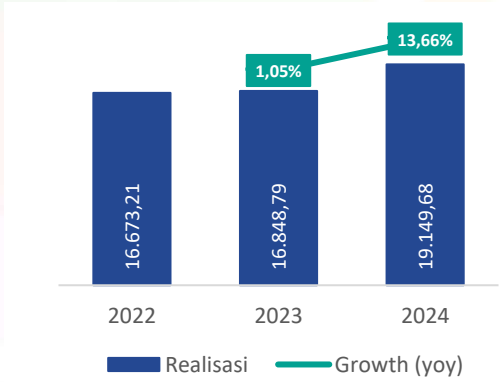

Sumber: GFS Kanwil DJPb Kepri, 2025 (diolah)

3.3.1 Pendapatan Konsolidasian

Pada Grafik 3.43 di bawah terlihat **realisasi Pendapatan Konsolidasi terus mengalami pertumbuhan**. Pada tahun 2024, realisasi Pendapatan Konsolidasi sebesar Rp19.149,68 miliar tumbuh 13,66 persen (*yoy*). Perkembangan Pendapatan Konsolidasi yang

stagnan pada tahun 2022 dan 2023 kemudian menjadi meningkat cukup drastis pada tahun 2024. Kenaikan realisasi Pendapatan Konsolidasi menandakan optimalisasi pemerintah pusat maupun daerah dalam memanfaatkan potensi sumber pendapatan di daerah.

Pada tahun 2024, **kontribusi Pendapatan Konsolidasi didominasi oleh Penerimaan Perpajakan sebesar Rp14.488,16 miliar**, kemudian diikuti oleh PNBP sebesar Rp4.658,30miliar, dan Pendapatan Hibah sebesar Rp3,22 miliar. Pertumbuhan tertinggi terdapat pada realisasi Pendapatan PNBP yaitu 135,87 persen (*yoy*).

Grafik 3.44 –Realisasi Belanja Konsolidasian, 2022 s.d. 2024 (Dalam Miliar Rupiah)

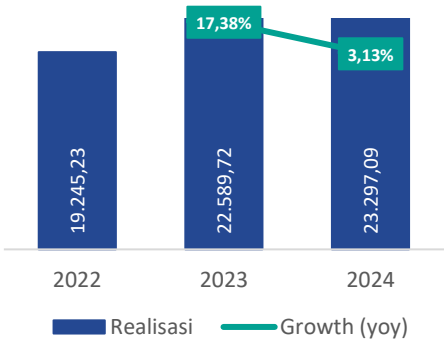

Sumber: GFS Kanwil DJPb Kepri, 2025 (diolah)

3.3.2 Belanja Konsolidasian

Pada Grafik 3.44 di atas terlihat realisasi **Belanja Konsolidasi tahun 2024 sebesar Rp23.297,09 miliar** dengan pertumbuhan realisasi Belanja Konsolidasi 3,13 persen (*yoy*). Pada tahun 2024, Belanja Konsolidasi didominasi oleh Belanja Pusat dan Daerah sebesar Rp22.533,31 miliar dibandingkan dengan Transfer Pusat dan Daerah sebesar Rp763,78 miliar.

Analisis Belanja Konsolidasi per Kapita

Berdasarkan realisasi Belanja Konsolidasi, dapat diketahui besarnya Belanja Konsolidasi per kapita. Melalui analisis ini dapat dilihat tingkat pemerataan Belanja Konsolidasi terhadap jumlah penduduk. Adapun hasil perhitungan belanja per kapita tahun 2022 sampai dengan 2024 sebagai mana Tabel 3.17.

Belanja Konsolidasi pada tahun 2022 sebesar Rp19.245,23 miliar, tahun 2023 sebesar Rp22.589,72 miliar, dan tahun 2024 sebesar Rp23.297,09 miliar. Disisi lain, jumlah penduduk pada tahun 2022 sebanyak 2.118.239 jiwa, tahun 2023 sebanyak 2.179.820 jiwa, dan tahun 2024 sebanyak 2.183.300 jiwa.

Pada tahun 2022 besarnya rasio Belanja per kapita sebesar Rp8,98 juta per jiwa, pada tahun 2023 sebesar Rp8,84 juta per jiwa, dan pada tahun 2024 sebesar Rp10,67 juta per jiwa. Pada tahun 2023 rasio Belanja per kapita tumbuh negative sebesar minus 1,57 persen sedangkan **pada tahun 2024 rasio Belanja per kapita tumbuh 20,7 persen**.

Tabel 3.19 – Rasio Belanja Konsolidasi per Kapita, 2022 s.d. 2024

Periode	Belanja (Dalam Miliar Rupiah)	*Growth* Belanja	Jumlah Penduduk (jiwa)	*Growth* Jumlah penduduk	Rasio Belanja per Kapita (Rp juta/jiwa)	*Growth* Rasio Belanja per Kapita
(a)	(b)		(c)		(d) = (b) / (c)	
2022	19.245,23	-	2.118.239	-	8,98	-
2023	22.589,72	17,38%	2.179.820	2,91%	8,84	-1,57%
2024	23.297,09	3,13%	2.183.300	0,16%	10,67	20,7%

Sumber: GFS Kanwil DJPb Kepri dan BPS Kepri, 2025 (diolah)

3.3.3 Surplus/Defisit

Perkembangan realisasi Surplus/Defisit Konsolidasi menunjukkan nilai yang fluktuatif pada tiga tahun terakhir. **Pada tahun 2024 dicatat Defisit sebesar Rp4.147,42 miliar** dengan pertumbuhan sebesar minus 27,76 (yoy). Defisit yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya disebabkan oleh pertumbuhan Pendapatan Konsolidasi yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan Belanja Konsolidasi.

Grafik 3.45 –Realisasi Defisit Konsolidasian, 2022 s.d. 2024 (Dalam Miliar Rupiah)

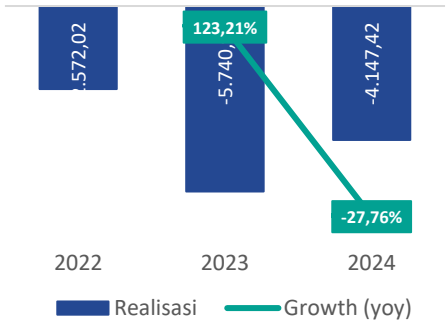

Sumber: GFS Kanwil DJPb Kepri, 2025 (data diolah)

3.3.4 Pembiayaan Konsolidasi

Grafik 3.46 –Realisasi Pembiayaan Konsolidasian, 2022 s.d. 2024 (Dalam Miliar Rupiah)

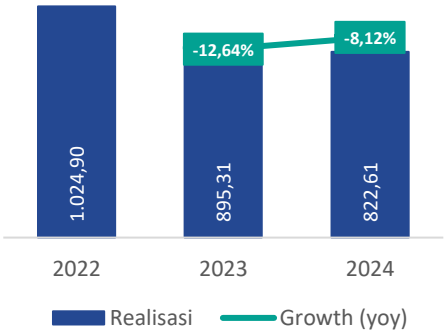

Sumber: GFS Kanwil DJPb Kepri, 2025 (data diolah)

Perkembangan realisasi Pembiayaan Konsolidasi menunjukkan nilai yang fluktuatif pada tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022 realisasi sebesar Rp1.024,90 miliar, pada tahun 2023 sebesar Rp895,31 miliar, dan pada tahun 2024 sebesar Rp822,61 miliar.

Special Box 3

Perbedaan Definisi, Pilar dan Posisi Ketahanan Pangan dari *Food and Agriculture Organization* (FAO) dan Badan Pangan Nasional (BPN)

Gambar 1.
Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi

Menurut Badan Pangan Nasional definisi ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

BPN tidak mengadopsi satu pilar FAO yaitu Stabilitas . Hal ini membuat Indonesia rawan Food Insecurity pada kondisi "*Economic Shocks*" seperti Pandemic.

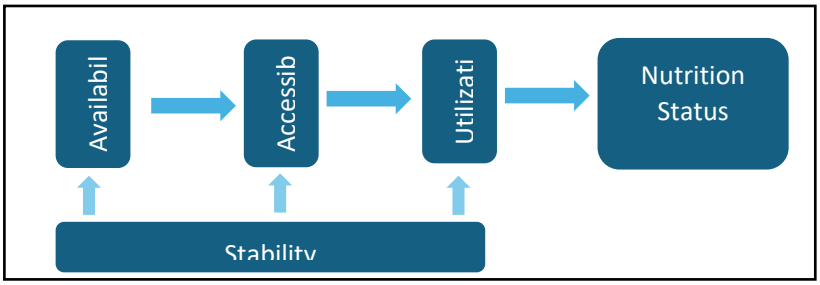

Kwanele and Worth (2020), menghasilkan hubungan antara ke empat pilar ketahanan pangan dan ketahanan gizi

Food and Agriculture Organization (FAO) mendefinisikan ketahanan pangan (*food security*) *exists when all people, at all times, have physical and economic access to sufficient, safe and nutritious food that meets their dietary needs and food preferences for an active and healthy life (World Food Summit, 1996)*

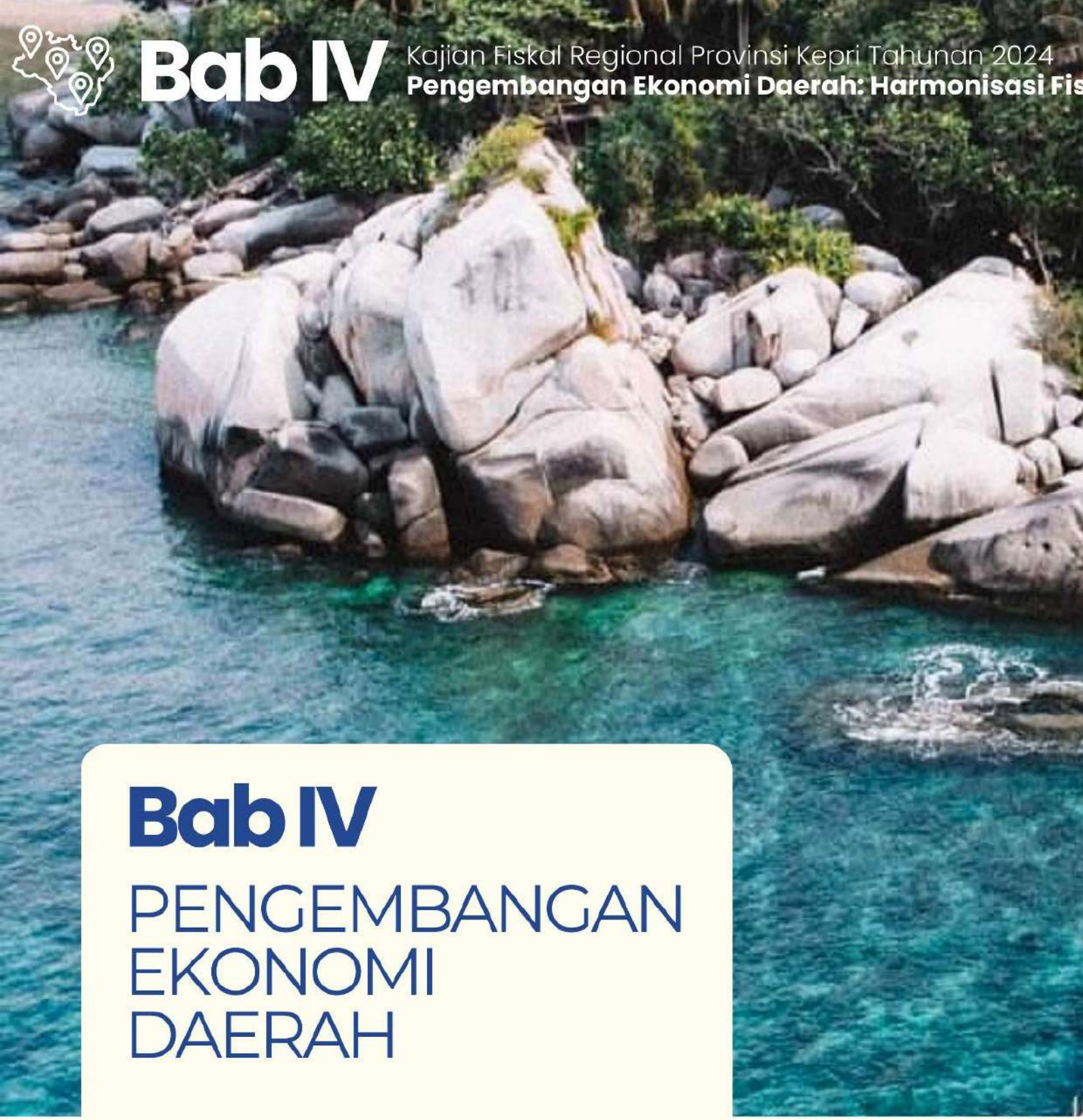

Bab IV

PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH

Harmonisasi belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik di Kepri tahun 2024 menunjukkan kinerja yang efektif.

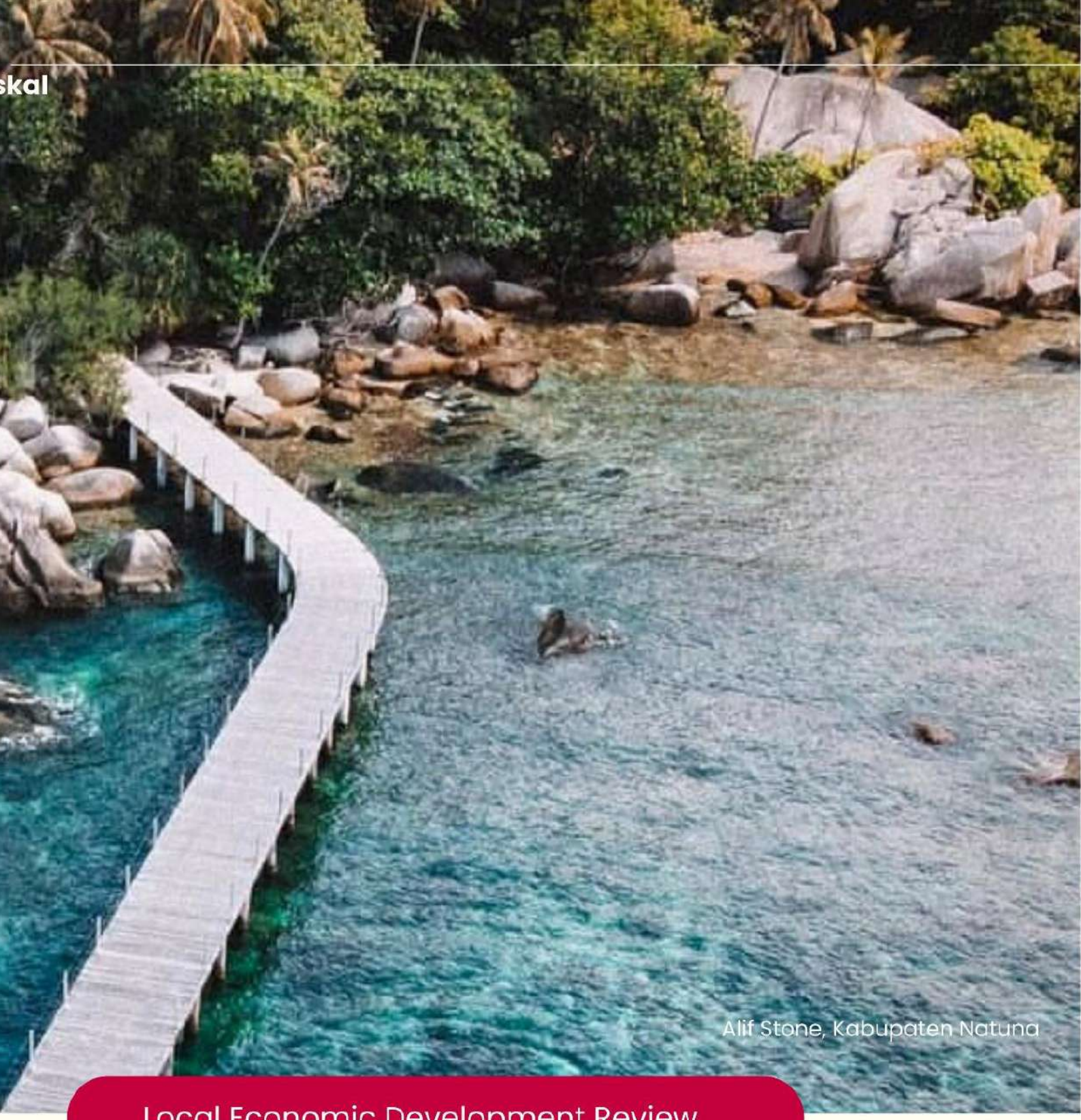

Alif Stone, Kabupaten Natuna

Local Economic Development Review

- Pendahuluan
- Gambaran Umum Harmonisasi Belanja KL/DAK Fisik di Tingkat Wilayah

4.1 Pendahuluan

Tahun 2024 merupakan tahun kedua pelaksanaan SOP Link 70 tahun 2023 tentang Monitoring dan Evaluasi (Monev) Perencanaan dan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah. Kolaborasi antara Ditjen Anggaran (DJA), Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Ditjen Perbendaharaan (DJPb) sangat penting untuk memastikan harmonisasi Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah terjaga dengan baik. Sinergi ketiga unit di Kementerian Keuangan ini menjadi sangat penting dalam mengawal harmonisasi Belanja Pemerintah Pusat dan Tranfer ke Daerah.

Pada bab ini terdapat dua terminologi yang berbeda yaitu:

1. Belanja K/L yang mendukung (salah satu jenis TKD) misalnya Belanja K/L yang mendukung DAK Fisik;
2. TKD DAK Fisik.

Secara khusus, peran Kanwil DJPb di seluruh Indonesia dalam mengawal pelaksanaan Belanja K/L yang mendukung DAK Fisik melalui aktivitas sebagai berikut:

1. Reviu kinerja realisasi anggaran dan capaian output harmonis.
2. Analisis permasalahan harmonisasi Belanja Pemerintah Pusat yang mendukung DAK Fisik di masing-masing wilayah.
3. Identifikasi upaya harmonisasi Belanja K/L dan DAK Fisik oleh pemerintah daerah.

Tujuan utama aktivitas tersebut adalah dalam rangka memperoleh gambaran kendala/permasalahan yang terjadi di lapangan, sekaligus memotret upaya yang dilakukan oleh pemda maupun satker dalam sinkronisasi Belanja K/L dan DAK Fisik. Selain itu, melalui kegiatan harmonisasi diharapkan adanya rekomendasi kebijakan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam rangka meningkatkan kualitas dan efektivitas Belanja K/L yang mendukung DAK Fisik.

Ruang lingkup monev Belanja K/L yang mendukung DAK Fisik yang dilakukan Kanwil DJPb Kepri berfokus pada spasial/kewilayahan dengan alokasi DAK Fisik. Monev sikronisasi Belanja Pemerintah Pusat dan DAK Fisik tahun 2024 dilaksanakan terhadap 6 (enam) bidang yang telah dilakukan sinkronisasi pada tahap perencanaan/penganggaran, yaitu: Bidang Pendidikan; Bidang Kesehatan; Bidang Jalan; Bidang Air Minum; Bidang Sanitasi; dan Bidang Pertanian. Pada Kajian Fiskal Regional triwulan IV Tahun 2024, Kanwil DJPb Prov. Kepri menyajikan data dan menjelaskan secara rinci gambaran kinerja, kendala serta upaya dalam harmonisasi Belanja K/L dan DAK Fisik pada tingkat wilayah.

4.2 Gambaran Umum Harmonisasi Belanja KL/DAK Fisik di Tingkat Wilayah

4.2.1 Alokasi Belanja K/L yang Mendukung DAK Fisik dan DAK Fisik pada 6 Bidang

RO harmonis di lingkup Kepri tersebar pada empat (4) K/L, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pertanian. Keempat K/L ini masing-masing membidangi Rincian Output (RO) Harmonis sesuai dengan karakteristik tugas dan fungsinya masing-masing: Kementerian PUPR memiliki belanja RO Harmonis pada bidang jalan, sanitasi, dan air minum; Kemendikbudristek pada bidang pendidikan; Kementerian Pertanian pada bidang pertanian serta Kementerian Kesehatan pada bidang kesehatan dan KB.

4.2.1.2 Perbandingan Belanja K/L yang Mendukung DAK Fisik dan TKD DAK Fisik

Terdapat 6 bidang DAK Fisik yang didukung oleh Belanja K/L, yaitu air minum, jalan, kesehatan dan KB, pendidikan, pertanian, dan

sanitasi. Untuk melihat perbandingan antara Pagu pada DAK Fisik dan Belanja K/L yang mendukung DAK Fisik, terjadi pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1 – Pagu dan Realisasi Belanja K/L (RO Harmonis) dan TKD Dak Fisik Tahun 2024 (dalam Rp)

Bidang	Belanja K/L (RO Harmonis)			TKD DAK Fisik		
	Pagu	Realisasi	% Real	Pagu	Realisasi	% Real
Air Minum	76.139.528.000	75.730.074.844	99,46%	6.953.789.000	6.875.780.500	98,88%
Jalan	460.629.538.000	460.183.243.034	99,90%	160.499.591.000	157.594.881.081	98,19%
Kesehatan dan KB	2.029.576.000	1.998.733.350	98,48%	110.760.405.000	101.465.620.857	91,61%
Pendidikan	90.527.006.000	88.514.050.401	97,78%	203.582.668.000	193.514.076.702	95,05%
Pertanian	809.745.000	439.895.108	54,33%	4.589.438.000	4.512.669.386	98,33%
Sanitasi	1.395.000.000	1.288.581.483	92,37%	1.155.503.000	1.155.502.950	100,00%
Jumlah	**631.530.393.000**	**628.154.578.220**	**99,47%**	**487.541.394.000**	**465.118.531.476**	**95,40%**

Sumber: Sintesa, 2025 (diolah)

Bidang jalan merupakan bidang dengan Pagu Belanja K/L mendukung DAK Fisik tertinggi sebesar Rp460,63 miliar, dengan realisasi Rp460,18 miliar (99,90 persen dari Pagu). Sementara itu, Pagu DAK Fisik sebesar Rp160,50 miliar, dengan realisasi sebesar Rp157,59 miliar (98,19 persen dari Pagu). Pembangunan infrastruktur konektivitas masih menjadi fokus pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Kepri.

Bidang pendidikan memiliki Pagu Belanja K/L mendukung DAK Fisik sebesar Rp90,53 miliar, dengan realisasi Rp88,51 miliar (97,78 persen dari Pagu). Selain itu, Pagu DAK fisik pada bidang pendidikan sebesar Rp203,58 miliar, dengan realisasi Rp193,51 miliar (95,05 persen dari Pagu). Pendidikan menjadi prioritas pemerintah dalam mendorong pembangunan manusia dan kesejahteraan masyarakat.

Bidang air minum memiliki Pagu Belanja K/L mendukung DAK Fisik tertinggi sebesar Rp76,14 miliar, dengan realisasi Rp75,73 miliar (99,46 persen dari Pagu). Sementara itu, Pagu DAK Fisiknya sebesar Rp6,95 miliar, dengan realisasi Rp6,88 miliar (98,88 persen dari Pagu). Pemerintah pusat dan daerah terus mendorong pembangunan akses air bersih di Kepri untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bidang kesehatan dan KB memiliki Pagu Belanja K/L mendukung DAK Fisik sebesar Rp2,03 miliar, dengan realisasi Rp2,00 miliar (98,48 persen dari Pagu). Selain itu, Pagu DAK fisik pada bidang kesehatan dan KB sebesar Rp110,76 miliar, dengan realisasi Rp101,47 miliar (91,61 persen dari Pagu). Kesehatan adalah bidang yang menjadi prioritas pemerintah dalam mendorong kesejahteraan masyarakat.

Bidang sanitasi memiliki Pagu Belanja K/L mendukung DAK Fisik sebesar Rp1,40 miliar, dengan realisasi Rp1,29 miliar (92,37 persen dari Pagu). Sementara, Pagu DAK Fisiknya sebesar Rp1,55 miliar, dengan realisasi 1,15 miliar (100,00 persen dari Pagu).

Bidang pertanian memiliki Pagu Belanja K/L mendukung DAK Fisik sebesar Rp0,81 miliar, dengan realisasi Rp0,44 miliar (54,33 persen dari Pagu). Selain itu, Pagu DAK Fisik pada bidang pertanian sebesar Rp4,59 miliar, dean realisasi 4,51 miliar (98,33 persen dari Pagu).

4.2.1.2 Alokasi Anggaran Belanja K/L Secara Umum

Tabel 4.2 – Pagu K/L yang Mendukung DAK Fisik RO Harmonis (dalam Rp)

BA	K/L	Pagu Total	Pagu Mendukung DAK Fisik	Porsi (%)	Jumlah Satker	Jumlah RO
018	Kementerian Pertanian	8.429.537.000	809.745.000	9,61%	6	8
023	Kemendikbudristek	657.888.597.000	53.399.352.000	8,12%	3	7
024	Kementerian Kesehatan	153.755.857.000	2.029.576.000	1,32%	1	21
033	Kementerian PUPR	1.104.206.846.000	575.291.720.000	52,10%	5	18
Jumlah		**1.924.280.837.000**	**631.530.393.000**	**32,82%**	**15**	**54**

Sumber: Sintesa, 2025 (diolah)

Kementerian PUPR memiliki alokasi Belanja RO Harmonis mencapai Rp575,29 miliar (52,10 persen dari total Pagu Kementerian PUPR), terbagi pada 5 satker dengan 18 rincian output. Pagu tersebut merupakan yang terbesar dalam RO Harmonis di Kepri. Sebagian besar belanja pada Kementerian PUPR ini digunakan untuk pembangunan infrastruktur konektivitas seperti jalan dan jembatan.

Pagu Harmonis yang terbesar kedua yaitu Kemendikbudristek dengan alokasi mencapai Rp53,40 miliar dari total Rp657,89 miliar (8,12 persen dari Pagu Kemendikbudristek di Kepri), terbagi pada 3 satker dengan 7 rincian output. Alokasi belanja tersebut sebagian besar dimanfaatkan untuk rehabilitasi sekolah dan pelatihan guru.

Pagu terbesar selanjutnya terdapat pada Kementerian Kesehatan dengan Pagu Belanja terkait RO Harmonis mencapai Rp2,93 miliar dari total Rp153,76 miliar (1,32 persen dari total Pagu Kemenkes di Kepri), terdapat pada 1 satker dengan 21 rincian output. Sebagian besar belanja tersebut dimanfaatkan untuk pelatihan tenaga medis di daerah

Kementerian Pertanian memiliki Pagu Belanja terkait RO Harmonis Rp0,81 miliar dari total Rp8,43 miliar (9,61 persen dari Pagu Kementerian Pertanian di Kepri), terdapat pada 6 satker dengan 8 rincian output. Belanja tersebut sebagian besar dimanfaatkan untuk penyediaan alat pertanian dan penyuluhan pertanian.

Secara keseluruhan Pagu K/L mendukung DAK Fisik sebesar Rp631,53 miliar (32,82 persen dari total Pagu K/L terkait RO Harmonis), yang tersebar pada 15 satuan kerja dengan 54 rincian output.

3.2.1.3 Alokasi Anggaran K/L Berdasarkan Bidang DAK Fisik

Tabel 4.3 – Pagu dan Realisasi Belanja K/L per Subbidang RO Harmonis Tahun 2024 (dalam Miliar Rupiah)

Bidang	Subbidang	K/L	Pagu	Real	% Real	Pagu Bidang	Real Bidang	%	Jumlah Satker	Jumlah RO
Air Minum	Air Minum	Kementerian PUPR	76,14	75,73	99,46%	76,14	75,73	99,46%	3	4
Jalan	Jalan	Kementerian PUPR	460,63	460,18	99,90%	460,63	460,18	99,90%	2	12
Kesehatan dan KB	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting	Kementerian Kesehatan	0,87	0,87	99,62%	2,03	2,00	98,48%	1	21
	Penguatan Sistem Kesehatan	Kementerian Kesehatan	1,16	1,13	97,62%					
Pendidikan	Unknown	Kementerian PUPR	37,13	37,13	100,00%	90,53	88,51	97,78%	4	8
	PAUD	Kemendikbudristek	0,13	0,13	99,98%					
	SD/SMP/SMA/SMK	Kemendikbudristek	53,27	51,26	96,22%					
Pertanian	Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan	Kementerian Pertanian	0,81	0,44	54,33%	0,81	0,44	54,33%	6	8
Sanitasi	Sanitasi	Kementerian PUPR	1,40	1,29	92,37%	1,40	1,29	92,37%	1	1
Total			**631,53**	**628,15**	**99,47%**	**631,53**	**628,15**	**99,47%**	**17**	**54**

Sumber: Sintesa, 2025 (diolah)

Realisasi Belanja K/L mendukung DAK Fisik bidang jalan mencapai Rp460,18 miliar (99,90 persen dari Pagu) yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR, melalui 2 satker dengan 12 rincian output. Sebagian besar belanja pada Kementerian PUPR ini digunakan untuk pembangunan infrastruktur konektivitas seperti jalan dan jembatan.

Pada bidang pendidikan, Pagu terbesar terdapat pada subbidang SD, SMP, SMA, SMK dengan Pagu Rp53,27 miliar, dengan realisasi Rp51,26 miliar (96,22 persen dari Pagu). Kemudian subbidang *unknown* (tidak teridentifikasi) memiliki Pagu sebesar Rp37,13 miliar, dengan realisasi mencapai Rp37,13 miliar (100,00 persen dari Pagu). Selanjutnya subbidang PAUD memiliki Pagu Rp0,13 miliar, telah direalisasikan Rp0,13 miliar (99,98 persen dari Pagu).

Realisasi Belanja K/L mendukung DAK Fisik bidang air minum mencapai Rp76,73 miliar (99,46 persen dari Pagu) yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR, melalui 3 satker dengan 4 rincian output. Sebagian besar belanja pada bidang air minum tersebut dimanfaatkan untuk pembangunan SPAM dan jaringan air bersih.

Bidang kesehatan dan KB memiliki Pagu terbesar berada pada subbidang penguatan sistem kesehatan dengan Pagu Rp1,16 miliar, dengan realisasi Rp1,13 miliar (97,62 persen dari Pagu). Selanjutnya, subbidang penguatan penurunan angka kematian ibu, bayi, dan intervensi *stunting* memiliki Pagu Rp0,88 miliar, dengan realisasi mencapai Rp0,87 miliar (99,62 persen dari Pagu).

Bidang pertanian hanya terdapat satu subbidang, yaitu pertanian - tematik penguatan kawasan sentra produksi pangan (pertanian, perikanan, dan hewani) memiliki Pagu Rp0,81 miliar, namun realisasi baru mencapai Rp0,44 miliar (54,33 persen dari Pagu).

Pada bidang sanitasi memiliki Pagu Rp1,40 miliar dengan realisasi Rp1,29 miliar (92,37 persen dari Pagu). Belanja pada Bidang Sanitasi tersebut dimanfaatkan untuk pembinaan dan pengawasan sanitasi.

4.2.1.4 Capaian RO Utama Pada Belanja K/L Berdasarkan Bidang DAK Fisik

Tabel 4.4 – Pagu dan Realisasi Belanja K/L per Subbidang RO Harmonis Tahun 2024 (dalam Miliar Rupiah)

Bidang	Satuan	Pagu (M)	Realisasi (M)	Vol	Real Vol	% Real Vol
Air Minum						
Jaringan air baku yang dibangun/ditingkatkan	Km	39,56	39,56	9,30	9,32	100,22%
Pembangunan SPAM Kabupaten/Kota	Liter/detik	27,41	27,04	15,00	15,00	100,00%
Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat	SR	8,20	8,18	2.880	2.880	100,00%
Jalan						
Pembangunan Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP)	Km	188,32	188,22	21,98	21,98	100,00%
Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan	Km	70,86	70,62	33,35	33,35	100,00%
Jalan Kawasan Prioritas (ProPN)	Km	70,33	70,33	2,89	2,89	100,00%
Kesehatan dan KB						
Tenaga Kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya terkait Upaya Perbaikan Status Gizi (LP - 4)	Orang	0,57	0,57	48,00	48,00	100,00%
Tenaga Kesehatan yang dilatih TOT kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap penyakit infeksi emerging di FKTP (SDM-23)	Orang	0,22	0,20	30,00	30,00	100,00%
Tenaga Kesehatan yang dilatih TOT Pencegahan dan pengendalian infeksi (SDM-23)	Orang	0,16	0,16	30,00	30,00	100,00%
Pendidikan						

Bidang	Satuan	Pagu (M)	Realisasi (M)	Vol	Real Vol	% Real Vol
Guru yang mengikuti Program Pendidikan Kepemimpinan Sekolah Model Baru	Orang	37,13	37,13	8,00	8,00	100,00%
Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah Dasar dan Menengah	Unit	36,20	35,40	1.436	1.436	100,00%
Satuan Dikdas dan Dikmen yang difasilitasi penjaminan mutunya	Lembaga	8,73	7,92	1.578	1.578	100,00%
Pertanian						
Sarana Pengolahan Tanaman Perkebunan	Unit	0,23	0,01	1,00	-	0,00%
Kebun Sumber Benih Tanaman Perkebunan	Hektar	0,23	0,17	9,00	9,00	100,00%
Lembaga yang teredukasi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor	Lembaga	0,14	0,08	1,00	1,00	100,00%
Sanitasi						
Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Sanitasi	Daerah	1,40	1,29	7,00	7,00	100,00%

Sumber: Sintesa, 2025 (diolah)

1. Bidang Air Minum

Bidang air minum terdiri dari 4 rincian output, dengan 3 rincian output terbesar, yaitu jaringan air baku yang dibangun/ditingkatkan, pembangunan SPAM kabupaten/kota, dan infrastruktur air minum berbasis masyarakat.

Rincian output jaringan air baku yang dibangun/ditingkatkan memiliki Pagu Rp39,56 miliar, dengan realisasi Rp39,56 miliar (99,99 persen dari Pagu). RO ini memiliki target volume output sebanyak 9,30 km, dengan capaian mencapai 9,32 km (100,22 persen dari target output).

Rincian output pembangunan SPAM kabupaten/kota memiliki Pagu Rp27,41 miliar, dengan realisasi Rp27,04 miliar (98,63 persen dari Pagu). RO ini memiliki target volume output sebanyak 15 liter/detik, yang telah tercapai sebanyak 15 liter/detik (100,0 persen dari target output).

Rincian output infrastruktur air minum berbasis masyarakat memiliki Pagu Rp8,08 miliar, dengan realisasi Rp8,18 miliar (99,78 persen dari Pagu). RO ini memiliki volume output sebanyak 2.880 SR, yang telah tercapai sebanyak 2.880 SR (100,00 persen dari target output).

2. Bidang Jalan

Terdapat 17 rincian output pada bidang jalan, dengan 3 rincian output terbesar, yaitu pembangunan jalan trans pada 18 pulau tertinggal, terluar, dan terdepan (MP) yang memiliki Pagu sebesar Rp188,32 miliar, preservasi rekonstruksi, rehabilitasi jalan dengan Pagu sebesar Rp70,86 miliar, dan jalan kawasan prioritas (ProPN) dengan Pagu Rp70,33 miliar.

Realisasi rincian output pembangunan jalan trans pada 18 pulau tertinggal, terluar, dan terdepan (MP) sebesar Rp188,22 miliar (99,95 persen dari Pagu). Rincian output ini memiliki target volume pekerjaan jalan sepanjang 21,98 km, dengan capaian pekerjaan mencapai 21,98 km (100 persen dari target output).

Realisasi rincian output preservasi rekonstruksi, rehabilitasi jalan sebesar Rp70,62 miliar (99,66 persen dari Pagu). Rincian output ini memiliki target volume pekerjaan jalan sepanjang 33,35 km, dengan capaian pekerjaan mencapai 33,35 km (100 persen dari target output).

Realisasi rincian output jalan kawasan prioritas (ProPN) sebesar Rp70,33 miliar (100,00 persen dari Pagu). Rincian output ini memiliki target volume pekerjaan jalan sepanjang 2,89 km, dengan capaian output sepanjang 2,89 km (100 persen dari target).

3. Bidang Kesehatan dan KB

Terdapat 21 rincian output pada bidang Kesehatan dan KB, dengan 3 rincian output terbesar, yaitu tenaga kesehatan yang

ditingkatkan kapasitasnya terkait upaya perbaikan status gizi (LP - 4) yang memiliki Pagu sebesar Rp0,57 miliar, tenaga kesehatan yang dilatih TOT kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap penyakit infeksi emerging di FKTP (SDM-23) dengan Pagu sebesar Rp0,22 miliar, dan tenaga kesehatan yang dilatih TOT pencegahan dan pengendalian infeksi (SDM-23) memiliki Pagu Rp0,16 miliar.

Realisasi rincian output tenaga kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya terkait upaya perbaikan status gizi (LP - 4) mencapai Rp0,57 miliar (99,75 persen dari Pagu). Target volume output pada RO sebanyak 48 orang, dengan realisasi 48 orang (100 persen dari target output).

Realisasi rincian output tenaga kesehatan yang dilatih TOT kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap penyakit infeksi emerging di FKTP (SDM-23) mencapai Rp0,20 miliar (93,10 persen dari Pagu). Target volume output pada RO ini sebanyak 30 orang, dengan capaian output mencapai 30 orang (100 persen dari target output).

Realisasi rincian output tenaga kesehatan yang dilatih TOT pencegahan dan pengendalian infeksi (SDM-23) mencapai Rp0,16 miliar (98,31 persen dari Pagu). Target volume output pada RO ini sebanyak 30 orang, dengan capaian output mencapai 30 orang (100 persen dari target output).

4. Bidang Pendidikan

Bidang pendidikan terdiri dari 8 rincian output, dengan 3 rincian output terbesar, yaitu guru yang mengikuti program pendidikan kepemimpinan sekolah model baru, rehabilitasi dan renovasi sekolah dasar dan menengah, dan satuan Dikdas dan Dikmen yang difasilitasi penjaminan mutunya.

Rincian output rehabilitasi dan renovasi sekolah dasar dan menengah memiliki Pagu Rp37,13 miliar, dengan realisasi Rp37,13 miliar (100,00 persen dari Pagu). RO ini memiliki target volume output sebanyak 8 unit, yang telah tercapai sebanyak 8 unit (100 persen dari target output).

Rincian output guru yang mengikuti program pendidikan kepemimpinan sekolah model baru memiliki Pagu Rp36,20 miliar, dengan realisasi Rp35,40 miliar (97,77 persen dari Pagu). RO ini memiliki target volume output sebanyak 1.436 orang, yang telah tercapai sebanyak 1.436 orang (100 persen dari target output).

Rincian output rehabilitasi dan satuan Dikdas dan Dikmen yang difasilitasi penjaminan mutunya memiliki Pagu sebesar Rp8,73 miliar, dengan realisasi Rp7,92 miliar (90,68 persen dari Pagu). RO ini memiliki volume output sebanyak 1.578 orang, yang telah tercapai sebanyak 1.578 orang (100 persen dari target output).

5. Pertanian

Terdapat 8 rincian output pada bidang pertanian, dengan 3 rincian output terbesar, yaitu sarana pengolahan tanaman perkebunan yang memiliki Pagu sebesar Rp0,23 miliar, kebun sumber benih tanaman perkebunan memiliki Pagu 0,23 miliar dan lembaga yang teredukasi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor Pagu dengan sebesar Rp0,14 miliar.

Realisasi rincian output sarana pengolahan tanaman perkebunan hanya mencapai Rp0,01 miliar (5,52 persen dari Pagu). RO ini memiliki target volume output sebanyak 1 unit, dengan capaian output 0 unit (0,00 persen dari target output).

Realisasi rincian output kebun sumber benih tanaman perkebunan mencapai Rp0,17 miliar (76,77 persen dari Pagu). Target volume output pada RO ini sebanyak 9 hektar, dengan capai output 9 hektar (100 persen dari target output).

Realisasi lembaga yang teredukasi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor mencapai Rp0,08 (57,76

persen dari Pagu). Target volume output pada RO ini sebanyak 1 lembaga, dengan capaian output 1 lembaga (100 persen dari target output).

6. Bidang Sanitasi

Bidang sanitasi terdiri dari 1 rincian output, yaitu pembinaan dan pengawasan pengembangan sanitasi yang memiliki Pagu sebesar Rp1,40 miliar, dengan realisasi Rp1,29 miliar (92,37 persen dari Pagu). Rincian output tersebut memiliki target volume output sebanyak 7 daerah, dengan capaian output sebanyak 7 daerah (100 persen dari target output).

4.2.2 Kendala dan Tantangan Pelaksanaan Harmonisasi Belanja K/L

Dari keenam bidang pada RO Harmonis, kendala yang paling banyak dialami, yaitu pada aspek eksekusi kegiatan. Terdapat 19 rincian output yang mengalami kendala dan tantangan terkait dengan eksekusi kegiatan.

Grafik 4.1 - Kendala dan Tantangan Keseluruhan Bidang

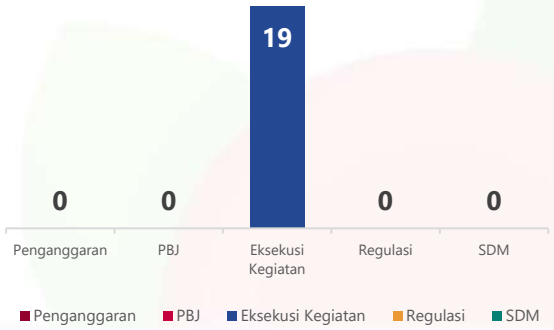

Sumber: Sintesa, 2025 (diolah)

Kluster kendala dan tantangan yang dialami pada aspek kegiatan, yaitu faktor luar seperti cuaca di Kepri yang memperhitungkan angin yang sangat kuat di musim tertentu, lokasi di pulau terluar dan sulit terjangkau, keamanan, kesiapan pedoman umum, juknis, dan dokumen pelaksanakan, serta kluster permasalahan lainnya.

4.2.2.1 Kendala Eksekusi Kegiatan

Grafik 4. 2 - Kendala dan Tantangan – Eksekusi Kegiatan per Jenis Kendala

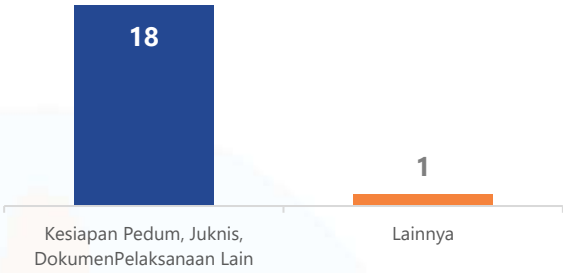

Sumber: Sintesa, 2025 (diolah)

Kendala dalam aspek eksekusi kegiatan sebagian besar terdapat terjadi pada kategori kesiapan pedoman umum, juknis, dan dokumen pelaksanaan lainnya yang terdapat pada 18 rincian output. Adapun faktor lainnya menjadi kendala pada 1 rincian output.

Kendala dan tantangan dalam hal kesiapan pedoman umum, juknis, dan dokumen pelaksanaan lain yaitu petunjuk teknis yang terbit menjelang akhir tahun anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan baru dapat dilaksanakan pada triwulan IV.

Grafik 4. 3 - Kendala dan Tantangan – Eksekusi Kegiatan per Bidang

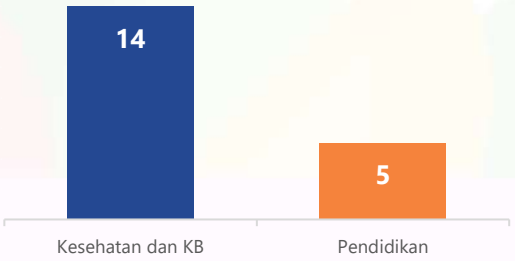

Sumber: Sintesa, 2025 (diolah)

Kendala eksekusi kegiatan ini terjadi pada dua bidang, yaitu kesehatan dan KB, serta pendidikan. Pada bidang kesehatan dan KB terjadi pada 14 rincian output, dengan permasalahn utama yaitu petunjuk teknis yang baru terbit menjelang akhir tahun, sehingga kegiatan baru dapat dilaksanakan pada triwulan IV.

Pada bidang pendidikan, kendala terkait eksekusi kegiatan dirasakan pada 5 rincian output. Permasalahan utama yaitu kegiatan yang baru dapat dilaksanakan pada bulan Desember, sehingga realisasi baru dapat terlihat pada akhir tahun anggaran.

4.2.3 Kendala dan Tantangan Pelaksanaan DAK Fisik Pada 6 Bidang

Sampai dengan semester II Tahun 2024, beberapa isu dalam penyaluran DAK Fisik antara lain adalah:

1. Tidak tersalurnya DAK Fisik tahap II bidang jalan di Kab. Natuna dengan Pagu Rp7,68 miliar dikarenakan lokasi kegiatan merupakan kawasan hutan lindung, sehingga tidak mendapatkan izin pelaksanaan kegiatan. Penyebab terjadinya permasalahan ini dikarenakan pemerintah daerah yang kurang berkoordinasi bersama dengan pengelola kawasan hutan lindung yang menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan.
2. Tidak tersalurnya DAK Fisik bidang pendidikan subbidang SD tahap III di Kota Batam dengan nilai Rp533,44 juta, karena pemda terlambat menyampaikan syarat salur. Pemda terlambat menyampaikan syarat salur dikarenakan tidak segera melakukan penyampaian melalui aplikasi omspan.
3. Tidak tersalurnya DAK Fisik Sekaligus Rekomendasi di Kab. Lingga untuk Pengadaan Mesin dan Peralatan Sentra IKM Sagu dengan nilai kontrak Rp12,30 Miliar, karena BAST tidak dapat terpenuhi sampai dengan batas waktu 16 Desember 2024. Penyebab terjadinya permasalahan ini yaitu sulit ditemukannya vendor yang dapat menyediakan mesin dan peralatan pengolahan sagu. Terdapat satu vendor di Provinsi Lampung namun sampai dengan batas waktu tidak dapat menyelesaikan atau menunjukan progres pekerjaan yang akurat.
4. Pada pelaksanaan DAK Fisik Pemda Kota Batam di bidang Kesehatan terdapat perubahan juknis dari Kementerian Kesehatan yang baru selesai pada bulan Juni sehingga dinas kesehatan harus menyesuaikan spesifikasi untuk pengadaan alat kesehatan dan pada e-katalog yang tidak terdapat spesifikasi yang TKDN sehingga harus meminta rekomendasi dari kementerian kesehatan dan team TKDN untuk mendapatkan persetujuan.
5. Pada Pemko Batam dan Pemkab Karimun terdapat rencana kegiatan yang lebih besar dari nilai kontrak karena pemda terlambat untuk melaksanakan revisi RK untuk memaksimalkan sisa pagu kontrak.
6. Terdapat kendala dalam proses reviu APIP yang cukup memakan waktu pada beberapa pemda, hal ini dikarenakan Inspektorat selaku APIP memiliki kendala pada SDM yaitu kurangnya personil sehingga proses reviu mengalami keterlambatan. Berdasarkan komitmen pimpinan, proses penyelesaian review tersebut tidak boleh lebih dari seminggu dari SPD terbit atau 5 hari kerja, dasarnya adalah surat permintaan reviu masuk.
7. OPD lambat melakukan upload dokumen penyaluran DAK Fisik seperti laporan realisasi penyerapan dana dan volume capaian output yang mendekati batas terakhir maksimal pengajuan dikhawatirkan jika OPD pelaksana terlambat melakukan perekaman pada aplikasi OMSPAN yang menyebabkan tertolaknya dokumen dan menyebabkan terjadinya gagal bayar. Selain itu, OPD juga lambat dalam mengajukan surat reviu dan menyiapkan data pendukung reviu kepada APIP.
8. Terdapat kendala yaitu terdapat lahan atau tanah yang statusnya belum *clear* sehingga menghambat pengerjaan proyek DAK Fisik. Status tanah atau lahan yang *clean and clear* diperlukan sebagai aspek legalitas dalam pemindahtanganan sebuah properti agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari.
9. Geografis Kepri yang berbentuk kepulauan dengan banyak pulau kecil yang terpisah oleh lautan juga memberikan kendala tersendiri terkait dengan letak geografis

dan cuaca yang juga dapat menghambat pengerjaan proyek DAK Fisik.

10. Terdapat pergantian Kepala OPD Pemda dampak dari reshuffle berdampak pada pergantian operator dan pelaksana kegiatan DAK Fisik sehingga diperlukannya koordinasi kembali terkait dengan pergantian tersebut.

4.2.4 Upaya Sinkronisasi di Daerah oleh Satker dan Pemda

4.2.4.1 Bidang Jalan

Pada bidang jalan telah dilakukan **beberapa upaya strategis dari pemerintah daerah dan Kementerian PUPR**, diantaranya yaitu melalui pembagian lokasi dan fokus pembangunan antara belanja K/L dan DAK Fisik di daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui dialog antara pemerintah daerah dan Kementerian PUPR. Pada tanggal 06 Mei 2024 telah dilaksanakan Musrenbangnas, Pemerintah Daerah Kepri bersama Kementerian PUPR Kepri mengusulkan enam proyek strategis melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2024 tersebut. Keenam proyek yang diusulkan yakni pembangunan jembatan penghubung Batam-Bintan, penggantian jaringan distribusi utama (JDU) Perumda Tirta Kepri di Kota Tanjungpinang, pengembangan sistem pengelolaan air minum (SPAM) regional Pulau Bintan, peningkatan SPAM IKK Sebayar, (Bunguran Timur, Kabupaten Natuna), pembangunan monumen tugu bahasa nasional di Pulau Penyengat, dan pembangunan jembatan semala di Natuna.

Selain itu juga upaya harmonisasi rutin dilaksanakan oleh direktorat teknis Kementerian PUPR bersama Kepala Daerah dan OPD terkait, untuk mendukung pelaksanaan pembangunan jalan di Kepri.

Pada tahun 2024 terdapat pembangunan jalan diberbagai lokasi Kepri, Kementerian PUPR membangun jalan pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan. Terdapat 11 (delapan) proyek berstatus Proyek Prioritas Nasional, yaitu 1) pembangunan dan pemeliharaan jalan daerah, 2) pembangunan jalan mendukung kawasan prioritas (KI, KEK, dan KSPN), 3) sarana dan prasarana pendidikan, 4) pembangunan SPAM dan sanitasi layak, 5) pengembangan fasilitas peningkatan kualitas rumah, 6) pembangunan sarana dan prasarana pendukung efisiensi sistem logistik, 7) penanganan permukiman kumuh, 8) peningkatan aksesibilitas, amenitas, dan atraksi, 9) fasilitasi peningkatan standar keandalan bangunan dan 10) keamanan bermukim (IMB dan SLF), serta 11) penyediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman.

Pada capaian DAK Fisik, terdapat pembangunan, penanganan, perbaikan, dan peningkatan kapasitas jalan yang tersebar pada 5 Kabupaten/Kota lingkup Kepri. Belanja ini terharmonisasi sesuai dengan RKP tahun 2024 dengan percepatan pembangunan pada Kawasan 3T, percepatan pembangunan insfrastruktur antar pulau guna pengintegrasian dan percepatan pembangunan kawasan pesisir, serta pengembangan kawasan pariwisata unggul Batam-Bintan.

4.2.4.2 Bidang Pendidikan

Upaya harmonisasi terus dilaksanakan oleh **pemerintah daerah bersama Kemendikbudristek** dalam peningkatan layanan pendidikan di wilayah Kepri, di antaranya melalui dialog, serta pendampingan dari BPMP Kepri. Dinas Pendidikan Kepri mengajukan usulan dan pelaksanaan DAK Fisik.

Sinkronisasi tersebut terus diupayakan oleh Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Kepri bersama Dinas Pendidikan Kepri dengan melaksanakan dialog dan rapat koordinasi. Salah satunya yaitu rapat koordinasi kebijakan merdeka belajar untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kepri. Dengan kerjasama yang baik tersebut BPMP Kepri sebagai mitra strategis

pemda mendapat apresiasi Gubernur dalam peningkatan akses dan mutu pendidikan di kepri

Dalam pelaksanaannya, Belanja Kemendikbudristek di bidang Pendidikan memiliki beberapa output antara lain 1) guru yang mengikuti program pendidikan kepemimpinan sekolah model baru, 2) rehabilitasi dan renovasi sekolah dasar dan menengah, satuan dikdas dan dikmen yang difasilitasi penjaminan mutunya, 3) guru dan tenaga kependidikan yang mendapat pendampingan pembelajaran, 4) guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti inovasi pembelajaran dalam peningkatan kompetensi.

Belanja DAK Fisik pendidikan sebagian besar digunakan untuk pengadaan, pengembangan, dan revitalisasi bangunan pada tingkat pendidikan dasar hingga menengah, mulai dari PAUD, SD, SMP, SKB, SLB, SMK, SMA, dan perpustakaan sekolah di seluruh wilayah Kepri.

4.2.4.3 Air Minum

Pada bidang air minum telah dilakukan beberapa **upaya strategis dari pemerintah daerah dan Kementerian PUPR**, khususnya Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kepri. Upaya dimaksud melalui dialog dan keterlibatan satuan kerja pemerintah pusat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kepri Tahun 2024 dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kepri Tahun 2025. Koordinasi seperti ini rutin dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan satuan kerja lingkup pemerintah pusat dalam rangka menyelaraskan program pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Belanja Pemerintah Pusat pada bidang sanitasi digunakan untuk di antaranya pembangunan jaringan air baku yang dibangun/ditingkatkan, pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), dan infrastruktur air minum berbasis masyarakat.

Dalam menyelaraskan kegiatan tersebut, satker Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepri (BPPW) rutin melaksanakan penandatanganan kerja sama bersama pemerintah daerah, salah satunya dalam kegiatan Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS). Kegiatan tersebut merupakan salah satu kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) yang dilakukan secara partisipatif dengan tujuan menyediakan sarana dan prasarana sanitasi serta peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Berdasarkan hal tersebut, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepri melaksanakan kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Sanitasi LPK dan Kegiatan SANIMAS Kepri Tahun Anggaran 2024.

4.2.4.4 Kesehatan

Kementerian Kesehatan bersama Dinas Kesehatan Kepri senantiasa melaksanakan dialog dalam peningkatan layanan kesehatan di wilayah Kepri. Harmonisasi Belanja Pemerintah Pusat dan DAK Fisik bidang kesehatan dilaksanakan melalui pembagian fokus peningkatan layanan dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan.

Pada alokasi Belanja Pemerintah Pusat di bidang Kesehatan terdapat Belanja yang berharmonisasi dengan DAK Fisik, dengan Pagu terbesar pada Belanja tenaga kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya terkait upaya perbaikan status gizi (LP - 4), tenaga kesehatan yang dilatih TOT kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap penyakit infeksi *emerging* di FKTP (SDM-23), tenaga kesehatan yang dilatih TOT Pencegahan dan pengendalian infeksi (SDM-23), serta tenaga kesehatan di FKTP yang dilatih TOT penanggulangan TBC bagi petugas kesehatan (SDM-23).

4.2.4.5 Bidang Pertanian

Upaya **harmonisasi antara Belanja Kementerian Pertaniaan dan DAK Fisik bidang pertanian** di wilayah Kepri dilakukan melalui pembagian fokus pelaksanaan kegiatan

dalam meningkatkan kapasitas pertanian di wilayah Kepri. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan pertemuan dan diskusi bersama antara Kementerian Pertanian dan Dinas Pertanian di Wilayah Kepri.

Belanja Kementerian Pertanian yang terkait pada bidang pertanian di Kepri dilaksanakan melalui kegiatan pemberian layanan kesehatan hewan, sertifikasi produk karantina pertanian, selanjutnya terdapat juga sosialisasi, penyuluhan dan pembinaan pertanian, di dalamnya juga termasuk program daya tambah dan daya saing industri.

Pada DAK Fisik, belanja digunakan untuk pembangunan/renovasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan sarana pendukung pertanian lainnya. Selain itu, terdapat juga pembangunan/renovasi Puskeswan dan sarana pendukungnya.

5.2.4.6 Sanitasi

Upaya harmonisasi terus dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama Kementerian PUPR, khususnya melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepri (BPPW) dalam peningkatan sanitasi diwilayah Kepri.

Kerja sama dan koordinasi tersebut dilakukan melalui perjanjian kerja sama dan kegiatan kolaborasi antara pemerintah daerah dan BPPW Kepri dalam meningkatkan sanitasi di Kepri.

Dalam bidang sanitasi, output yang dihasilkan yaitu berupa pembinaan dan pengawasan pengembangan sanitasi yang dilaksanakan oleh BPPW Kepri. Bekerjasama dengan pemerintah daerah Kepri, pada tahun 2024 telah melakukan sosialisasi dan penyediaan Sanimas (Sanitasi Berbasis Masyarakat) yang merupakan salah satu kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) yang dilakukan secara partisipatif dengan tujuan menyediakan sarana dan prasarana sanitasi serta peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Program Penyediaan sarpras sanitasi tersebut meliputi pembangunan MCK yang terdiri dari bilik mandi dan kakus/toilet, tempat wudhu, tempat cuci tangan dan tempat cuci pakaian, serta Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik.

Special Box 4

Benchmarking Singapore Strategy in Ensuring and Securing Food Supply

Pendahuluan

Mengambil pelajaran dari strategi pemerintah Singapura untuk memastikan ketahanan pangan masyarakatnya, provinsi Kepri memiliki isu kerawanan pangan yang kurang lebih sama dengan Singapura. Berbeda dengan provinsi daratan (mainland) di Indonesia yang memiliki indeks ketahanan pangan yang tinggi, Kepri sebagai provinsi kepulauan (Archipelagic Province dengan hanya 2% daratan dan 98% lautan) memiliki karakteristik ketahanan pangan yang tidak sama dengan provinsi daratan

Bagaimana Pemerintah Indonesia sebagai regulator mengatur dengan tepat strategi ketahanan pangan untuk provinsi Kepulauan?

1. Singapura adalah salah satu negara yang memiliki keterbatasan lahan dan kondisi geografis yang sanga sulit untuk memproduksi hasil pertanian.
2. Kanwil DJPB Prov Kepri sebagai RCE merekomendasikan pemerintah pusat untuk belajar dari strategi pemerintah Singapura dan menyusun aturan yang sesuai bagi provinsi Kepulauan seperti Kepri dan lainnya

Lesson Learned From Singapore

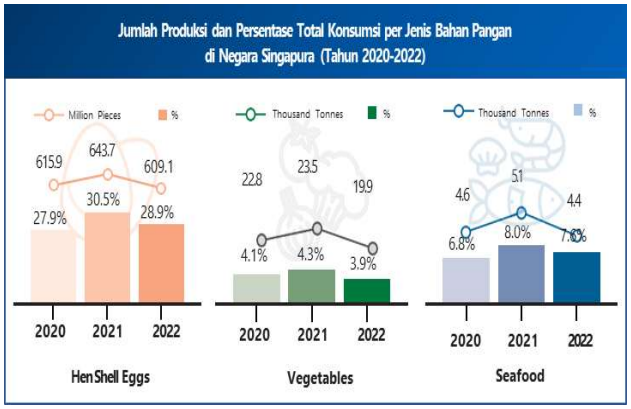

Singapura melakukan impor lebih dari 90 persen dari makanan mereka dan hal tersebut mereka lakukan dari lebih dari 183 negara di seluruh dunia. Pemerintah Singapura menyadari tantangan yang dihadapi dengan kondisi ini cukup berat seperti volatilitas pasar global makanan, dampak dari perubahan iklim, keputusan geopolitik suatu negara dan pandemic penyakit.

Satu kunci untuk memitigasi permasalahan ini adalah adanya usaha bersama atau kolektif antara pemerintah, industri dan masyarakat untuk memperkuat ketahanan suplai makanan. Salah satunya adalah pembentukan *Singapore's Food Agency (SFA)*.

***Singapore's Food Agency* (SFA) memiliki tugas untuk:**

Special Box 4

Benchmarking Singapore Strategy in Ensuring and Securing Food Supply

1. Diversifikasi sumber suplai makanan. Ini adalah strategi utama Singapura. Diversifikasi sumber pangan akan menurunkan ketergantungan dari satu sumber untuk beberapa jenis pangan. SFA mencari sumber baru untuk terus mempertahankan strategi diversifikasi pangan ini yaitu dengan cara melakukan mitra baru dengan industri baru dan negara lainnya.
2. *Stockpiling* atau penjagaan stok pangan. Hal ini juga dilakukan oleh Bulog di daerah dan strategi seperti pembangunan tempat hasil penyimpanan hasil panen di daerah pedesaan.

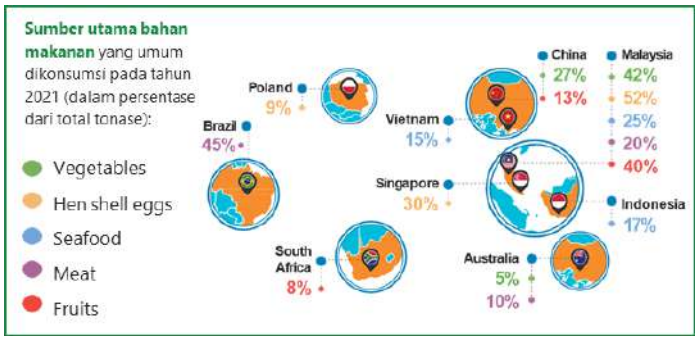

3. Produksi lokal. Memahami Singapura bukanlah daerah penghasil maka melakukan produksi lokal pangan justru menjadi alternatif. Namun demikian, pemerintah Singapura tetap menumbuhkan kapabilitas dan kapasitas masyarakat dan industri pertanian untuk memproduksi pangan secara lokal. Strategi ini dilakukan sebagai cadangan ketika terjadi disrupsi suplai pangan.

If you know the enemy and know yourself, you need not fear the results of a hundred battles.

Sun Tzu

Bab V

ANALISIS TEMATIK: REVIU KETAHANAN PANGAN DI KEPRI

Provinsi Kepri menghadapi tantangan besar dalam mencukupi kebutuhan pangan lokal karena keterbatasan lahan pertanian.
Dengan hanya 2% daratan dan 98% lautan.

Desa Wisata Poyotomo, Kabupaten Bintan

Thematic Analysis

- Pendahuluan
- Analisis Tematik: Reviu atas Ketahanan Pangan di Kepri

5.1 Pendahuluan

Sesuai Undang-Undang No.18 tahun 2012 tentang Pangan, Ketahanan Pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. UU Pangan bukan hanya berbicara tentang ketahanan pangan, namun juga memperjelas dan memperkuat pencapaian ketahanan pangan dengan mewujudkan kedaulatan pangan (*food soveregnity*) dengan kemandirian pangan (*food resilience*) serta keamanan pangan (*food safety*).

Ketahanan pangan merupakan salah satu faktor krusial dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi di Indonesia. Berbagai gejolak sosial dan politik mungkin terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Gangguan pada ketahanan pangan seperti kenaikan harga beras pada waktu krisis moneter dapat memicu kerawanan sosial yang membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional. Oleh karena itu, Pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan ketahanan pangan bagi masyarakat, baik dari produksi dalam negeri maupun dengan tambahan impor.

Pemenuhan kebutuhan pangan dan menjaga ketahanan pangan menjadi semakin penting bagi Indonesia karena jumlah penduduknya sangat besar dengan cakupan geografis yang luas dan tersebar. Indonesia memerlukan pangan dengan kriteria jumlah mencukupi dan tersebar, yang memenuhi kriteria konsumsi maupun logistik, yang mudah diakses oleh setiap orang, dan memberikan keyakinan bahwa esok masih ada pangan untuk masyarakat. Untuk itu, pemerintah berkomitmen untuk terus mengupayakan program demi mewujudkan 17 target dalam SDGs (*Sustainable Development Goals*) di antaranya adalah tanpa kemiskinan (target nomor 1) dan mengakhiri kelaparan dengan mencapai ketahanan pangan, memperbaiki nutrisi dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan (target nomor 2).

Lebih lanjut, **ketahanan pangan menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo.** Hal tersebut disampaikan dalam pidato perdana Presiden setelah pengucapan sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia di Gedung Nusantara DPR/MPR pada Minggu, 20 Oktober 2024. Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen Indonesia menuju swasembada pangan dan energi sebagai langkah utama guna menghadapi tantangan global yang makin kompleks. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa dalam situasi krisis global, negara-negara lain akan mengutamakan kepentingan domestiknya. Oleh karena itu, Indonesia harus mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan nasional secara mandiri (swasembada).

5.2 Analisis Tematik

5.2.1 Perkembangan Kondisi Ketahanan Pangan Regional

5.2.1.1 Perkembangan Ketersediaan Pangan

Grafik 5.1 - Produksi Padi di Provinsi Kepri (Ton) Tahun 2018-2023

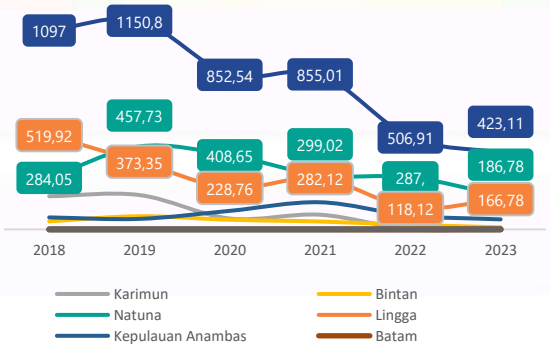

Sumber: BPS Kepri, 2025 (diolah)

Produksi padi di Provinsi Kepri mengalami tren penurunan setiap tahunnya, mulai dari tahun 2018 dengan produksi sebesar

1.097 ton, menjadi 423,11 ton pada tahun 2023. Kondisi ini diantaranya dipengaruhi oleh minimnya minat SDM usia produktif untuk menjadi petani dan semakin menyempitnya lahan pertanian akibat pembangunan daerah industri dan lahan yang dikerjasamakan kepada pihak ketiga.

Grafik 5.2 - Produksi Beras di Provinsi Kepri (Ton)

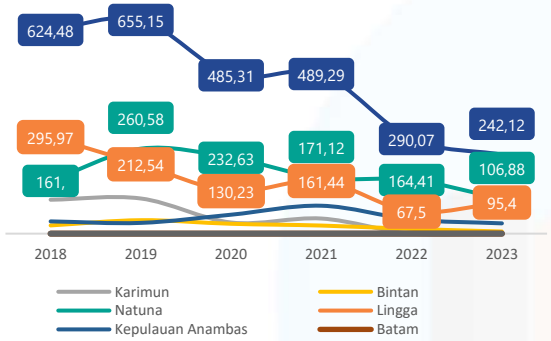

Sumber: BPS Kepri, 2025 (diolah)

Sejalan dengan itu, produksi beras di Kepri juga terus mengalami tren penurunan dari 624,48 ton pada tahun 2018, menjadi menjadi 242,12 pada tahun 2023. Daerah penghasil beras terbesar pada Kabupaten Natuna yang mencapai 106,88 ton, dan Kabupaten Lingga 95,43 ton pada tahun 2023.

Grafik 5.3 - Tingkat Produktivitas Lahan (ton/ha)

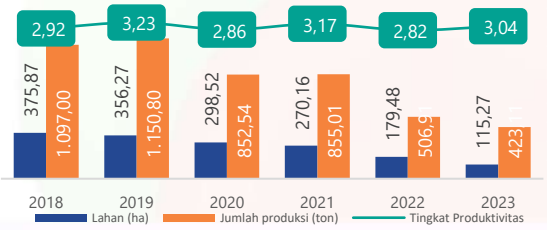

Sumber: BPS Kepri, 2025 (diolah)

Berdasarkan Grafik 5.3. apabila dilihat dari tingkat produktivitas lahan dibandingkan dengan padi yang dihasilkan menunjukan tren fluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2023, tingkat produktivitas lahan mencapai 3,04 ton/ha.

Lahan pertanian padi di Kepri menunjukan tren penurunan yang cukup signifikan sebesar 69,33%, dari 375,87 hektare pada tahun 2018, menjadi 115,27 hektare pada tahun 2023. Sejalan dengan itu produksi padi juga menunjukan penurunan yang signifikan akibat berkurangnya lahan pertanian.

Grafik 5.5 - Konsumsi dan Produksi Beras Tahunan (ton)

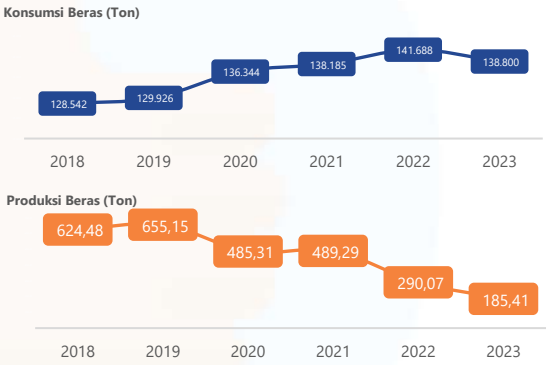

Sumber: BPS Kepri, 2025 (diolah)

Konsumsi beras di Kepri cenderung meningkat setiap tahunnya, dari sebanyak 128.542 ton/tahun pada tahun 2018, menjadi 138.800 ton/tahun pada tahun 2023. Namun demikian **tingkat konsumsi beras yang meningkat tersebut tidak diimbangi oleh produksi beras di Kepri yang mengalami tren menurun**.

Sehingga **sebagian besar kebutuhan konsumsi beras Kepri harus dipenuhi melalui impor** beras dari daerah lain seperti Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, serta dari negara lain seperti Thailand.

Konsumsi bahan pangan perkapita/bulan di Kepri sebagaimana Grafik 5.4 di dominasi oleh bahan makanan pokok

Grafik 5.4 - Konsumsi Bahan Pangan Perkapita/Bulan (ton)

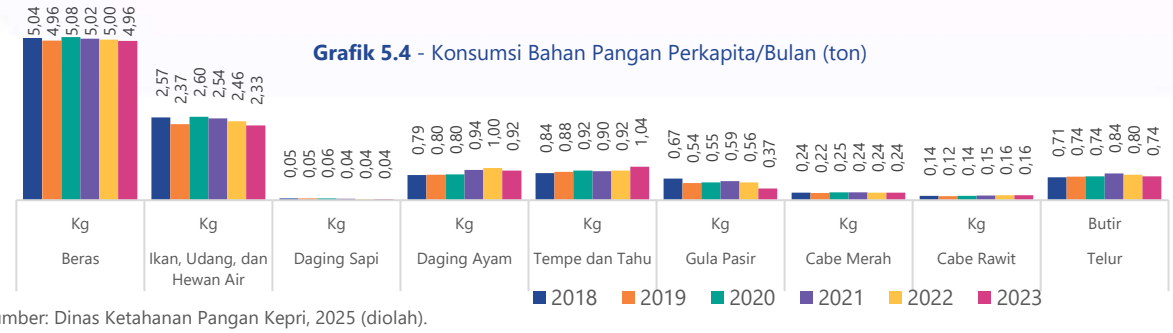

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kepri, 2025 (diolah).

beras yang dikonsumsi sebanyak 4,96 kg/orang setiap bulannya. Adapun lauk pauk yang paling banyak dikonsumsi yaitu Ikan, Udang, dan Hewan Air lainnya sebanyak 2,33 kg/orang setiap bulannya. Kondisi ini sejalan dengan karakteristik Kepri sebagai daerah kepulauan dengan 98% lautan, dan hanya sebesar 2% daratan, menjadikannya daerah dengan sumb er kekayaan laut yang berlimpah.

Konsumsi daging sapi di Kepri terbilang sangat rendah, hanya sebesar 0,04 kg/orang setiap bulannya. Sedangkan daging ayam, tempe, dan tahu, serta telur masih cukup marak dikonsumsi masyarakat Kepri, masing masing sebanyak 0,92 kg/orang, 1,04 kg/orang, dan 0,74 kg/orang setiap bulannya secara berturut-turut.

5.1.2 Perkembangan Indeks Ketahanan Pangan (IKP)

Grafik 5.6 - IKP Provinsi Kepri

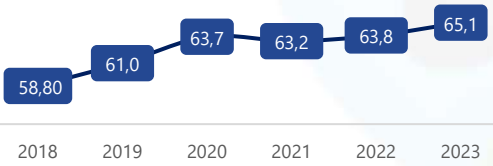

Sumber: BPS Kepri, 2025 (diolah)

IKP Provinsi Kepri terus mengalami peningkatan, dengan pucak tertinggi pada tahun 2023 sebesar 65,10 yang berada pada urutan ke 30 nasional, meningkat dari sebelumnya tahun 2018 sebesar 58,80, hal ini memerlukan upaya intensifikasi pertanian, seperti program varietas unggul, teknologi pertanian moder2n, dan subsidi pupuk dan bibit unggul.

Grafik 5.7 - IKP Kabupaten/Kota Lingkup Kepri

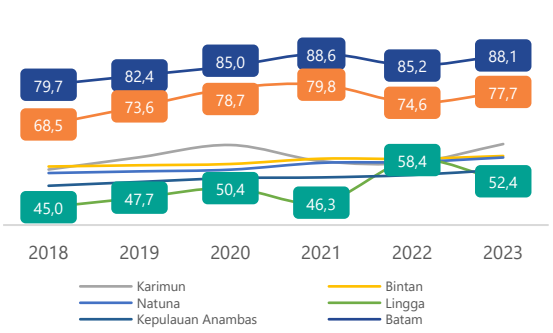

Sumber: BPS Kepri, 2025 (diolah)

Kabupaten/Kota dengan IKP tertinggi terdapat pada Kota Batam sebesar 88,10 pada tahun 2023, diikuti oleh Kota Tanjungpinang dengan IKP 77,75. Adapun Kabupaten dengan IKP terendah terdapat pada Kabupaten Lingga, dengan nilai IKP sebesar 52,41 pada tahun 2023.

Grafik 5.8 - IKP Berdasarkan Pilar Ketahanan Pangan

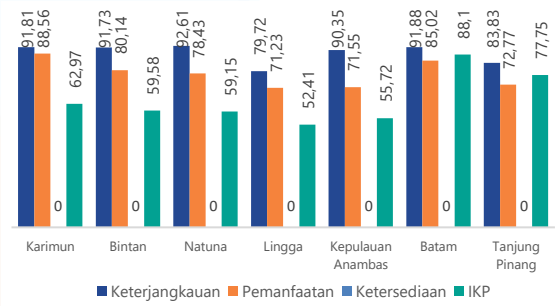

Sumber: BPS Kepri, 2025 (diolah)

Berdasarkan pilar ketahanan pangan, rata-rata nilai aspek keterjangkauan di Kepri sebesar 88,85, aspek pemanfaatan sebesar 78,24, namun pada aspek ketersediaan memiliki nilai 0. Sehingga berdasarkan aspek-aspek tersebut IKP di Kabupaten Kepri cenderung memiliki nilai yang rendah, karena aspek ketersediaan menjadi komponen yang diperhitungkan dalam perhitungan IKP, sedangkan pada Kota di Kepri aspek ketersediaan dikeluarkan dari perhitungan IKP, sehingga Kota Batam memiliki nilai IKP yang relatif tinggi sebesar 88,10, dan Kota Tanjungpinang sebesar 77,75.

Grafik 5.9 - Garis Kemiskinan (Rp) dan Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)

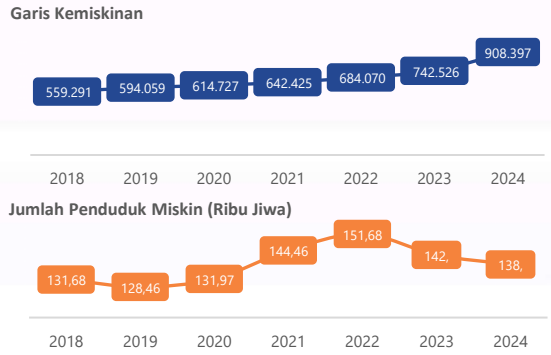

Sumber: BPS Kepri, 2025 (diolah)

IKP dapat menjadi salah satu indikator terhadap perkembangan jumlah penduduk miskin di Kepri. Ketika masyarakat sulit

menjangkau bahan pangan pokok tentunya akan mendorong peningkatan jumlah penduduk miskin. Garis kemiskinan di Kepri pada tahun 2024 sebesar Rp908.397/bulan. Angka garis kemiskinan ini terus meningkat dari tahun 2018 yang sebesar Rp559.291.

Berdasarkan garis kemiskinan tersebut, Penduduk Miskin di Kepri terdapat 138,30 ribu jiwa pada tahun 2024. **Seiring dengan peningkatan indeks ketahanan pangan pada tahun 2023, penduduk miskin juga mengalami penurunan 5,69% (*yoy*).** Penduduk miskin pada tahun 2023 sebanyak 5,69% dari total penduduk Kepri.

Grafik 5.10 - PoU Provinsi Kepri 2018-2023 (persen)

Sumber: BPS Kepri, 2025 (diolah)

***Prevalence of undernourishment* (PoU) atau tingkat ketidakcukupan konsumsi pangan di Kepri tahun 2024 sebesar 9,55% dari total penduduk Kepri,** menurun sebesar 0,28 persen poin apabila dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 9,83%. Penurunan PoU pada tahun 2023, dan 2024 sejalan dengan penurunan jumlah penduduk miskin di Kepri.

Grafik 5.11 - PoU Kab/Kota 2018-2023

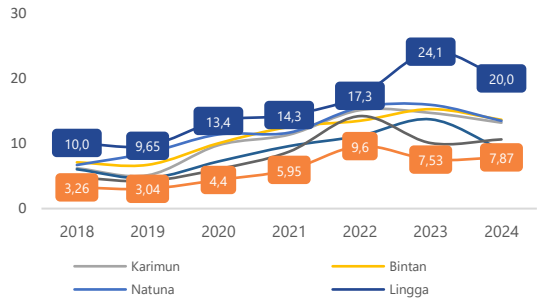

Sumber: BPS Kepri, 2025 (diolah)

PoU tertinggi di Kepri terdapat pada Kabupaten Lingga yang sebesar 20,00% pada tahun 2024, turun sebesar 4,11 persen poin dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 24,11% dari penduduk Lingga. Tingkat ketidakcukupan konsumsi pangan tertinggi dan terendah tersebut sejalan dengan persentase penduduk miskin yang cukup tinggi di lingga sebesar 9,99% dari total penduduk Kab Lingga.

PoU terendah terdapat pada Kota Batam yang sebesar 7,87% pada tahun 2024, meningkat 0,34 persen poin dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 7,53% dari penduduk Kota Batam. tingkat PoU yang rendah tersebut sejalan dengan persentase penduduk miskin yang rendah di Kota Batam sebesar 4,85% dari total penduduk Batam. Hal ini disebabkan oleh pembangunan yang massive di Kota Batam sebagai kota industri membuka banyak

Tabel 5.1 - Ketahanan Pangan Makanan Pokok Beras Kepri 2024 (ton)

Bulan	Ketersediaan Beras (Ton)				Kebutuhan Beras (Ton)				
	Stok Awal	Produksi	Barang Masuk	Total	Rumah Tangga	Non Rumah Tangga	Total	Stock Beras	% Pemenuhan Produksi
Jan	19.466	18	25.380	44.864	11.942	4.738	16.680	28.184	**0,11%**
Feb	28.185	50	17.620	45.855	11.171	4.433	15.604	30.251	**0,32%**
Mar	30.251	42	13.648	43.941	11.965	4.748	16.713	27.228	**0,25%**
Apr	27.228	7	13.264	40.499	12.096	4.800	16.896	23.603	**0,04%**
May	23.604	5	13.704	37.313	11.942	4.738	16.680	20.633	**0,03%**
Jun	20.633	11	15.283	35.927	11.566	4.589	16.155	19.772	**0,07%**
Jul	19.770	3	15.840	35.613	11.942	4.738	16.680	18.933	**0,02%**
Aug	18.934	4	21.045	39.983	11.942	4.738	16.680	23.303	**0,02%**
Sep	23.302	17	74.985	98.304	11.557	4.586	16.143	82.161	**0,11%**
Oct	82.161	53	16.179	98.393	11.942	4.738	16.680	81.713	**0,32%**
Nov	81.713	45	15.279	96.992	11.557	4.575	16.135	80.857	**0,28%**
Total	**375.247**	**255**	**242.227**	**617.684**	**129.622**	**51.421**	**181.046**	**80.857**	**0,13%**
Total Konsumsi Harian (Ton):			**550**						
Stock Ketahanan Pangan (Hari):			**147**						

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kepri, 2025 (diolah)

Ketahanan pangan Kepri dapat dilihat dari cadangan makanan pokok berupa beras pada Januari 2024 sebesar 28.184 ton, meningkat pesat pada September 2024 menjadi 82.161 Ton disebabkan adanya peningkatan impor yang besar sejumlah 74.985 Ton pada September 2024. **Jumlah cadangan beras per November 2024 sebanyak 80.857 ton, dengan konsumsi rata-rata beras per hari sebesar 550 Ton, Kepri mampu bertahan selama 147 hari atau ± 5 bulan tanpa produksi dan impor makanan.**

Ketahanan pangan Kepri dapat dilihat dari Grafik 5.12 bahwa cadangan makanan pokok berupa beras pada Januari 2024 sebesar 28.184 ton, meningkat pesat pada Oktober 2024 menjadi 81.713 Ton disebabkan adanya peningkatan impor yang besar sejumlah 74.985 Ton pada September 2024.

Jumlah cadangan beras per Oktober 81.713 ton, dengan konsumsi rata-rata beras per hari sebesar 550 Ton, Kepri mampu bertahan selama 149 hari atau ± 5 bulan tanpa produksi dan impor makanan.

Grafik 5.12 - *Stock* Pangan Beras Kepri 2024 (Ton)

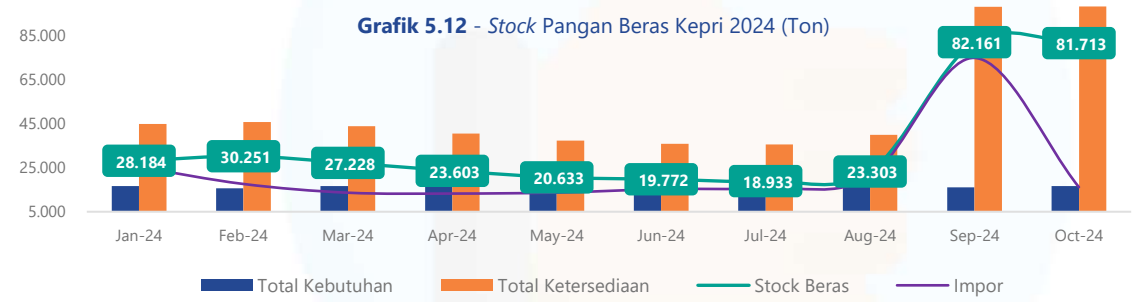

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kepri, 2025 (diolah)

Berdasarkan FGD bersama para Kepala Dinas Ketahanan Pangan lingkup Provinsi Kepri, disampaikan bahwa Kepri sebagai ***Archipelagic Region***, memiliki kondisi yang berbeda dari daerah lain di Indonesia, karena hanya memiliki 2% daratan dan 98% lautan. Kondisi ini menunjukan keterbatasan lahan yang dapat digarap untuk menjadi pertanian. Terbatasnya lahan, penurunan jumlah petani, ditambah dengan penurunan lahan pertanian yang berimbas pada turunnya produksi beras menyebabkan **pemenuhan kebutuhan pangan beras daerah tidak mencapai 1% dari total konsumsi**, **sisanya lebih dari 99% dipenuhi melalui impor** (dalam dan luar negeri). Ketergantungan pada impor, penurunan lahan pertanian dan produksi beras akan berdampak pada melemahnya sektor pertanian karena berimbas pada penurunan pendapatan petani serta hilangnya pekerjaan di sektor pertanian. Hal ini menyebabkan **sebagian besar kebutuhan konsumsi beras Kepri harus dipenuhi melalui impor** beras dari daerah lain seperti Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, serta dari negara lain seperti Thailand.

5.2.2 Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan

5.2.2.1 Perkembangan Pagu, Realisasi, dan Capaian Output Belanja Pemerintah Pusat di Kepri

Grafik 5.13 - Belanja Badan Pangan Nasional (dalam Miliar Rupiah)

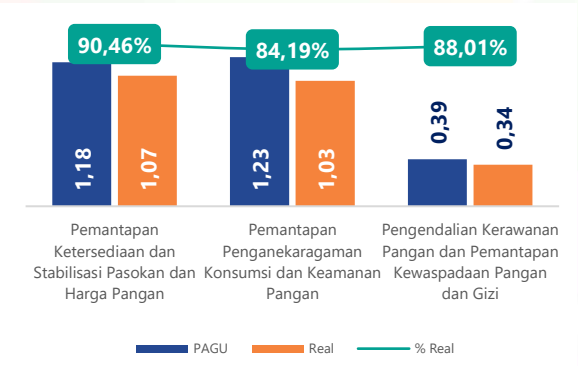

Sumber: Sintesa, 2025 (diolah).

Belanja Badan Pangan Nasional di Prov Kepri terbesar s.d. November 2024 terdapat pada program pemantapan ketersediaan, stabilisasi dan harga pasokan sebesar Rp1,07 miliar (90,46% dari pagu), diikuti oleh program pemantapan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan Rp1,03 miliar (84,19% dari

pagu) dan program pengendalian kerawanan pangan dan pemantapan kewaspadaan gizi Rp0,34 miliar. Belanja dimaksud digunakan untuk menjaga stabilitas harga pangan, penguatan infrastruktur pangan dan upaya menstabilkan stock pangan.

Grafik 5.14 - Belanja Kementerian Pertanian (dalam Miliar Rupiah)

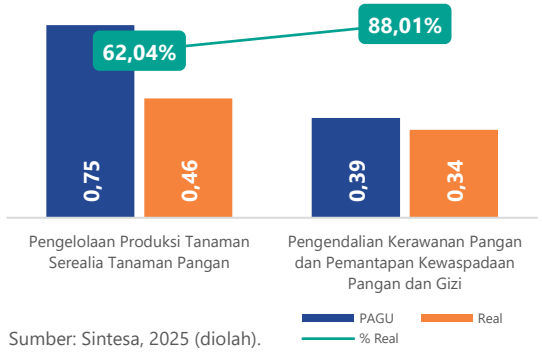

Sumber: Sintesa, 2025 (diolah).

Realisasi Belanja Kementerian Pertanian di Prov Kepri terbesar s.d. November 2024 terdapat pada program produksi tanaman serelia sebesar Rp0,46 miliar (62,04% dari pagu), diikuti oleh pengendalian kerawanan pangan dan pemantapan kewaspadaan pangan dan gizi Rp0,34 miliar (88,01% dari pagu). Realisasi tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan pengelolaan produksi tanaman pangan dan pengendalian kerawanan pangan.

Grafik 5.15 - Belanja Badan Pusat Statistik

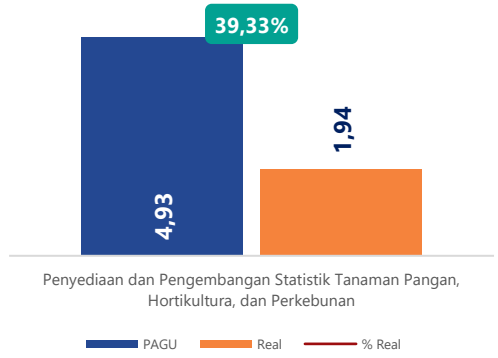

Sumber: Sintesa, 2025 (diolah).

Badan Pusat Statistik sebagai pusat data nasional mengalokasikan Belanja terkait dengan penyediaan dan pengembangan statistik pangan sebesar Rp4,93 miliar dan s.d. November 2024 telah merealisasikan Rp1,94 miliar (39,33%). Penyediaan data tersebut sangat penting untuk mengukur ketahanan pangan suatu daerah, sehingga dapat merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kondisi terkini.

Grafik 5.16 - Belanja Kementerian PUPR (dalam Miliar Rupiah)

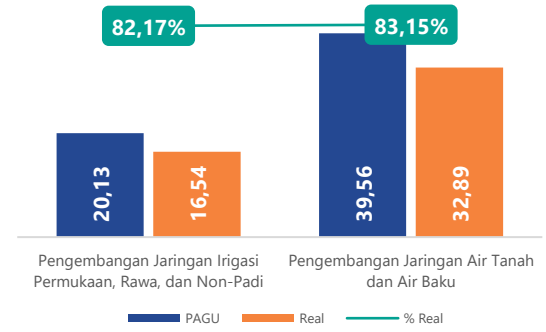

Sumber: Sintesa, 2025 (diolah).

Pengembangan jaringan air tanah dan air baku didukung oleh Kementerian PUPR dengan realisasi Belanja s.d. November 2024 mencapai Rp32,89 miliar (83,15% dari pagu) dan Pengembangan Jaringan Irigasi Rp16,54 miliar (82,17% dari pagu). Dengan adanya dukungan infrastruktur jaringan air diharapkan dapat memenuhi kebutuhan air di sektor rumah tangga.

Grafik 5.17 – Alokasi Belanja DKP2KH Kepri (DK/TP) (dalam Miliar Rupiah)

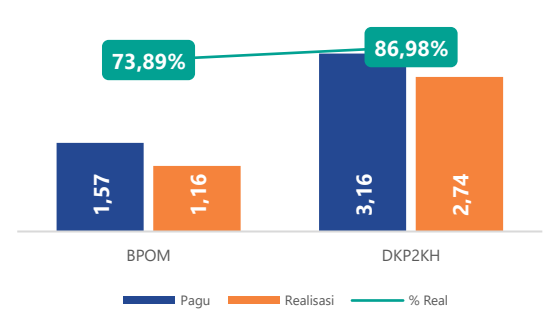

Sumber: Sintesa, 2025 (diolah).

Belanja Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Kesehatan Hewan kepri diharapkan dapat mengembangkan pertanian lokal, meningkatkan produktivitas petani, serta memperkuat sistem pertanian berkelanjutan, Realisasi Belanja Ketahanan pangan DKP2KH s.d November 2024 mencapai Rp2,74 miliar (73,88% dari pagu). BPOM sebagai instansi yang menjaga kesehatan makanan s.d. November 2024 telah merealisasikan Belanja

pada program Desa Pangan Aman sebesar Rp1,16 miliar (86,70% dari pagu).

5.2.2.2 Perkembangan Penyaluran TKD Untuk Ketahanan Pangan di Kepri

Grafik 5.18 - DAK Fisik Tematik Penguatan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perinakan dan Hewani) (dalam Miliar Rupiah)

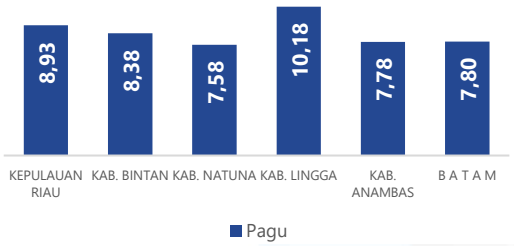

Sumber: Omspan TKD, 2025 (diolah).

Alokasi Belanja DAK Fisik Tematik Penguatan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perinakan dan Hewani) dapat meningkatkan aksesibilitas ke sentra produksi Pangan, alokasi belanja dimaksud terbesar pada Pemda Lingga Rp10,18 miliar diikuti oleh Prov Kepri, Kab Bintan, Batam, Anambas dan Natuna. Selanjutnya, Kota Tanjungpinang dan Kab. Karimun tidak memiliki alokasi belanja terkait program tersebut.

Grafik 5.19 - Alokasi Belanja DAK Fisik Kelautan dan Perikanan (dalam Miliar Rupiah)

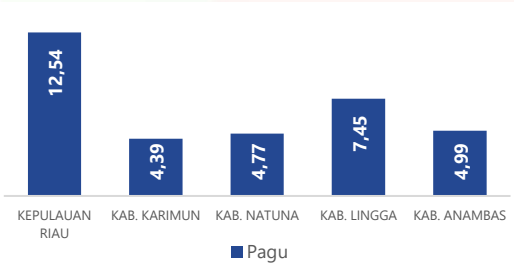

Sumber: Omspan TKD, 2025 (diolah).

Alokasi Belanja DAK Fisik Kelautan Perikanan Tematik Penguatan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perinakan dan Hewani) di Kepri meningkatkan kapasitas produksi perikanan melalui pembangunan sarana dan prasarana, seperti pelabuhan perikanan, fasilitas pengolahan ikan, dan kapal nelayan, alokasi belanja dimaksud paling besar terdapat pada Prov Kepri Rp12,54 miliar diikuti oleh Prov Kepri, Pemda Lingga, Anambas, Natuna dan Karimun.

Grafik 5.20 - DAK Fisik Pertanian Tematik Penguatan Sentra Produksi Pangan (Paertanian, Perinakan dan Hewani) (dalam Miliar Rupiah)

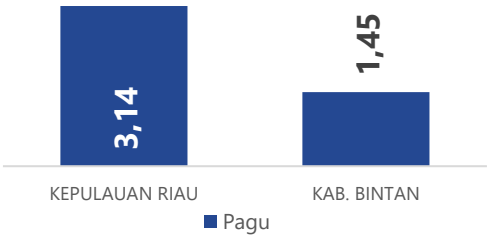

Sumber: Omspan TKD, 2025 (diolah).

Belanja DAK Fisik Pertanian dapat digunakan untuk **membangun dan memperbaiki infrastruktur yang mendukung produksi pangan**, seperti irigasi, jalan pertanian, fasilitas pengolahan hasil pertanian. Alokasi Belanja DAK Fisik Pertanian Tematik Penguatan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perinakan dan Hewani) di Kepri terbesar terdapat pada Prov Kepri Rp3,14 miliar diikuti oleh Kab. Bintan, sementara itu pemerintah kabupaten/kota lainnya tidak memiliki alokasi belanja terkait program tersebut.

Grafik 5.21 - Dak Non Fisik Ketahanan Pangan dan Pertanian (dalam Miliar Rupiah)

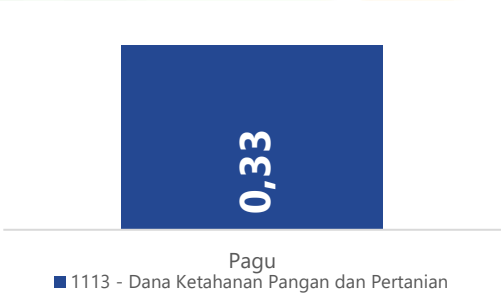

Sumber: Omspan TKD, 2025 (diolah).

Belanja DAK Non Fisik Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab Bintan digunakan untuk memberikan penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan kepada petani, peternak, dan nelayan. Alokasi Belanja Non Fisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab Bintan sebesar Rp0,33 miliar, sementara itu tidak terdapat alokasi dana DAK Non Fisik pada pemerintah kabupaten/kota.

5.2.2.2 Perkembangan Belanja APBD untuk Ketahanan Pangan di Kepri

Grafik 5.22 - Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat (dalam Miliar Rupiah)

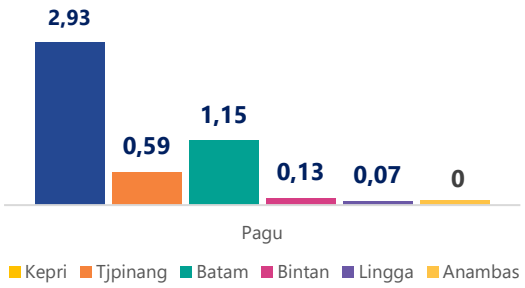

Sumber: GFS Kanwil Kepri, 2025 (diolah).

Program Peningkatan **Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat digunakan untuk meningkatkan keberagaman konsumsi pangan**, mengurangi kerawanan pangan dan peningkatan akses terhadap pangan bergizi. Alokasi Belanja pada program dimaksud terbesar terdapat di Prov. Kepri mencapai Rp2,93 miliar, diikuti oleh Kota Batam Rp1,15 miliar dan Tanjungpinang, Bintan, Lingga dan Anambas.

Grafik 5.23 - Program Penanganan Kerawanan Pangan Masyarakat (dalam Miliar Rupiah)

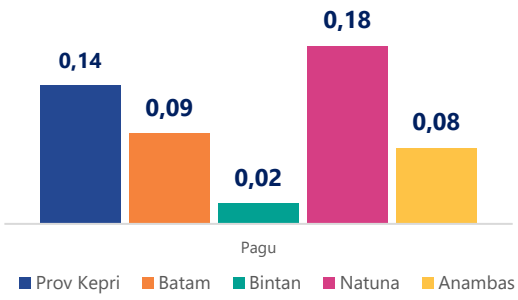

Sumber: GFS Kanwil Kepri, 2025 (diolah).

Program Penanganan Kerawanan Pangan Masyarakat digunakan untuk meningkatkan akses terhadap pangan yang cukup dan bergizi, meningkatan ketersediaan pangan di wilayah terpencil dan dukungan distribusi pangan. Alokasi Belanja pada program dimaksud terbesar terdapat di Kab Natuna sebesar Rp0,18 miliar, diikuti oleh Prov Kepri Rp0,14 miliar, serta Batam, Anambas dan Bintan.

Grafik 5.24 - Program Pengawasan Keamanan Pangan (dalam Miliar Rupiah)

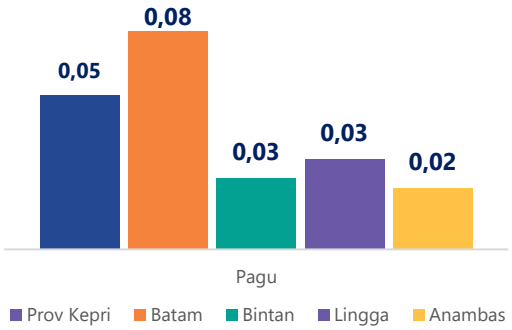

Sumber: GFS Kanwil Kepri, 2025 (diolah).

Program Pengawasan Keamanan Pangan digunakan untuk meningkatkan keamanan pangan bagi konsumen meliputi bebas dari kontaminasi bahan berbahaya seperti pestisida, bahan kimia berbahaya, mikroorganisme pathogen, dan bahan bahaya lainnya. Belanja Pengawasan Keamanan Pangan terbesar pada Kota Batam Rp0,08 miliar diikuti oleh Prov. Kepri, Lingga, Bintan dan Anambas

Grafik 5. 25 - Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi (dalam Miliar Rupiah)

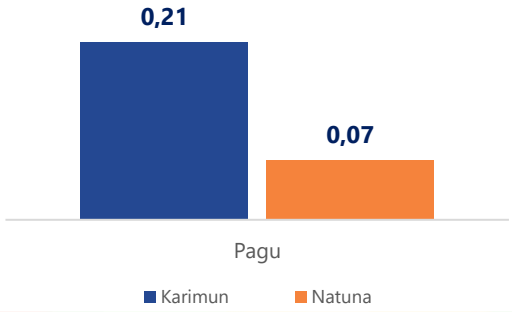

Sumber: GFS Kanwil Kepri, 2025 (diolah).

Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan digunakan untuk meningkatkan kemandirian pangan daerah, produksi pangan lokal yang beragam dan berkualitas pemberdayaan ekonomi masyarakat pertanian dan perikanan. Alokasi Belanja program tersebut hanya terdapat pada Kab. Karimun Rp0,21 miliar dan Kab. Natuna Rp0,07 miliar.

5.2.2.3 Perkembangan Perkembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk Ketahanan Pangan di Kepri

Grafik 5.26 - PSN -Sistem Penyediaan Air Minum (dalam Miliar Rupiah) (SPAM)

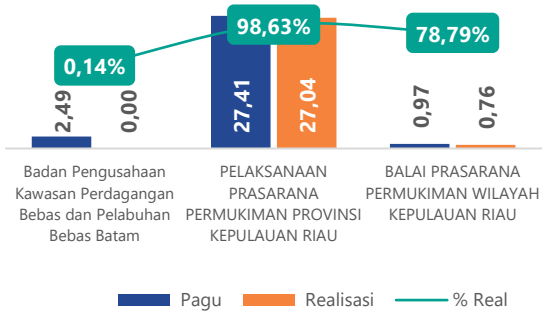

Sumber: Sakti Kemenkeu, 2025 (diolah).

Realisasi Belanja Proyek Strategis Nasional (PSN) s.d. November 2024 terkait Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kepri terbesar berada pada Satker BPPW (KemenPUPR) mencapai Rp27,04 miliar (98,63% dari pagu), diikuti oleh Balai Prasarana Permukiman (KemenPUPR) Rp0,76 miliar (78,79% dari pagu), sementara itu BPKPB Pelabuhan Bebas Batam belum merealisasi proyek SPAM sebesar Rp2,49 miliar. Belanja PSN tersebut digunakan untuk pengelolaan sumber daya air berkelanjutan, peningkatan akses terhadap air bersih sehingga meningkatkan kesehatan masyarakat, dan mendukung sektor pertanian perikanan dalam memperkuat ketahanan pangan di Kepri.

Grafik 5.27 – Grafik Pagu dan Realisasi Belanja Proyek Strategis Nasional Irigasi (dalam Miliar Rupiah)

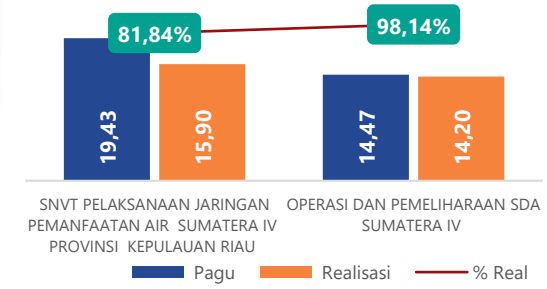

Sumber: Sakti Kemenkeu, 2025 (diolah).

Belanja program pengelolaan Irigasi digunakan untuk meningkatkan Infrastruktur pertanian, mendorong penguatan ketahanan pangan terutama pada musim kemarau sehingga mampu menjaga stabilitas produksi sektor pertanian. Realisasi **Belanja Proyek Strategis Nasional Irigasi s.d. November 2024** di Kepri terdapat pada Satker SNVT Pelaksanaan jaringan Pemanfaatan Air Sumatera IV sebesar Rp15,90 miliar (81,84% dari pagu) dan Satker Operasi dan Pemeliharaan SDA Sumatera IV sebesar Rp14,20 miliar (98,14% dari pagu).

Grafik 5.28 - PSN - Proyek Strategis Nasional Waduk/Bendungan (dalam Miliar Rupiah)

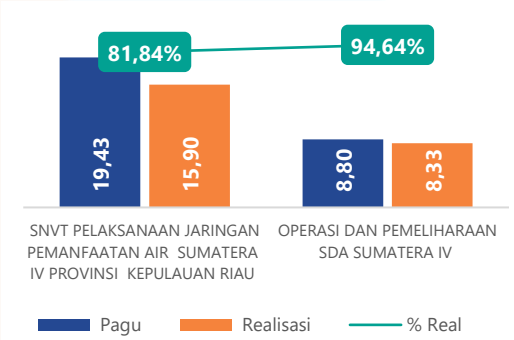

Sumber: Sakti Kemenkeu, 2025 (diolah).

Belanja Proyek Strategis Nasional Waduk/Bendungan s.d. November 2024 terdapat pada Satker Operasi Dan Pemeliharan SDA Sumatera IV mencapai Rp8,33 miliar (94,65% dari pagu), sementara itu realisasi belanja satker BPKPB Pelabuhan Bebas Batam masih sangat rendah. Proyek strategi nasional tersebut digunakan untuk penyediaan air untuk irigasi, masyarakat, pembangkit listrik energi air, pengendalian banjir dan pengelolaan air yang berkelanjutan.

5.2.3 Keterkaitan Antara Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Terhadap Pencapaian Indikator-Indikator Ketahanan Pangan

5.2.3.1 Analisis Dampak Kebijakan Ketahanan Pangan Di Kepri

Kepri sebagai salah satu daerah yang memiliki banyak pulau dan tergantung pada sektor kelautan serta perikanan, telah mengembangkan berbagai kebijakan ketahanan pangan untuk mendukung kebutuhan pangan di

wilayahnya. Beberapa kebijakan ketahanan pangan yang dilakukan di Kepri antara lain:

5.2.3.1.1 Pengembangan Sumber Pangan Lokal

Kepri memiliki banyak potensi sumber daya alam yang dapat dikembangkan untuk mendukung ketahanan pangan, seperti perikanan, peternakan, pertanian laut, dan pertanian darat. **Pemerintah daerah mendorong pengembangan produk lokal seperti ikan hasil tangkap** dan daging ternak seperti sapi, kambing serta domba dan pertanian lainnya. Hal ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan pangan dari luar daerah dan meningkatkan keberagaman pangan lokal.

Kebijakan ini meningkatkan produksi pangan lokal, yang mengurangi ketergantungan pada pasokan pangan dari luar daerah. Dengan adanya pengembangan sektor perikanan, peternakan dan pertanian lokal, ketersediaan pangan di Kepri menjadi lebih stabil dan beragam. Selain itu, dengan pemanfaatan hasil laut yang melimpah, ketersediaan ikan dan produk perikanan lainnya semakin meningkat.

Grafik 5. 29 - Perikanan Tangkap Laut (ton)

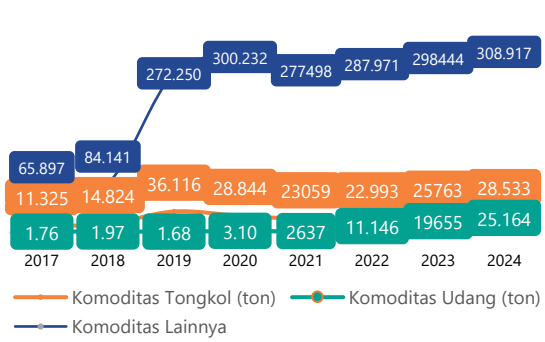

Sumber: BPS Kepri, 2025 (diolah)

Grafik 5.29 **menunjukan bahwa upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah di bidang perikanan tangkap laut di Kepri berjalan *on the track*** dengan adanya tren yang meningkat sejak tahun 2022 meliputi komoditas tongkol, udang dan lainnya. Hasil perikanan tangkap laut tahun 2024 pada komoditas tongkol udang dan lainnya masing-masing sebesar 28,53 ribu ton, 25,16 ribu ton dan 308,91 ribu ton.

Grafik 5. 30 - Produksi Ternak (ton)

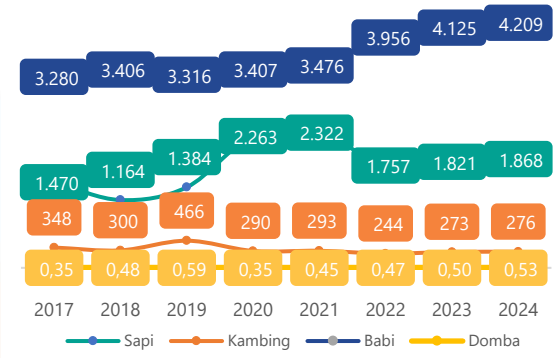

Sumber: BPS Kepri, 2025 (diolah)

Dapat dilihat pada Grafik 5.30 bahwa upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah di Bidang Produksi Ternak di Provinsi Kepri menunjukan hasil positif dengan adanya tren yang meningkat sejak tahun 2022 meliputi komoditas daging sapi, kambing, domba dan babi. Hasil Produksi Ternak tahun 2024 tertinggi pada komoditas daging babi 4.209 ton, diikuti daging sapi 1.868 ton, daging kambing 276 ton, dan daging domba 0,53 ton.

Grafik 5. 31- Produksi Ternak Unggas (ton)

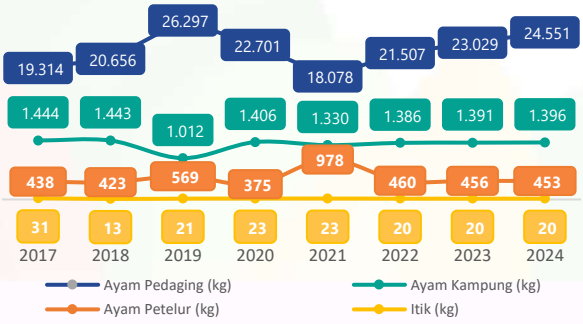

Sumber: BPS Kepri, 2025 (diolah)

Grafik 5.31 diatas menunjukan bahwa **upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah di Bidang Produksi Ternak Unggas di Provinsi Kepri berjalan positif** dengan adanya tren yang meningkat sejak tahun 2022 meliputi komoditas ayam petelur, ayam pedaging, ayam kampung dan itik. Hasil Produksi Ternak Unggas tahun 2024 tertinggi terdapat pada komoditas ayam pedaging 25.551 ton, diikuti ayam kampung 1.396 ton, ayam petelur 453 ton, dan itik 20 ton.

Program peningkatan perikanan tangkap dan pengembangan peternakan sapi, kambing, domba dan ayam serta pengolahan hasil perikanan membantu menciptakan stok pangan yang lebih berkelanjutan dan dapat dijangkau oleh masyarakat setempat.

5.2.3.1.2 Peningkatan Infrastruktur dan Akses Pangan

Salah satu tantangan di Provinsi Kepri adalah distribusi pangan yang sulit di beberapa pulau terluar. Oleh karena itu, pemerintah daerah fokus pada pembangunan dan peningkatan infrastruktur transportasi dan logistik untuk memastikan pangan dapat didistribusikan dengan baik ke seluruh wilayah, terutama ke daerah-daerah terpencil dan pulau-pulau kecil.

Dampak: Kebijakan peningkatan infrastruktur transportasi dan logistik yang dilakukan pemerintah, seperti pembangunan jalur transportasi darat jalan provinsi dan kabupaten serta pembangunan sarana prasarana transportasi laut yang lebih baik, **meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan. Distribusi pangan menjadi lebih efisien**, sehingga masyarakat di pulau-pulau kecil dan terpencil dapat lebih mudah mendapatkan pangan yang dibutuhkan.

Grafik 5. 32 - Jalan - Tematik Penguatan Transportasi Kawasan Sentra Produksi Pangan (dalam Miliar Rupiah)

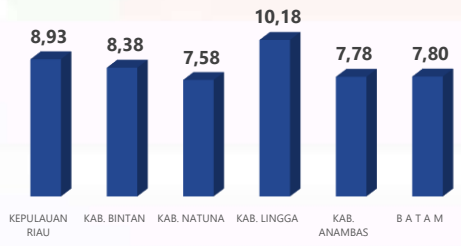

Sumber: Omspan TKD, 2025 (diolah).

Grafik 5.32 diatas menunjukan bahwa upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dalam **alokasi anggaran pembangunan jalan provinsi dan kabupaten dalam penguatan transportasi kawasan sentra produksi pangan** di Provinsi Kepri. Alokasi anggaran tertinggi berada pada Kab. Lingga Rp10,18 miliar, diikuti Prov Kepri Rp8,93 miliar dan selanjutnya, daerah dengan alokasi anggaran terendah berada pada Kab. Natuna Rp8,38 miliar.

Grafik 5. 33 - Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi (dalam Miliar Rupiah)

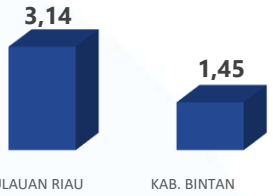

Sumber: Omspan TKD, 2025 (diolah).

Dapat dilihat pada Grafik 5.33 bahwa upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam **mengalokasikan anggaran pertanian dalam penguatan kawasan sentra produksi pangan** di Kepri. Alokasi anggaran terdapat pada Prov Kepri Rp3,14 miliar dan dan Kab. Bintan Rp1,45 miliar dengan **program renovasi balai benih tanaman pangan dan hortikultura, pembangunan *screen house modern*** pengembangan hortikultura komoditas sayuran, penyediaan kelengkapan laboratorium kultur jaringan Balai Benih dan Ruang sertifikasi benih.

Grafik 5.34 - Kelautan dan Perikanan - Tematik Pembangunan Kawasan Pelabuhan (dalam Miliar Rupiah)

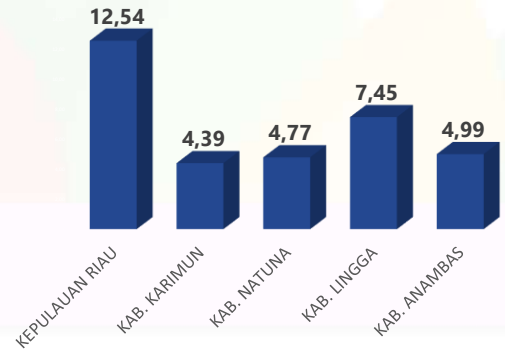

Sumber: Omspan TKD, 2025 (diolah).

Grafik 5.34 menunjukan bahwa upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam mengalokasikan anggaran **pembangunan kawasan pelabuhan dalam penguatan sentra produksi perikanan** di Provinsi Kepri. Alokasi anggaran tertinggi berada pada Prov Kepri Rp12,54 miliar, diikuti Kab. Lingga Rp7,45 miliar, dan selanjutnya, daerah dengan alokasi

anggaran terendah berada pada Kab. Karimun Rp4,39 miliar

Pembangunan pelabuhan kawasan perikanan dan jalur transportasi yang lebih baik memungkinkan distribusi pangan lebih lancar dari pusat produksi ke daerah-daerah periferi. Hal Ini dapat mengurangi masalah kekurangan pangan di daerah terpencil yang sebelumnya sulit dijangkau.

5.2.3.1.3 Diversifikasi Pangan

Salah satu kebijakan yang juga dijalankan adalah **diversifikasi pangan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan pangan pokok tertentu, seperti beras**. Pemerintah daerah mendorong konsumsi pangan berbasis produk lokal yang lebih beragam, seperti **jagung, kedelai dan ikan**, untuk menciptakan ketahanan pangan yang lebih tahan terhadap guncangan ekonomi dan perubahan iklim.

Dampak: Kebijakan diversifikasi pangan yang mendorong konsumsi pangan lokal selain beras, seperti jagung, kedelai, ubi dan ikan, membantu memperbaiki pola konsumsi masyarakat. Hal ini meningkatkan keberagaman gizi yang dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga memenuhi kebutuhan gizi yang lebih seimbang dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Grafik 5.35 - Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat (dalam Juta Rupiah)

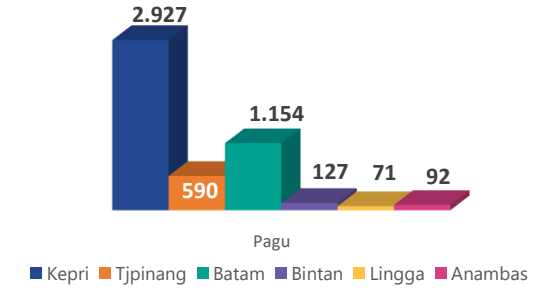

Sumber: Omspan TKD, 2025 (diolah).

Grafik 5.35 menggambarkan alokasi **program diversifikasi ketahanan pangan pada APBD tahun 2024 tertinggi pada Prov Kepri** dengan anggaran Rp2,92 miliar, diikuti Kota Tanjungpinang 590 juta dan Selanjutnya terkecil berada pada Kab Lingga Rp71 juta.

Grafik 5.36 - Perkembangan Produksi Jagung dan Kedelai (ton)

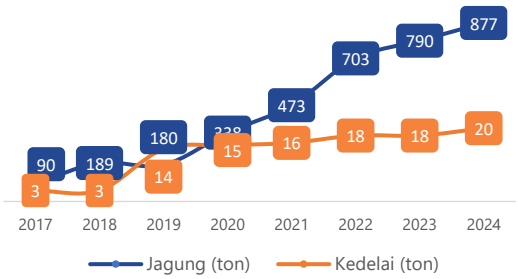

Sumber: BPS Kepri, 2025 (diolah)

Pemerintah Kepri berupaya fokus pada penguatan ketahanan pangan melalui diversifikasi pangan, seperti terlihat pada Grafik 5.36 bahwa memiliki dampak signifikan terhadap **peningkatan produksi komoditas jagung pada tahun 2017 hanya 90 ton menjadi 877 ton pada tahun 2024**. Selanjutnya produksi Kedelai pada tahun 2017 hanya 3 ton menjadi 20ton pada tahun 2024.

Grafik 5.37 - Perkembangan Perikanan Budidaya (ton)

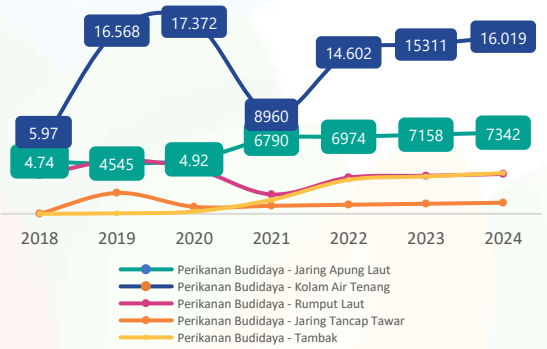

Sumber: BPS Kepri, 2025 (diolah)

Grafik 5.37 menunjukan bahwa **upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam penguatan sentra produksi perikanan di Provinsi Kepri berdampak positif** terhadap tren peningkatan hasil budidaya perikanan jaring apung, rumput laut, tambak, kolam air tenang dan jarring tancap tawar.

Selanjutnya, Promosi penggunaan bahan pangan lokal sebagai pengganti bahan pangan impor meningkatkan ketersediaan pangan bergizi dan mengurangi ketergantungan pada satu jenis pangan utama, serta membuka

peluang untuk pengolahan pangan dengan nilai tambah yang lebih tinggi.

5.2.3.1.4 Pemberdayaan Masyarakat dan Pelatihan Pertanian dan Perikanan

Dalam rangka memperkuat ketahanan pangan, pemerintah daerah bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan dan sektor swasta, untuk memberikan **pelatihan kepada masyarakat dalam bidang pertanian, perikanan, dan peternakan**. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.

Dampak: Pemberdayaan dan pelatihan pertanian berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya ketahanan pangan, serta **meningkatkan keterampilan masyarakat dalam mengelola sumber daya pangan** dengan lebih efisien dan ramah lingkungan.

Grafik 5.38 - Belanja Ketahanan Pangan (APBN) (dalam Miliar Rupiah)

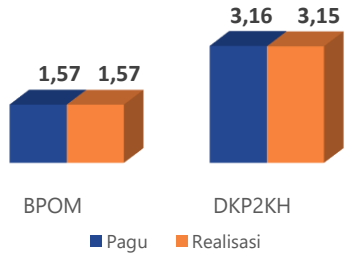

Sumber: Sintesa, 2025 (diolah).

Grafik 5.38 menunjukan dengan anggaran Rp3,15 miliar, **Dinas Kelautan dan Perikanan serta Pemerintah Kepri secara aktif menyelenggarakan berbagai pelatihan** dan pemberdayaan dibidang pertanian dan perikanan disertai dengan penyuluhan kepada masyarakat, petani, dan nelayan terkait cara-cara untuk meningkatkan produksi pangan, serta pentingnya keberagaman konsumsi pangan yang bergizi. Program ini juga mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memanfaatkan bahan pangan lokal untuk meningkatkan ketahanan pangan daerah.

5.2.3.1.5 Pemanfaatan Teknologi dalam Pertanian dan Perikanan

Teknologi seperti sistem pertanian modern (misalnya, hidroponik) dan teknologi perikanan (seperti budidaya ikan secara ramah lingkungan) juga didorong untuk meningkatkan produksi pangan di Kepri. **Pemanfaatan teknologi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi** produksi serta hasil yang diperoleh oleh petani dan nelayan lokal.

Grafik 5.39 - Produksi Tanaman Sayuran - 1 (ton)

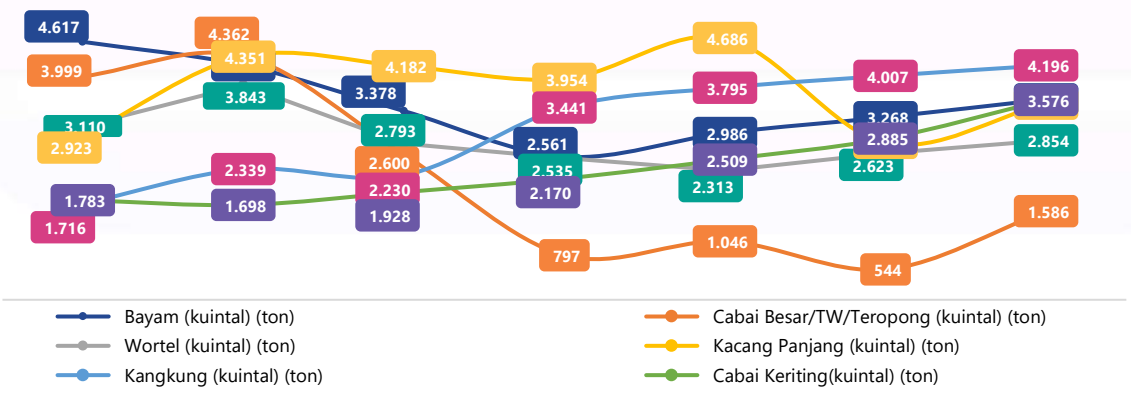

Sumber: BPS Kepri, 2025 (diolah)

Grafik 5.40 - Produksi Tanaman Sayuran - 2 (ton)

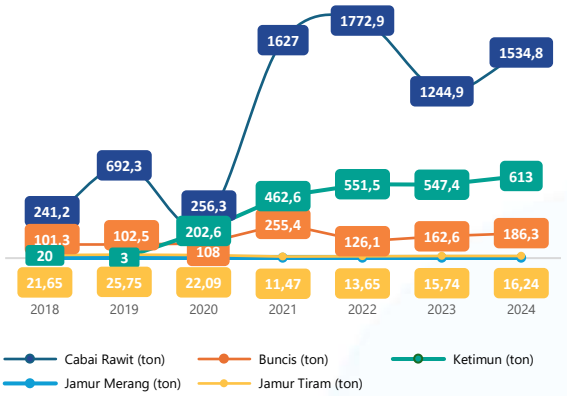

Sumber: BPS Kepri, 2025 (diolah)

Penggunaan teknologi pertanian modern yang digagas oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan (DKP2KH) berdampak positf bagi peningkatan produksi tanaman sayuran yang menjadi salah satu konsumsi terbesar bagi masyarakan Kepri dan juga dapat menjadi salah satu faktor pendorong inflasi seperti cabai rawit, ketimun dan buncis. Produksi tanaman sayuran mengalami tren meningkat sejak tahun 2021, dapat diilihat pada Grafik 5.40 bahwa produksi tertinggi tanaman sayuran terdapat pada komoditas jamur tiram 1.534 ton, diikuti ketimun 613 ton, buncis 186,3 ton dan cabai rawit 16,24 ton.

Lebih lanjut, **teknologi pertanian modern juga berdampak pada peningkatan variasi keanekaragaman sayuran** meliputi komoditas Kangkung, Bayam, Cabai Keriting, Kacang Panjang, Wortel dan Cabai Besar sebagaimana pada Grafik 5.39.

5.2.3.1.5 Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Kebijakan ketahanan pangan juga berkaitan dengan upaya konservasi sumber daya alam yang menjadi basis pangan di daerah tersebut. Misalnya, **pelestarian ekosistem laut dan pengelolaan kawasan perikanan secara berkelanjutan** untuk menjaga keberlanjutan produksi ikan dan rumput laut. Melalui kebijakan-kebijakan tersebut, Kepri berupaya untuk meningkatkan ketahanan pangan dengan memanfaatkan potensi lokal dan memperkuat sektor pertanian serta perikanan yang menjadi tumpuan ekonomi daerah

5.2.3.2 Analisis Dampak Kebijakan Ketahanan Pangan Di Kepri

Provinsi Kepri memiliki potensi yang besar di sektor kelautan dan perikanan, tetapi juga menghadapi tantangan dalam pembangunan ketahanan pangan, terutama terkait dengan distribusi bahan pangan, pengelolaan sumber daya alam, serta akses dan infrastruktur**. Dana Transfer ke Daerah, yang merupakan salah satu instrumen keuangan dari pemerintah pusat untuk mendukung pembangunan daerah**, dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan ketahanan pangan di Kepri. Program TKD terkait Tematik Ketahanan Pangan pada tahun 2024 dapat kami sampaikan sebagai berikut:

5.2.3.2.1 Program Peningkatkan Infrastruktur Pendukung Ketahanan Pangan

Dana DAK Fisik dapat digunakan untuk membangun dan merehabilitasi pelabuhan, jalan, fasilitas pangan pertanian dan jaringan transportasi yang menghubungkan kepulauan di Kepri. Selanjutnya, digunakan untuk pembangunan sarana penyimpanan pangan hasil pertanian dan perikanan, terutama di daerah diluar Kota Tanjungpinang dan Batam. Program tersebut meliputi:

1. Penanganan Jalan Provinsi dan Kabupaten;
2. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan;
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan dan Kawasan Konservasi Provinsi;
4. Pembangunan/ Rehabilitasi Unit Perbenihan (UPTD Kab/Kota);
5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil;
6. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Kab/Kota) Pembangunan;

7. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Pembudidaya Ikan Skala Kecil;

5.2.3.2.2 Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Sektor Pertanian dan Perikanan

Ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada infrastruktur, tetapi juga pada kemampuan sumber daya manusia (SDM) dalam mengelola sektor pertanian dan perikanan. Dana Dak Non Fisik dapat digunakan **untuk meningkatkan SDM, berikut rincian program DAK Non Fisik Kepri**:

1. Pembinaan dan Penyuluhan Pangan bagi masyarakat;
2. Penyelenggaran pelatihan bagi petani dan nelayan;

Dependent Variable: IKP
Method: Panel Least Squares
Date: 01/21/25 Time: 13:48
Sample: 2019 2023
Periods included: 5
Cross-sections included: 8
Total panel (balanced) observations: 40

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
DAK FISIK LN	13.10658	4.133486	3.170831	0.0035
DAK NON FISIK LN	12.12594	4.968004	2.440807	0.0208
C	-573.3534	142.2088	-4.031772	0.0003

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.430288	Mean dependent var	63.32836
Adjusted R-squared	0.259374	S.D. dependent var	11.59672
S.E. of regression	9.980094	Akaike info criterion	7.651380
Sum squared resid	2988.068	Schwarz criterion	8.073600
Log likelihood	-143.0276	Hannan-Quinn criter.	7.804041
F-statistic	2.517571	Durbin-Watson stat	2.502582
Prob(F-statistic)	0.027850		

3. Sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya ketahanan pangan untuk keberlanjutan;
4. Pengembangan varietas unggul (benih);
5. Bantuan pupuk dan bibit unggul;
6. Pemanfaatan pekarangan lokal/rumah warga;
7. Expose dan promosi hasil pangan lokal Kepri;
8. Penguatan kelembagaan, pembentukan kelompok tani terdidik;
9. Kemitraan usaha antara petani, pengusaha dan pemerintah daerah;

5.2.3.2.3 Dampak Belanja DAK Fisik dan DAK Non Fisik Dalam Meningkatan Ketahanan Pangan di Kepri Menggunakan Analisis Regresi Data Panel

Ketahanan pangan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan berkelanjutan, terutama di wilayah kepulauan seperti Kepri (Kepri) yang memiliki tantangan geografis, sosial, dan ekonomi tersendiri. Dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan, peran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik menjadi sangat strategis.

DAK Fisik umumnya diarahkan pada pembangunan infrastruktur strategis, seperti irigasi, jalan akses pertanian, dan fasilitas penyimpanan hasil panen, sementara **DAK non-fisik** mendukung pengembangan kapasitas sumber daya manusia, subsidi, dan pelatihan yang terkait dengan sektor pangan.

Analisis ini menggunakan metode regresi data panel dengan data yang mencakup kabupaten/kota di Kepri selama periode 2019 s.d. 2023. Dalam analisis regresi data panel tersebut telah dilakukan Uji Chou dan Uji Hausman yang digunakan untuk melihat memilih model terbaik yang akan digunakan. Berdasarkan Uji Chou didapat nilai *p-value* 0,000 < 0,05 dan Uji Hausman *p-value* 0,025 < 0,05 menunjukan FEM (*Fixed Effect Model*) yang terpilih daripada CEM (*Common Effect Model) dan* REM (*Random Effect Model).*

Gambar 5.1 - Hasil Analisis Regresi Data Panel Eviews
Sumber: Aplikasi Eviews, 2025 (diolah)

Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan metode FEM di dapat hasil bahwa **DAK Fisik dan DAK Non Fisik memiliki pengaruh signifikan positif terhadap peningkatan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) di Kepri**. DAK Fisik memiliki nilai *p-value* 0,0035 < 0,05 dengan koefisien regresi mencapai 13,11. Begitupun DAK Non Fisik memiliki nilai *p-value* 0,020 < 0,05 dengan koefisien regresi mencapai 12,12.

Hasil regresi tersebut menunjukan bahwa peran pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan di Kepri terus menunjukan hasil yang positif. Belanja DAK Fisik yang dimanfaatkan dalam sektor pertanian seperti pembangunan **jalan, irigasi, dan lumbung penyimpanan hasil panen** dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan ketahanan pangan. Begitu juga dengan DAK Non Fisik yang digunakan untuk **penyuluhan pertanian, bantuan benih, pengembangan pangan lokal**, dan program pendukung ketahanan pangan telah memberikan dampak signifikan dalam peningkatan ketahanan pangan di Kepri.

5.2.4 Analisis Sinkronisasi Kebijakan Ketahanan Pangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Provinsi Kepri

Untuk mencapai ketahanan pangan yang optimal di Kepri, penting untuk melakukan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. **Sinkronisasi ini memastikan bahwa kebijakan yang diimplementasikan di tingkat daerah sejalan dengan kebijakan strategis yang ditetapkan oleh pemerintah pusat**, serta dapat mengakomodasi kebutuhan dan karakteristik lokal. Beberapa aspek sinkronisasi antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah di Kepri adalah:

Tabel 5.2 – Tabel Kebijakan Ketahanan Pangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Provinsi Kepri

Aspek	Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi Kepri
Visi dan Misi	Menjamin ketersediaan pangan yang cukup, aman, bergizi, dan merata di seluruh Indonesia.	Mengimplementasikan kebijakan ketahanan pangan yang berbasis pada potensi kelautan dan pertanian daerah.
Peraturan dan Kebijakan Utama	Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan	Peraturan Gubernur Kepri No. 24 Tahun 2021 tentang Pangan Lokal
	Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Ketahanan Pangan Nasional Perpres Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kepri
Strategi Pengembangan Pangan	Diversifikasi konsumsi pangan	Pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan untuk ketahanan pangan
	Meningkatkan produksi pangan dalam negeri	Pengembangan pertanian berbasis lahan tidur dan pekarangan
	Penguatan cadangan pangan nasional	
Pendanaan dan Infrastruktur	Pengembangan infrastruktur logistik pangan	Pembangunan infrastruktur distribusi pangan lokal
Pemberdayaan Masyarakat	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan	Program ketahanan pangan berbasis komunitas
	Dukungan kepada petani dan nelayan	Pengembangan koperasi pangan lokal di daerah pesisir dan pedesaan

Aspek	Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi Kepri
Ketahanan Pangan dalam Kondisi Darurat	Pengelolaan cadangan pangan nasional untuk menghadapi krisis pangan	Penyusunan rencana kontinjensi pangan untuk menghadapi bencana alam atau kondisi darurat pangan
	Kebijakan pangan dalam bencana alam	
Pendidikan dan Penyuluhan	Program pendidikan pangan melalui media nasional	Penyuluhan kepada petani dan nelayan mengenai pola tanam dan budidaya yang ramah lingkungan
	Kampanye konsumsi pangan bergizi	Penyuluhan konsumsi pangan bergizi bagi masyarakat Kepri
Keterlibatan Sektor Swasta	Mendorong kerjasama dengan sektor swasta untuk menciptakan sistem pangan yang lebih efisien	Mendorong sektor swasta untuk berinvestasi dalam pengolahan pangan lokal dan distribusi hasil pertanian serta perikanan
Sumber Daya Alam dan Potensi Daerah	Peningkatan ketahanan pangan berbasis sumber daya alam dan pengelolaan pertanian	Pemanfaatan potensi perikanan, kelautan, dan hasil pertanian lokal seperti sagu, kelapa, dan rempah
Program Inovasi	Inovasi dalam sistem distribusi pangan berbasis teknologi informasi	Inovasi sistem pangan berbasis digital dan teknologi pertanian untuk meningkatkan hasil pangan lokal

]

5.2.4.1 Koordinasi Program dan Kebijakan

Program Nasional seperti Upsus Pajale yang bertujuan meningkatkan produksi padi, jagung, dan kedelai dapat disinkronkan dengan pengembangan kebijakan komoditas pangan lokal di Kepri yang lebih sesuai dengan kondisi alam di Kepri, seperti kelapa, ubi, dan ikan.

Sinkronisasi: Di Kepri, yang memiliki banyak pulau kecil dan wilayah pesisir, kebijakan pusat untuk **meningkatkan produksi pangan seperti jagung dapat dipadukan dengan pengembangan pertanian berbasis lahan kering dan ekosistem laut**. Program tersebut juga dapat disesuaikan dengan penguatan sektor perikanan dan budidaya rumput laut, yang menjadi komoditas unggulan daerah

5.2.4.2 Pendanaan dan Alokasi Sumber Daya

Pemerintah pusat menyediakan dana dan bantuan untuk pembangunan infrastruktur ketahanan pangan melalui APBN. Pemerintah daerah, dalam hal ini Provinsi Kepri, kemudian mengalokasikan dana tersebut untuk penguatan kegiatan yang mendukung ketahanan pangan, seperti jalan, pelabuhan yang menghubungkan pulau-pulau, serta fasilitas untuk mendukung distribusi pangan ke daerah terpencil.

Sinkronisasi: Pemerintah pusat dapat memberikan dana untuk **pembangunan pelabuhan atau jalur distribusi pangan,** yang kemudian digunakan oleh pemerintah daerah untuk memastikan distribusi pangan berjalan dengan lancar ke pulau-pulau kecil dan daerah-daerah yang sulit dijangkau.

5.2.4.3 Pemberdayaan Masyarakat dan Penyuluhan

Penyuluhan kepada petani dan nelayan yang dilakukan oleh pemerintah pusat harus dilaksanakan dengan pendekatan yang disesuaikan dengan karakteristik lokal. **Pemerintah daerah memiliki peran dalam menyesuaikan materi dan pendekatan penyuluhan dengan kebutuhan spesifik masyarakat Kepri**, seperti pengembangan teknik pertanian ramah lingkungan, pemanfaatan teknologi pertanian modern (misalnya hidroponik), serta penguatan sektor perikanan berbasis masyarakat.

Sinkronisasi: Pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan **program pelatihan mengenai budidaya perikanan** ramah lingkungan, sementara pemerintah daerah dapat menyelenggarakan pelatihan lebih spesifik, seperti budidaya ikan laut dan rumput laut yang sesuai dengan kondisi perairan Kepri.

5.2.4.4 Pendanaan dan Alokasi Sumber Daya

Pemerintah pusat dapat menyediakan teknologi dan infrastruktur pendukung seperti alat pertanian modern, teknologi budidaya ikan, dan sistem irigasi yang lebih efisien. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk implementasi teknologi ini dan memastikan bahwa petani dan nelayan di daerah memiliki akses yang memadai.

Sinkronisasi: Pemerintah pusat dapat mendukung dengan menyediakan alat dan teknologi pertanian modern, sementara pemerintah daerah memastikan distribusi alat tersebut sampai ke petani atau nelayan lokal dan memberikan pelatihan tentang cara penggunaannya.

1. **Pendanaan dan Alokasi Sumber Daya**

Pemerintah pusat dan daerah harus melakukan evaluasi bersama untuk memantau sejauh mana kebijakan ketahanan pangan yang telah dijalankan berhasil mencapai tujuannya. Pemerintah pusat memberikan standar dan indikator pencapaian ketahanan pangan, sementara pemerintah daerah melaksanakan pengawasan dan evaluasi di lapangan.

Sinkronisasi: Program-program ketahanan pangan yang dilaksanakan di Kepri harus dievaluasi secara rutin untuk mengetahui apakah

kebijakan tersebut efektif dalam meningkatkan produksi pangan lokal, akses pangan, serta kualitas hidup masyarakat di daerah tersebut.

5.2.4.5 Tantangan dalam Sinkronisasi Kebijakan

Meskipun ada upaya untuk menyinkronkan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, masih ada beberapa tantangan yang dihadapi, antara lain:

1. Ketidaksesuaian Prioritas Lokal dan Nasional: Tidak semua kebijakan nasional dapat langsung diterapkan di daerah karena adanya perbedaan kondisi lokal, baik dalam hal sumber daya alam, budaya, maupun kebutuhan pangan.
2. Koordinasi yang Kurang Efektif: Sinkronisasi yang buruk antara pemerintah pusat dan daerah dapat menghambat implementasi kebijakan, terutama terkait dengan alokasi anggaran dan sumber daya.
3. Keterbatasan Infrastruktur: Infrastruktur yang kurang memadai, terutama di pulau-pulau kecil, masih menjadi hambatan dalam distribusi pangan yang efisien.

Sinkronisasi antara kebijakan ketahanan pangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Kepri sangat penting untuk menciptakan ketahanan pangan yang optimal. Kolaborasi yang baik antara kebijakan strategis nasional dan implementasi kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi lokal dapat memperkuat sistem ketahanan pangan secara menyeluruh. Melalui koordinasi yang efektif, alokasi sumber daya yang tepat, dan pemanfaatan teknologi yang sesuai, diharapkan ketahanan pangan di Kepri dapat terjasga dan berkembang secara berkelanjutan.

5.2.5 *Current Issue* Ketahanan Pangan di Kepri

Berdasarkan FGD bersama para Kepala Dinas Ketahanan Pangan lingkup Provinsi Kepri, disampaikan bahwa Kepri sebagai *Archipelagic Region*, memiliki kondisi yang berbeda dari daerah lain di Indonesia, karena hanya memiliki 2% daratan dan 98% lautan. Dengan kondisi geografis yang demikian, terdapat beberapa *current issue* ketahan pangan di Kepri, yaitu sebagai berikut:

1. **Lahan pertanian padi di Kepri mengalami penurunan setiap tahun**, selama periode 2018 – 2023 menurun 69,33%, dari 375,87 hektare menjadi 115,27 hektare.
2. **Produksi Beras Kepri mengalami penurunan** 62,22% dari dari tahun 2018 sebesar 624,48 ton menjadi 242,12 ton pada tahun 2023.
3. **Pemenuhan kebutuhan pangan beras Kepri dari produksi sendiri tidak mencapai 1% dari total konsumsi**, sisanya lebih dari 99% di supply melalui impor (ketergantungan impor).
4. Indeks Ketahanan Pangan (**IKP) Kepri pada tahun 2023 sebesar 65,10 tergolong rendah berada di peringkat 30** dari 34 provinsi di Indonesia.
5. **Keterbatasan Infrastruktur Pertanian** termasuk sistem irigasi, jalan, dan fasilitas penyimpanan hasil pertanian.
6. **SDM terampil dan berpengetahuan di sektor pertanian sangat terbatas** akibat pergeseran pola pekerjaan masyarakat usia produktif yang enggan menjadi petani.
7. Jenis hasil produksi bahan pangan dari **tanaman buah dan sayuran di Kepri tidak terlalu beragam**.
8. **Penyaluran Dana TKD terkait penguatan ketahanan pangan belum maksimal** pada Kabupaten Lingga, terdapat gagal salur pengadaan alat sentra produksi sagu.

Special Box 5

Menghitung Dampak Ekonomi Kebijakan Makan Bergizi Gratis dan Kesiapan Ketahanan Pangan Indonesia (Analisis Input-Output)

Program unggulan pemerintahan baru TA 2025 telah dialokasikan dalam belanja K/L sebesar Rp121 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp71 triliun diperuntukan bagi program makanan bergizi gratis yang akan dikelola oleh Badan Gizi Nasional. Pemerintah mengalokasikan Rp71 triliun yang diperuntukkan bagi program makanan bergizi gratis, yang meningkatkan belanja pemerintah (*government spending*) pada sektor penyediaan akomodasi makan minum.

Tabel *Input Output* (IO) yang digunakan yaitu tabel IO Indonesia tahun 2016 atas harga produsen. Matriks final demand yang diasumsikan berubah, yaitu pada belanja pemerintah (government spending) yang meningkat Rp71 triliun.

Dalam analisis input output terdapat beberapa perhitungan perhitungan, yaitu:

1. *Output Multiplier* $O_j = \sum_{i=1}^{n} b_{ij}$

   Angka pengganda output mengukur output total yang tercipta akibat adanya perubahan satu unit permintaan akhir di suatu sektor

2. *Household Multiplier* $H_j = \sum_{i=1}^{n} a_{n+1,i} b_{ij}$

   Angka pengganda pendapatan mengukur peningkatan pendapatan masyarakat akibat adanya perubahan (peningkatan) permintaan akhir suatu sektor.

3. *Employment Multiplier* $E_j = \sum_{i=1}^{n} w_{n+1,i} b_{ij}$

   Angka pengganda tenaga kerja mengukur peningkatan jumlah tenaga kerja akibat adanya perubahan permintaan akhir suatu sektor.

4. Nilai Tambah Bruto *Multiplier* $NTB_j = \sum_{i=1}^{n} g_{ij} v_i$

   Angka pengganda NTB mengukur pendapatan total yang tercipta akibat adanya perubahan satu unit permintaan akhir di suatu sektor

Hasil pengolahan data tabel IO Indonesia tahun 2016 sebagaimana rilis BPS Indonesia adalah sebagai berikut:

Sektor	Output (Juta)	Income (Juta)	Tenaga Kerja (Orang)	PDB (Juta)
1	15.590.221	5.098.740	310.250	12.309.856
2	2.858.900	475.697	3.594	1.928.131
3	32.774.036	4.547.000	76.297	12.446.120
4	1.586.557	71.346	621	336.510
5	51.353	5.782	220	36.071
6	348.982	65.526	957	138.266
7	7.154.371	2.211.646	63.950	5.040.705
8	2.309.712	338.966	7.728	1.056.854
9	71.289.165	15.920.955	491.235	33.325.485
10	1.118.946	200.772	1.037	700.390
11	2.228.436	747.370	5.424	1.636.374

Special Box 5

Menghitung Dampak Ekonomi Kebijakan Makan Bergizi Gratis dan Kesiapan Ketahanan Pangan Indonesia (Analisis Input-Output)

12	782.356	52.656	363	605.145
13	1.282.736	356.693	2.934	746.639
14	303.627	115.297	1.982	170.705
15	56.700	27.879	560	37.823
16	50.096	13.541	305	25.124
17	120.529	46.185	1.511	69.900
Jumlah	**139.906.722**	**30.296.051**	**968.969**	**70.610.097**

Berdasarkan hasil perhitungan, **anggaran pemerintah sebesar Rp71 triliun yang digunakan untuk belanja pada sektor penyediaan akomodasi makan minum, dapat meningkatkan output seluruh sektor sebesar Rp139,91 triliun**. Dengan tambahan output terbesar pada sektor 9 (penyediaan akomodasi makan minum) sebesar Rp71,29 triliun, sektor 3 (industri pengolahan) sebesar Rp32,74 triliun sebagai dampak peningkatan permintaan output industri pengolahan yang digunakan dalam industri makan dan minum, sektor 1 (pertanian, kehutanan, dan perikanan) sebesar Rp15,59 triliun sebagai dampak tambahan permintaan pada sektor 1 yang merupakan input utama dalam penyediaan makanan dan minuman, dan sektor 7 (perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor) sebesar Rp7,15 triliun sebagai dampak peningkatan permintaan pada sektor 7.

Dampak tambahan output yang perlu disediakan oleh rumah tangga pada sektor 1 (pertanian, kehutanan, dan perikanan) dari kebijakan makan bergizi gratis tersebut memberikan dampak terhadap ketahanan pangan Indonesia. Peningkatan permintaan yang tinggi tersebut tentu akan mempengaruhi kerawanan pangan Indonesia, sehingga perlu diantisipasi oleh pemerintah dalam penyediaan *supply* pangan untuk kebijakan tersebut.

Kemudian serapan tenaga kerja melalui kebijakan tersebut berpotensi meningkat sebesar 968,969 orang secara keseluruhan. Sektor 9 meningkatkan serapan tenaga kerja sebesar 491,235 orang, diikuti sektor 1 sebanyak 310.250 orang, sektor 3 sebanyak 76.297 orang, dan sektor 7 sebanyak 64.950 orang. Menunjukan meskipun sektor 3 memiliki tambahan output yang lebih besar dibandingkan sektor 1, namun tambahan tenaga kerja sektor 1 lebih besar hingga 4x lipat dari peningkatan sektor 3. Kondisi ini salah satunya dipengaruhi oleh sektor 1 yang merupakan sektor padat karya, sehingga meningkatkan serapan tenaga kerja secara signifikan. Sedangkan sektor 3, tidak berdampak pada serapan tenaga kerja yang sangat tinggi, karena industri saat ini sudah banyak menggunakan bantuan mesin.

Tambahan penghasilan yang diterima rumah tangga secara keseluruhan mencapai Rp30,30 triliun. Sektor 9 menerima tambahan penghasilan tertinggi sebesar Rp15,92 triliun, diikuti sektor 1 sebesar Rp5,10 triliun, sektor 3 sebesar Rp4,55 triliun, dan sektor 7 sebesar Rp2,21 triliun.

Peningkatan PDB secara keseluruhan mencapai Rp70,61 triliun terhadap PDB 2016 yang sebesar 12.406,80 triliun. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat mencapai 0,57% apabila dibandingkan dengan tahun 2016. Sektor 9 memberikan tambahan PDB sebesar Rp33,33 triliun, diikuti sektor 1

Special Box 5

Menghitung Dampak Ekonomi Kebijakan Makan Bergizi Gratis dan Kesiapan Ketahanan Pangan Indonesia (Analisis Input-Output)

sebesar Rp12,31 triliun, sektor 3 sebesar Rp12,45 triliun, dan sektor 7 sebesar Rp5,04 triliun. Kondisi ini menunjukan dampak besar belanja makanan bergizi gratis terhadap pertumbuhan PDB, salah satunya pada sektor pertanian dan perikanan yang mencapai 17,43% dari total pertumbuan PDB.

J.4. Kesimpulan

1. Konsumsi pangan berupa bahan makanan yang mengandung beras di Indonesia secara tahunan mencapai 93,79 kg/kapita/tahun tumbuh 0,30% (*yoy*).
2. Ketersediaan pangan di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 116,77 kg/kapita/tahun yang tumbuh 0,86% (*yoy*). Ketersediaan pangan tersebut hanya dapat mencukupi kebutuhan pangan selama 1,17 tahun (14 bulan) apabila dibandingkan dengan konsumsi tahunan sebesar 93,79 kg/kapita/tahun.
3. Anggaran pemerintah Rp71 triliun yang digunakan untuk program makan bergizi gratis, dapat meningkatkan output seluruh sektor perekonomian mencapai sebesar Rp139,91 triliun.
4. Serapan tenaga kerja melalui kebijakan makan bergizi gratis berpotensi meningkat sampai dengan 968,969 orang secara keseluruhan.
5. Peningkatan PDB secara keseluruhan mencapai Rp70,61 triliun terhadap PDB 2016 yang sebesar Rp12.406,80 triliun sebagai dampak kebijakan makan bergizi gratis. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat mencapai 0,57% apabila dibandingkan dengan tahun 2016.

J.5. Rekomendasi Kebijakan

1. Badan Gizi Nasional selaku K/L yang melaksanakan anggaran agar dapat mengoptimalkan anggaran yang telah direncanakan.
2. Kementerian terkait seperti Badan Gizi Nasional, Kementerian Pertanian, dan Badan Pangan Nasional agar dapat bersinergi dalam memenuhi kebutuhan pangan untuk menjaga rantai pasokan makanan dalam kegiatan tersebut.
3. Kementerian Pertanian, dan Badan Pangan Nasional agar meningkatkan dan memastikan kondisi ketahanan pangan dapat tetap terjaga dengan mengoptimalkan produksi pangan lokal.
4. TPID di pusat dan daerah agar dapat menjaga rantai pasok pangan di daerah, sehingga peningkatan permintaan akibat kebijakan tersebut tidak memberikan dampak inflasi yang terlalu tinggi.

Bab VI
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Optimalisasi Kebijakan Fiskal: Meningkatkan pembangunan di Kepri agar selaras dengan pembangunan nasional melalui perbaikan kinerja fiskal pada pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Kawasan KEK Nongsa, Kota Batam

Thematic Analysis

- Kesimpulan
- Rekomendasi

6.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari Kajian Fiskal Regional Kepulauan Riau triwulan IV 2024 sebagai berikut:

Sasaran Pembangunan dan Tantangan Daerah

1. **Sasaran Pembangunan di Kepri** bertujuan untuk menciptakan kemajuan yang berkelanjutan dan inklusif. Kepri memiliki sasaran spesifik yaitu Optimalisasi Potensi Kemaritiman, Keunggulan Wilayah dan Keberlanjutan Lingkungan; Percepatan Pemulihan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi; Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kuat, dan Antisipatif; Penguatan Jaringan Pengamanan Sosial; Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berkarakter; Pembinaan Keagamaan, Pelestarian Budaya, dan Harmoni Masyarakat; serta Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengintegrasian antar Pulau.
2. **Tantangan daerah dalam rangka pembangunan Kepri** dapat dilihat dari berbagai aspek sebagai berikut:
   1) **Tantangan Ekonomi Daerah:** Dari potensi kekayaan alam dan letak geografis, Kepri mengalami beberapa hambatan dalam mengembangkan wilayah perekonomiannya. Tantangan ekonomi Kepri dijelaskan dalam beberapa kelompok sebagai berikut:
      a. **Keterbatasan Masyarakat Kepri mengelola Sumber Daya Alam**. Kepri kaya akan hasil laut namun masih kesulitan untuk mengembangkan sektor perikanan akibat kurangnya infrastruktur yang memadai, akses teknologi modern, serta terbatasnya pendanaan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing di pasar global.
      b. **Infrastruktur Ekonomi yang Terbatas.** Konektivitas antar wilayah di Kepri, terutama di pulau-pulau terluar, masih terkendala kurangnya bandara, pelabuhan, transportasi, fasilitas kesehatan, serta jaringan internet berkecepatan tinggi. Hal ini menghambat integrasi ekonomi, perdagangan, dan pembangunan di antar provinsi, antar pulau dan area perbatasan.
      c. **Ketidakmerataan Investasi**. Investasi di Kepri masih sangat terkonsentrasi di Kota Batam, sehingga terjadi kesenjangan dalam pemerataan investasi di wilayah lain, seperti Kabupaten Lingga, Natuna, dan Kepulauan Anambas. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan SDM dan infrastruktur di daerah terluar tersebut.
      d. **Tantangan Ketenagakerjaan.** Peningkatan jumlah angkatan kerja di Kepri tidak diiringi dengan peningkatan lapangan pekerjaan dan pelatihan yang memadai, sehingga pasar tenaga kerja belum mampu menyerap masuknya tenaga kerja dari luar Kepri yang terus bertambah ke Batam dan Bintan.
   2) **Tantangan Sosial Kependudukan**: Kepri dengan angka IPM tertinggi di regional Sumatera tahun 2024 nyatanya masih bertolak belakang dengan Gini Ratio Kepri yang masih tinggi sebesar 0,357. Artinya, ketimpangan tersebut dapat menghadirkan tantangan sosial kependudukan yang dapat menghambat pembangunan di Kepri. Tantangan sosial kependudukan Kepri dijelaskan dalam beberapa kelompok sebagai berikut:
      a. **Ketimpangan Demografis**: Sebagian besar penduduk Kepri terkonsentrasi di Kota Batam (58,48%), sementara daerah lain seperti Kepulauan Anambas memiliki jumlah penduduk yang sangat rendah. Ketimpangan ini memengaruhi distribusi pembangunan ekonomi dan sosial, khususnya di wilayah terpencil.
      b. **Tantangan Pembangunan Manusia**: IPM Kota Batam 83,32 dan IPM Kabupaten Lingga sebesar 73,05 menandakan perbedaan signifikan dalam akses pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi antara daerah perkotaan seperti Batam yang perekonomiannya terus

melaju dengan kabupaten-kabupaten terluar Kepri seperti Lingga yang sangat sulit memperoleh fasilitas umum untuk meningkatkan kesejahteraannya.

c. **Tantangan Budaya Masyarakat.** Masyarakat Kepri menghadapi kesulitan dalam mengadopsi budaya global yang produktif sambil mempertahankan kearifan lokal Melayu. Terdapat kebutuhan untuk mendorong diplomasi budaya antar suku dan antar negara guna memperkuat pembangunan daerah.
d. **Keterbatasan Akses Pendidikan**. Akses pendidikan, terutama di wilayah pulau-pulau terpencil, masih sangat terbatas. Tingkat partisipasi masyarakat di Kepri dalam pendidikan menengah hanya 77,2%, dan angka putus sekolah mencapai 0,4%. Infrastruktur dan kualitas pendidikan di wilayah terpencil, jauh tertinggal dibandingkan dengan daerah perkotaan.
e. **Kesenjangan Layanan Kesehatan**. Pelayanan kesehatan di Kepri belum merata, terutama di wilayah kepulauan terpencil. Angka Kematian Ibu (AKI) meningkat menjadi 98 per 100.000 kelahiran, dan kekurangan gizi pada balita masih menjadi masalah serius, diperburuk oleh sulitnya akses layanan kesehatan yang memadai.
f. **Ketimpangan Sosial dan Ekonomi**. Meskipun terdapat berbagai program bantuan sosial, ketimpangan sosial di Kepri masih tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan Gini Ratio sebesar 0,357. Program bantuan seperti BLT dan KIP belum optimal dalam mengurangi ketimpangan, khususnya di daerah-daerah tertinggal.

3) **Tantangan *Geopolitical Conflict* di Wilayah Maritim.** Kabupaten Natuna sebagai wilayah terluar Kepri menghadapi tantangan besar dalam memaksimalkan potensi SDA bawah lautnya, termasuk minyak dan gas, akibat tekanan dari negara-negara tetangga seperti Cina, Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. Mekanisme eksploitasi seperti "*beggar thy neighbour*" mengakibatkan SDA Natuna, terutama ikan dan biota laut dikuasai oleh negara-negara besar tersebut. Akibatnya, upaya pemerintah daerah dan pusat untuk memajukan ekonomi Natuna terjebak dalam "*economic growth trap*," di mana pertumbuhan ekonomi tetap stagnan, sementara SDA melimpah tak dapat dimanfaatkan secara optimal.
4) **Tantangan sebagai Daerah Berstatus *Free Trade Zone***. FTZ Kepri di wilayah Batam, Bintan, Tanjungpinang dan Karimun (BBK) menawarkan berbagai insentif yang menarik bagi investor, seperti insentif fiskal, regulasi bisnis yang fleksibel, serta area produksi berbiaya rendah. FTZ di Kepri menghadapi beberapa kendala signifikan seperti proses perizinan impor yang rumit, ketidakpastian terkait pajak berganda, dan birokrasi yang lambat dalam pengurusan lahan, disinsentif fiskal, seperti perbedaan tarif pajak antara Indonesia dan Singapura, membuat investor cenderung memilih Singapura, resistensi dari masyarakat lokal terkait proyek yang dianggap merugikan lingkungan dan perekonomian masyarakat kecil, seperti isu di pulau Rempang. Tantangan ini memperlambat proses pembangunan dan operasional kawasan FTZ di Kepri.

Analisis Ekonomi Regional

Kinerja ekonomi Kepulauan Riau secara kumulatif (*ctc*) tumbuh positif dan menjadi provinsi dengan **pertumbuhan ekonomi tertinggi ke-3 di regional Sumatera**. Indikator kesejahteraan rata-rata mengalami peningkatan dengan rincian sebagai berikut:

1. **Pada triwulan IV 2024, kinerja perekonomian Kepri terjaga baik dengan angka pertumbuhan ekonomi sebesar 5,14 persen (*yoy*)** yang mencerminkan kestabilan perekonomian di Kepri. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Kepri di tahun 2024 menjadi yang tertinggi ke-3 di regional Sumatera (5,03% *ctc*), setelah Sumatera Selatan dan Sumatera Utara. Hal ini didorong oleh meningkatnya jummlah kunjungan wisman dan wisnus yang meningkatkan permintaan barang dan

jasa dan mendukung produktivitas ekonomi Kepri. **PDRB** ADHB triwulan IV 2024 Rp93.446,15 miliar dan ADHK Kepri sebesar Rp53.394,49 miliar. Dari sisi Pengeluaran, akselerasi pertumbuhan ekonomi di Kepri didominasi oleh **Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)** dengan *share* 44,42 persen dan tumbuh 5,63 persen (*yoy*). Dari sisi Lapangan Usaha, PDRB Kepri didominasi oleh 3 (tiga) sektor utama, yakni **sektor industri pengolahan** dengan kontribusi terhadap PDRB sebesar 41,07 persen, disusul sektor konstruksi 20,82 persen dan sektor pertambangan dan penggalian 9,87 persen.

2. **Tingkat inflasi** Kepri pada tahun 2024 sebesar 2,09 persen (*ctc*). Angka inflasi ini diperoleh berdasarkan perhitungan tekanan inflasi pada kota Batam, kota Tanjungpinang dan kabupaten Karimun. Inflasi Kepri di bulan Desember 2024 didominasi oleh kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau dengan andil inflasi sebesar 0,72 persen (*yoy*). **Harga pada komoditas emas perhiasan (0,40 persen), tarif listrik (0,26 persen), dan tarif parkir (0,18 persen) berkontribusi pada inflasi.** Hal tersebut dipengaruhi oleh ketidakstabilan iklim di daerah produsen beras yang menyebabkan gagal panen, sedangkan Provinsi Kepri masih mengimpor beras dari daerah produsen beras dari dalam negeri (pulau jawa) dan luar negeri (Thailand).
3. **IPM Kepri pada tahun 2024 berhasil menjadi IPM tertinggi ke-tiga Nasional** dengan IPM sebesar 79,89 dan tumbuh sebesar 0,81 persen (*yoy*). Capaian tersebut merupakan prestasi bagi Kepri yang berhasil menjadi provinsi dan menjadi IPM tertinggi pada Regional Sumatera selama enam tahun berturut-turut.
4. **Tingkat kemiskinan** Kepri pada September 2024 tercatat 124,96 ribu jiwa atau 4,78 persen dari total penduduk Kepri. Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya di bulan Maret 2024, tingkat kemiskinan Kepri turun sebanyak ±13,3 ribu jiwa (*yoy*).
5. **Gini Ratio atau tingkat ketimpangan Kepri** di bulan September 2024 sebesar 0,357. Gini Ratio tersebut meningkat 0,008 persen (*yoy*). Gini Ratio tersebut dibawah angka Gini Ratio nasional yaitu 0,381. **Angka Gini Ratio Kepri per September 2024 berada pada peringkat pertama tertinggi di regional Sumatera**. Pertumbuhan ekonomi yang terus melaju nyatanya tidak serta merta mengurangi ketimpangan sosial, hal ini menunjukkan bahwa kemanfaatan dari pertumbuhan ekonomi Kepri tidak dirasakan secara merata. Hal ini disebabkan majunya kota Batam sebagai pusat bisnis kurang mampu memberikan efek domino (*spatial economic effect*) peningkatan aktivitas ekonomi pada kabupaten lainnya.
6. **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)** Kepri bulan Agustus 2024 tercatat 6,39 persen; dengan **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)** mencapai 69,17 persen. Angka TPT Provinsi Kepri masih berada **pada peringkat pertama tertinggi di Regional Sumatera dan tertinggi ke-tiga Nasional** setelah Provinsi Jawa Barat (6,75 persen) dan Provinsi Banten (6,68 persen), meskipun turun sebesar 0,41 persen (*yoy*). Penurunan TPT tersebut menjadi sinyal positif bahwa masyarakat di Kepri telah memiliki akses dan kesempatan yang lebih baik terhadap lapangan pekerjaan dan kesempatan untuk berkontribusi dalam perekonomian.
7. **NTP Kepri** pada bulan Desember 2024 sebesar 104,63 menunjukkan pertumbuhan positif 0,88 persen (*mtm*) dan 0,45 persen (*yoy*). NTP tersebut telah mencapai target NTP dalam RPJMD Kepri yang di targetkan mencapai 99,95 persen di tahun 2024. Namun NTP Kepri masih berada di bawah angka NTP Nasional (122,78).
8. **NTN** Kepri di bulan Desember 2024 sebesar 104,84. Angka NTN tersebut mengalami penurunan sebesar 3,20 persen (yoy), tumbuh negatif 0,28 persen (mtm) dan tumbuh 1,07 persen (yoy). Angka NTN Kepri berada di atas Nasional (102,71). Meskipun lebih tinggi dibandingkan dengan capaian NTN Nasional, NTP Kepri masih belum mencapai sasaran NTN yang ditetapkan oleh Dinas Kelautan

dan Perikanan Kepri yang pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 116. Maka dari itu, pemerintah daerah akan terus meningkatkan produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap serta meningkatkan kapasitas nelayan terkait teknologi kelautan perikanan.

Analisis Fiskal Regional

Pelaksanaan APBN Tingkat Provinsi

1. **Pendapatan Negara** tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp15.155,62 miliar yang seluruhnya merupakan Penerimaan Dalam Negeri, terdiri dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp12.488,53 miliar dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp2.707,09 miliar.
   - **Realisasi Penerimaan Perpajakan** sebesar Rp10.582,10 miliar (85,01 persen dari Target) dan mengalami pertumbuhan 7,65 persen (*yoy*). Kinerja perpajakan didorong oleh PPh Non Migas sebesar 88,72 persen dari total Penerimaan Perpajakan. Dari sektor lapangan usaha, Penerimaan Perpajakan didominasi 45,63 persen dari Industri Pengolahan.
   - **Realisasi Pendapatan PNBP** sebesar Rp3.189,56 miliar (117,82 persen dari Target) dan tumbuh signifikan sebesar 29,81 persen (*yoy*) didominasi dari PNBP BLU BP Batam.
2. **Belanja Negara** tahun 2024 dianggarkan dengan Pagu sebesar Rp18.682,57 miliar, terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) Rp10.501,28 miliar, dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp8.181,29 miliar.
   - **Realisasi Belanja Pemerintah Pusat** sebesar Rp9.130,36 miliar (86,95 persen dari Pagu) dan tumbuh sebesar 4,63 persen (*yoy*). Persentase realisasi Belanja Pemerintah Pusat tahun 2024 merupakan yang terendah dalam tiga tahun terakhir.
   - **Realisasi Belanja TKD** sebesar Rp8.036,53 miliar (98,23 persen dari Pagu) dan mengalami perlambatan pertumbuhan sebesar minus 12,65 persen (*yoy*).
3. **Defisit** dianggarkan sebesar Rp3.526,94 miliar dan terealisasi sebesar Rp3.395,23 miliar (96,27 persen dari Pagu).

Pelaksanaan APBD Tingkat Provinsi

1. **Pendapatan Daerah** tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp14.524,05 miliar, terdiri dari PAD sebesar Rp4.801,80 miliar, Pendapatan Transfer sebesar Rp9.609,46 miliar, dan LLPDyS sebesar Rp103,79 miliar.
   - **Realisasi PAD** sebesar Rp4.753,80 miliar (98,82 persen dari Target) dan mengalami pertumbuhan 8,96 persen (*yoy*). Pertumbuhan PAD didongkrak oleh keberhasilan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan Pajak Daerah (tumbuh 7,91 persen, *yoy*) dan Retribusi Daerah (tumbuh 193,30 persen, *yoy*) sehingga mendorong PAD tumbuh positif. **Rasio PAD terhadap PDRB** tahun 2024 sebesar 2,50 persen dan merupakan angka tertinggi pada tiga tahun terakhir. **IKF I** menunjukan hanya Kota Batam dan Kabupaten Karimun yang masuk ke klaster Menuju Mandiri, sedangkan **IKF II** menunjukkan hampir seluruh kabupaten/kota sudah masuk ke klaster Menuju Kemandirian kecuali Kabupaten Lingga.
   - **Realisasi Pendapatan Transfer** sebesar Rp8.290,90 miliar (86,28 persen dari Target) dan tumbuh minus 5,27 persen (yoy). Realisasi ini didominasi dari DAU sebesar 52,27 persen dari total Pendapatan Transfer.
   - **Realisasi LLPDyS** sebesar Rp23,49 miliar (22,64 persen dari Target) dan tumbuh minus 24,18 persen (*yoy*).
2. **Belanja Daerah** tahun 2024 dianggarkan dengan Pagu sebesar Rp15.232,97 miliar, terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp11.719,57 miliar, Belanja Modal sebesar Rp2.116,19 miliar, Belanja Tak Terduga sebesar Rp85,58 miliar, dan Belanja Transfer sebesar Rp1.311,64 miliar.

- **Realisasi Belanja Operasi** sebesar Rp11.105,75 miliar (94,76 persen dari Pagu) dan mengalami pertumbuhan sebesar 5,75 persen (*yoy*).
- **Realisasi Belanja Modal** sebesar Rp1.780,12 miliar (84,12 persen dari Pagu) dan mengalami pertumbuhan sebesar minus 17,98 persen (*yoy*).
- **Realisasi Belanja Tak Terduga** sebesar Rp5,16 miliar (6,02 persen dari Pagu) dan mengalami perlambatan pertumbuhan sebesar minus 44,37 persen (*yoy*).
- **Realisasi Belanja Transfer** sebesar Rp563,66 miliar (42,97 persen dari Pagu) dan mengalami pertumbuhan sebesar 0,36 persen (*yoy*).

3. **Defisit** dianggarkan sebesar Rp708,93 miliar dan terealisasi sebesar Rp386,49 miliar (54,52 persen dari Pagu)

Pelaksanaan Anggaran Konsolidasi

1. **Pendapatan Konsolidasi** tahun 2024 sebesar Rp19.149,68 miliar dan mengalami pertumbuhan 13,66 persen (*yoy*).
2. **Belanja Konsolidasi** tahun 2024 sebesar Rp23.297,09 miliar dan mengalami pertumbuhan sebesar 3,13 persen (*yoy*).
3. **Defisit Konsolidasi** tahun 2024 sebesar Rp4.147,42 miliar dan mengalami pertumbuhan sebesar minus 27,76 persen (*yoy*).

Pengembangan Ekonomi Daerah: Harmonisasi Belanja K/L dan DAK Fisik di Tingkat Wilayah

1. Hasil monev Belanja Pemerintah Pusat dan DAK Fisik tahun 2024 dilakukan terhadap 6 (enam) bidang yang telah disinkronisasi pada tahap perencanaan/penganggaran. Hingga periode 31 Desember 2024, **Rincian Output (RO) yang telah diselaraskan oleh DJA dan DJPK menunjukkan bahwa realisasi anggaran serta capaian output RO telah Harmonis** digunakan secara efektif. Namun demikian, terdapat beberapa permasalahan terutama pada aspek eksekusi kegiatan.
2. **Bidang jalan merupakan bidang dengan Pagu Belanja K/L mendukung DAK Fisik tertinggi sebesar Rp460,63 miliar**, dengan realisasi Rp460,18 miliar (99,90 persen dari Pagu). Bidang pendidikan memiliki Pagu sebesar Rp90,53 miliar, dengan realisasi Rp88,51 miliar (97,78 persen dari Pagu). Bidang air minum memiliki Pagu Rp76,14 miliar, dengan realisasi Rp75,73 miliar (99,46 persen dari Pagu). Bidang kesehatan dan KB memiliki Pagu Rp2,03 miliar, dengan realisasi Rp2,00 miliar (98,48 persen dari Pagu). Bidang sanitasi memiliki Pagu Rp1,40 miliar, dengan realisasi Rp1,29 miliar (92,37 persen dari Pagu).
3. **Kementerian PU memiliki alokasi Belanja RO Harmonis mencapai Rp575,29 miliar (52,10 persen dari total Pagu Kementerian PUPR**), terbagi pada 5 satker dengan 18 rincian output. Kemendikbudristek memiliki alokasi Rp53,40 miliar dari total Rp657,89 miliar (8,12 persen dari Pagu Kemendikbudristek di Kepri), terbagi pada 3 satker dengan 7 rincian output. Kementerian Kesehatan memiliki Pagu Belanja terkait RO Harmonis mencapai Rp2,93 miliar dari total Rp153,76 miliar (1,32 persen dari total Pagu Kemenkes di Kepri), terdapat pada 1 satker dengan 21 rincian output. Kementerian Pertanian memiliki Pagu Belanja terkait RO Harmonis Rp0,81 miliar dari total Rp8,43 miliar (9,61 persen dari Pagu Kementerian Pertanian di Kepri), terdapat pada 6 satker dengan 8 rincian output.
4. **Kendala yang paling banyak dialami yaitu pada aspek eksekusi kegiatan**. Terdapat 19 rincian output yang mengalami kendala dan tantangan terkait dengan eksekusi kegiatan. Sebagian besar terjadi pada kategori kesiapan pedoman umum, juknis, dan dokumen pelaksanaan lainnya yang terdapat pada 18 rincian output. Adapun faktor lainnya menjadi kendala pada 1 rincian output.

Permasalahan utama yaitu petunjuk teknis bidang kesehatan yang baru terbit menjelang akhir tahun sehingga kegiatan baru dapat dilaksanakan pada triwulan IV 2024.

5. **Penyaluran DAK Fisik mengalami beberapa hambatan yaitu tidak tersalurnya DAK Fisik tahap II bidang jalan di Kab. Natuna** dengan Pagu Rp7,68 miliar dikarenakan lokasi kegiatan merupakan kawasan hutan lindung, **tidak tersalurnya DAK Fisik bidang pendidikan subbidang SD tahap III di Kota Batam** dengan nilai Rp533,44 juta karena pemda terlambat menyampaikan syarat salur, **tidak tersalurnya DAK Fisik Sekaligus Rekomendasi di Kab. Lingga** untuk Pengadaan Mesin dan Peralatan Sentra IKM Sagu dengan nilai kontrak Rp12,30 Miliar karena BAST tidak dapat terpenuhi sampai dengan batas waktu 16 Desember 2024, kendala dalam proses reviu APIP yang cukup memakan waktu pada beberapa pemda, dan lahan atau tanah yang statusnya belum *clear* sehingga menghambat pengerjaan proyek DAK Fisik.
6. Upaya sinkronisasi Belanja Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah di Kepri terus diupayakan. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kepri bersama Dinas Pendidikan Provinsi Kepri merumuskan **kebijakan merdeka belajar untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan** di Kepri.
7. Pembangunan bidang pemberdayaan air di Kepri dilaksanakan pada enam proyek strategis melalui forum Musrenbangnas tahun 2024 yang melibatkan satker pemerintah pusat dan OPD pemerintah daerah. Pemprov Kepri bersama Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Provinsi Kepri **menyusun RKPD mengenai peningkatan layanan air bersih dan sanitasi** yang layak bagi masyarakat

Analisis Tematik: Reviu atas Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Nasional di Daerah

1. Kepri sebagai *Archipelagic Region* memiliki kondisi yang berbeda dari daerah lain di Indonesia, karena hanya memiliki 2% daratan dan 98% lautan. Kondisi ini menunjukan **keterbatasan lahan yang dapat digarap menjadi lahan pertanian**.
2. **Produksi padi di Provinsi Kepri mengalami tren penurunan setiap tahunnya**, mulai dari tahun 2018 dengan produksi sebesar 1.097 ton, menjadi 423,11 ton pada tahun 2023. Kondisi dipengaruhi oleh minimnya minat SDM usia produktif untuk menjadi petani dan semakin menyempitnya lahan pertanian akibat pembangunan daerah industri dan lahan yang dikerjasamakan kepada pihak ketiga.
3. **Konsumsi beras di Kepri cenderung meningkat setiap tahunnya**, dari sebanyak 128.542 ton/tahun pada tahun 2018, menjadi 138.800 ton/tahun pada tahun 2023. Namun demikian, tingkat konsumsi beras yang meningkat tersebut tidak diimbangi oleh produksi beras di Kepri yang mengalami tren menurun
4. Pemenuhan kebutuhan pangan dari **produksi beras daerah di Kepri tidak mencapai 1% dari total konsumsi,** sisanya lebih dari 99% dipenuhi melalui impor dalam dan luar negeri.
5. **Jumlah cadangan beras per November 2024 sebanyak 80.857 ton**, dengan konsumsi masyarakat rata-rata beras per hari sebesar 550 ton, dengan kata lain, Kepri mampu bertahan selama 147 hari atau ± 5 bulan tanpa produksi dan impor makanan.
6. **Lauk pauk yang paling banyak dikonsumsi di Kepri yaitu Ikan, Udang, dan Hewan Air** lainnya sebanyak 2,33 kg/orang setiap bulannya. Kondisi ini sejalan dengan karakteristik Kepri sebagai *Archipelagic Region*.
7. **IKP Provinsi Kepri terus mengalami peningkatan, dengan pucak tertinggi pada tahun 2023 sebesar 65,10 yang berada pada urutan ke 30 nasional**. Kabupaten/Kota dengan IKP tertinggi

terdapat pada Kota Batam sebesar 88,10 pada tahun 2023, sedangkan terendah pada Kabupaten Lingga, dengan nilai IKP sebesar 52,41.

8. ***Prevalence of undernourishment*** **(PoU) atau tingkat ketidakcukupan konsumsi pangan di Kepri tahun 2024 sebesar 9,55% dari total penduduk Kepri**. PoU tertinggi di Kepri terdapat pada Kabupaten Lingga sebesar 20,00% pada tahun 2024, sedangkan terendah pada Kota Batam sebesar 7,87%.
9. **Program ketahanan pangan di Kepri berjalan *on the track*** ditunjukkan dengan hasil perikanan tangkap laut, produksi ternak, dan produksi ternak unggas yang meningkat sejak tahun 2022 s.d. 2024. Program peningkatan perikanan tangkap dan pengembangan peternakan sapi, kambing, domba dan ayam serta pengolahan hasil perikanan membantu menciptakan stok pangan yang lebih berkelanjutan dan dapat dijangkau oleh masyarakat setempat.
10. **Pemerintah turut mendorong konsumsi pangan berbasis produk lokal yang lebih beragam, seperti jagung, kedelai dan ikan,** untuk menciptakan ketahanan pangan yang lebih tahan terhadap guncangan ekonomi dan perubahan iklim. Alokasi program diversifikasi ketahanan pangan pada APBD tahun 2024 tertinggi pada Prov Kepri dengan anggaran Rp2,92 miliar, diikuti Kota Tanjungpinang 590 juta dan Selanjutnya terkecil berada pada Kab Lingga Rp71 juta.
11. **Hasil analisis kuantitatif terhadap TKD dan IKP menunjukkan bahwa DAK Fisik dan DAK Non Fisik memiliki pengaruh signifikan positif terhadap peningkatan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) di Kepri**. DAK Fisik memiliki nilai *p-value* 0,0035 < 0,05 dengan koefisien regresi mencapai 13,11. Begitupun DAK Non Fisik memiliki nilai *p-value* 0,020 < 0,05 dengan koefisien regresi mencapai 12,12.
12. **Belanja DAK Fisik yang dimanfaatkan dalam sektor pertanian seperti pembangunan jalan, irigasi, dan lumbung penyimpanan hasil panen** dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan ketahanan pangan. Begitu juga dengan DAK Non Fisik yang digunakan untuk penyuluhan pertanian, bantuan benih, pengembangan pangan lokal, dan program pendukung ketahanan pangan telah memberikan dampak signifikan dalam peningkatan ketahanan pangan di Kepri.

6.2 Rekomendasi

Analisis Ekonomi Regional

Pada Kajian Fiskal Regional Triwulan IV 2024 yang disusun oleh Kanwil DJPb Kepri, kami mengusulkan rekomendasi atas analisis ekonomi regional Kepri sebagai berikut:

1. **Pemerintah daerah** agar **meningkatkan belanja pada sektor Industri Pengolahan, Konstruksi dan Pertambangan dan Penggalian** dalam rangka mengoptimalkan perekonomian PMTB (investasi) yang memiliki kontribusi paling besar yaitu 41,07 persen terhadap PDRB Kepri, sehingga dapat lebih mempercepat pertumbuhan Kepri di Triwulan I 2025. Pemda Kepri agar menambah alokasi belanja pada sektor strategis pendukung PDRB diharapkan dapat mengakselerasi peningkatan aktivitas ekonomi kedepannya.
2. **TPID** diharapkan memperkuat **kolaborasi antar instansi pusat dan daerah di Kepri dalam rangka menjaga kestabilan Target inflasi** dengan menerbitkan kebijakan dan program yang tepat dengan mempertimbangkan kondisi fiskal dan moneter melalui berbagai upaya meliputi operasi pasar murah untuk mengatur keterjangkauan harga, pemantauan kesediaan pasokan pada Bulog, distributor serta pasar, pelaksanaan program budidaya pertanian dan memastikan kelancaran rantai distribusi bahan pangan.
3. Dalam rangka **meningkatkan IPM, Pemprov Kepri** agar meningkatan formasi tenaga pendidik (guru) sampai ke pulau perintis, kesehatan (fasilitas kesehatan sampai ke pelosok) dan penguatan

keterampilan lapangan usaha sesuai dengan kondisi daerah kepulauan, seperti pelatihan budidaya rumput laut, perikanan dan sektor kelautan.

4. **Pemerintah daerah** agar melaksanakan **Program pengentasan kemiskinan** dengan cara:
   a. Dinas Sosial perlu **memperkuat Jaring Pengaman Sosial dengan mengintegrasi data penerima bantuan sosial** di daerah dengan data pusat agar pelaksanaan penyaluran Bansos dapat menjangkau keluarga penerima manfaat secara tepat sasaran.
   b. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah agar **melaksanakan pelatihan keterampilan wirausaha dan pendampingan** untuk memunculkan UMKM baru yang akan meningkatkan pendapatan rumah tangga (mandiri secara ekonomi) dan meningkatkan UMKM naik kelas dan siap ekspor.
5. Aspek pemerataan menjadi fokus pemerintah daerah, **Pemprov Kepri agar melakukan upaya menurunkan ketimpangan (Gini Ratio)** dengan cara meningkatkan Belanja Infrastruktur dan kegiatan perdagangan untuk menstimulus aktivitas ekonomi pada daerah terpencil/pedesaan. Di sisi lain, pemerintah kabupaten berkolaborasi dengan pemprov dalam menumbuhkan program pelatihan kerja, *entrepreneurship*, serta menambahkan alokasi fasilitas pinjaman Pemprov Kepri dengan bunga 0 (nol) persen kepada pelaku usaha.
6. **Pemerintah daerah** agar lebih **menggencarkan program pemberdayaan ekonomi untuk menurunkan tingkat pengangguran** melalui pelatihan keterampilan, memudahkan akses terhadap modal usaha, dan pembangunan infrastruktur yang mendukung pengembangan UMKM.

   a) **Pemerintah Kota Batam** yang masih memiliki isu tingkat pengangguran yang tinggi diharapkan untuk menyediakan lebih banyak sekolah vokasi setingkat SMK dan Politeknik, melakukan kerja sama dengan industri (program *link and match industry*) sehingga tercipta kualitas tenaga kerja *high-skilled worker* yang sesuai dengan kebutuhan industri di Kota Batam.
   b) **Agar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang berkembang sangat pesat di Kota Batam dapat menyerap tenaga kerja lokal** sehingga dapat meningkatkan pendapatan kepala keluarga dan meningkatkan kesejahteraan. Hal ini akan menurunkan tingkat kemiskinan jangka panjang.

7. Dalam upaya **meningkatkan NTP, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan** agar menyediakan akses petani terhadap teknologi pertanian modern dengan tambahan insentif berupa benih unggul, pupuk organik, dan teknik pertanian berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas produk sehingga meningkatkan nilai jual.
8. Untuk **meningkatkan NTN** agar **Dinas Kelautan dan Perikanan** membentuk koperasi nelayan atau kelompok usaha bersama dengan memfasilitasi akses nelayan ke pasar yang lebih besar dan stabil. Pemerintah daerah diharapkan dapat membantu mempromosikan produk ikan lokal, dan membuka akses ke pasar ekspor membangun kemitraan dengan sektor swasta, termasuk perusahaan pengolahan ikan, restoran, hotel, dan ritel, untuk memastikan pasokan ikan yang berkualitas dan berkelanjutan.
9. **Surplus perdagangan luar negeri** dapat ditingkatkan melalui upaya **Dinas Perindustrian dan Perdagangan** dalam menggencarkan pemasaran yang lebih agresif dan lebih intensif berpartisipasi dalam pameran internasional untuk menarik pasar ekspor potensial baru khususnya komoditas gas alam, hasil tambang dan hasil industri (non migas) yang menjadi produk ekspor andalan.

Analisis Fiskal Regional

Berdasarkan Kajian Fiskal Regional triwulan IV 2024 ini, kami mengusulkan rekomendasi atas analisis fiskal regional sebagai berikut:

Kepada Pemerintah Pusat

1. **Aspek Perencanaan dan Penganggaran**
   a. Pemerintah pusat, khususnya dalam hal ini **Kementerian Keuangan agar melakukan pengawasan dan edukasi pelaksanaan KEM PPKF kepada seluruh unit vertikal** Kementerian Keuangan dan pemerintah daerah dalam rangka sinergitas kebijakan fiskal pusat dan daerah.
   b. Pemerintah Pusat **melaksanakan pemetaan, koordinasi dan dialog rutin untuk melakukan harmonisasi belanja dan RO satker** sehingga tidak terjadi duplikasi antara Belanja K/L dan pemda.
2. **Aspek Pendapatan Negara dan Daerah**
   a. Selain pembinaan terhadap BLU baru, **Kanwil DJPb juga dapat mengawal proses dan mendorong percepatan perubahan status satker PNBP yang berpotensi untuk menjadi BLU**. Dengan perubahan status menjadi BLU dengan fleksibiltasnya, diharapkan dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat.
   b. **Pemerintah Pusat dapat mendorong promosi potensi investasi, termasuk paket kebijakan fasilitas fiskal** yang dapat dinikmati oleh investor di Kepri, sehingga mendorong investor-investor baru. Setiap investasi yang masuk ke wilayah Kepri dapat digunakan untuk memperkecil *Human Capital Gap* dan *Infrastructure Gap* yang ada di pada Kota Batam dengan wilayah lain yang terdapat di Kepri. Dampak dari investasi ini akan menjadi katalisator transformasi ekonomi khususnya di Kepri.
3. **Aspek Belanja Negara dan Daerah**
   a. Seluruh K/L terkait agar lebih matang dalam menyusun rencana penyerapan Belanja Modal termasuk **menyusun strategi perikatan kontrak di awal periode sehingga dapat mengantisipasi keterlambatan penyelesaian pembangunan** yang berdampak pada rendahnya realisasi Belanja Modal di tahun anggaran yang akan datang.
   b. **Terhadap RO harmonis**, dapat disampaikan rekomendasi sebagai berikut:
      1) Terkait dengan kendala di aspek penganggaran, satker perlu memperbaiki proses penganggaran, serta **membangun koordinasi yang baik antara pelaksana kegiatan dan bagian perencanaan sehingga meminimalisir penyesuaian dan revisi anggaran**. Satker agar melakukan evaluasi terhadap proses perencanaan anggaran mengingat kondisi geografis Kepri merupakan wilayah kepulauan, sehingga kegiatan yang dilaksanakan pada daerah terluar menjadi sulit dilaksanakan. Satker perlu melakukan penyesuaian terhadap jadwal kegiatan apabila diperlukan. Satker agar melakukan koordinasi dengan K/L pusat dan KPPN terkait dengan pencairan anggaran yang dilaksanakan pada akhir tahun dengan kondisi-kondisi tersebut.
      2) Terkait dengan kendala pada aspek eksekusi kegiatan, satker agar **melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan, dengan menyesuaikan pelaksanaan kegiatan** sesuai dengan *timeline* pekerjaan. Satker juga perlu mempersiapkan mitigasi permasalahan dengan memperhitungkan musim di wilayah Kepulauan melalui koordinasi bersama pihak Stasiun Meteorologi terdekat. Terkait dengan banyaknya pihak yang terlibat dan penolakan, satker dapat bekerjasama dengan pemda dan pihak-pihak terkait lainnya untuk membantu menjalin komunikasi dan koordinasi.
      3) Terkait dengan kendala pada aspek SDM, satker perlu **mengoptimalkan SDM yang tersedia dengan meningkatkan kapasitas melalui pelatihan** pemanfaatan teknologi atau alat yang lebih efisien, sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan dengan lebih cepat dan

efektif. Perlu dilakukan internalisasi pengetahuan kepada satker agar pergantian pejabat tidak menjadi kendala. Peningkatan kapasitas SDM juga dapat menjadi solusi dengan memberikan pelatihan terkait proses penganggaran yang tepat dan optimal. Pelatihan lain melalui pemanfaatan teknologi informasi dapat diterapkan, sehingga pekerjaan dapat terselesaikan dengan lebih cepat dan efisien dan mengatasi masalah ketersediaan SDM.

4) Terkait dengan kendala aspek pengadaan barang dan jasa, **penyediaan barang dan jasa dapat dilakukan melalui e-catalog dan dicari konsultan lain yang lebih kooperatif**. Untuk menekan biaya logistik, Pemerintah Pusat dan Daerah dapat bekerjasama dengan maskapai penerbangan dan/atau perusahaan penyedia jasa pengiriman laut/*shipping* yang memiliki armada kapal berkecepatan tinggi dan berkapasitas besar untuk mempermudah pergerakan barang-barang logistik oleh pelaku usaha dan meningkatkan konektivitas antar pulau. Selain itu, hal ini akan sangat membantu proses pengadaan barang/jasa yang diperlukan oleh satuan kerja pemerintah pusat yang berada di Kepri.

5) Terkait dengan **kendala regulasi, satker agar melakukan koordinasi dengan K/L pusat** dan pihak terkait lainnya.

c. Beberapa anggaran belum dapat direalisasikan karena terdapat 1) blokir anggaran, dan 2) belum terdapat petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan. **Satker perlu mempercepat penyelesaian blokir anggaran dengan proaktif berkoordinasi** ke tingkat wilayah hingga Eselon I, dan KPPN. Terkait kegiatan yang menunggu petunjuk teknis, satker dapat melakukan persiapan pada aspek-aspek tertentu yang dapat dilakukan tanpa petunjuk teknis.

d. **Pemerintah pusat perlu memerhatikan akurasi pemberian dana transfer pada tiap-tiap daerah melalui analisis kebutuhan** daerah. Hal ini disebabkan terdapat daerah yang membutuhkan dana transfer pada program tertentu namun tidak mendapatkan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat.

4. Aspek Surplus/Defisit dan Pembiayaan Daerah

a. **Pemerintah Pusat dapat bersinergi dengan PT SMI, PIP dan pihak lainnya untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada pemda** terkait alternatif skema ***creative financing*** dengan memperhatikan kapasitas fiskal dan karakteristik daerah.

b. Pemerintah Pusat (dalam hal ini salah satunya adalah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan) dapat menjadi **fasilitator bagi pemda untuk dapat menerapkan pola pembiayaan KPBU sebagai alternatif *creative financing*** untuk mendanai proyek infrastruktur dengan PT SMI dengan pemda terlebih dahulu melakukan *benchmarking* ke provinsi yang telah berhasil melakukannya seperti Provinsi Jawa Barat.

Kepada Pemerintah Daerah

1. Aspek Perencanaan dan Penganggaran

a. **Pemerintah Daerah melakukan pemetaan, koordinasi dan dialog rutin untuk melakukan harmonisasi Belanja dan RO satker** sehingga tidak terjadi duplikasi antara Belanja K/L dan pemda.

b. **Dalam rangka menyelaraskan RPJMN dan RPJMD serta meningkatkan kualitas *mandatory spending*** pendidikan dan kesehatan sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas SDM daerah, pemda perlu melakukan hal-hal sebagai berikut:

1) Melakukan ***updating budget tagging*** dan *budget tracking* untuk mengidentifikasi subkegiatan yang berdampak kepada kualitas belanja wajib pendidikan dan kesehatan.

2) Mengidentifikasi program, kegiatan dan output yang menjadi **Prioritas Nasional**.

3) Memetakan dan memastikan program, kegiatan dan **output dalam RPJMD dan RKPD telah sesuai** dengan RPJMN dan RKP.

4) Menyampaikan dalam narasi dan matriks RKPD terkait **dukungan terhadap Prioritas Nasional.**

2. Aspek Pendapatan Negara dan Daerah

a. **Penurunan Harga CPO di pasar global menurunkan penerimaan Bea Keluar**. Pemerintah perlu mendorong komoditas lain yang dapat meningkatkan ekspor yang akhirnya meningkatkan Bea Keluar, misalnya dengan terus mendukung dan memfasilitasi agar pengusaha yang melakukan ekspor perdana ke wilayah pangsa pasar baru. Selain itu, pemerintah dapat **mengembangkan potensi komoditas ekspor lainnya, seperti hasil karet lempengan, kelapa dan budidaya perikanan (ikan bawal bintang)** karena karakteristik Kepri sebagai daerah kepulauan.

b. Kebijakan untuk menyesuaikan tarif pajak reklame terbukti efektif untuk meningkatkan PAD dari pajak reklame. **Pemerintah daerah agar mengevaluasi tarif pajak reklame** daerah masing-masing. Pemda dapat melakukan penyesuaian terhadap ketentuan tarif pajak yang dinilai tidak sesuai dengan keadaan terkini. Kebijakan untuk mengevaluasi tarif pajak reklame tersebut dapat juga diterapkan pada pajak lain yang perlu penyesuaian tarif.

c. Kebijakan untuk **menertibkan reklame ilegal yang dilakukan oleh Pemko Tanjungpinang** juga dapat direplikasi oleh pemerintah daerah lain. Penertiban tersebut juga dapat dilakukan terhadap sumber PAD lainnya, tidak terbatas pada penertiban reklame ilegal. Misalnya penertiban izin Perizinan Bangunan Gedung.

d. **Pemda perlu melakukan upaya peningkatan PAD** dengan cara:

1) **Mengoptimalkan PAD dari Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan** mengingat realisasi masih kurang optimal sampai dengan triwulan IV 2024. Dinas DPMPTSP berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Lingga agar menyusun *mapping* terhadap potensi sumber daya alam yang dapat ditawarkan kepada investor sehingga mampu memberikan bagi hasil kepada Kabupaten Lingga.
2) Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah (LLPAD) mengalami kontraksi. Penurunan ini terjadi disebabkan oleh penurunan pendapatan BLUD rumpun kesehatan sebagai kontributor mayoritas pada LLPAD. **Pemerintah daerah agar memetakan BLUD yang mengalami penurunan pendapatan dan menemukan permasalahan** serta solusi penyelesaian. Hal tersebut penting dilakukan mengingat seharusnya BLUD merupakan salah satu penyumbang potensial pendapatan bagi pemerintah daerah.
3) Penurunan penerimaan pajak hotel pada Kabupaten Bintan disebabkan oleh menurunnya wisman singapura yang menjadi kontributor terbesar mencapai 60,62 persen wisman di Provinsi Kepri. **Pengajuan bebas *Visa on Arival* (VoA) Kepri kepada Kemenparekraf dan Ditjen Imigrasi** dapat ditindaklanjuti untuk meningkatkan kunjungan wisman mancanegara.
4) **Meningkatkan basis data perpajakan** daerah dan melakukan ekstensifikasi pajak.
5) Mengembangkan aplikasi dan **sistem yang mendukung kemudahan administrasi dan pembayaran pajak** bagi wajib pajak dan pemda dengan tujuan meningkatkan pendapatan pajak daerah
6) Meningkatkan pemungutan pajak daerah melalui **kerja sama pemungutan pajak dan sinergi pemungutan pajak daerah provinsi dan kabupaten/kota** serta mengotimalkan data dari pemerintah pusat, pemda lain, serta pihak ketiga.
7) Pemda dapat melakukan *mapping* potensi investasi dan pengembangan sektor perekonomian potensial daerah serta membentuk **tim *taskforce* peningkatan PAD lintas sektor** untuk dapat meningkatkan PAD.
8) Pemda dapat memberikan **insentif pajak daerah dan retribusi daerah kepada pelaku usaha mikro dan ultra mikro** sebagai wujud dukungan kemudahan usaha dan investasi

serta untuk mendukung pencapaian program prioritas daerah dan nasional. Efek dari pemberian insentif yaitu akan mendorong *competitive advantage* dan pertumbuhan ekonomi daerah yang akan meningkatkan PAD.

e. Pemda dapat mendorong **promosi potensi investasi, termasuk paket kebijakan fasilitas fiskal yang dapat dinikmati oleh investor di Kepri** sehingga mendorong investor-investor baru. Setiap investasi yang masuk ke wilayah Kepri dapat digunakan untuk memperkecil *Human Capital Gap* dan *Infrastructure Gap* yang ada di pada Kota Batam dengan wilayah lain yang terdapat di Kepri. Dampak dari investasi ini akan menjadi katalisator transformasi ekonomi khususnya di Kepri.

f. Kabupaten Kepulauan Anambas, Lingga dan Natuna terdapat potensi pariwisata, maka pemerintah daerah dapat mengembangkan *master plan* untuk pembiayaan infrastruktur di sekitar wilayah **potensi pariwisata. Opsinya adalah sinergi beberapa alternatif pendanaan**, misalnya pembiayaan proyek tersebut dibagi pembiayaannya oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Belanja Kementerian/Lembaga serta kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha/Swasta. Pemda dapat berupaya juga untuk meningkatkan potensi investasi di daerah.

g. Dalam mendukung sektor Industri Pengolahan dan Konstruksi, Pemerintah telah menyediakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan daerah *Free Trade Zone* (FTZ) dengan berbagai kemudahan dan insentif fiskal yang diberikan. Saat ini hanya kota Batam yang merupakan wilayah FTZ secara menyeluruh sedangkan Bintan, Karimun dan Tanjungpinang bersifat FTZ sebagian (*enclave*). Oleh karena itu, dalam upaya mengoptimalisasikan dukungan fiskal dan kemudahan berusaha untuk sektor unggulan **diharapkan pemerintah dapat memperluas area/zona FTZ di keseluruhan wilayah Kabupaten Karimun, Bintan, dan Tanjungpinang agar dapat meningkatkan realisasi investasi dan mendorong pemerataan** perekonomian di Kepri.

3. Aspek Belanja Negara dan Daerah

a. **Dalam rangka meningkatkan IPM daerah, pemda dapat mengoptimalkan Belanja Daerah fungsi Pendidikan dan Kesehatan** sehingga dapat meningkatkan kualitas dan layanan fasilitas Pendidikan dan kesehatan, menurunkan tingkat kematian ibu dan bayi, dan menurunkan jumlah balita kekurangan gizi dan meningkatkan kompetensi siswa..

b. Dalam rangka **meningkatkan investasi daerah, pemda dapat mengoptimalkan Belanja Modal Infrastruktur dan Konektivitas** dalam rangka penyediaan infrastruktur dan konektivitas transportasi untuk menarik investor ke daerah.

c. Untuk menekan biaya logistik, **pemerintah pusat dan daerah dapat bekerjasama dengan maskapai penerbangan dan/atau perusahaan penyedia jasa pengiriman** laut/*shipping* yang memiliki armada kapal berkecepatan tinggi dan berkapasitas besar untuk mempermudah pergerakan barang-barang logistik oleh pelaku usaha dan meningkatkan konektivitas antar pulau. Hal ini akan sangat membantu proses pengadaan barang/jasa yang diperlukan oleh satuan kerja pemerintah pemerintah daerah yang berada di Kepri.

4. Aspek Surplus/Defisit dan Pembiayaan Daerah

a. Pemda dapat mulai melakukan **opsi pembiayaan seperti pinjaman daerah, penerbitan sukuk dan obligasi daerah** dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan kesinambungan fiskal serta memastikan kemampuan daerah untuk membayar pokok pinjaman beserta bunga dan kemampuan untuk membayar investor bagi sukuk dan obligasi daerah.

b. Pemda dapat melakukan **kolaborasi dengan perusahaan yang beroperasi di kabupaten/kota untuk melakukan *creative financing*** dengan memanfaatkan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai dukungan peningkatan sarana prasarana pendidikan dan pemberian beasiswa kepada siswa berprestasi di daerah.

c. Pemerintah Daerah juga dapat **berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pihak *donor* untuk dapat difasilitasi menerapkan pola pembiayaan KPBU** sebagai alternatif *creative financing* untuk mendanai proyek infrastruktur dengan PT SMI dengan pemda terlebih dahulu melakukan *benchmarking* ke provinsi yang telah melakukannya seperti Provinsi Jawa Barat.

Kepada Kanwil DJPb Kepri

1. Aspek Perencanaan dan Penganggaran

a. KPPN Tanjungpinang dan Batam perlu melakukan **pengawalan anggaran mulai dari proses perencanaan DIPA, terbitnya DIPA dan pelaksanaan kegiatan** pada satuan kerja terkait. Kemudian memastikan satuan kerja dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan *timeline* kegiatan.

b. Kanwil DJPb Prov. Kepri agar melakukan **koordinasi dengan pemda untuk dapat memperoleh dokumen risalah rapat penyusunan KUA-PPAS**.

2. Aspek Pendapatan Negara

a. Pada tahun 2024, terdapat tiga BLU muda di Kepri. Kanwil DJPb sebagai Pembina BLU di daerah agar dapat segera **melakukan pembinaan untuk melakukan percepatan peningkatan penerimaan BLU** dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan BLU.

b. Selain pembinaan terhadap BLU muda, Kanwil DJPb juga dapat mengawal proses dan **mendorong percepatan perubahan status satker PNBP yang berpotensi untuk menjadi satker BLU**. Dengan perubahan status menjadi satker BLU dengan fleksibilitasnya diharapkan dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat.

c. Kanwil DJPb Prov. Kepri dapat menyelenggarakan FGD untuk membantu pemda mengidentifikasi potensi investasi dan meningkatkan PAD pemda.

3. Aspek Belanja Negara

a. **Kantor Wilayah DJPb Kepri hendaknya tetap melakukan monitoring dan evaluasi terhadap progres penyaluran Dana Transfer ke Daerah**, progres kontrak atau proyek yang dibiayai dengan Dana Transfer, capaian output atas penggunaan Dana Transfer serta mempercepat penyerapan Dana Transfer ke Daerah.

b. **KPPN Tanjungpinang dan KPPN Batam juga perlu senantiasa mengingatkan satuan kerja terkait agar segera menyelesaikan blokir dan revisi anggaran**, dengan mendorong satuan kerja untuk bersikap proaktif berkoordinasi hingga ke unit eselon I.

c. KPPN Tanjungpinang dan KPPN Batam juga perlu memberikan arahan kepada satuan kerja terkait agar dapat menyusun **perencanaan dan pelaksanaan anggaran dengan memprioritaskan kegiatan yang memberikan *output* dan *outcome*** yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan tidak tercapainya target.

Pengembangan Ekonomi Daerah: Harmonisasi Belanja K/L dan DAK Fisik di Tingkat Wilayah

1. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan kegiatan di lapangan agar **mempersiapkan mitigasi permasalahan dengan memperhitungkan perubahan musim di wilayah Kepulauan** seperti Kepri, melalui koordinasi bersama pihak Stasiun Meteorologi. Penyelesaian mengenai pedoman umum/juknis yang lama terbit, agar satker berkoordinasi dengan unit Eselon 1 untuk menanyakan juknis terkait dan memperhitungkan waktu tambahan dalam pelaksanaan pekerjaan.
2. Dalam memperbaiki aspek penganggaran, satker perlu mencermati proses penganggaran, serta **membangun koordinasi antara pelaksana kegiatan dan bagian perencanaan sehingga meminimalisir penyesuaian dan revisi anggaran**. Selanjutnya, satker agar terus menjalin

komunikasi bersama unit Eselon 1 untuk pembukaan blokir anggaran dan blokir automatic adjustment serta mengawal pembukaan blokir agar tidak terhambat.

3. **Instansi agar meningkatkan kapasitas SDM melalui workshop dan pelatihan** aplikasi. Selanjutnya, untuk mengantisipasi pergantian tugas kerja operator/pengelola keuangan agar diterapkan sistem *transfer knowledge* dari operator lama ke operator yang baru sehingga operator dapat segera menyesuaikan dengan pekerjaan.
4. **Terkait kendala pada aspek PBJ dan proses eksekusi kegiatan, agar satker melakukan koordinasi dengan** eselon I untuk memperjelas pedoman dan juknis pelaksanaan. Selanjutnya, **agar Dinas Kesehatan Provinsi Kepri berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk mendorong percepatan penerbitan juknis bidang kesehatan**. Selanjutnya, Pemerintah daerah membuat tim percepatan pemenuhan dokumen penyaluran DAK Fisik meliputi penyusunan RK dan penyelesaian syarat dokumen salur.
5. **Agar pemerintah daerah lingkup Provinsi Kepri bersinergi dengan satuan kerja K/L dalam rangka meningkatkan harmonisasi pengawasan** dan pelaksanaan kegiatan dalam penyelesaian proyek pembangunan dengan pembiayaan DAK Fisik.
6. **Agar BPMP memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan Dinas Pendidikan**, sekolah, serta pemangku kepentingan terkait untuk **memastikan implementasi kebijakan program Merdeka Belajar** yang efektif dan sinergis.
7. **Agar Pemprov Kepri memperluas akses masyarakat terhadap layanan air bersih dan sanitasi yang layak**, terutama di daerah perdesaan dan pulau-pulau kecil, serta memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan air bersih dan sanitasi, seperti penggunaan Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk pemetaan wilayah pelayanan.

Analisis Tematik: Reviu atas Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Nasional di Daerah

1. Secara geografis Kepri memiliki 2% daratan dan 98% lautan, agar Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan **(DKP2KH) Prov Kepri menginisiasi pengembangan kawasan pertanian terpadu** yang mengintegrasikan berbagai aspek produksi, pengolahan, irigasi dan pemasaran.
2. Produksi padi di Provinsi Kepri mengalami tren penurunan setiap tahunnya, agar Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan **(DKP2KH) Prov Kepri mendorong penerapan teknologi pertanian modern, seperti sensor, drone, dan sistem informasi geografis (SIG**), untuk meningkatkan produktivitas.
3. Konsumsi beras masyarakat Kepri cenderung meningkat setiap tahunnya, dari sebanyak 128.542 ton/tahun pada tahun 2018 menjadi 138.800 ton/tahun pada 2023, **agar Pemerintah Daerah dan DKP2KH membuat MoU dengan daerah pengimpor beras** untuk memastikan keamanan stok pangan beras dimasa mendatang.
4. Pemerintah daerah agar meningkatkan sumber suplai makanan baru dengan **mendiversifikasi jenis pangan**. Hal ini akan menurunkan ketergantungan terhadap satu supplier dan jenis pangan.
5. Agar pemerintah daerah **berkolaborasi dengan sektor swasta, kelompok tani dan masyarakat untuk mengembangkan sektor pertanian** meliputi pengembangan kawasan pertanian, peningkatan sistem irigasi dan pemberian subsidi dan insentif untuk petani.
6. **Bulog agar meningkatkan penyediaan stok pangan yang cukup melalui *stockpiling*.** Hal ini juga perlu dilakukan oleh Bulog di daerah melalui tempat penyimpangan hasil panen dan stok pangan daerah.

7. **Agar Pemerintah Daerah dan Dinas Ketahanan Pangan memberikan insentif atau subsidi finansial bagi generasi muda yang ingin terjun ke sektor pertanian**, seperti bantuan modal usaha, hibah untuk pembelian alat pertanian, atau kredit pertanian dengan bunga rendah.
8. **Agar Dinas Ketahanan Pangan Kepri dan pemda menggalakkan program menanam desa, sekolah dan pekarangan rumah** untuk meningkatkan ketahan pangan rumah tangga dan daerah.
9. **Agar APIP dan Dinas Pertanian Provinsi memperketat pengawasan pengadaan alat pertanian** bersumber dari pendanaan DAK Fisik di daerah, agar tidak terjadi gagal salur seperti alat pertanian sagu di Kabupaten Lingga senilai 12 miliar.
10. Agar pemerintah pusat dan daerah **memfokuskan penganggaran pada Belanja Modal terkait ketahanan pangan**.
11. Agar Dinas Pertanian **menginisiasi Gerakan menanam jenis buah dan sayuran baru untuk meningkatkan variasi pangan** hasil tumbuhan di Kepri.
12. Pemerintah daerah dan Bulog agar menyediakan **gudang penyimpanan pertanian dan *cold storage* bagi hasil laut** untuk meningkatkan penyediaan stok pangan.

List of Reference

Daftar Pustaka

Peraturan

Kementerian Sekretariat Negara. 2022. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.

----------. 2020. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2015. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.07/2015 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2016*. Berita Negara RI Tahun 2015, No. 1181. Jakarta:Kementerian Keuangan.

----------. 2014.Surat Edaran Nomor SE-43/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Kajian Fiskal Regional. Jakarta: Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.05/2020 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Ultra Mikro

Keputusan Direktur Jenderal Perbandaharaan Nomor KEP-112/PB/2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberdayaan UMKM Lingkup DJPb

Laporan dan Buku

Provinsi Kepulauan Riau. 2021. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026*. Tanjungpinang: Provinsi Kepulauan Riau.

----------. 2021. *Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026*. Tanjungpinang: Provinsi Kepulauan Riau.

----------. 2021. *Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan*. Tanjungpinang: Provinsi Kepulauan Riau.

Badan Pusat Statistik. 2024. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kepulauan Riau 2024. Tanjungpinang: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau.

----------. 2025. Provinsi Kepulauan Riau Dalam Angka 2024. Tanjungpinang: Badan Pusat Statistik Provinsi

List of Reference

Daftar Pustaka

Kepulauan Riau.

----------. 2025. *Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Riau Agustus 2025*. Tanjungpinang: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau.

----------. 2025. *PDRB Triwulanan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Triwulan IV 2024*. Tanjungpinang: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau.

----------. 2025. *Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Riau Triwulan IV 2024*. Tanjungpinang: BadanPusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau.

----------. 2025. *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV 2024*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

----------. 2025. *Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia September 2024*. Tanjungpinang: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau.

----------. 2025. *Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia September 2024*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

----------. 2025. *Profil Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau Maret 2025*. Tanjungpinang: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau.

----------. 2025. *Profil Kemiskinan di Indonesia September 2024*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

----------. 2024. *Perkembangan Nilai Tukar Petani Kepulauan Riau Desember 2024*. Tanjungpinang: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau.

----------. 2025. *Perkembangan Nilai Tukar Petani dan Harga Produsen Gabah Desember 2024*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

----------. 2025. *Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2024*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

----------. 2025. Laporan Inflasi IHK Bulan Desember 2024. Batam: *Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau.*

Report

Haryono, S., & P. Wardoyo. 2012. *Struktural Equation Modelling Untuk Penelitian Manajemen Menggunakan Amos 18.00*. Bekasi: PT. Intermedia Personalia Utama.

Kline, R. B. (2015). *Principles and practice of structural equation modeling. Guilford Publications*.

Cahyo, R. D. (2016). *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, 95 Dan Rata-Rata Lama Pendidikan Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2009-2014. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 4(2).

Narotama MR. *Small islands in a large archipelago state: Examining small islands' peripherality and governance relations in Riau Islands Province, Indonesia [Doctoral dissertation]*. University of Birmingham; 2022. Available from: https://etheses.bham.ac.uk/id/eprint/12603/

List of Reference

Daftar Pustaka

Berita

1. https://bpmpkepri.kemdikbud.go.id/aksi/detailkabar.php?id=288
2. https://bpbatam.go.id/en/kepala-bp-batam-bangun-22-infrastruktur-jalan-hingga2024-mendatang/
3. https://kepri.batampos.co.id/pemprov-siapkan-empat-program-strategis-utnuk-tekan-anka-kemiskinan/
4. https://kepriprov.go.id/berita/pendidikan/program-gubernur-ansar-gratiskan-spp-untuk-anak-anak-sma-smk-dan-slb-terealisasi

Sumber Lain

SIKRI (Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia)
Aplikasi MEBE dan SINTESA https://ditpa.kemenkeu.go.id/
Aplikasi OMSPAN https://spanint.kemenkeu.go.id/
Aplikasi SIMTRADA https://djpk.kemenkeu.go.id/simtrada
Data Bapenda Provinsi/Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Kepri
Aplikasi SIKP-KUR
Aplikasi SIKP-UMi

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DJPb
Indonesian Treasury

InTress

Kajian Fiskal Regional

Provinsi Kepulauan Riau

Tahunan
2024

Kanwil DJPb Kepulauan Riau @djpbkepri @djpbkepri

Konten Kajian Fiskal Regional (KFR) Tahunan 2024 dilindungi oleh Undang-Undang, hak cipta melekat pada Kanwil DJPb Kepri. Dilarang mengumumkan, mendistribusikan mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin dari Kanwil DJPb Provinsi Kepri.

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DJPb
Indonesian Treasury

InTress